



Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Lampung



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.
- KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
 2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



M. BASUKI HADIMULJONO

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur

PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



M. Basuki Hadimuljono

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN

Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

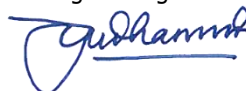
Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Yudha Mediawan



Tim Pengarah

Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.
Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc.
Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc.
Benny Hermawan, S.T., M.Sc.
Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM
Pranoto, S.T., M.Dev.Plg.
Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc.
Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci.
Ir. Kuswardono, MCP.
Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc.

Tim Penyusun

Sosilawati, S.T., M.T.
Indra Maulana, S.T., M.T.
Silvita Jarsil Anwar, S.T., M.T., M.Sc.
Latifah Noor Fauziah, S.T.
Nur Haryati Salekha, S.Si
Alfian Mahfudin, S.P.W.K.
Wantarista Ade Wardhana, S.T.
Putri Widia Pratiwi, S.E.
Rachmi Layina Chimayati, S.T, M.T.

Tim Peninjau

Sinta Nur Aini, S.T., M.T.
Dedy Pratama, S.E.
Astri Isnaini Dewi, S.T., M.R.K.
Chintya Jasmine Gunarso, S.T



BPIW

DAFTAR ISI

SAMBUTAN i
TIM PENGARAH, TIM PENYUSUN, DAN TIM PENINJAU iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Kedudukan Dalam Kebijakan 4
1.3. Urgensi Penyusunan RPIW 5
1.4. Muatan RPIW 5
1.5. Manfaat RPIW 6
1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW 6
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN 11
2.1. Kebijakan Penataan Ruang 13
2.2. Kebijakan Sektor 19
2.3. Agenda Global 29
2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 31
BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH 41
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan 43
3.2. Profil Demografi 66
3.3. Profil Ekonomi 74
3.4. Profil Sosial Budaya 96
3.5. Profil dan Interaksi Antar Kawasan 97
BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR 101
4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air 103
4.2. Profil dan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 133
4.3. Profil dan Infrastruktur Permukiman 144
4.4. Profil dan Infrastruktur Perumahan 161
4.5. Profil dan Infrastruktur Non PUPR 165
BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 171
5.1. Isu Strategis Provinsi 173
5.2. Isu Strategis Fokus Perencanaan 175
BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH 191
6.1. Proyeksi Pertumbuhan 193
6.2. Visi dan Strategi 203
6.3. Skenario Pengembangan 203
BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 229
7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah 231
7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur 284
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 289

**BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RPIW INFRASTRUKTUR..... 321**

9.1. Latar Belakang323

9.2. Tujuan.....323

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi 324

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Pelabuhan Provinsi Lampung	13
Tabel 2.2	Kawasan Andalan Provinsi Lampung	15
Tabel 2.3	Lokasi Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk melayani Angkutan Laut.....	24
Tabel 2.4	Rencana Lokasi Pelabuhan	24
Tabel 2.5	Lokasi Terminal Umum (bagian dari pelabuhan umum yang dapat berubah mengikuti perkembangan pelabuhan)	25
Tabel 2.6	Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan	25
Tabel 2.7	Pelabuhan Sungai dan Danau	25
Tabel 2.8	Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030	26
Tabel 2.9	Arahan Agenda Global	29
Tabel 2.10	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	33
Tabel 3.1	Luas Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	43
Tabel 3.2	Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung	45
Tabel 3.3	Tutupan Lahan Provinsi Lampung	49
Tabel 3.4	Perkembangan Tutupan Lahan Provinsi Lampung	50
Tabel 3.5	Bahaya Banjir Provinsi Lampung	54
Tabel 3.6	Bahaya Cuaca Ekstrem Provinsi Lampung	54
Tabel 3.7	Bahaya Kekeringan Provinsi Lampung	55
Tabel 3.8	Bahaya Likuifaksi Provinsi Lampung	56
Tabel 3.9	Bahaya Tanah Longsor Provinsi Lampung	56
Tabel 3.10	Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung	57
Tabel 3.11	Bahaya Gempa Bumi Provinsi Lampung	58
Tabel 3.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2018-2021	66
Tabel 3.13	Kepadatan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010-2021	68
Tabel 3.14	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung	70
Tabel 3.15	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	71
Tabel 3.16	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	74
Tabel 3.17	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	75
Tabel 3.18	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota tiap Sektor terhadap PDRB Provinsi tiap Sektor (Persen)	75

Tabel 3.19	Mata Pencanharian Masyarakat menurut Status Pekerjaan Provinsi Lampung.....	76
Tabel 3.20	Produksi Tanaman Pangan (Ton) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021.....	79
Tabel 3.21	Luas Area Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2020.....	80
Tabel 3.22	Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2020.....	80
Tabel 3.23	Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (Kwintal) Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020	81
Tabel 3.24	Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kwintal) Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020	82
Tabel 3.25	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya.....	82
Tabel 3.26	Jumlah Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan (m3) Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019	83
Tabel 3.27	Produksi Perikanan Budidaya (ton) Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Lampung Tahun 2020	84
Tabel 3.28	Produksi Perikanan Tangkap (ton) Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Lampung Tahun 2020	85
Tabel 3.29	Nilai Ekspor berdasarkan Komoditi di Provinsi Lampung	86
Tabel 3.30	Jumlah Rumah Makan/Restoran dan Hotel Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	88
Tabel 3.31	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan (hari) di Provinsi Lampung Tahun 2021	89
Tabel 3.32	Justifikasi Kawasan Prioritas Pertanian.....	90
Tabel 3.33	Justifikasi Kawasan Prioritas Perkotaan	91
Tabel 3.34	Justifikasi Kawasan Prioritas Pariwisata	91
Tabel 4.1	Neraca Air WS Seputih Sekampung.....	105
Tabel 4.2	Daftar Bendungan dan Kapasitas Air Baku.....	107
Tabel 4.3	Daftar kapasitas Air Baku Provinsi Lampung.....	108
Tabel 4.4	Neraca Air Eksisting WS Mesuji-Tulang Bawang	109
Tabel 4.5	Jumlah Jenis Bangunan Infrastruktur Tampung Air	112
Tabel 4.6	Nama dan Lokasi Danau di Provinsi Lampung	112
Tabel 4.7	Nama dan Lokasi Bendungan di Provinsi Lampung	112
Tabel 4.8	Nama dan Lokasi Bendung di Provinsi Lampung	113
Tabel 4.9	Daya Tampung Bendungan.....	115
Tabel 4.10	Luas Daerah Irigasi Menurut Kewenangan Pusat.....	120

Tabel 4.11	Kebutuhan Air Irigasi WS Mesuji Tulang Bawang.....	122
Tabel 4.12	Kebutuhan Air Irigasi WS Seputih Sekampung	122
Tabel 4.13	Nama dan Lokasi Pembangunan Pengalaman Pantai di Provinsi Lampung.....	124
Tabel 4.14	Kebutuhan RKI Provinsi Lampung	125
Tabel 4.15	Pemanfaatan Air di Provinsi Lampung	125
Tabel 4.16	Monitoring Infrastruktur Sumber Daya Air.....	126
Tabel 4.17	Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Kawasan Pertanian	127
Tabel 4.18	Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Kawasan Perkotaan.....	127
Tabel 4.19	Profil Infrastruktur Fokus Kawasan Pariwisata	129
Tabel 4.20	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas Provinsi Lampung.....	132
Tabel 4.21	Persentase Kemantapan Jalan	133
Tabel 4.22	Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung	133
Tabel 4.23	Kemantapan Jembatan.....	137
Tabel 4.24	Kondisi Jembatan Berdasarkan Nilai Kerusakan	138
Tabel 4.25	Monitoring Infrastruktur Bina Marga	138
Tabel 4.26	Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan Perkotaan.....	142
Tabel 4.27	Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan Perkotaan.....	142
Tabel 4.28	Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan Pariwisata.....	143
Tabel 4.29	Profil Kinerja Infrastruktur Kawasan Kumuh Provinsi Lampung	147
Tabel 4.30	Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha.....	148
Tabel 4.31	Akses Air Minum Layak dan Kinerja SPAM Provinsi Lampung	149
Tabel 4.32	Profil Fasilitas TPA Provinsi Lampung.....	150
Tabel 4.33	Kondisi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja di Provinsi Lampung	152
Tabel 4.34	Monitoring Infrastruktur Permukiman.....	154
Tabel 4.35	Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Pertanian	159
Tabel 4.36	Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Perkotaan.....	159
Tabel 4.37	Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Pariwisata.....	160
Tabel 4.38	Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Pariwisata.....	160
Tabel 4.39	Backlog Perumahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	163
Tabel 4.40	Monitoring Infrastruktur Perumahan	164

Tabel 4.41 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan Pertanian	164
Tabel 4.42 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan Perkotaan.....	164
Tabel 4.43 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan Pariwisata.....	165
Tabel 4.44 Daftar Infrastruktur Perhubungan Provinsi Lampung	165
Tabel 4.45 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Lampung Tahun 2021	167
Tabel 4.46 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Pertanian	167
Tabel 4.47 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Perkotaan.....	168
Tabel 4.48 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Pariwisata.....	168
Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Pertanian	177
Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan	182
Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Pariwisata.....	187
Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2022-2029	193
Tabel 6.2 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2023-2029	197
Tabel 6.3 Pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung pada Tahun 2011-2020	198
Tabel 6.4 Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Metode Multi Criteria Analysis (MCA).....	199
Tabel 6.5 Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung berdasarkan MCA.....	200
Tabel 6.6 Isu Strategis Fokus Pertanian	205
Tabel 6.7 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian	206
Tabel 6.8 Analisis SWOT Fokus Pertanian.....	209
Tabel 6.9 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Pertanian	210
Tabel 6.10 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Pertanian	211
Tabel 6.11 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan	213
Tabel 6.12 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan.....	214
Tabel 6.13 Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan	217
Tabel 6.14 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Kawasan Perkotaan.....	218
Tabel 6.15 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Kawasan Perkotaan.....	220
Tabel 6.16 Isu Strategis Fokus Pariwisata.....	222

Tabel 6.17	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata	222
Tabel 6.18	Analisis SWOT Fokus Kawasan Pariwisata	224
Tabel 6.19	Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Kawasan Pariwisata.....	225
Tabel 6.20	Skoring Opportunities dan Threats Fokus Kawasan Pariwisata.....	226
Tabel 7.1	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian Lampung Tengah	232
Tabel 7.2	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Lampung Tengah	233
Tabel 7.3	Nilai IKSI Kawasan Pertanian Lampung Tengah	233
Tabel 7.4	Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian Lampung Tengah	237
Tabel 7.5	Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Kawasan Pertanian Lampung Tengah	238
Tabel 7.6	Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum Kawasan Pertanian Lampung Tengah Kebutuhan Air Minum Kawasan Pertanian Lampung Tengah.....	241
Tabel 7.7	Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan Pertanian Lampung Tengah	241
Tabel 7.8	Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Kawasan Pertanian Lampung Tengah	242
Tabel 7.9	Gap Supply-Demand Lumpur Tinja Kawasan Pertanian Lampung Tengah	243
Tabel 7.10	Kapasitas Eksisting Lumpur Tinja Kawasan Pertanian Lampung Tengah	243
Tabel 7.11	Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah Kawasan Pertanian Lampung Tengah	244
Tabel 7.12	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian Mesuji.....	246
Tabel 7.13	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Mesuji	246
Tabel 7.14	Kondisi Jaringan Irigasi.....	247
Tabel 7.15	Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian Mesuji	247
Tabel 7.16	Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Kawasan Pertanian Mesuji	249
Tabel 7.17	Proyeksi dan Gap Supply-Demand Kebutuhan Air Minum Kawasan Pertanian Mesuji	251
Tabel 7.18	Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan Pertanian Mesuji	251
Tabel 7.19	Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah Kawasan Pertanian Mesuji	252
Tabel 7.20	Proyeksi Kebutuhan Air Baku PKN Bandar Lampung	254

Tabel 7.21	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan PKN Bandar Lampung.....	255
Tabel 7.22	Proyeksi Luasan Daerah Banjir PKN Bandar Lampung.....	255
Tabel 7.23	Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Kawasan PKN Bandar Lampung.....	256
Tabel 7.24	Proyeksi Gap Supply-Demand Air Minum Kawasan PKN Bandar Lampung.....	258
Tabel 7.25	Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan PKN Bandar Lampung.....	258
Tabel 7.26	Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah Kawasan PKN Bandar Lampung.....	259
Tabel 7.27	Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha di PKN Bandar Lampung	259
Tabel 7.28	Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Way Kambas dan sekitarnya.....	261
Tabel 7.29	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Way Kambas dan sekitarnya.....	262
Tabel 7.30	Proyeksi Luasan Daerah Banjir KSPN Way Kambas dan sekitarnya.....	262
Tabel 7.31	Proyeksi Kinerja Jalan Nasional KSPN Way Kambas.....	263
Tabel 7.32	Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum di Kabupaten Lampung Timur.....	264
Tabel 7.33	Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Timur.....	264
Tabel 7.34	Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan di Kabupaten Lampung Timur.....	264
Tabel 7.35	Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha di Kabupaten Lampung Timur	265
Tabel 7.36	Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Krakatau dan sekitarnya.....	266
Tabel 7.37	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Krakatau dan sekitarnya.....	267
Tabel 7.38	Proyeksi Luasan Daerah Banjir KSPN Krakatau dan sekitarnya.....	267
Tabel 7.39	Proyeksi Kinerja Jalan Nasional KSPN Krakatau dan Sekitarnya	269
Tabel 7.40	Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum di Kabupaten Lampung Selatan	270
Tabel 7.41	Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan di Kabupaten Lampung Selatan	270
Tabel 7.42	Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan	270

Tabel 7.43	Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha di Kabupaten Lampung Selatan	271
Tabel 7.44	Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI Provinsi Lampung Tahun 2023-2029.....	272
Tabel 7.45	Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	273
Tabel 7.46	Tabel Proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	274
Tabel 7.47	Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Provinsi Lampung	276
Tabel 7.48	Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	278
Tabel 7.49	Tabel Proyeksi Jumlah Air Limbah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	279
Tabel 7.50	Tabel Proyeksi Timbunan Sampah Masuk TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	280
Tabel 7.51	Luas Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	281
Tabel 7.52	Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha.....	281
Tabel 7.53	Backlog Perumahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	282
Tabel 7.57	Matriks Keterpaduan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur	284
Tabel 8.1	Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian	292
Tabel 8.2	Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan.....	295
Tabel 8.3	Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata	297
Tabel 8.4	Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Sumber Daya Air	303
Tabel 8.5	Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Bina Marga	310
Tabel 8.6	Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya	312
Tabel 8.7	Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan	317

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	4
Gambar 1.2	Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 1.3	Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	9
Gambar 2.1	Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan	28
Gambar 2.2	Peta Sintesa Kebijakan Provinsi Lampung	36
Gambar 3.1	Peta Administrasi Provinsi Lampung	44
Gambar 3.2	Peta Hidrologi Provinsi Lampung	48
Gambar 3.3	Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2009-2019	50
Gambar 3.4	Peta Tutupan Lahan Tahun 2009 Provinsi Lampung	52
Gambar 3.5	Peta Tutupan Lahan Tahun 2019 Provinsi Lampung	53
Gambar 3.6	Peta Bahaya Banjir Provinsi Lampung	59
Gambar 3.7	Peta Bahaya Gerakan Tanah Provinsi Lampung	60
Gambar 3.8	Peta Bahaya Bencana Kekeringan Provinsi Lampung	61
Gambar 3.9	Peta Bahaya Bencana Likuifaksi Provinsi Lampung	62
Gambar 3.10	Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor Provinsi Lampung	63
Gambar 3.11	Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung	64
Gambar 3.12	Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung	65
Gambar 3.13	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021	67
Gambar 3.14	Visualisasi Spasial Perkembangan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010-2020	67
Gambar 3.15	Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Lampung	69
Gambar 3.16	Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	71
Gambar 3.17	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	72
Gambar 3.18	Peta Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung	73

Gambar 3.19	Grafik Mata Pencaharian Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	77
Gambar 3.20	Penilaian Aspek Daya Saing Wilayah Provinsi Lampung	78
Gambar 3.21	Volume Ekspor dan Impor Provinsi Lampung	86
Gambar 3.22	Peta Penentuan Kawasan Prioritas Provinsi Lampung	93
Gambar 3.23	<i>Network Analysis – Gravity</i> di Provinsi Lampung	97
Gambar 3.24	Peta Profil Interaksi Antar Kawasan Provinsi Lampung	99
Gambar 4.1	Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Lampung	104
Gambar 4.2	Peta Infrastruktur Sumber Daya Air	114
Gambar 4.3	Bendungan Batutegei	115
Gambar 4.4	Bendungan Way Sekampung	115
Gambar 4.5	Bendungan Margatiga	116
Gambar 4.6	Bendungan Gerak Jabung.....	116
Gambar 4.7	Bendungan Argoguruh.....	117
Gambar 4.8	Bendung Way Tulung Mas.....	117
Gambar 4.9	Peta Kewenangan Daerah Irigasi.....	121
Gambar 4.10	Peta Konektivitas Bandara dengan Pelabuhan	137
Gambar 4.11	Peta Sebaran Kondisi Jembatan Provinsi Lampung	139
Gambar 4.12	Peta <i>Level of Service</i> Ruas Jalan Provinsi Lampung	140
Gambar 4.13	Peta Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	141
Gambar 4.14	Peta Sebaran Bangunan Cagar Budaya Nasional dan Desa Adat.....	146
Gambar 4.15	Diagram Kebutuhan Air Minum di Provinsi Lampung	150
Gambar 4.16	Diagram Timbulan Sampah di Provinsi Lampung	152
Gambar 4.17	Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	153
Gambar 4.18	Peta Akses Air Minum Layak Provinsi Lampung	155
Gambar 4.19	Peta Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung.....	156
Gambar 4.20	Peta Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung	157
Gambar 4.21	Peta Persebaran Kawasan Kumuh Provinsi Lampung	158

Gambar 4.22	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kab/Kota Provinsi Lampung	161
Gambar 4.23	Peta RTLH.....	162
Gambar 4.24	Peta Persebaran Infrastruktur Perhubungan Provinsi Lampung	169
Gambar 4.25	Peta Kelistrikan Provinsi Lampung	170
Gambar 6.1	Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025 Provinsi Lampung	195
Gambar 6.2	Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2029 Provinsi Lampung	196
Gambar 6.3	Grafik Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 2022-2029 ...	198
Gambar 6.4	Grafik Perkembangan Kecenderungan Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2020.....	199
Gambar 6.5	Peta Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung	201
Gambar 6.6	Peta Daya Dukung Lahan Terbangun Provinsi Lampung	202
Gambar 6.7	Langkah Penyusunan <i>Grand Strategy</i>	204
Gambar 6.8	Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Pertanian	212
Gambar 6.9	Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perkotaan.....	221
Gambar 6.10	Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Pariwisata.....	228
Gambar 7.1	Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan Pertanian Lampung Tengah.....	232
Gambar 7.2	Peta <i>Level of Service</i> (LoS) Kawasan Pertanian Lampung Tengah	240
Gambar 7.3	Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan Pertanian Lampung Tengah.....	242
Gambar 7.4	Foto <i>Mapping</i> Sebaran Kawasan Kumuh Kawasan Pertanian Lampung Tengah.....	245
Gambar 7.5	Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan Pertanian Mesuji.....	245
Gambar 7.6	Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian Mesuji.....	248
Gambar 7.7	Peta <i>Level of Service</i> (LoS) Kawasan Pertanian Mesuji.....	250
Gambar 7.8	Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan Pertanian Mesuji.....	252
Gambar 7.9	Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk PKN Bandar Lampung	254
Gambar 7.10	Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN Way Kambas dsk	260

Gambar 7.11 Grafik Proyeksi Neraca Air KSPN Way
Kambas dan sekitarnya261

Gambar 7.12 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
KSPN Krakatau dan sekitarnya..... 266

Gambar 7.13 Grafik Proyeksi Neraca Air KSPN Krakatau
dsk267



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, pertambangan, dan perikanan. Pada tahun 2021, PDRB ADHK Provinsi Lampung sebesar 247 triliun rupiah dan berkontribusi 2,22% dari PDB Nasional. Penyumbang PDRB Provinsi terbesar yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,39%); Industri Pengolahan (19,65%); serta Perdagangan Besar dan Eceran (11,70%). Jumlah penduduk Lampung tahun 2021 sebanyak 9.081.792 jiwa (3,3% Nasional) dengan laju pertumbuhan penduduk Lampung sebesar 1,10% per tahun. Kota Bandar Lampung mejadi kota terpadat di Provinsi Lampung mencapai >150 orang/Ha.

Kawasan strategis skala nasional di Provinsi Lampung meliputi sistem perkotaan nasional (PKN Bandar Lampung, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, PKW Kota Agung), Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional di WS Way Seputih-Way Sekampung, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, serta Danau Ranau dan sekitarnya.

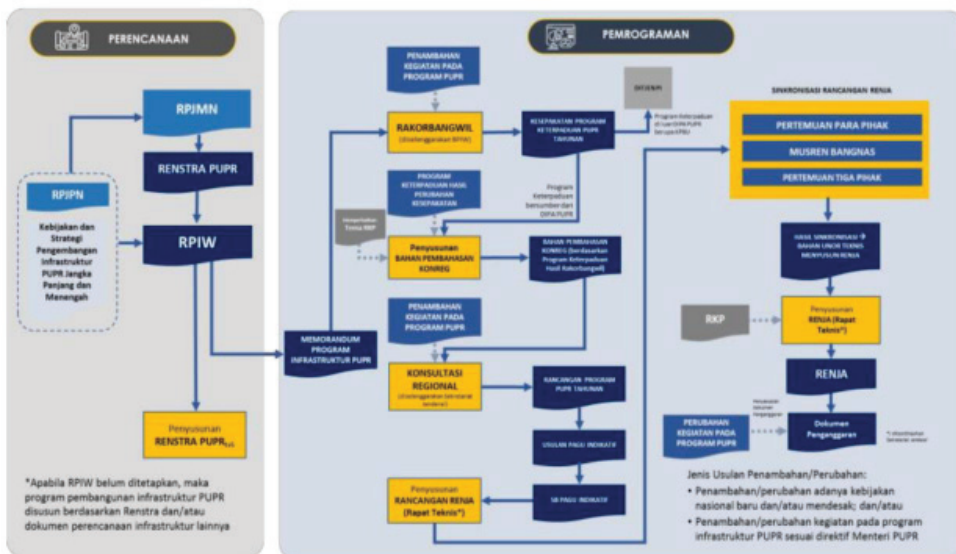
PKN Bandar Lampung menjadi simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, serta berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, pembangunan wilayah Lampung akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien. Terbangunnya Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera di sekitar Provinsi Lampung menjadi pendorong ekonomi wilayah yang cukup dominan sebagai jalur pergerakan barang dan orang yang terkoneksi ke hub internasional maupun regional.

Pengembangan infrastruktur memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah Provinsi Lampung yang sesuai dengan arah kebijakan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu komponen penentu yang dirumuskan berdasarkan arah kebijakan pengembangan wilayah dan dukungan terhadap sektor strategis nasional. Untuk itu, diperlukan suatu rencana pengembangan infrastruktur wilayah PUPR terpadu yang

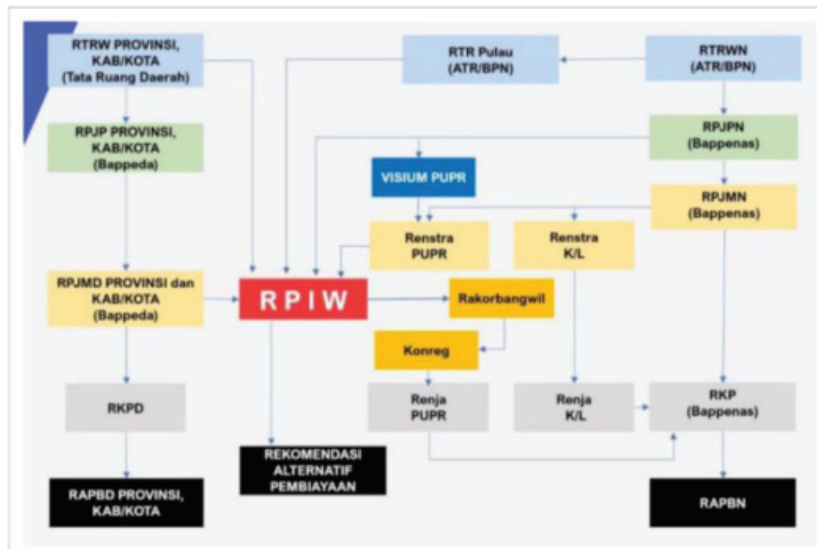
menterjemahkan arah kebijakan jangka panjang dan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Dalam pengembangan infrastruktur PUPR terpadu yang mempertimbangkan aspek tata ruang, lintas sektor, dan lintas kewenangan memerlukan dokumen perencanaan yang sistematis dan terstandarisasi yang dapat dituangkan dalam muatan materi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disingkat RPIW. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan dokumen rencana yang menjadi referensi dan media koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus katalis bagi pengembangan wilayah Provinsi Lampung.

1.2. Kedudukan Dalam Kebijakan

Kedudukan dalam Kebijakan menjelaskan posisi RPIW dalam kerangka perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR serta terhadap dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Posisi RPIW



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3. Urgensi Penyusunan RPIW

Penyusunan RPIW ini dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pengembangan wilayah melalui perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Lampung. Adapun tujuan dari penyusunan RPIW ini adalah untuk menyusun dokumen kebijakan teknis program keterpaduan dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR untuk pengembangan wilayah Provinsi Lampung.

Guna mendukung tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran penyusunan RPIW yaitu tersusunnya baseline data atau profil, kendala dan potensi, skenario pengembangan, analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR, dan tersusunnya Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Lampung.

1.4. Muatan RPIW

Bagian Muatan RPIW menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut:

- Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
- Arah Kebijakan, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat

uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;

- c. Profil Wilayah dan Potensi Daerah, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
- d. Profil dan Kinerja Infrastruktur, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
- e. Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
- f. Skenario Pengembangan Wilayah, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritas);
- g. Analisis Kebutuhan Infrastruktur, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
- h. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
- i. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5. Manfaat RPIW

Terdapat beberapa manfaat dari penyusunan RPIW, yaitu:

- a. Dasar mengintegrasikan dan mensinkronisasi kebijakan nasional dan daerah ke dalam RPIW;
- b. Acuan pemrograman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kementerian PUPR; dan
- c. Masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan PUPR lainnya.

1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Proses penyusunan RPIW melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data dan Informasi

- Arah kebijakan (penataan ruang, sektor, dan agenda global) akan menentukan fokus perencanaan dan kawasan prioritas.
- Sasaran dan target jangka panjang memuat kondisi di masa depan sesuai fokus perencanaan dan strategi Unit Organisasi PUPR.
- Profil wilayah dan kependudukan akan menggambarkan kondisi eksisting wilayah yang berkaitan fisik kebencanaan, kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya.
- Profil dan kinerja infrastruktur yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi eksisting infrastruktur.

Setelah pengumpulan data dan informasi, dilakukan proses perumusan isu strategis melalui tahapan:

- Penentuan konteks perencanaan meliputi fokus dan lokus makro, meso, dan mikro pada wilayah pengembangan. perumusan sintesa fokus kebijakan untuk mengelaborasi kondisi eksisting wilayah yang meliputi isu lokus mikro di tingkat makro, isu eksternal di tingkat meso, dan isu internal di tingkat mikro.
- Identifikasi fokus kebijakan dan kondisi eksisting wilayah akan digunakan dalam menentukan kawasan prioritas pengembangan wilayah.
- Selanjutnya untuk menentukan isu strategis melalui keterpaduan isu wilayah, masalah utama dan opsi masa depan Kawasan prioritas sesuai fokus perencanaan.

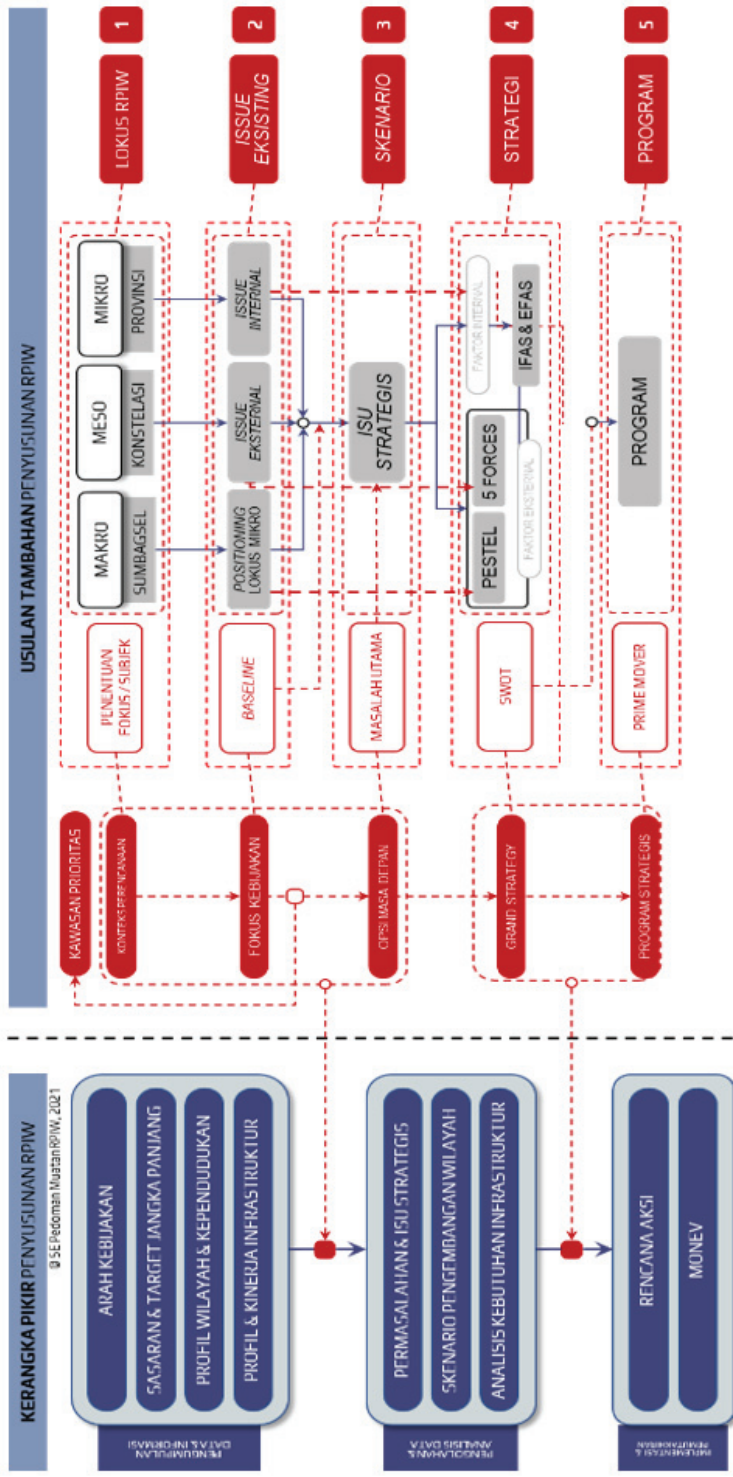
b. Pengolahan dan Analisis Data:

- Permasalahan dan isu strategis akan menggambarkan kondisi yang ingin diselesaikan di wilayah pengembangan
- Skenario pengembangan wilayah akan menghasilkan *grand strategy* per fokus perencanaan pada wilayah pengembangan.
- Analisis kebutuhan infrastruktur akan menghitung gap kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan infrastruktur di masa depan.
- Setelah pengolahan dan analisis data, dilakukan penyusunan *grand strategy* dirumuskan melalui analisis eksternal (PESTLE dan 5 FORCES) dan analisis internal SWOT. Selanjutnya, *grand strategy* akan digunakan untuk penyusunan program perencanaan.

c. Implementasi dan Pemutakhiran :

- Rencana aksi akan menghasilkan daftar kegiatan dan rencana aksi pembangunan infrastruktur secara spesifik pada setiap unit organisasi atau instansi penanggungjawab lain.
- Monitoring dan Evaluasi akan memantau keberlangsungan kegiatan pembangunan infrastruktur dan menilai kebermanfaatan dari pembangunan

Bagan Kerangka Pikir Alur Penyusunan RPIW memuat tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, sampai implementasi dan pemutakhiran sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber : Pedoman Muatan RPIW (2021) dan Penajaman Dokumen Teknokratik RPIW, diolah



BAB 2

ARAH

KEBIJAKAN



2.1. Kebijakan Penataan Ruang

2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memuat beberapa aspek utama dalam pengembangan wilayah Provinsi Lampung diantaranya sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi nasional, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan serta Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sistem perkotaan nasional di Provinsi Lampung terdiri atas PKN, PKW. Terdapat 1 (satu) PKN di Provinsi Lampung yaitu PKN Bandar Lampung. Salah satu fungsi PKN sendiri adalah sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Disamping PKN, terdapat 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Lampung yaitu PKW Kota Metro, Kalianda, Liwa, Menggala, Kotabumi dan Kota Agung yang salah satu fungsinya sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Sistem jaringan transportasi nasional terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara. Terdapat Jaringan Jalan Tol pada sistem di Provinsi Lampung yaitu Terbanggi Besar - Pematang Panggang (II/6) dan Bakauheni - Terbanggi Besar (II/6).

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Di Provinsi Lampung terdapat beberapa sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jenis Pelabuhan Provinsi Lampung

No.	Jenis Pelabuhan	Nama Pelabuhan
1.	Pelabuhan Utama	Panjang (II/1)
2.	Pelabuhan Pengumpul	Teluk Betung (II/3) Kota Agung/Tanjung Balai (II/3)
3.	Pelabuhan Angkutan Penyeberangan	Bakauheni (II/1) Ketapang (Lampung) (II/2) Tabuan (II/2) Madang (II/2) Pulau (II/2) Canti (II/2) Teluk Betung (II/2)

Sumber: PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Tatanan kebandarudaraan di Provinsi Lampung mencakup layanan barang dan penumpang untuk kebutuhan pengangkutan

regional dan internasional yaitu Bandar Udara Raden Inten II (II//3) sebagai Bandara Pengumpul Sekunder.

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Lampung meliputi wilayah sungai lintas provinsi antara lain WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau (Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu-Lampung), WS Mesuji-Tulang Bawang (Lampung-Sumatera Selatan) dan WS Nasal-Padang Guci (Bengkulu-Sumatera Selatan-Lampung) serta wilayah sungai strategis nasional yaitu WS Seputih-Sekampung (Lampung).

Kawasan Lindung Provinsi Lampung terdiri dari 1 (satu) kawasan suaka alam/pelestarian alam yaitu Rawa Kandis, 4 (empat) cagar yaitu Bukit Barisan Selatan, Anak Krakatau, Pulau Krakatau Lampung dan Laut Bukit Barisan Selatan, 2 (dua) taman nasional yaitu Bukit Barisan Selatan dan Way Kambas serta 1 (satu) Taman Hutan Rakyat yaitu Wan Abdul Rachman.

Pada RTRWN ditetapkan juga 5 (lima) kawasan andalan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Kawasan Andalan Provinsi Lampung

No.	Lokasi	Kawasan Andalan
1.	Kawasan Bandar Lampung-Metro	Perkebunan, pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, panas bumi
2.	Kawasan Mesuji dan Sekitarnya	Pertanian, perkebunan, industri, gas bumi
3.	Kawasan Kotabumi dan Sekitarnya	Pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas bumi
4.	Kawasan Liwa-Krui	Pertanian, perkebunan, perikanan laut, pariwisata, pertambangan, panas bumi
5.	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	Perikanan, pertambangan, pariwisata

Sumber: PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Lampung berada di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan meliputi Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung (II/B/1) dan Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (II/E/2).

Berdasarkan arah kebijakan RTRWN, dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Provinsi Lampung diarahkan pada Pengembangan pusat-pusat perkotaan khususnya PKN Bandar Lampung dengan sektor unggulan perdagangan, jasa dan industri serta pengembangan pusat perkotaan lain yang berada di Lampung yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Metro, Kalianda, Liwa, Menggala, Kotabumi, dan Kota Agung sebagai kawasan perkotaan dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian dan pariwisata.

2.1.2. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera

Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera memuat beberapa aspek sebagai acuan dalam pengembangan Provinsi Lampung antara lain tujuan penataan ruang, penguatan konektivitas dan keterpaduan simpul transportasi antar moda, jaringan energi serta sistem jaringan sumber daya air. Penataan ruang Pulau Sumatera bertujuan untuk mewujudkan:

1. Pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;
2. Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
3. Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk

- ketenagalistrikan;
4. Pusat industri yang berdaya saing;
 5. Pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*);
 6. Kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 7. Kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah;
 8. Kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 9. Pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera;
 10. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
 11. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Kota Bandar Lampung sebagai PKN diarahkan pada pengembangan perkebunan, pariwisata, industri, pertanian dan perikanan, sedangkan sistem perkotaan lain memiliki fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. PKW Metro diarahkan pada pengembangan perkebunan, industri dan pertanian;
2. PKW Kalianda diarahkan pada pengembangan perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
3. PKW Liwa diarahkan pada pengembangan perkebunan, perikanan, pertanian, industri dan pariwisata;
4. PKW Menggala diarahkan pada pengembangan perkebunan, perikanan, pertanian dan industri;
5. PKW Kotabumi diarahkan pada pengembangan perkebunan, perikanan, pertanian, industri
6. PKW Kota Agung diarahkan pada pertanian, industri dan pariwisata.

Terdapat arahan untuk memperkuat konektivitas pada RTR Pulau Sumatera yaitu pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera dan Jaringan Jalan untuk meningkatkan Aksesibilitas di

kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Tertinggal dan Terisolasi, Termasuk Pulau-Pulau Kecil dengan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan Antar Kota (Jaringan jalan Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Jaringan jalan Bakauheni-Terbanggi Besar, Jaringan jalan Pematang Panggang-Kayu Agung-Simpang Indralaya dan Jaringan jalan Jembatan Selat Sunda). Di samping itu, untuk mendukung konektivitas terdapat keterpaduan antar moda antara lain dengan pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota, Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Penyeberangan, Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan Provinsi di Luar Pulau Sumatera, Pelabuhan Utama dan Bandar Udara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi, terdapat arahan pengembangan terdapat arahan pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Seluruh Pulau Sumatera serta Antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah termasuk diantaranya jaringan transmisi tenaga listrik mendukung Provinsi Lampung.

Terkait dengan sumber daya air terdapat Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional dan WS Lintas Provinsi sesuai dengan RTRWN serta terdapat 2 (dua) DAS yaitu DAS Tulang Bawang dan DAS Sekampung. Terdapat pula 4 (empat) CAT Lintas Provinsi (CAT Lubuklinggau-Muaraenim, CAT Gedongmeneng, CAT Ranau dan CAT Metro-Kotabumi), Waduk Batu Tegi dan Waduk Way Jepara dan Waduk Way Rarem serta Daerah Irigasi antara lain 1) DI Way Sekampung, 2) DI Way Tebu I, II, III, dan IV, DI Way Kandis II, 3) DI Way Tulung Mas dan DI Bumi Agung, 4) DI Way Umpu dan 5) DI Dp. Mesuji Tulang Bawang, DI Dp. Rawa Pintu, DI. Peng. Rawa Mesuji Atas, DI Pidada Tulang Bawang, dan DI Way Rarem.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam RTR Pulau Sumatera, Provinsi Lampung diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, energi, industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi bencana.

2.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029 menyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata menuju Provinsi Lampung berjaya.

Rencana Struktur Ruang Provinsi Lampung terdiri dari rencana sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah. Sistem perkotaan terdiri dari PKN, PKW, dan PKL. Rencana PKN dan PKW sesuai dengan penetapan yang terdapat di RTRWN, sedangkan PKL ditetapkan pada 21 kawasan antara lain 1) Kawasan Perkotaan Sukadana di Kabupaten Lampung Timur, 2) Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan, 3) Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, 4) Kawasan Perkotaan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran, 5) Kawasan Perkotaan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan, 6) Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung Tengah, 7) Kawasan Perkotaan Mesuji di Kabupaten Mesuji, 8) Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 9) Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan, 10) Kawasan Perkotaan Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan, 11) Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kabupaten Tulang Bawang, 12) Kawasan Perkotaan Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah, 13) Kawasan Perkotaan Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah, 14) Kawasan Perkotaan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur, 15) Kawasan Perkotaan Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat, 16) Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur, 17) Kawasan Perkotaan Krui di Kabupaten Pesisir Barat, 18) Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara, 19) Kawasan Perkotaan Wiralaga di Kabupaten Mesuji, 20) Kawasan Perkotaan Wonosobo di Kabupaten Tanggamus 21) Kawasan Perkotaan Natar - Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana pengembangan jaringan transportasi terdiri dari Jalan tol (Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang, Ruas exit toll Lematang - Pelabuhan Panjang, Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung), Terminal penumpang (Tipe A dan Tipe B), Terminal barang, Jembatan timbang, Jaringan jalur KA, Stasiun KA, Pelabuhan sungai dan danau, Pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal khusus, Bandar udara pengumpul, Bandar udara pengumpan dan Bandar udara khusus.

Rencana Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Lampung terdiri dari Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi, Sumber air lintas provinsi, Daerah irigasi, Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, Sumber air lintas kabupaten/kota dan Prasarana sumber daya air. Terdapat juga rencana jaringan prasarana lainnya yang terdiri atas SPAM (SPAM Regional Bandar Lampung, SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas dan SPAM Regional

Kawasan Ekonomi Mesuji Tulang Bawang), SPAL di kawasan permukiman pada kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan TPA di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung terdiri dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan yang berfungsi sebagai ekosistem mangrove, sedangkan kawasan budi daya diarahkan pada Kawasan hutan produksi, Kawasan pertanian, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan permukiman dan Kawasan pertahanan keamanan.

Rencana Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Lampung terdiri dari kawasan strategis nasional dan provinsi. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Provinsi Lampung yaitu 1) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung), 2) Kawasan Selatan Sunda (Provinsi Lampung dan Banten), 3) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat). Kawasan strategis provinsi terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya; dan Kawasan Pariwisata Pantai Barat) dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batuteigi).

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam RTRW Provinsi Lampung, Provinsi Lampung diarahkan untuk pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata. PKN Bandar Lampung memiliki fungsi utama pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa, pusat distribusi dan koleksi; pusat pendukung jasa pariwisata; dan pusat pendidikan tinggi, dengan didukung kawasan perkotaan di sekitarnya (PKW).

2.2. Kebijakan Sektor

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007) berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Pelaksanaan

RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. Periode terakhir (Tahap 4) dari tahapan RPJPN ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Pada RPJMN 2020-2024 ditetapkan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan. Koridor Pertumbuhan di Provinsi Lampung yaitu Kab. Tulangbawang, Kab. Lampung Tengah, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran dan Kab. Lampung Timur, sedangkan Koridor Pemerataan meliputi Kab. Lampung Utara, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat; dan Kab. Pesisir Barat.

Arah Pengembangan Provinsi Lampung berdasarkan RPJMN 2020-2024 meliputi 1) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Bandar Lampung; 2) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Katibung, Kawasan Industri Pesawaran; 3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal di Pesisir Barat; dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di KPPN Tulang Bawang dan KPPN Mesuji.

Major Project di Provinsi Lampung antara lain: 1) Jalan Akses KI Tanggamus; 2) Penyediaan air baku di kawasan strategis KI Pesawaran; 3) Penyediaan air baku di kawasan strategis KI Way Pisang; 4) Penyediaan air baku di kawasan strategis KI Katibung; dan 5) Penyediaan air baku di daerah tertinggal Pesisir Barat.

Berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah Provinsi Lampung meliputi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Bandar Lampung, Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan, Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

2.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 menjadi arah penyelenggaraan pembangunan Provinsi Lampung, dalam lima tahun periode penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut merupakan misi dan strategi yang ingin dicapai dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Misi ke 2 dan ke 3, Provinsi Lampung diarahkan untuk Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah dan Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan.

2.2.4. Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia 2045 terkait upaya untuk pemerataan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam 30 tahun ke depan, peranan luar Jawa dan KTI diperkirakan meningkat menjadi 48,2 % dan 25,1 % dari perekonomian nasional. Wilayah Sumatera diharapkan meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 23,2% terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7% per tahun. Pulau Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian dengan konsep agrobisnis menjadi satu potensi ekonomi untuk dikembangkan antara lain pengembangan sentra perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Wilayah Sumatera juga diarahkan untuk sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Di sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional, khususnya berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam diarahkan menjadi pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika dan industri kapal. 32

Pengembangan sektor jasa di wilayah Sumatera didukung oleh pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung dan Batam.

Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah. Secara umum, pengembangan wilayah Pulau Sumatera diarahkan sebagai basis industri baru dan gerbang kawasan Asia. Berdasarkan Visi Indonesia 2045, **pengembangan wilayah Sumatera diarahkan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, dan energi; mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah; mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan.**

2.2.5. Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa daftar PSN yang terdapat di Provinsi Lampung meliputi:

1. Jalan Tol Bakauheni - Tb. Besar (138km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;
2. Proyek Revitalisasi Bandar Udara Raden Inten II, Lampung;
3. Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung;
4. Proyek Bendungan Sukoharjo, Sukaraja III, Segalamider dan Rokan Kiri dan Bendungan Way Sekampung;
5. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus (KI Tanggamus);
6. Proyek Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/ Lampung dan Prabumulih - Kertapati Palembang

2.2.6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang tertuang dalam PP No. 14 Tahun 2015 memuat visi Pembangunan Industri Nasional yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut: 1. Tahap I (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan

kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi; 2. Tahap II (2020-2024). Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas; 3. Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan ditetapkan sebagai WPPI yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI dengan pengembangan industri prioritas.

2.2.7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) di Provinsi Lampung terdapat DPN Krakatau-Ujung Kulon dan sekitarnya dengan Kawasan Pengembangan Pawisata Nasional (KPPN) ialah KKPN Danau Ranau dan sekitarnya, KPPN Way Kambas dan sekitarnya, KPPN Bandar Lampung dan sekitarnya, KPPN Krui-Tanjung Setia dan sekitarnya, KPPN Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya, KPPN Kalianda dan sekitarnya dan KPPN Krakatau-Selat Sunda dan sekitarnya. Selain itu terdapat KSPN Way Kambas dan sekitarnya, KSPN Krakatau dan sekitarnya dan KSPN Danau Ranau dan sekitarnya.

2.2.8. Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Kepelabuhanan Nasional khususnya diarahkan untuk mewujudkan sektor

kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan yang kompetitif dengan sistem operasi pelabuhan, baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Hasil penetapan secara rinci dari lokasi dan hierarki pelabuhan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun khususnya untuk wilayah Provinsi Lampung meliputi:

Tabel 2.3 Lokasi Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk melayani Angkutan Laut

Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
		2017	2022	2027	2037
Bandar Lampung	Panjang	PU	PU	PU	PU
Bandar Lampung	Teluk Belung	PR	PR	PR	PR
Lampung Selatan	Sebalang	PR	PR	PP	PP
Lampung Timur	Labuhan Maringgai	PR	PR	PP	PP
Mesuji	Mesuji	PR	PR	PR	PR
Tanggamus	Kota Agung/Batu Balai	PP	PP	PP	PP
Tulang Bawang	Menggala	PR	PR	PP	PP
Lampung Selatan	Lagundu	PL	PL	PL	PL
Lampung Selatan	Kalianda	PL	PL	PL	PL
Lampung Selatan	P. Sevesi	PL	PL	PL	PL
Tanggamus	P. Tabuan	PL	PL	PL	PL

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.4 Rencana Lokasi Pelabuhan

Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
		2017	2022	2027	2037
Lampung Selatan	Canti	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Lampung Selatan	Ranggai	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Lampung Tengah	Way Seputih	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Lampung Timur	Kuala Penat	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Lampung Timur	Way Sekampung	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Mesuji	KTM SP 8	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Mesuji	Sungai Sidang	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Mesuji	Wiralaga	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Pesisir Barat	Bangkunat	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Pesisir Barat	Krui	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Tanggamus	Kelumbayan	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Tanggamus	Kiluan	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Tulang Bawang	Dente Teladas	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Tulang Bawang	Teladas	Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Tulang Bawang	Sungai Barung	Pelabuhan Pengumpan Lokal			

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020

(Perubahan atas Kepmen Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.5 Lokasi Terminal Umum (bagian dari pelabuhan umum yang dapat berubah mengikuti perkembangan pelabuhan)

Kabupaten/Kota	Terminal Umum	Keterangan
Lampung Selatan	Bandar Bakau Jaya	Pelabuhan Bakauheni

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.6 Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan

Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
Bakauheni	Kab. Lampung Selatan	Operasi	Kelas I
Ketapang (Lampung)	Kab. Lampung Selatan	Rencana	Kelas I
Tabuan	Kab. Tanggamus	Rencana	Kelas III
Madang	Kab. Tanggamus	Rencana	Kelas III
Pulau Sebesi	Kab. Lampung Selatan	Rencana	Kelas III
Canti	Kab. Lampung Selatan	Rencana	Kelas III
Teluk Betung	Kota Bandar Lampung	Rencana	Kelas III

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.7 Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelabuhan	Status Pencapaian	Hierarki
Pagar Dewa	Operasi	Pengumpan
Dermaga Lombok	Operasi	Pengumpan
Sekau	Operasi	Pengumpan
Dermaga Danau Ranau Lampung	Operasi	Pengumpan
Heniarong	Rencana	Pengumpan
Dermaga Cabang Sungai Way Putih	Operasi	Pengumpan
Dermaga Danau Jepara	Rencana	Pengumpan
Dermaga Waduk Way Ralem	Rencana	Pengumpan
Wiralaga	Operasi	Pengumpul
Mesuji Timur	Operasi	Pengumpan
Sungai Sidang	Operasi	Pengumpan
Sukabanjar	Rencana	Pengumpan
Kota Agung	Rencana	Pengumpan
Menggala	Rencana	Pengumpul
Gedung Aji	Rencana	Pengumpan
Rawajitu	Rencana	Pengumpan

Pelabuhan	Status Pencapaian	Hierarki
Tulang Bawang	Rencana	Pengumpul
Kuala	Rencana	Pengumpun
Dermaga Kuala Teladas	Operasi	Pengumpun
Bahuga	Rencana	Pengumpun
Dergama Sungai Kota Terpadu Mandiri SP. VIII	Operasi	Pengumpun

*Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)*

2.2.9. Visium Kementerian PUPR 2030

Visium Kementerian PUPR 2030 adalah **"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa **Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030** sebagai berikut:

Tabel 2.8 Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030

Tahun	Sumber Daya Air	Bina Marga	Cipta Karya	Perumahan
2020-2024	Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m ³ /kapita/tahun	- Kondisi jalan mantap 97% - Pembangunan jalan tol 1.500 Km - Pembangunan jalan baru 2.500 Km - Pembangunan jembatan baru/fly over 60.000 m	88% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi.	Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit.
2025-2030	Bendungan multifungsi untuk memenuhi	Kondisi Jalan Mantap 99%	100% Pelayanan Air Minum	Zero Backlog rumah bagi MBR

Tahun	Sumber Daya Air	Bina Marga	Cipta Karya	Perumahan
	kapasitas tampung 120 m ³ / kapita/ tahun.	– Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km – Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km – Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m	– Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan – 100% Pelayanan Sanitasi	3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit.
Target 2030	Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120m ³ /kapita/ tahun	Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle	100% SMART LIVING (Hunian Cerdas)	

Sumber: Visium Kementerian PUPR, 2017

2.2.10. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam Renstra Kementerian PUPR, ditetapkan target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 sebagai berikut:

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m³/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar	
50 m³/detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			
			

Gambar 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

2.2.11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) merupakan dokumen sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Lampung dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan, masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan pendapatan daerah. Kawasan wisata unggulan berdasarkan RIPPARDA terdiri atas:

1. Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung
2. Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Tanjung Setia
3. Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas
4. Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan
5. Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi
6. Kawasan Wisata Unggulan Bakauheni dan Menara Siger
7. Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

2.2.12. Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal

Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal ditinjau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan

Daerah Tertinggal Tahun 2029 – 2024 dimana daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:

1. Perekonomian masyarakat;
2. Sumber daya manusia;
3. Sarana dan prasarana;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Aksesibilitas;
6. Karakteristik daerah.

Adapun kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal yang ada di Provinsi Lampung ialah **Kabupaten Pesisir Barat**.

2.3. Agenda Global

Agenda global berisi tentang poin penting arahan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Paris Agreement*, dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030. Adapun uraian terkait agenda global khususnya yang terkait dengan pengembangan wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Arahan Agenda Global

No	Kebijakan Global	Arahan
1	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	SDGs adalah 17 (tujuh belas) tujuan bersama global dan nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur PUPR mendukung terwujudnya SDGs pada tujuan: - Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua - Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi - Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Selain itu, secara tidak langsung implikasi SDGs terhadap arahan pengembangan infrastruktur PUPR antara lain: 1. Dukungan terhadap Tujuan 1 melalui

No	Kebijakan Global	Arahan
		pengentasan kemiskinan ekstrem. 2. Dukungan terhadap Tujuan 2 melalui peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi dalam rangka kedaulatan pangan. 3. Dukungan terhadap Tujuan 3 dan 4 melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. 4. Dukungan terhadap Tujuan 5 melalui pengarusutamaan gender. 2. 5. Dukungan infrastruktur PUPR untuk mendorong perkembangan wilayah melalui pengembangan seluruh kawasan strategis.
2	<i>New Urban Agenda (NUA)</i>	NUA adalah komitmen global, 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Komitmen ini membawa semangat inklusif, kolaboratif, dan partisipatif dalam pembangunan perkotaan. Pembangunan infrastruktur PUPR turut mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui penyediaan perumahan dan akses pelayanan dasar seperti: • Pembangunan perumahan yang terjangkau • Penanganan kawasan permukiman kumuh • Akses universal air minum dan sanitasi perkotaan • Sarana prasarana sosial perkotaan
3	<i>Paris Agreement</i>	<i>Paris Agreement</i> adalah kesepakatan 196 negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia meratifikasi <i>Paris Agreement</i> melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario <i>baseline</i> tidak ada intervensi (<i>Business as Usual/BAU</i>) pada tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	Sendai Framework for Disaster Risk	SFDRR adalah kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang disepakati 187 negara untuk membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana. Terdapat 7

No	Kebijakan Global	Arahan
	Reduction (SFDRR)	(tujuh) target global SFDRR seperti (1) mengurangi kematian, (2) mengurangi jumlah orang terdampak, (3) mengurangi kerugian ekonomi, (4) mengurangi kerusakan akibat bencana terhadap infrastruktur kritis dan layanan dasar, (5) meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana lokal dan nasional, (6) meningkatkan kerja sama internasional, (7) meningkatkan ketersediaan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan infrastruktur PUPR dapat mendukung melalui 2 (dua) aksi prioritas yaitu (1) Berinvestasi pada pengurangan risiko bencana untuk ketahanan melalui pengurangan dan pencegahan risiko bencana secara struktural, non struktural dan fungsional pada fasilitas kritis, khususnya sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur fisik dan (2) Meningkatkan kesiapan kebencanaan dan “Membangun Kembali Lebih Baik” melalui peningkatan ketangguhan infrastruktur kritis baru maupun eksisting termasuk infrastruktur air, transportasi, dan telekomunikasi, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan operasional selama dan setelah bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan global yang terkait dengan pengembangan Provinsi Lampung, yaitu pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur terintegrasi yang berketahanan bencana.

2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dirumuskan fokus dan lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, kebijakan pengembangan kawasan prioritas, dan agenda global di Provinsi

Lampung. Kebijakan penataan ruang dan kebijakan sektoral Provinsi Lampung berfokus pada kawasan perkotaan, pertanian, pengembangan pariwisata, dan industri. Setelah dilakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan tiga fokus perencanaan di Provinsi Lampung yaitu: 1) Pertanian; 2) Pariwisata; dan 3) Pelayanan dasar kawasan perkotaan. Selanjutnya lokus perencanaan ditentukan berdasarkan fokus perencanaan terpilih dan prioritas kawasan (*shortlist*). Sintesa kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

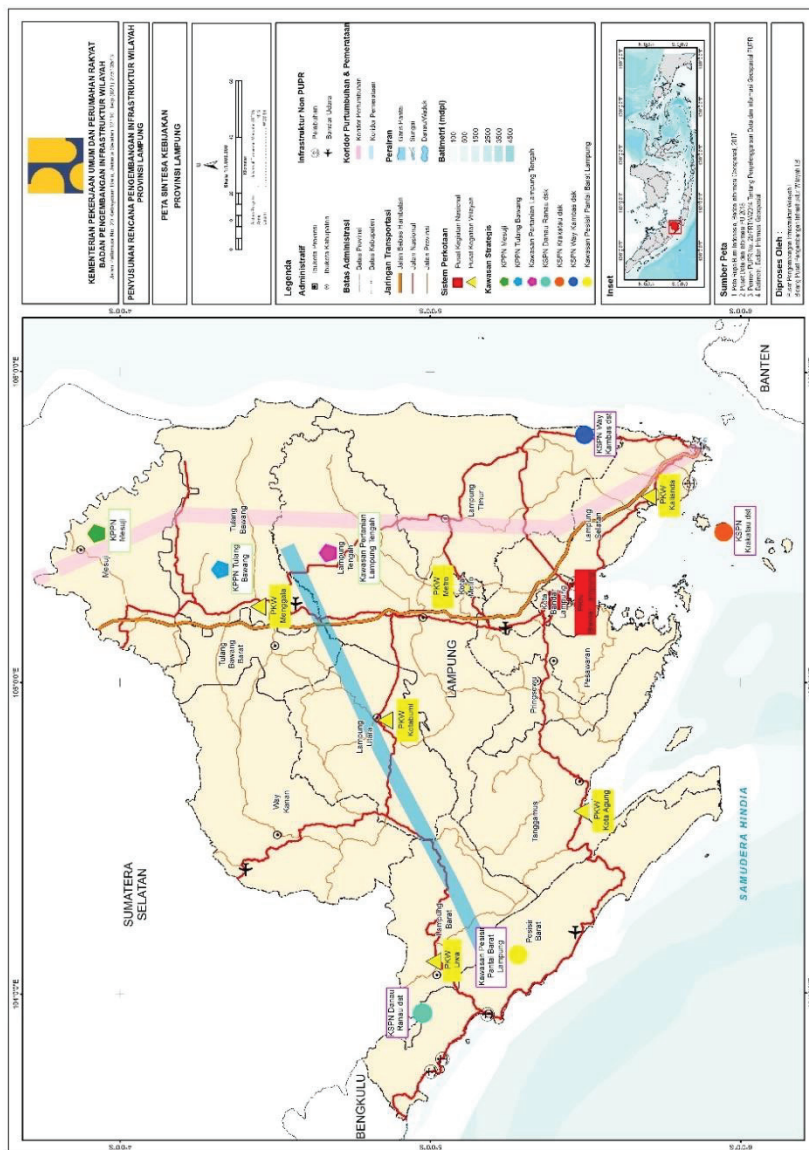
Tabel 2.10 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Konteks Perencanaan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandar Lampung sebagai dengan sektor unggulan perdagangan, jasa dan industri serta Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Metro, Kalianda, Liwa, Menggala, Kotabumi, dan Kota Agung sebagai kawasan perkotaan dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian dan pariwisata		Pertanian: 1. Kab. Lampung Tengah 2. KPPN Mesuji 3. KPPN Tulang Bawang Pariwisata: 1. KSPN Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur 2. KSPN Krakatau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan
	RTR Pulau Sumatera	Provinsi Lampung diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, energi, industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi bencana.	Pertanian, pengembangan pariwisata, industri, dan kawasan perkotaan	
	RTRW Provinsi Lampung	Provinsi Lampung diarahkan untuk pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata. PKN Bandar Lampung memiliki fungsi utama pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa, pusat distribusi dan koleksi; pusat pendukung jasa pariwisata; dan pusat pendidikan tinggi, dengan didukung kawasan perkotaan disekitarnya (PKW).		Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan: 1. PKN Bandar Lampung 2. PKW Metro
Kebijakan Sektoral	Visi Indonesia 2045	Arah pengembangan wilayah Sumatera diarahkan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, dan energi; mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah; mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan.	Sektor Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Kawasan Perkotaan	
	RPJMN 2020-2024	1. Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Bandar Lampung 2. Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan Industri Tanggamus,		

Konteks Perencanaan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
		Kawasan Industri Katibung, Kawasan Industri Pesawaran 3. Percepatan pembangunan daerah tertinggal di Pesisir Barat 4. Koridor Pertumbuhan: Kab. Tulangbawang; Kab. Lampung Tengah; Kota Metro; Kab. Lampung Selatan; Kota Bandar Lampung; Kab. Pesawaran; dan Kab. Lampung Timur. 5. Koridor Pemerataan: Kab. Lampung Utara; Kab. Pringsewu; Kab. Tanggamus; Kab. Lampung Barat; dan Kab. Pesisir Barat. 6. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di KPPN Tulang Bawang dan KPPN Mesuji		
	Rencana Induk Perindustrian Nasional	Pengembangan WPPI Sumatera bagian selatan (Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Banten)		
	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025	Pengembangan pariwisata alam berskala nasional (KSPN) 1. KSPN Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur 2. KSPN Krakatau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan 3. KSPN Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat		
	Rencana Induk Keperlabuhan Nasional (Kepmen 432/2011)	Pelabuhan Bakauheni sebagai pelabuhan penyeberangan utama berhierarki 1 sebagai hub transportasi prioritas gerbang masuk Pulau Sumatera.		
	Visium PUPR 2030	SDA: Peningkatan kapasitas tampung, BM: peningkatan konektivitas CK: pemenuhan air minum, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh, Perumahan: Penanganan Backlog MBR		
	Renstra PUPR 2020-2024	Strategi SDA: pemenuhan pelayanan dasar perkotaan melalui penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta		

Konteks Perencanaan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
Agenda Global		pengurangan resiko bencana Strategi BM: Meningkatkan konektivitas wilayah utara dan selatan Lampung Strategi CK: Memenuhi pelayanan infrastruktur dasar air minum aman dan perpipaan, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan dan pengurangan sampah Strategi Perumahan: Menyediakan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan PSU Perumahan		
	RPJMD Prov Lampung 2019-2024	Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah dan Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan		
	SDG's	Indonesia: Percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan		
	New Urban Agenda	Indonesia: pembangunan berkelanjutan dan berketahanan		
	Paris Agreement	Mengurangi emisi gas rumah kaca karena industri.		
	Sendai Framework	Mengurangi risiko, menurunkan kerentanan, peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan. Kawasan rawan bencana Lampung: Berdasarkan data InaRISK, diketahui bahwa wilayah Provinsi Lampung memiliki bahaya bencana, meliputi banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, likuifasi dan tanah longsor.	Pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur terintegrasi yang berketahanan bencana	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 2.2 Peta Sintesa Kebijakan Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan sintesa kebijakan, dirumuskan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Lampung yang akan berfokus pada pengembangan: 1) Pertanian; 2) Perkotaan; dan 3) Pariwisata. Ketiga fokus arah kebijakan pengembangan wilayah ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah.

Pada Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah akan dijabarkan penentuan kawasan prioritas dengan fokus arah kebijakan pengembangan wilayah untuk: 1) Pertanian; 2) Perkotaan; dan 3) Pariwisata. Proses penentuan kawasan prioritas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan daftar panjang (*longlist*) kawasan prioritas yang sesuai atau mendukung 3 (tiga) fokus di atas;
- 2) Penapisan *longlist* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk didapatkan daftar pendek (*shortlist*) atau kawasan prioritas terpilih. Kriteria yang digunakan pada masing-masing fokus pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:
 - a) Kriteria Fokus Pertanian
 - Memiliki Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dengan kontribusi tingkat nasional;
 - Produktivitas yang dominan (Luas panen dan produksi 3 terbesar dalam 5 tahun terakhir);
 - Merupakan Kawasan RPJMN;
 - Kesesuaian Arah Pengembangan Provinsi (Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3 terbesar di Provinsi Lampung);
 - Terdapat daerah irigasi kewenangan pusat.
 - b) Kriteria Fokus Perkotaan
 - Memiliki Infrastruktur Perhubungan Skala Nasional (Bandara/Pelabuhan);
 - Merupakan Kawasan Prioritas RPJMN;
 - Kesesuaian Arah Pengembangan Provinsi;
 - Sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Kab/ Kota merupakan sektor sekunder/tersier;
 - Merupakan kawasan andalan RTRWN.
 - c) Kriteria Fokus Pariwisata
 - Kawasan Prioritas pada RIPPARNAS;
 - Aksesibilitas yang memadai: Simpul transportasi, konektivitas dengan jalan nasional;
 - Kesesuaian Arah Pengembangan Provinsi;
 - Adanya Badan Pengelola.

Setelah penentuan kawasan prioritas terpilih, akan dijabarkan profil dan potensi setiap kawasan prioritas berdasarkan fokus perencanaan. Selain itu, Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah juga akan membahas mengenai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Lampung.

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (*Food Estate*), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- **Menurunnya kualitas infrastruktur.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- **Menyebabkan ketimpangan pembangunan.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.

- **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam

- perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
 - **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.11 Infrastruktur Prioritas PUPR Provinsi Lampung

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	Sumber Daya Air	Bendungan Way Sekampung	Kab. Pringsewu	PSN
2	Sumber Daya Air	Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Sukaraja)	Kab. Lampung Selatan	
3	Sumber Daya Air	Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Maja)	Kab. Lampung Selatan	
4	Permukiman	Penataan Kawasan Kumuh Sakai-Sambaiyan	Kab. Pringsewu	
5	Sumber Daya Air	Bendungan Margatiga	Kab. Lampung Timur	PSN
6	Bina Marga	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung - bagian dari Trans Sumatera	Kab. Mesuji, Kab. Lampung Tengah	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 3

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH



3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan

Provinsi Lampung merupakan bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Berdasarkan data BPS, Provinsi Lampung memiliki luas 33.553,35 km². Secara geografis, letak Provinsi Lampung berada pada 6°45'-3°45' Lintang Selatan dan 103°14'-105°50' Bujur Timur. Adapun batas administratif Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

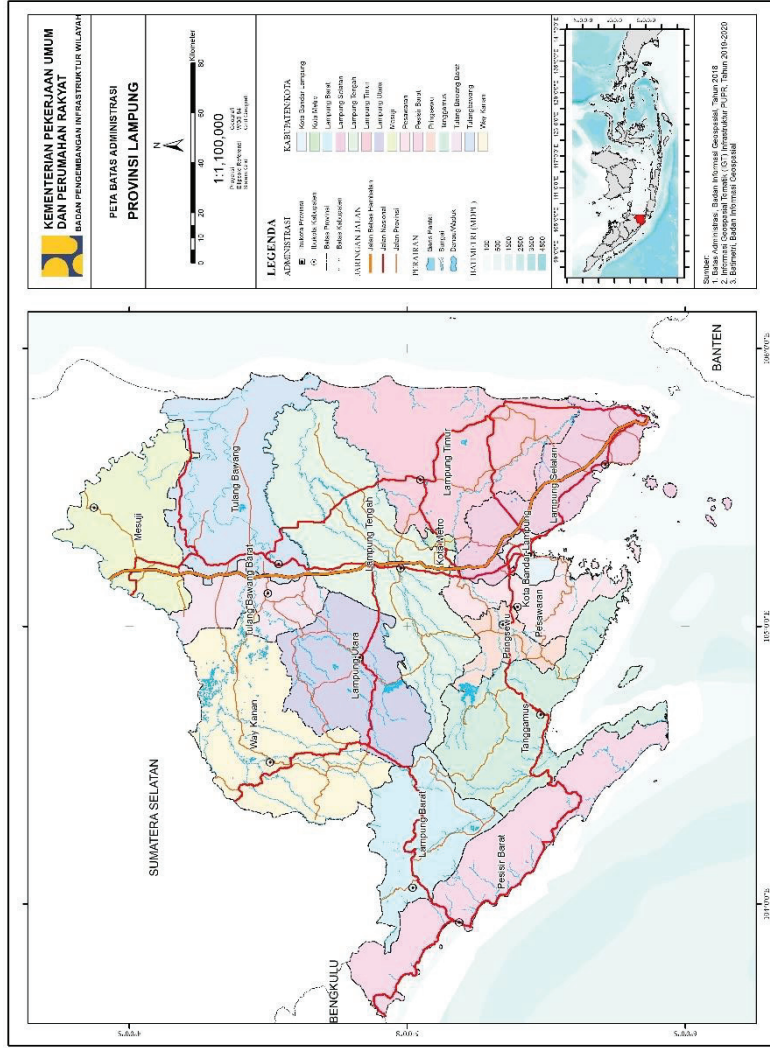
Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
Sebelah Selatan : Selat Sunda
Sebelah Barat : Samudra Indonesia
Sebelah Timur : Laut Jawa

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Jumlah kecamatan di Provinsi Lampung adalah sebanyak 229 kecamatan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 28 kecamatan. Berikut merupakan tabel wilayah administrasi Provinsi Lampung:

Tabel 3.1 Luas Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Lampung Barat	2.118,76	15	131	5
Tanggamus	2.900,29	20	299	3
Lampung Selatan	2.219,46	17	256	4
Lampung Timur	3.864,69	24	264	0
Lampung Tengah	4.544,00	28	304	10
Lampung Utara	2.529,54	23	232	15
Way Kanan	3.657,49	14	221	6
Tulang Bawang	3.091,08	15	147	4
Pesawaran	1.278,21	11	148	0
Pringsewu	614,48	9	126	5
Mesuji	2.205,27	7	105	0
Tulang Bawang Barat	1.285,74	9	100	3
Pesisir Barat	2.988,07	11	116	2
Kota Bandar Lampung	183,31	20	0	126
Kota Metro	73,15	5	0	22
Provinsi Lampung	33.553,35	229	2.449	205

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022



Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Lampung

Ditinjau dari Kondisi Hidrologi, Provinsi Lampung memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan berupa sungai. Berikut adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada pada Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) Wilayah Sungai (WS) yaitu Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, Wilayah Sungai Seputih-Sekampung, Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang, dan Wilayah Sungai Semangka. Berikut merupakan tabel DAS di Provinsi Lampung:

Tabel 3.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

Nama DAS	Luas (Ha)	Nama DAS	Luas (Ha)
A.Malsano	5154	Pedada	2999
Anak Selanak	606	Pekonsusuk	1649
Anak Selanakduo	125	Pekonunggak	562
Batu Balai 1	805	Puhawang	363
Batubalai 2	356	Puhawang Kanan	350
Batujajar	271	Puhawangkecil	9
Batumenyan	810	Pulau Legunditua	63
Baturanji	228	Pulau Lelengalunik	14
Batuserampok	708	Pulau Mundu	13
Batutajem	454	Pulau Pisang	144
Bawang	1365	Pulau Sebesi	4214
Betung	920	Pulau Sebijai	66
Buahberak	253	Pulau Seram	3
Cantik	913	Pulau Siuncal	312
Cintigi	286	Pulau Sulah	9
Condonglaut	115	Pulau Tangkil	10
Curup	596	Pulau Tiga	7
Gunung Sebesi	151	Pulaubalak	22
Gunung Sebuk	364	Pulaubar	13
Gununglegundi	828	Pulaulelagian Besar	445
Kandang Balak	169	Pulaulelengga	74
Karangbuah	348	Pulaulunik	9
Karup	222	Pulaupaku	3
Kelaw	1205	Purworejo	1913
Kesugihan	195	Rajabasa	355
Ketapangdua	271	Rawakambas	1094
Kotaguring	332	Rawapenet	2722
Legundi	382	Rimau Balak	292
Legundi Timur	561	Rimaubalak Kecil	3
Legundi Utara	505	Rusaba	1714
Lempasing	801	Sawangbalak	566
Maja	545	Sawangcemerlang	315
Manula	4324	Sebesi Kanan	219
Mesuji	278636	Sebesi Kiri	267
Musi	28883	Sebesi Selatan	272
Paguran	261	Sebesi Utara	146
Panjurit	75	Sebuk Kanan	366
Pasirsakti	1175	Sebuk Kiri	356

RPIW Provinsi Lampung
Tahun 2025 – 2034

Nama DAS	Luas (Ha)
Sebukubesar	428
Sebukukecil	14
Sekampung	485817
Semanak	882
Semangka	176681
Seputih	754783
Sumberagung	571
Sumur	320
Tabuhan	275
Tamiang 1	971
Tamiang 2	555
Tanjung Belimbing	293
Tanjung Tikus	538
Tanjungcina	369
Tanjungjati	261
Teluk Sebuku	147
Teluk Tampang	170
Telukbaru	620
Telukberak	263
Telukbuduk	273
Telukumahnai	1087
Tengkuyuh	956
Tulang Bawang	950553
Umbarioh	372
Way Andeng	1659
Way Asahan	1143
Way Atau	2358
Way Babuta	1515
Way Babutakanan	960
Way Badak	642
Way Badakecil	147
Way Badakkanan	350
Way Bagiik	689
Way Bagiikkiri	363
Way Bakauheni	1097
Way Bakauhenikecil	533
Way Balak	1683
Way Balam	370
Way Balau	6174
Way Bambang	11844
Way Batang	777
Way Batulawang	466
Way Baturaja	1305
Way Bayuk	3406
Way Belambang	8187
Way Belimbing	1189
Way Betung	1430
Way Buatan	2553
Way Bulok	383
Way Bulokkiri	573
Way Cangi	483
Way Ceringin	1077
Way Coyung	3234
Way Cumu	649

Nama DAS	Luas (Ha)
Way Doh	789
Way Garuntang	4922
Way Gebang	1380
Way Gedau	7396
Way Gerabak	534
Way Gubak	753
Way Guring	402
Way Gusung	1241
Way Halami	9867
Way Hanuan	3571
Way Haru	949
Way Heni	2052
Way Henikiri	379
Way Isom	1692
Way Jambu 1	417
Way Jambu 2	21751
Way Jelai	557
Way Jepara	76496
Way Kabuduk	654
Way Kabuduktunggal	477
Way Kambas	48989
Way Kapuk	6165
Way Karwi	942
Way Karyatani	907
Way Kargading	447
Way Kawat	1321
Way Kawatkecil	62
Way Kawatkiri	338
Way Kejadian	3024
Way Ketapang 2	553
Way Keteguhan	334
Way Krui	9602
Way Kuripan	434
Way Laay	16276
Way Lalaan	3119
Way Lalaankanan	1682
Way Lubuk	7292
Way Lunik	259
Way Mahnai	10069
Way Maja	7008
Way Menangkanan	1019
Way Menangkiri	24059
Way Mengkudu	1139
Way Muaratando	1303
Way Napal	6998
Way Napaliut	6009
Way Narta	302
Way Ngambur 1	829
Way Ngambur 2	15512
Way Ngaras	13894
Way Nibung	15977
Way Nipah	1018
Way Nipahbesar	524

Nama DAS	Luas (Ha)
Way Nipahduo	118
Way Nipahkanan	123
Way Nipahkecil	871
Way Nipahkiri	335
Way Nipoh	642
Way Paku	1230
Way Panago	2656
Way Panagonhilir	293
Way Panjang 1	2615
Way Panjang 2	279
Way Panorama	3033
Way Paya	3999
Way Pemerihan 1	211
Way Pemerihan 2	18603
Way Pemerihanhilir	285
Way Pidada	546
Way Punduh	5204
Way Putih	4277
Way Putihkecil	207
Way Ratai	32633
Way Ruapampang	985
Way Ruguk	1336
Way Rugukhilir	190
Way Sarubalak	5062
Way Sarubalakhilir	465
Way Sebalam	374
Way Seka	13508
Way Sekopong	1292
Way Selayan	1501
Way Selayangduo	121
Way Seleman	3667
Way Serat	653
Way Simpangbalak	17074
Way Siring	3318
Way Siringrebang	1894
Way Slemanhilir	562
Way Srengsem	437
Way Suak	995
Way Suakbesar	478
Way Suakkecil	209
Way Sukabanjar	1802
Way Sukamaju	2091
Way Sukapandang	5693
Way Sukarja	509
Way Sumur	958
Way Sumurbatu	476
Way Tabakah	4473
Way Tampang	717
Way Tampangkanan	367
Way Tanjungan	340
Way Tanjungbatang	800
Way Tanjungheni	839
Way Tanjungwalur	529

Nama DAS	Luas (Ha)
Way Tarahan 1	456
Way Tarahan 2	1564
Way Tarahanbesar	188
Way Tarahankiri	145
Way Telukpandan	1903
Way Temuli	23971
Way Tenubang	29079
Way Terusan	513
Way Terusan Hilir	300
Way Tirompedada	820
Way Titan	9404
Way Titandakan	1397
Way Tridarmayuga	1478
Way Tunggal	239
Way Tunggaldua	275
Way Tuolunik	354
Way Umbar	9066
Way Urang	1481
Way Walur	650
Waycukuhbalak	1352
Waykarwidua	283
Total	3.371.069

Sumber: Rupa Bumi Indonesia



Gambar 3.2 Peta Hidrologi Provinsi Lampung

Tutupan Lahan meliputi Perubahan Tutupan Lahan dan Perkembangan Tutupan Lahan. Tutupan lahan dapat diartikan sebagai jenis hamparan obyek yang menutupi permukaan bumi (terdiri dari lahan terbangun dan non terbangun). Tutupan lahan mengacu pada kenampakan fisik permukaan bumi, seperti badan air, bebatuan, lahan terbangun, dan sebagainya (Syahbana, 2013). Sedangkan penggunaan lahan adalah jenis kegiatan yang berlangsung di permukaan bumi, seperti permukiman, sawah, dan sebagainya.

Tutupan lahan terbesar di Provinsi Lampung adalah Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas 1.230.492,84 Ha. Dominasi tutupan lahan selanjutnya yaitu Pertanian Lahan Kering dengan luas total 666.771,08 Ha.

Tabel 3.3 Tutupan Lahan Provinsi Lampung

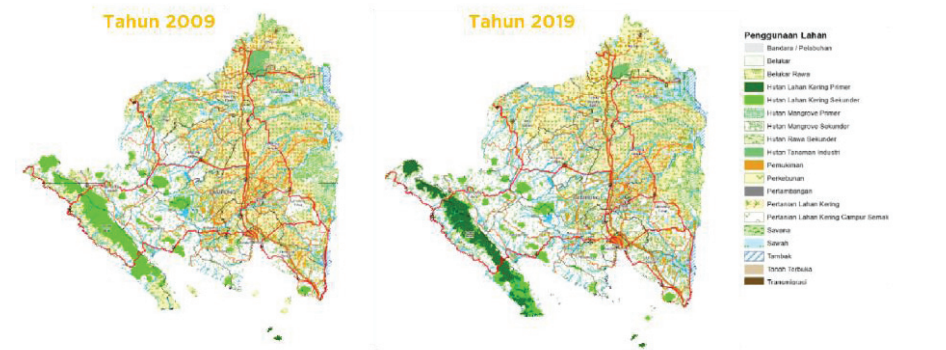
Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bandara/Pelabuhan	344,79	0.01
Belukar	95.227,48	2.86
Belukar Rawa	168.765,36	5.06
Hutan Lahan Kering Primer	136.407,22	4.09
Hutan Lahan Kering Sekunder	105.905,29	3.18
Hutan Mangrove Primer	3,82	0.00
Hutan Mangrove Sekunder	6.226,42	0.19
Hutan Rawa Sekunder	39.961,06	1.20
Hutan Tanaman	14.531,86	0.44
Pemukiman	276.364,28	8.29
Perkebunan	285.261,49	8.56
Pertambangan	292,80	0.01
Pertanian Lahan Kering	666.771,08	20.00
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1.230.492,84	36.91
Savana/Padang rumput	29,01	0.00
Sawah	250.538,64	7.52
Tambak	37.341,82	1.12
Tanah Terbuka	18.090,42	0.54
Transmigrasi	1.050,46	0.03
Luas Total	3.333.606,12	100

Sumber: Rupa Bumi Indonesia

Perubahan Tutupan Lahan berdasarkan peta tahun 2009 dan 2019, untuk klasifikasi tutupan lahan dan pengamatan kebenaran objek-objek tutupan lahan secara visual di lapangan teridentifikasi menjadi 19 kelas tutupan lahan. Dari gambar berikut, dapat dilihat bahwa sepanjang 10 tahun, perkembangan kawasan perkotaan atau kawasan permukiman di Provinsi Lampung terjadi pada beberapa kabupaten/ kota diantaranya Kabupaten Pesisir Barat.

Luasan lahan tidak terbangun (91,7%) lebih luas jika dibandingkan

dengan luasan lahan terbangun (8,3%). Lahan pemukiman mengalami perubahan luasan yang signifikan dari 233.302,26 Ha pada tahun 2009 menjadi 276.364,28 Ha pada tahun 2019 yang berpusat di Kota Bandar Lampung.



Gambar 3.3 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2009-2019

Sumber: Rupa Bumi Indonesia

Perkembangan Tutupan Lahan dapat dilihat dari luas lahan terbangun mengalami peningkatan dari 7,02% pada tahun 2009 menjadi 8,3% pada tahun 2019.

Tabel 3.4 Perkembangan Tutupan Lahan Provinsi Lampung

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		Persentase (%)		GAP
	2009	2019	2009	2019	
Belukar	265.880,46	95.227,48	8,00	0,01	-170.652,98
Belukar Rawa	222.160,79	168.765,36	6,69	2,86	-53.395,44
Hutan Lahan Kering Primer	2.443,13	136.407,22	0,07	5,06	133.964,08
Hutan Lahan Kering Sekunder	203.782,97	105.905,29	6,13	4,09	-97.877,68
Hutan Mangrove Sekunder	524,61	6.226,42	0,02	3,18	5.701,80
Hutan Rawa Sekunder	44.295,86	39.961,06	1,33	0,00	-4.334,81
Hutan Tanaman	31.919,11	14.531,86	0,96	0,19	-17.387,25
Pemukiman	233.302,26	276.364,28	7,02	1,20	43.062,01
Perkebunan	178.508,98	285.261,49	5,37	0,44	106.752,51
Pertambangan	450,34	292,80	0,01	8,29	-157,54
Pertanian Lahan Kering	926.477,77	666.771,08	27,89	8,56	-259.706,69
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	989.205,87	1.230.492,84	29,78	0,01	241.286,97

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		Persentase (%)		GAP
	2009	2019	2009	2019	
Savana / Padang Rumput	117.493,11	29,01	3,54	20,00	-117.464,10
Sawah	55.532,73	250.538,64	1,67	36,91	195.005,92
Tambak	36.985,61	37.341,82	1,11	0,00	356,21
Tanah Terbuka	12.856,62	18.090,42	0,39	7,52	5.233,80
Transmigrasi	0,13	1.050,46	0,00	1,12	1.050,33
Bandara / Pelabuhan		344,79		0,54	344,79
Hutan Mangrove Primer		3,82		0,03	3,82

 = Tidak ada data

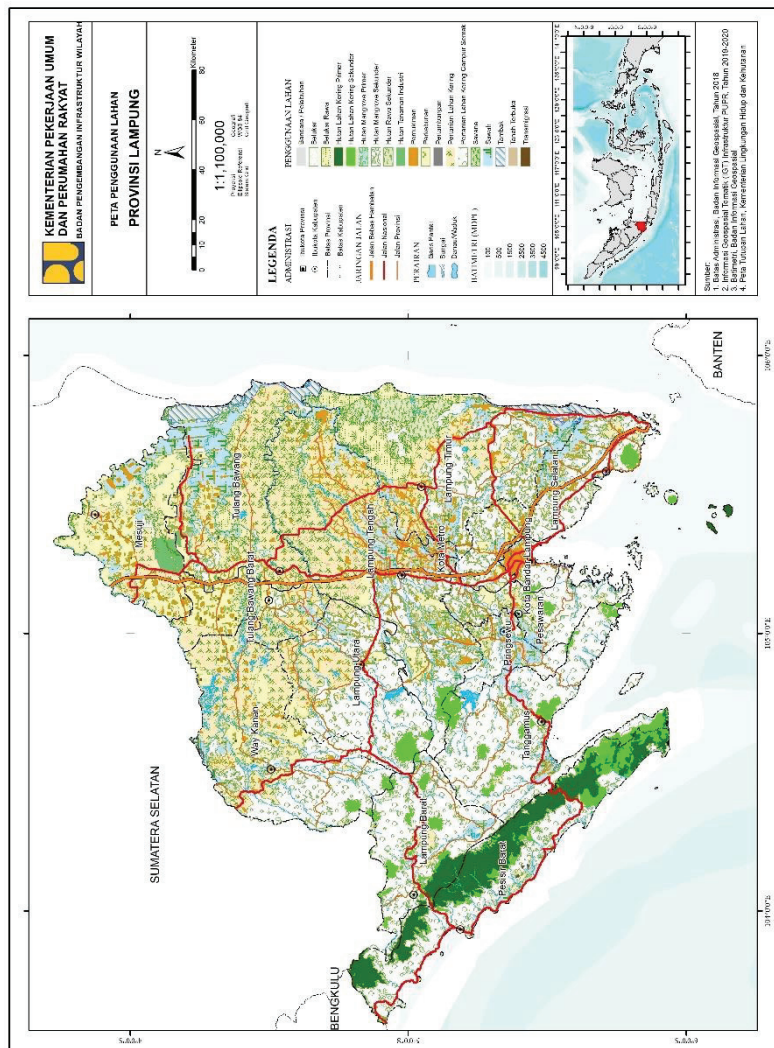
 = Lahan berkurang di tahun 2019

 = Lahan bertambah di tahun 2019

Sumber: Rupa Bumi Indonesia



Gambar 3.4 Peta Tutupan Lahan Tahun 2009 Provinsi Lampung



Gambar 3.5 Peta Tutupan Lahan Tahun 2019 Provinsi Lampung

Pada Kondisi Kebencanaan, berdasarkan data *InaRISK*, diketahui bahwa wilayah Provinsi Lampung memiliki bahaya bencana, meliputi banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, likuifasi dan tanah longsor.

Tabel 3.5 Bahaya Banjir Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	1.686,78	342,33	151,70	2.180,81
Kota Metro	2.180,51	536,10	314,44	3.031,04
Lampung Barat	5.897,61	1.074,76	715,78	7.688,16
Lampung Selatan	36.470,06	5.562,72	3.328,61	45.361,40
Lampung Tengah	96.597,11	21.980,29	14.122,73	132.700,13
Lampung Timur	91.927,26	13.300,15	9.080,90	114.308,32
Lampung Utara	353.78,00	6276,33	3.956,01	45.610,34
Mesuji	93.480,97	15.044,61	8.244,60	116.770,18
Pesawaran	9.893,64	1.709,12	1.121,94	12.724,71
Pesisir Barat	9.956,04	1.507,63	943,13	12.406,80
Pringsewu	8.330,15	1.083,37	739,92	10.153,44
Tanggamus	8.807,20	1.403,33	989,07	11.199,60
Tulang Bawang	125.793,56	13.656,37	7.955,05	147.404,99
Tulang Bawang Barat	32.335,36	5.050,48	2.856,06	40.241,90
Way Kanan	41.031,15	5.707,86	2.435,11	49.174,12
Provinsi Lampung	599.765,40	94.235,47	56.955,05	750.955,93

Sumber: *InaRISK BNPB*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana Banjir. Bahaya bencana banjir diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan data dari *InaRISK* Badan Nasional Penanggulangan Bencana 79,86% dari luas kawasan bahaya banjir termasuk dalam klasifikasi rendah; 12,54% termasuk klasifikasi bahaya bencana banjir sedang; dan 7,58% luas wilayahnya termasuk dalam klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana banjir.

Tabel 3.6 Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	11.311,67	1.456,46	1.105,06	13.873,20
Kota Metro	7.313,96	39,52		7.353,48
Lampung Barat	21.424,52	8.381,38	8.038,37	37.844,26
Lampung Selatan	148.966,15	36.120,02	5.006,82	190.092,99
Lampung Tengah	411.600,78	13.993,27	2.123,09	427.717,15
Lampung Timur	331.270,67	27.035,59	5.139,49	363.445,75
Lampung Utara	187.999,53	36.057,10	2.503,11	226.559,74
Mesuji	207.466,31	12.895,30	662,17	221.023,78
Pesawaran	36.622,76	8.385,05	2.949,20	47.957,01

Kabupaten/Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Pesisir Barat	34.779,11	16.661,93	6.213,04	57.654,08
Pringsewu	32.509,65	9.107,68	3.200,25	44.817,57
Tanggamus	33.658,26	18.189,92	9.928,63	61.776,81
Tulang Bawang	301.444,40	9.386,52	715,38	311.546,30
Tulang Bawang Barat	114.983,78	12.076,62	1.508,23	128.568,63
Way Kanan	225.767,19	77.648,19	10.609,81	314.025,18
Provinsi Lampung	2.107.118,74	287.434,55	59.702,63	2.454.255,93

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana cuaca ekstrim, Bahaya cuaca ekstrem diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan data dari *InaRISK* Badan Nasional Penanggulangan Bencana 85,86% dari luas kawasan bahaya banjir termasuk dalam klasifikasi rendah; 11,71% termasuk klasifikasi bahaya bencana banjir sedang; dan 2,58% luas wilayahnya termasuk dalam klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana cuaca ekstrem.

Tabel 3.7 Bahaya Kekeringan Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	47,06	-	18.360,35	18.407,41
Kota Metro	-	-	7.353,48	7.353,48
Lampung Barat	13.560,15	30.148,97	168.818,95	212.528,06
Lampung Selatan	433,34	-	222.197,09	222.630,42
Lampung Tengah	-	-	456.890,39	456.890,39
Lampung Timur	103,57	-	387.950,53	388.054,10
Lampung Utara	-	-	266.806,56	266.806,56
Mesuji	22.144,78	27.044,57	171.834,43	221.023,78
Pesawaran	333,70	-	128.063,19	128.396,89
Pesisir Barat	40.679,33	26.093,62	233.647,54	300.420,50
Pringsewu	-	-	61.765,40	61.765,40
Tanggamus	406,00	-	291.022,24	291.428,23
Tulang Bawang	78,17	-	311.910,96	311.989,13
Tulang Bawang Barat	32,04	-	128.677,74	128.709,77
Way Kanan	60.055,37	79.349,07	215.260,67	354.665,12
Provinsi Lampung	137.873,48	162.636,23	3.070.559,52	3.371.069,24

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana kekeringan. Bahaya kekeringan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan data dari *InaRISK* Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4,08% dari luas kawasan bahaya kekeringan termasuk dalam klasifikasi

rendah; 4,28% termasuk klasifikasi bahaya bencana kekeringan sedang; dan 91,08% luas wilayahnya termasuk dalam klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana kekeringan.

Tabel 3.8 Bahaya Likuifaksi Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	382,01	825,76	185,05	1.392,81
Lampung Selatan	7.787,67	17.221,25	838,30	25.847,22
Lampung Tengah	31.825,50	1.993,61	27,40	33.846,52
Lampung Timur	56.779,90	26.962,54	463,30	84.205,73
Lampung Utara	2.905,16	109,81	-	3.014,98
Pesawaran	2.659,57	3.077,16	394,56	6.131,29
Pesisir Barat	1.456,24	5.451,86	1.798,39	8.706,50
Pringsewu	5.593,26	4.081,79	120,13	9.795,17
Tanggamus	7.618,98	4.726,55	789,67	13.135,20
Tulang Bawang	108.256,22	-	-	108.256,22
Tulang Bawang Barat	14.288,04	1,68	-	14.289,73
Way Kanan	15.665,56	3.063,29	431,87	19.160,71
Provinsi Lampung	255.218,10	67.515,31	5.048,67	327.782,08

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 12 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung memiliki potensi Bahaya Bencana Likuifaksi. Kabupaten/kota yang tidak memiliki potensi bahaya bencana likuifaksi ialah Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Mesuji. Seluas 327.782,08 Ha kawasan di Provinsi Lampung memiliki potensi bahaya bencana likuifaksi dengan rincian 77,86% berklasifikasi rendah; 20,60% berklasifikasi sedang; dan 1,54% berklasifikasi tinggi.

Tabel 3.9 Bahaya Tanah Longsor Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	2.632,55	231,20	254,90	3.118,65
Lampung Barat	127.990,92	9.518,35	13.354,95	150.864,23
Lampung Selatan	15.713,01	2.095,92	2.060,89	19.869,82
Lampung Tengah	18.575,25	1.950,34	3.029,00	23.554,59
Lampung Timur	19,23	16,88	5,26	41,37
Lampung Utara	30.044,81	2.456,87	3.805,93	36.307,60
Pesawaran	45.722,14	3.367,17	4.824,73	53.914,03
Pesisir Barat	151.925,14	16.196,31	25.406,70	193.528,16
Pringsewu	13.991,34	587,22	432,57	15.011,13
Tanggamus	169.823,78	9.609,71	15.861,20	195.294,69

Kabupaten/ Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Tulang Bawang Barat	20,64	20,28	11,53	52,45
Way Kanan	31.346,99	2.736,37	2.580,66	36.664,02
Provinsi Lampung	607.805,79	48.786,63	71.628,32	728.220,75

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 12 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung memiliki potensi Bahaya Bencana Tanah Longsor. Kabupaten/ kota yang tidak memiliki potensi bahaya bencana tanah longsor ialah Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang. Seluas 782.220,75 Ha kawasan di Provinsi Lampung memiliki potensi bahaya bencana tanah longsor dengan rincian 83,46% berklasifikasi rendah; 6,70% berklasifikasi sedang; dan 9,83% berklasifikasi tinggi.

Tabel 3.10 Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	4.164,19	5,77	-	4.169,96
Kota Metro	1.969,86	-	-	1.969,86
Lampung Barat	165.341,33	3.876,76	520,24	169.738,33
Lampung Selatan	33.076,49	80.940,43	33.573,97	147.590,89
Lampung Tengah	73.583,55	98.477,61	179.995,84	352.056,99
Lampung Timur	47.368,46	110.279,51	142.137,77	299.785,74
Lampung Utara	51.808,70	108.334,45	66.244,33	226.387,47
Mesuji	1.751,64	12.198,78	178.582,67	192.533,10
Pesawaran	67.626,89	30.238,25	4981,00	102.846,15
Pesisir Barat	85.952,14	55.947,21	21.174,82	163.074,17
Pringsewu	34.005,53	7.662,42	349,48	42.017,43
Tanggamus	221.442,97	33.340,72	2.218,62	257.002,32
Tulang Bawang	940,34	37.877,15	210.267,35	249.084,83
Tulang Bawang Barat	252,74	20.992,33	86.811,27	108.056,34
Way Kanan	48.438,42	95.685,19	173.379,96	317.503,56
Provinsi Lampung	837.723,25	695.856,57	1.100.237,31	2.633.817,14

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan

kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Bahaya kebakaran hutan dan lahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung, berdasarkan data dari *InaRISK* Badan Nasional Penanggulangan Bencana 31,81% dari luas kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam klasifikasi rendah; 26,42% termasuk klasifikasi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan sedang; dan 41,77% luas wilayahnya termasuk dalam klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3.11 Bahaya Gempa Bumi Provinsi Lampung

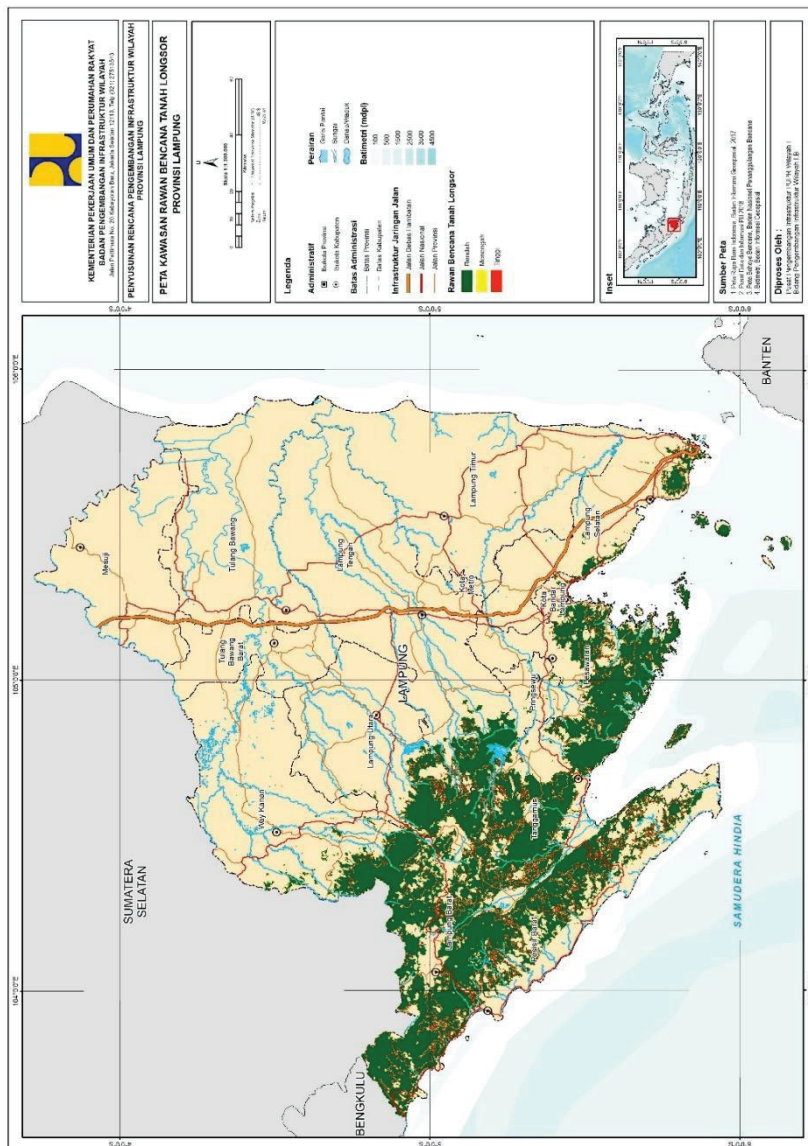
Kabupaten/Kota	Klasifikasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Bandar Lampung	3.715,06	222,28	14.439,18	1.8376,52
Kota Metro	2.223,56	4.469,07	660,84	7.353,48
Lampung Barat	41.686,66	227,83	170.551,28	212.465,76
Lampung Selatan	89.388,65	431,88	132.493,26	222.313,80
Lampung Tengah	358.757,01	42.268,60	55.864,78	456.890,39
Lampung Timur	294.496,89	34.204,10	58.896,30	387.597,29
Lampung Utara	225.069,32	17.910,17	23.827,07	266.806,56
Mesuji	220.862,86	-	-	220.862,86
Pesawaran	51.080,32	171,96	76.875,39	128.127,66
Pesisir Barat	176.013,48	-	124.098,02	300.111,50
Pringsewu	15.902,74	74,58	45.788,08	61.765,40
Tanggamus	55.564,78	65,03	235.515,25	291.145,06
Tulang Bawang	310.858,90	1.052,84	-	311.911,74
Tulang Bawang Barat	120.031,29	8.645,73	-	128.677,02
Way Kanan	315.200,51	11.286,48	27.957,04	354.444,03
Provinsi Lampung	2.280.852,03	121.030,55	966.966,50	3.368.849,08

Sumber: *InaRISK* BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana gempa bumi. Bahaya gempa bumi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan data dari *InaRISK* Badan Nasional Penanggulangan Bencana 67,70% dari luas kawasan bahaya gempa bumi termasuk dalam klasifikasi rendah; 3,59% termasuk klasifikasi bahaya bencana gempa bumi sedang; dan 28,70% luas wilayahnya termasuk dalam klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana gempa bumi.



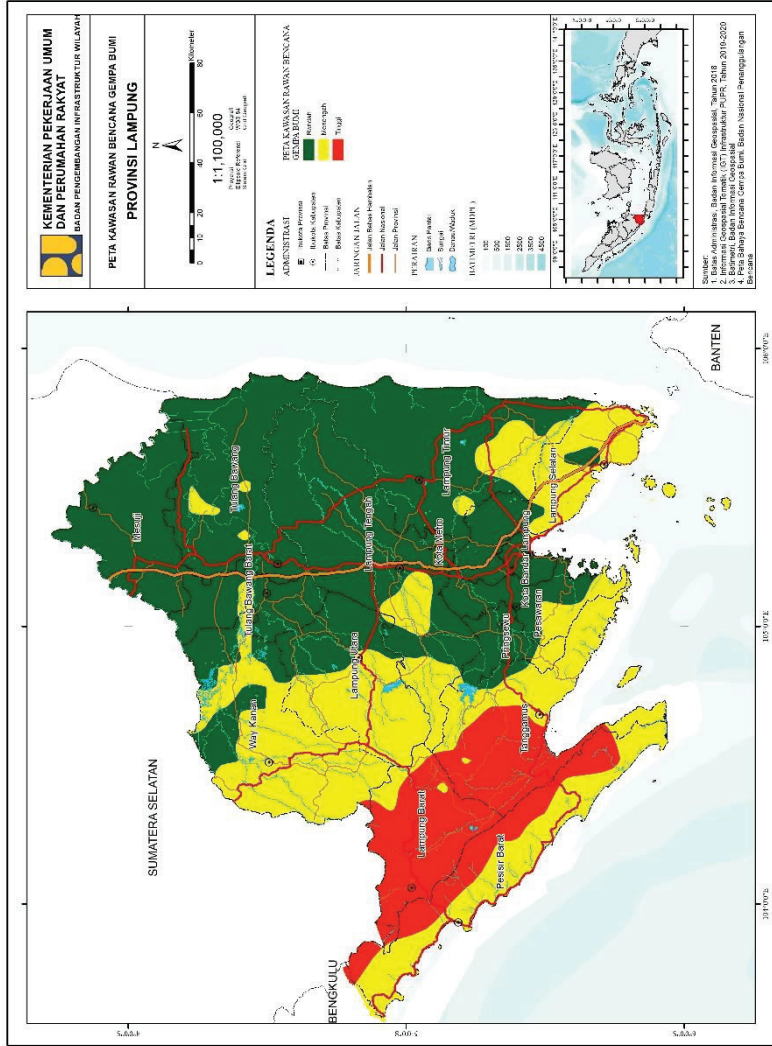
Gambar 3.6 Peta Bahaya Banjir Provinsi Lampung



Gambar 3.10 Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor Provinsi Lampung



Gambar 3.11 Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung



Gambar 3.12 Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung

3.2. Profil Demografi

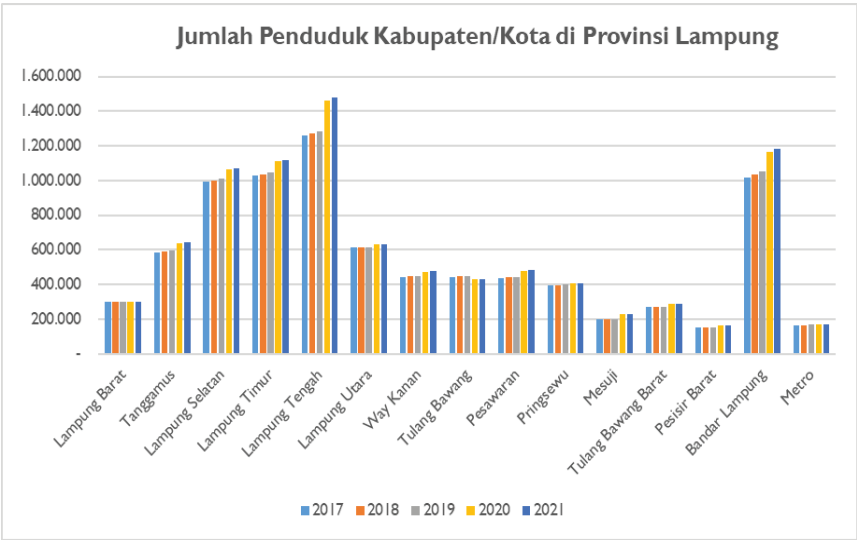
Perkembangan Jumlah Penduduk dapat dilihat berdasarkan data jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

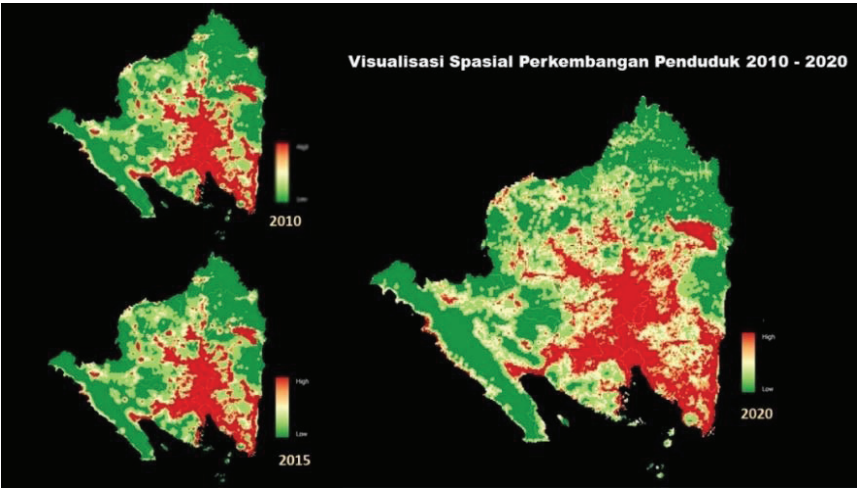
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	300.703	302.828	302.139	302.749
Tanggamus	592.603	598.299	640.275	645.807
Lampung Selatan	1.002.285	1.011.286	1.064.301	1.071.727
Lampung Timur	1.036.193	1.044.320	1.110.340	1.118.115
Lampung Tengah	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
Lampung Utara	614.701	616.897	633.099	634.117
Way Kanan	446.113	450.109	473.575	476.871
Tulang Bawang	445.797	450.902	430.021	430.630
Pesawaran	440.192	444.380	477.468	481.708
Pringsewu	397.219	400.187	405.466	406.823
Mesuji	199.168	200.198	227.518	229.772
Tulang Bawang Barat	271.206	273.215	286.162	287.707
Pesisir Barat	153.743	154.895	162.697	163.641
Bandar Lampung	1.033.803	1.051.500	1.166.066	1.184.949
Metro	165.193	167.411	168.676	169.781

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2018-2021 dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 1.477.395 jiwa, diikuti dengan Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sejumlah 1.184.949 jiwa. Perkembangan penduduk setiap kabupaten/ kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021
Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022



Gambar 3.14 Visualisasi Spasial Perkembangan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010-2020
Sumber: WorldPop diolah, 2022

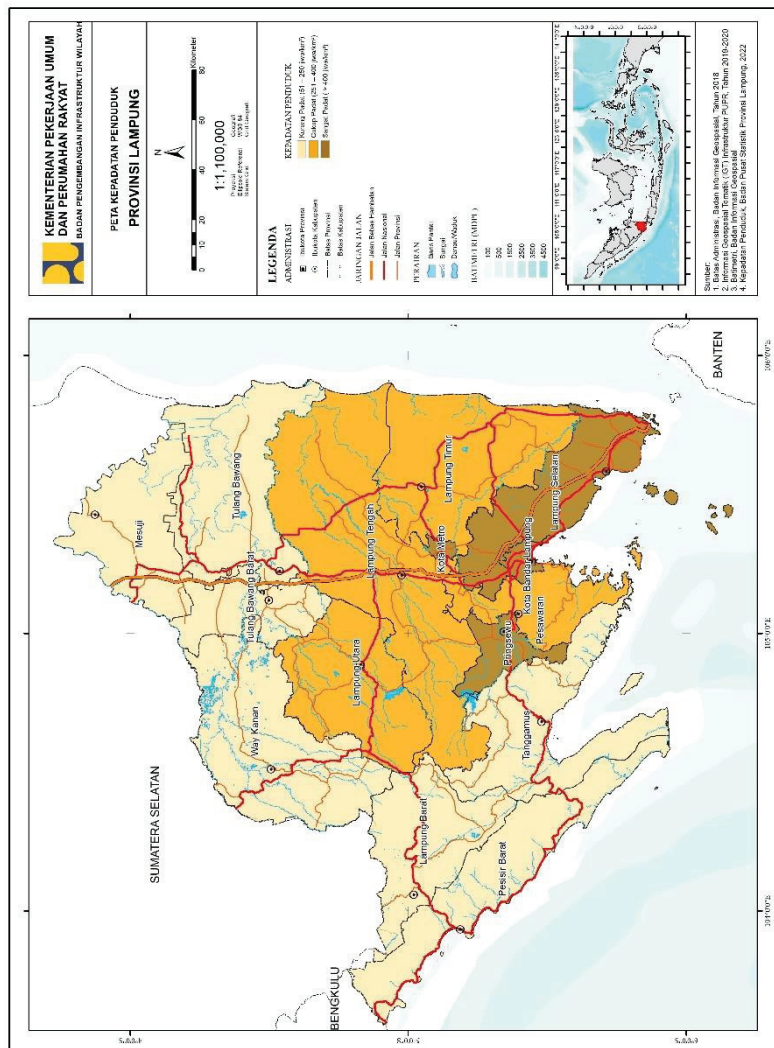
Kepadatan Penduduk dilakukan untuk membandingkan besarnya angka kelahiran dan kematian serta dapat menghitung mortalitas dan natalitas penduduk. Selain itu, juga dapat menghitung persentase pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Berikut adalah tabel kepadatan penduduk Provinsi Lampung:

Tabel 3.13 Kepadatan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010–2021

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	
	2010	2021
Lampung Barat	130,88	142,89
Tanggamus	185,02	222,67
Lampung Selatan	411,13	483,88
Lampung Timur	246,24	289,32
Lampung Tengah	257,64	325,13
Lampung Utara	230,98	250,68
Way Kanan	111,04	130,38
Tulang Bawang	128,73	139,31
Pesawaran	312,04	376,86
Pringsewu	594,60	662,06
Mesuji	84,98	104,19
Tulang Bawang Barat	194,99	223,77
Pesisir Barat	47,44	54,76
Kota Bandar Lampung	4.810,44	169.781
Kota Metro	1.988,67	169.781
Provinsi Lampung	268,46	270,67

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2021

Kota Bandar Lampung menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 6.464,18 jiwa/km². Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi memiliki beragam kegiatan yang menarik masyarakat untuk tinggal. Hal inilah yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi dengan luas Kota Bandar Lampung yang dapat dikategorikan kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar 54,76 jiwa/km².



Gambar 3.15 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Lampung

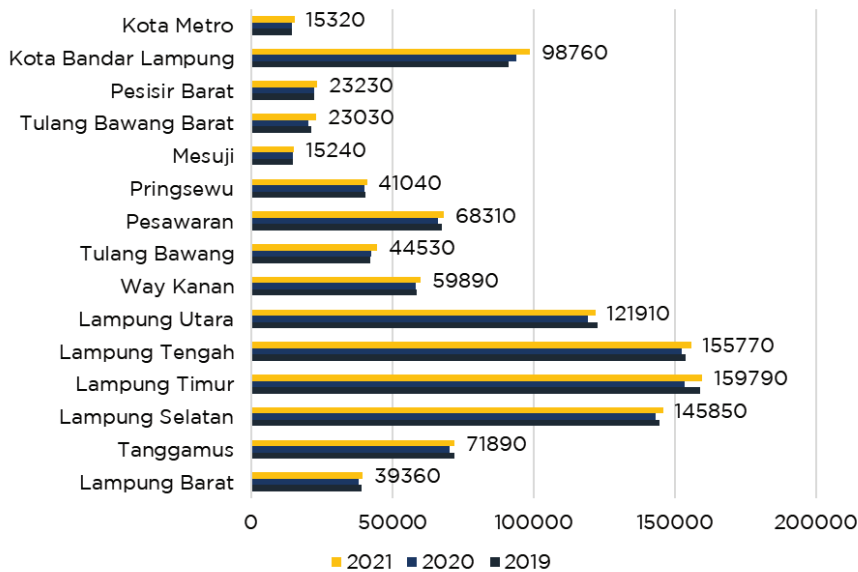
Laju Penurunan Jumlah Penduduk Miskin merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan, sehingga harus diketahui bagaimana perkembangan jumlah miskin dari tahun ke tahun serta persentasenya guna kebijakan yang diambil tepat sasaran. Berikut tabel data jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung:

Tabel 3.14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	39.050	38.120	39.360
Tanggamus	71.900	70.370	71.890
Lampung Selatan	144.440	143.330	145.850
Lampung Timur	158.900	153.570	159.790
Lampung Tengah	153.840	152.280	155.770
Lampung Utara	122.650	119.350	121.910
Way Kanan	58.720	58.410	59.890
Tulang Bawang	42.060	42.430	44.530
Pesawaran	67.360	66.040	68.310
Pringsewu	40.550	40.120	41.040
Mesuji	14.940	14.720	15.240
Tulang Bawang Barat	21.140	20.290	23.030
Pesisir Barat	22.380	22.240	23.230
Kota Bandar Lampung	91.240	93.740	98.760
Kota Metro	14.490	14.310	15.320

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung terdapat pada Kabupaten Lampung Timur. Adapun total penduduk miskin di Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.083.920 jiwa atau sebesar 11,94% dari total jumlah penduduk keseluruhan di Provinsi Lampung.



Gambar 3.16 Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

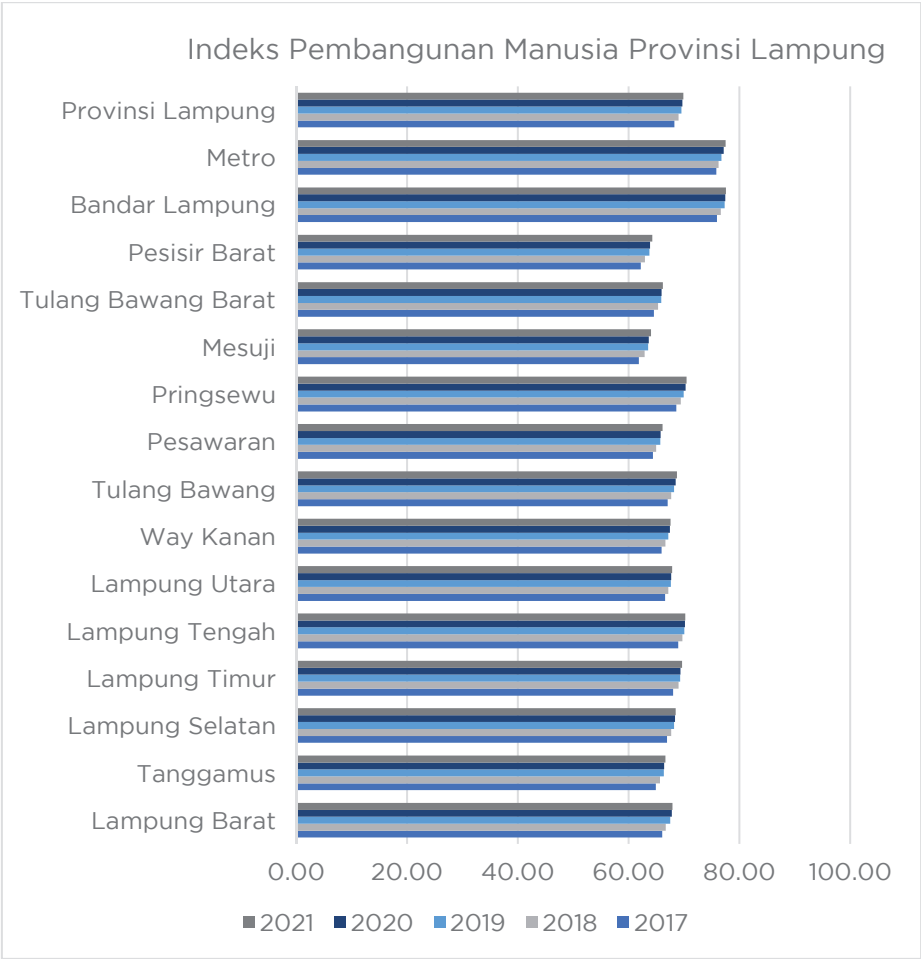
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Lampung adalah 67,65 meningkat menjadi 68,25 pada tahun 2017. Nilai IPM pada tahun 2018 sebesar 69,02 juga meningkat menjadi 69,57 di tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 69,69. Hingga pada penghitungan IPM tahun 2021 tercatat Provinsi Lampung memiliki IPM sebesar 69,90 Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Lampung Barat	67,5	67,8	67,9
Tanggamus	66,37	66,42	66,65
Lampung Selatan	68,22	68,36	68,49
Lampung Timur	69,34	69,37	69,66
Lampung Tengah	70,04	70,16	70,23
Lampung Utara	67,63	67,67	67,89
Way Kanan	67,19	67,44	67,57
Tulang Bawang	68,23	68,52	68,73
Pesawaran	65,75	65,79	66,14

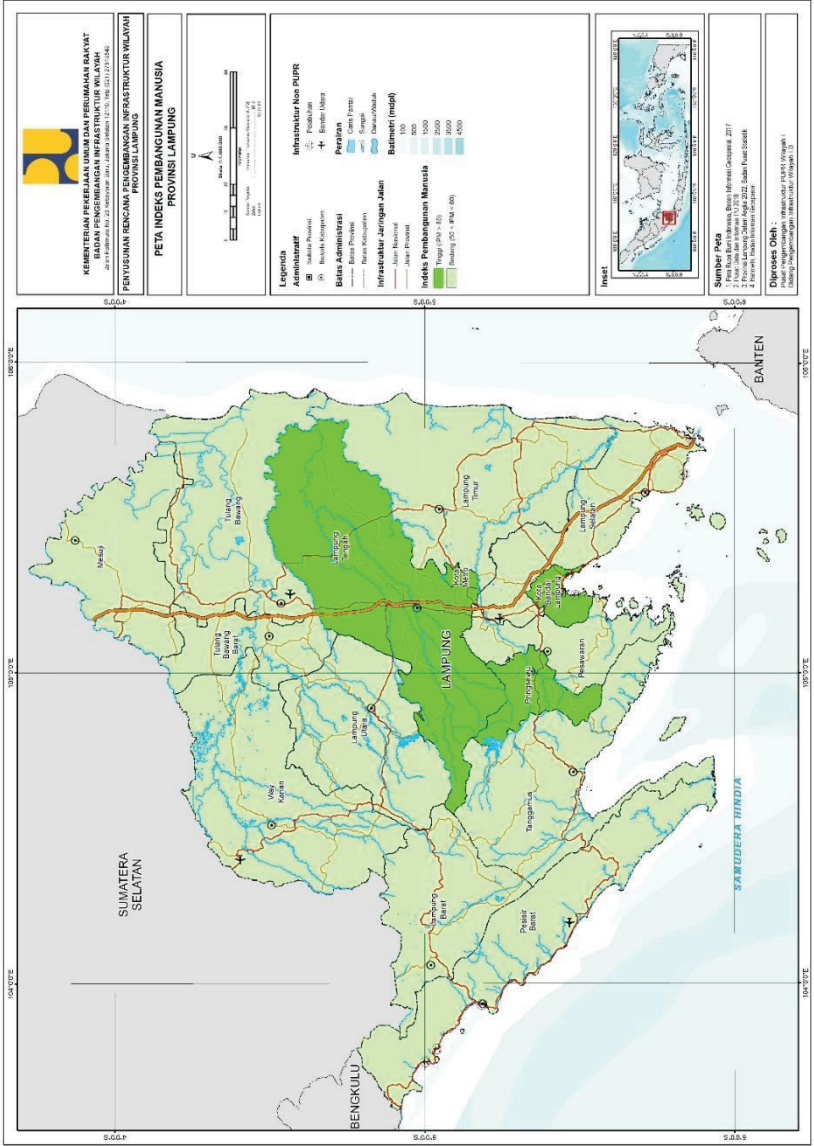
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Pringsewu	69,97	70,3	70,45
Mesuji	63,52	63,63	64,04
Tulang Bawang Barat	65,93	65,97	66,22
Pesisir Barat	63,79	63,91	64,3
Bandar Lampung	77,33	77,44	77,58
Metro	76,77	77,19	77,49

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022



Gambar 3.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022



Gambar 3.18 Peta Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

3.3. Profil Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi menjadi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK merupakan PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Sedangkan PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini. Berikut adalah tabel PDRB Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.16 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	16.439 504	16.311.641	16.691.464
Tanggamus	18.154 634	16.723.989	16.916.481
Lampung Selatan	29.891 130	28.005.367	28.497.195
Lampung Timur	28.313 977	26.111.509	25.936.870
Lampung Tengah	37.296 029	32.552.298	32.970.220
Lampung Utara	26.735 172	25.705.376	26.379.819
Way Kanan	21.242 821	20.022.703	20.417.471
Tulang Bawang	35.041 182	36.317.711	37.300.970
Pesawaran	25.630 113	23.645.335	23.857.801
Pringsewu	19.325 688	18.877.941	19.345.420
Mesuji	34.954 161	30.470.823	30.932.026
Tulang Bawang Barat	28.712 977	27.115.559	27.704.508
Pesisir Barat	20.042 907	18.899.297	19.146.727
Bandar Lampung	37.387 261	33.305.748	33.603.217
Metro	25.709 051	25.156.671	25.670.636
Provinsi Lampung	28.894 502	26.743.751	27.197.459

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa urutan 5 (lima) terbesar penyumbang PDRB terhadap Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Selatan. Urutan PDRB Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Kabupaten Tulang Bawang tetap menjadi kabupaten dengan nilai PDRB tertinggi. Selain PDRB ADHK, terdapat PDRB ADHB di Provinsi

Lampung. PDRB ADHB di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	23.404.088	23.614.681	24.714.990
Tanggamus	26.034.307	24.224.635	25.297.765
Lampung Selatan	44.129.169	41.704.922	43.307.952
Lampung Timur	39.797.485	36.710.498	38.323.275
Lampung Tengah	55.368.656	48.861.769	50.315.555
Lampung Utara	38.512.596	37.549.879	39.212.125
Way Kanan	31.022.091	29.594.040	30.746.033
Tulang Bawang	51.065.626	53.691.359	56.118.778
Pesawaran	36.433.510	34.047.403	34.965.125
Pringsewu	27.851.928	27.563.217	28.666.813
Mesuji	51.934.466	45.812.389	47.414.096
Tulang Bawang Barat	41.859.787	39.971.513	41.571.981
Pesisir Barat	30.246.494	28.889.489	30.062.936
Bandar Lampung	56.217.749	50.753.356	51.903.009
Metro	37.683.219	37.361.032	38.737.510
Provinsi Lampung	42.172.315	39.346.531	40.950.417

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha pada setiap Kabupaten/ Kota yang dibandingkan dengan PDRB Lapangan Usaha Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota tiap Sektor terhadap PDRB Provinsi tiap Sektor (Persen)

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota tiap Sektor terhadap PDRB Provinsi tiap Sektor (Persen)														
Lapangan Usaha	Bandar Lampung	Metro	Way Kanan	Mesuji	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Tulang Bawang	Tulang Bawang Barat	Pesawaran	Pringsewu
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	2,19	0,33	4,82	4,32	3,50	6,34	12,61	14,45	23,55	8,53	8,63	3,93	6,85	2,68
B. Pertambangan dan Penggalian	8,43	0,00	3,49	0,32	0,89	5,77	3,67	52,95	17,44	4,36	1,34	0,29	1,03	0,06
C. Industri Pengolahan	17,27	1,49	4,54	3,67	0,54	1,56	15,46	5,19	24,70	4,99	8,50	4,96	3,51	2,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15,65	1,81	2,79	2,55	0,23	2,07	10,91	38,35	15,51	3,72	5,05	0,98	1,85	1,63
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	42,75	0,99	2,06	0,75	2,09	5,11	14,28	6,32	6,80	3,61	3,09	2,85	2,74	1,61
F. Konstruksi	18,17	1,21	3,46	2,33	0,89	3,27	15,73	6,91	22,18	5,75	5,75	2,83	4,79	3,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,67	2,49	3,36	2,78	2,17	4,06	13,23	8,93	16,73	7,04	5,70	3,06	5,52	3,96
H. Transportasi dan Perhubungan	41,49	2,71	2,15	1,00	1,06	4,58	12,34	4,53	10,48	7,27	4,76	0,54	2,50	2,84
I. Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman	25,87	2,91	2,18	1,80	1,64	5,25	11,50	8,36	13,33	5,54	5,84	1,94	4,03	5,20
J. Informasi dan Komunikasi	23,92	2,98	3,66	1,41	1,49	3,52	9,06	9,80	15,83	7,42	4,96	3,27	3,29	3,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	35,50	5,89	1,84	0,47	1,75	3,99	10,30	7,26	14,69	5,92	3,77	0,83	0,87	6,01
L. Real Estate	32,66	3,75	3,26	2,28	3,13	4,37	9,51	8,60	12,49	6,10	4,42	2,33	3,36	4,26
M,N. Jasa Perusahaan	39,61	8,34	1,46	0,35	2,63	2,56	7,38	6,28	14,88	4,95	2,04	1,63	1,95	5,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,23	3,68	4,11	2,23	3,88	6,02	8,07	10,09	9,54	7,15	5,18	2,65	4,81	3,80
P. Jasa Pendidikan	17,63	3,33	3,98	2,00	2,89	6,47	9,93	10,35	15,77	8,55	3,86	2,70	5,24	5,78
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,16	3,47	4,02	1,29	2,80	6,50	7,11	8,00	10,41	6,37	2,63	1,47	2,97	4,66

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota tiap Sektor terhadap PDRB Provinsi tiap Sektor (Persen)													
Lapangan Usaha	Bandar Lampung	Met ro	Way Kanan	Mesuji	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Tulang Bawang	Tulang Bawang Barat	Pesawaran
R.S.T.U. Jasa lainnya	30,92	12,14	2,40	1,25	3,42	5,68	7,84	12,15	11,95	5,60	2,71	1,63	3,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16,12	1,76	3,94	2,88	2,05	4,42	12,36	11,74	19,72	6,77	6,50	3,23	4,65
													3,19
													1,27

*Tabel berwarna merah merupakan 3 Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi tertinggi

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari hasil perhitungan analisis tersebut didapatkan beberapa hasil yaitu:

- Kabupaten Lampung Tengah memiliki distribusi persentase PDRB paling tinggi di Provinsi Lampung;
- Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki *share* PDRB tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sektor Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi PDRB tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sektor Pertambangan dan Penggalian tertinggi berada di Kabupaten Lampung Timur, dimana perbedaan kontribusinya dengan 14 Kabupaten/Kota lainnya sangat jauh; dan
- Terlihat bahwa kontribusi PDRB di Provinsi Lampung terkonsentrasi oleh Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan.

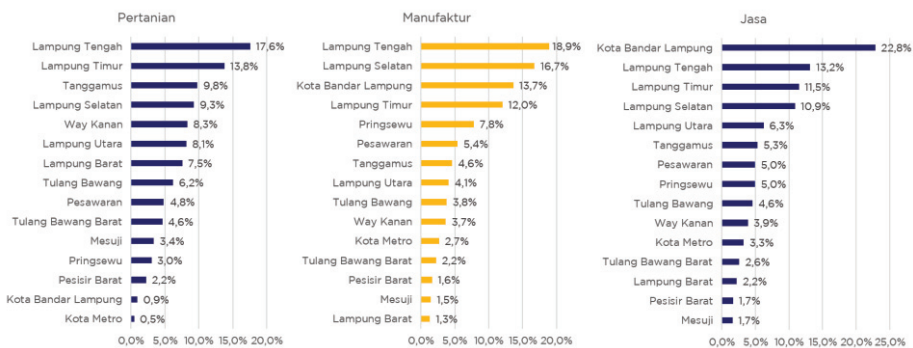
Tabel 3.19 Mata Pencapaian Masyarakat menurut Status Pekerjaan Provinsi Lampung

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama				
	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Jasa Servis	Total
Berusaha Sendiri	357.063	3.609	67.863	415.184	843.719
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	504.075	1.827	48.304	261.326	815.532
Berusaha dibantu Buruh Tetap	24.012	441	24.558	59.678	108.689
Buruh/Karyawan/Pegawai	148.322	6.027	153.106	812.980	1.120.435
Pekerja Bebas	293.562	11.266	41.710	251.121	597.659
Pekerja Keluarga	516.471	926	62.374	218.515	798.286
Total	1.843.505	24.096	397.915	2.018.804	4.284.320
Persentase (%)	43,03%	0,56%	9,29%	47,12%	100,00%

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

*Jasa Service merupakan Jasa Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.

Ditinjau dari Angkatan Kerja, Pekerjaan utama di Provinsi Lampung masih didominasi pada Lapangan Pekerjaan Tersier yaitu di Sektor Jasa Servis sebesar 47,12% dari total angkatan kerja. Jasa Servis di sini merupakan Jasa Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Angkatan kerja terbanyak kedua di dominasi oleh Sektor Primer yaitu di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 43,03% dari total angkatan kerja.

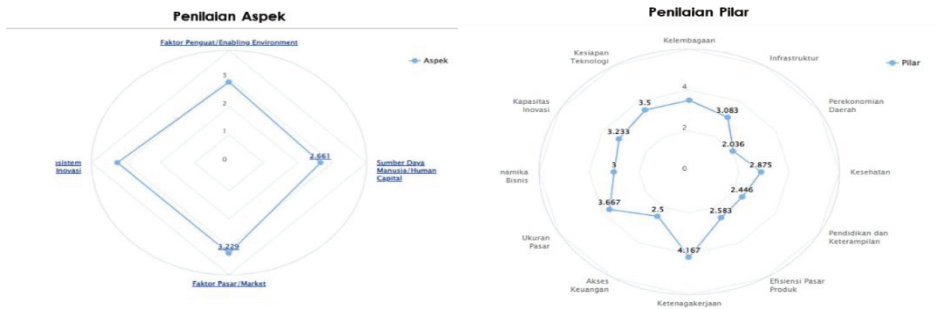


Gambar 3.19 Grafik Mata Pencarian Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Profil Daya Saing Wilayah didasarkan pada Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Penguatan Inovasi yang telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Berikut ini penilaian aspek daya saing wilayah untuk Provinsi Lampung sesuai dengan analisis yang telah dilakukan oleh BRIN pada tahun 2021:



Gambar 3.20 Penilaian Aspek Daya Saing Wilayah Provinsi Lampung

Sumber: BRIN, 2022

Dari keempat penilaian aspek, Provinsi Lampung mendapatkan nilai 3,0020 untuk Daya Saing Wilayah (kategori tinggi). Penilaian pada Aspek Faktor Penguat terdiri dari Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur dan Pilar Perekonomian Daerah memiliki nilai yang tinggi yaitu 2,8730. Untuk nilai Pilar Infrastruktur di Provinsi memiliki nilai tinggi yaitu 3,0830, Pilar Kelembagaan memiliki nilai sangat tinggi yaitu 3,5, namun Pilar Perekonomian Daerah masih rendah yaitu 2,0360. Hal ini berarti, masih buruknya ekosistem inovasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan kinerja perekonomian daerah yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kementerian PUPR dapat membantu dalam pemenuhan infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Potensi Pengembangan Daerah meliputi potensi sektor pertanian dan pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, investasi dan ekspor serta sektor pariwisata.

Sektor Pertanian dan Pangan dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya berupa padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, didapatkan data terkait jumlah produksi hasil pertanian tanaman pangan berupa padi dan palawija dalam satuan ton. Berikut merupakan data produksi tanaman pangan menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2021:

Tabel 3.20 Produksi Tanaman Pangan (Ton) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Padi	Beras	Jagung	Kedelai
Lampung Barat	59.975	34.299	816	477
Tanggamus	128.441	73.455	5.473	1.258
Lampung Selatan	311.045	177.884	563.723	1.205
Lampung Timur	397.256	227.188	433.330	1.639
Lampung Tengah	490.370	280.438	246.805	1.331
Lampung Utara	75.357	43.096	87.664	462
Way Kanan	83.357	47.671	39.439	272
Tulang Bawang	231.830	132.582	5.280	803
Pesawaran	112.216	64.176	66.509	6
Pringsewu	123.977	70.901	28.179	405
Mesuji	339.611	194.221	2.439	1.635
Tulang Bawang Barat	33.806	19.333	2.131	12
Pesisir Barat	57.565	32.921	20.214	254
Bandar Lampung	2.362	1.351	399	0
Metro	25.419	14.537	399	1
Provinsi Lampung	2.472.587	1.414.052	1.502.800	9.760

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebaran produksi padi yang ada di Provinsi Lampung. Diketahui bahwa produksi padi terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah sebesar 490.370 ton dan beras sebesar 280.438 ton. Untuk tanaman pangan berupa jagung dan kedelai, kabupaten dengan hasil produksi terbesar adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 563.723 ton untuk jagung dan 1.639 ton untuk kedelai. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah produksi padi, beras, jagung, dan kedelai paling sedikit adalah Kota Bandar Lampung hanya sebesar 2.362 ton padi, 1.351 ton beras, 399 ton jagung, dan tidak menghasilkan kedelai. Sedikitnya produksi di Kota Bandar Lampung baik berupa padi, beras, jagung, maupun kedelai dapat dipengaruhi oleh fungsi kawasan sebagai wilayah perkotaan dan pusat pemerintahan sehingga kegiatan perekonomian didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

Sektor Perkebunan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar bagi perekonomian daerah. Provinsi Lampung terkenal dengan produksi kelapa sawit dan kopi. Provinsi Lampung juga memiliki beberapa komoditas perkebunan yang tersebar pada masing-masing kabupaten. Persebaran produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21 Luas Area Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung
Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	Karet (Ha)	Kelapa (Ha)	Kelapa Sawit (Ha)	Kopi (Ha)	Kakao (Ha)	Tembakau (Ha)
Lampung Barat	107	511	35	54.106	1.698	10
Tanggamus	595	13.768	30	41.512	13.592	60
Lampung Selatan	7.625	22.275	7.150	715	11.400	38
Lampung Timur	15.358	17.892	7.512	525	10.978	84
Lampung Tengah	11.540	7.001	19.179	523	5.258	24
Lampung Utara	35.349	816	8.025	25.684	864	7
Way Kanan	30.986	4.090	13.772	21.956	1.429	40
Tulang Bawang	32.427	703	18.992	82	206	14
Pesawaran	1.214	11.246	792	3.452	27.415	85
Pringsewu	963	3.487	1.149	1.379	4.585	65
Mesuji	27.513	1.258	21.831	34	88	30
Tulang Bawang Barat	33.179	304	4.109	6	14	6
Pesisir Barat	689	7.293	7.129	6.694	1.148	20
Kota Bandar Lampung	87	364	63	170	515	5
Kota Metro	5	65	1	2	66	2
Provinsi Lampung	197.637	91.073	109.609	156.840	79.256	490

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa area perkebunan di Provinsi Lampung didominasi oleh karet dan kopi. Luas lahan perkebunan karet terbesar berada di Kabupaten Lampung Utara yaitu seluas 35.349 Ha. Sedangkan luas lahan perkebunan kopi terbesar berada di Kabupaten Lampung Barat yaitu seluas 54.106 Ha. Luas lahan dari masing-masing komoditas perkebunan ini tentu memiliki pengaruh bagi jumlah produksi tanaman perkebunan di Provinsi Lampung. Berikut merupakan tabel jumlah produksi tanaman perkebunan di Provinsi Lampung.

**Tabel 3.22 Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung
Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	Karet (ton)	Kelapa (ton)	Kelapa Sawit (ton)	Kopi (ton)	Kakao (ton)	Tembakau (ton)
Lampung Barat	42	628	19	57.930	2.053	7
Tanggamus	256	16.195	44	35.100	6.674	24
Lampung Selatan	7.520	21.815	11.640	427	9.705	27
Lampung Timur	7.089	11.131	8.822	240	3.234	84
Lampung Tengah	4.919	6.258	37.260	298	3.016	36
Lampung Utara	18.985	415	4.650	9.700	260	6
Way Kanan	52.562	2.925	26.664	8.702	622	23
Tulang Bawang	30.976	622	46.807	40	133	14
Pesawaran	1.085	8.350	681	1.358	29.426	84
Pringsewu	463	3.395	817	704	2.626	64
Mesuji	44.135	1.898	36.987	18	47	30
Tulang Bawang Barat	22.303	250	4.100	5	5	5
Pesisir Barat	154	7.891	15.162	3.384	722	2
Kota Bandar Lampung	91	528	150	220	515	7
Kota Metro	1	52	0	1	26	2
Provinsi Lampung	190.581	82.353	193.803	118.127	59.064	415

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komoditas perkebunan utama di Provinsi Lampung adalah karet dan kelapa

sawit. Produsen karet terbesar adalah Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 52.562 ton pada tahun 2020. Komoditas ini berpotensi untuk dijadikan sebagai komoditas ekspor Indonesia. Sedangkan komoditas kelapa sawit paling banyak dihasilkan di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebesar 46.807 ton pada tahun 2020. Kelapa sawit memiliki peran besar bagi perekonomian di Indonesia karena mampu menghasilkan minyak kelapa sawit yang banyak dibutuhkan dalam sektor industri.

Selain komoditas-komoditas di atas, terdapat pula komoditas perkebunan lain, seperti buah-buahan dan sayuran. Pada Provinsi Lampung memiliki beberapa komoditas buah-buahan dan sayuran tahunan. Berikut merupakan tabel produksi perkebunan buah-buahan dan sayuran tahunan Provinsi Lampung tahun 2020.

Tabel 3.23 Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (Kwintal) Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020

Jenis Tanaman	2019	2020
Alpukat	185.018	165.820
Anggur	5	0
Belimbing	37.758	28.578
Duku	61.833	93.670
Durian	162.176	328.430
Jambu Air	50.728	75.449
Jambu Biji	75.795	67.225
Jeruk Besar	20.187	14.504
Jeruk Siam	231.073	229.607
Mangga	255.471	190.331
Manggis	152.491	39.771
Markisa	562	1.219
Nangka	416.282	301.524
Nanas	6.992.430	269.744
Pepaya	1.055.975	855.304
Pisang	12.095.445	7.940.267
Rambutan	219.460	187.378
Salak	51.531	87.594
Sawo	194.748	179.204
Sirsak	17.450	32.778
Sukun	62.140	64.984
Petai	180.033	171.114
Jengkol	153.629	151.890
Melinjo	141.076	140.762

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa produksi buah-buahan tahunan terbesar di Provinsi Lampung adalah buah pisang dengan produksi mencapai 7.940.267 kwintal pada tahun 2020. Sedangkan produksi sayuran tahunan terbesar di Provinsi Lampung adalah jengkol dengan produksi mencapai 151.890

kwintal pada tahun 2020. Selain buah-buahan dan sayuran tahunan, terdapat pula produksi tanaman biofarmaka. Berikut merupakan tabel jenis tanaman biofarmaka di Provinsi Lampung:

**Tabel 3.24 Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kwintal)
Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020**

Jenis Tanaman	2019	2020
Dlingo	33.679	27.554
Jahe	1.363.150	1.730.505
Kapulaga	164.189	50.448
Keji Beling	72.987	30.038
Kencur	5.356.835	3.981.661
Kunyit	763.742	627.455
Laos/Lengkuas	860.202	704.172
Lempuyang	286.913	149.209
Lidah Buaya	77.335	36.791
Mahkota Dewa	994.826	661.164
Mengkudu	114.493	111.618
Sambiloto	92.188	27.619
Temuireng	254.350	104.011
Temukunci	239.623	72.390
Temu Lawak	292.244	180.286

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui produksi tanaman biofarmaka di Provinsi Lampung didominasi oleh kencur dan jahe. Jumlah produksi tanaman biofarmaka terbesar adalah kencur yang mencapai 3.981.661 kwintal pada tahun 2020 dan jahe mencapai 1.730.505 kwintal pada tahun 2020. Tanaman biofarmaka ini tentunya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Sektor Kehutanan memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, maupun penghasil bahan baku industri. Provinsi Lampung memiliki area hutan yang cukup luas yang terdiri atas beberapa komoditas berbeda. Berikut merupakan luasan hutan di Provinsi Lampung:

Tabel 3.25 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan (Ha)
Lampung Barat	39.231,27	297.079,00	0,00	0,00	336.310,27
Tanggamus	132.159,55	3.345,00	0,00	0,00	135.504,55
Lampung Selatan	13.786,70	15.735,10	0,00	42.346,90	69.868,70
Lampung Timur	23.780,86	125.621,30	0,00	13.175,00	162.577,16
Lampung Tengah	28.431,72	0,00	0,00	12.500,00	40.931,72
Lampung Utara	28.000,00	0,00	0,00	177,71	28.177,71
Way Kanan	22.289,10	0,00	0,00	67.006,47	89.295,57
Tulang Bawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesawaran	12.586,46	21.949,31	0,00	1.955,00	36.490,77
Pringsewu	7.557,24	0,00	0,00	0,00	7.557,24
Mesuji	0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Dapat Dikonversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan (Ha)
Tulang Bawang Barat	0,00	0,00	0,00	11.470,92	11.470,92
Pesisir Barat	9.692,10	0,00	33.358,00	0,00	43.050,10
Kota Bandar Lampung	100,00	300,00	0,00	0,00	400,00
Kota Metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinsi Lampung	317.615,00	462.029,71	33.358,00	191.732,00	1.004.734,71

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki beberapa jenis kawasan hutan yang salah satunya adalah hutan produksi dapat dikonversi. Hutan produksi ini memiliki kawasan yang cukup luas yaitu sebesar 191.732 Ha. Hutan ini memproduksi beberapa komoditas yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Komoditas kehutanan pada Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.26 Jumlah Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan (m³)
Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019**

Jenis Produk Kayu	2018	2019
Kayu Bulat	46.293,00	87.838,00
Kayu Gergajian	21.024,66	0,00
Kayu Lapis	0,00	17.327,00
Serpih Kayu	0,00	62.199,00
Veneer	27.970,00	32.772,00

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki beberapa jenis produk kayu, baik kayu bulat maupun kayu olahan. Pada tahun 2019, jenis kayu yang diproduksi adalah kayu bulat, kayu lapis, serpih kayu, dan veneer dengan total sebesar 200.136 m³ dan didominasi oleh produksi kayu bulat sebesar 87.838 m³. Komoditas kehutanan berupa kayu ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi perekonomian wilayah dengan dilakukannya distribusi ke daerah-daerah lain untuk dijadikan bahan baku industri.

Sektor Perikanan Provinsi Lampung hasil panen ikan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu budidaya dan tangkap. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2022 didapatkan data produksi perikanan budidaya berdasarkan komoditas yaitu patin, lele, nila, ikan mas, kakap, bandeng, rumput laut, kerapu, dan udang. Hasil produksi perikanan budidaya ditabulasikan menurut kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 3.27 Produksi Perikanan Budidaya (ton) Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Lampung Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Kakap	Bandeng	Rumput Laut	Kerapu	Udang	Lainnya
Lampung Barat	15	6	6.336	2.306	0	0	0	0	0	188
Tanggamus	0	956	488	979	0	314	114	0	1.612	209
Lampung Selatan	4.201	8.238	521	9	0	263	5.346	30	14.461	997
Lampung Timur	82	25	107	124	0	939	0	0	6.740	214
Lampung Tengah	13.517	10.908	6.154	1.547	0	0	0	0	0	10.216
Lampung Utara	0	2.754	50	4.059	0	0	0	0	0	0
Way Kanan	627	641	298	96	0	0	0	0	0	49
Tulang Bawang	245	662	507	0	0	7.954	0	0	26.126	2.724
Pesawaran	22	515	72	11	31	0	0	75	5.390	206
Pringsewu	1.057	5.181	1.038	2.856	0	0	0	0	0	1.646
Mesuji	637	670	836	237	0	63	0	0	81	751
Tulang Bawang Barat	321	1.800	664	425	0	0	0	0	0	993
Pesisir Barat	4	69	60	70	0	0	0	0	8.900	12
Bandar Lampung	45	174	128	18	0	99	0	6	0	70
Metro	385	1.091	9	0	0	0	0	0	0	385
Provinsi Lampung	21.158	33.690	17.268	12.737	31	9.632	5.460	111	63.310	18.660

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari keseluruhan komoditas utama perikanan budidaya yang ada di Provinsi Lampung, komoditas dengan hasil panen terbesar adalah udang sebesar 63.310 ton dan terbesar kedua adalah lele sebesar 33.690 ton. Sedangkan komoditas dengan hasil produksi paling sedikit adalah ikan kakap hanya sebesar 31 ton. Selain dipengaruhi oleh meratanya produksi pada tiap kabupaten/kota, besarnya hasil produksi juga dapat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya pembudidaya ikan pada masing-masing kabupaten/kota. Namun, kesembilan jenis komoditas tersebut adalah komoditas utama pada sektor perikanan budidaya di Provinsi Lampung dan merupakan potensi daerah yang dapat terus dikembangkan.

Selain perikanan budidaya, pemanenan ikan dapat dilakukan dengan cara penangkapan. Jenis penangkapan dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum. Berikut merupakan tabel produksi perikanan tangkap menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020:

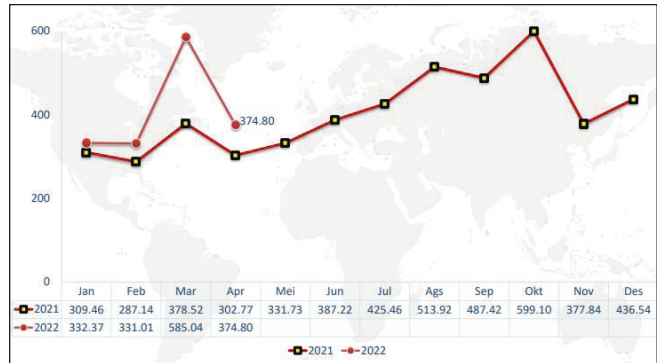
Tabel 3.28 Produksi Perikanan Tangkap (ton) Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Lampung Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Perikanan Tangkap di Laut				Perikanan Tangkap di Perairan Umum			
	Cakalang	Tongkol	Tuna	Udang	Lainnya	Udang	Ikan	Lainnya
Lampung Barat	0	0	0	0	0	0	475	0
Tanggamus	5	5.580	1.233	18	19.692	0	317	0
Lampung Selatan	239	1.063	0	79	12.450	0	0	0
Lampung Timur	0	2.807	0	0	42.851	0	670	0
Lampung Tengah	0	34	0	24	1.524	96	853	7
Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Way Kanan	0	0	0	0	0	0	215	0
Tulang Bawang	0	93	0	1.359	20.881	10	735	0
Pesawaran	0	1.666	0	256	13.714	3	29	0
Pringsewu	0	0	0	0	0	0	42	0
Mesuji	0	0	0	0	2.440	208	763	13
Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesisir Barat	0	433	644	0	3.180	0	146	5
Bandar Lampung	0	396	0	26	4.590	0	0	0
Metro	0	0	0	0	0	0	0	0
Provinsi Lampung	244	12.072	1.877	1.762	121.322	317	4.245	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara total hasil produksi perikanan tangkap terbesar adalah perikanan tangkap di laut. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh letak kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menjadi nelayan dengan menangkap ikan di laut. Komoditas dengan hasil panen terbesar adalah perikanan tangkap di laut pada kategori lainnya sebesar 121.322 ton, sedangkan komoditas dengan hasil produksi paling sedikit adalah perikanan tangkap di perairan umum pada kategori lainnya yang hanya sebesar 25 ton.

Investasi dan Ekspor berupa Realisasi investasi di sektor riil Provinsi Lampung tahun 2020 telah melampaui target yaitu Rp 5,7 triliun. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 7,12 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) bernilai \$498 ribu. Realisasi investasi yang melampaui target karena iklim investasi yang kian baik didukung infrastruktur dan konektivitas wilayah yang semakin baik setelah dibangunnya jalan tol lintas Sumatera. Volume ekspor dan impor di Provinsi Lampung berdasarkan data yang ada di BPS, jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 72,03 juta US\$. Sedangkan jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 210,24 juta US\$.



Gambar 3.21 Volume Ekspor dan Impor Provinsi Lampung
Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pada tahun 2021, nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan ekspor terendah ada di bulan Februari. Pada tahun 2022 di bulan Maret sudah mengalami peningkatan namun mengalami penurunan pada bulan berikutnya. Tujuan ekspor dari Provinsi Lampung yaitu menuju ke Amerika Serikat, Italia, India, Korea Selatan, dan Jepang. Struktur ekspor di Provinsi Lampung dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Pada bulan April tahun 2022, nilai ekspor terbesar adalah di kategori industri pengolahan sebesar 63,57%.

Tabel 3.29 Nilai Ekspor berdasarkan Komoditi di Provinsi Lampung

Jenis Komoditi	Nilai Ekspor Menurut Komoditi (Ribu US \$)	
	2020	2021
Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	1.075.503,80	1.700.169,84
Batu Bara	306.316,09	1.295.698,99
Ampas/Sisa Industri Makanan	198.062,30	428.339,35
Kopi, Teh, Rempah-Rempah	440.887,97	360.839,21
Olahan dari Buah-Buahan/Sayuran	260.348,32	297.027,46
Bubur Kayu/Pulp	147.895,51	184.310,42
Berbagai Produk Kimia	68.051,84	126.816,08
Gula dan Kembang Gula	70.828,08	115.624,34
Daging dan Ikan Olahan	79.689,40	77.503,41
Ikan dan Udang	72.503,10	60.048,69
Kasil Penggilingan	13.525,91	59.006,50
Karet dan Barang dari Karet	58.154,28	45.459,00
Kayu, Barang dari Kayu	29.756,29	29.828,86
Minuman	1.199,80	18.772,17
Bahan Kimia Organik	29.227,58	13.356,42
Berbagai Makanan Olahan	13.817,30	12.708,30
Buah-Buahan	12.177,51	12.310,10

Jenis Komoditi	Nilai Ekspor Menurut Komoditi (Ribu US \$)	
	2020	2021
Serat Tekstil dan Benang Kertas	2.261,56	2.569,86
Plastik dan Barang Dari Plastik	3.158,96	1.658,00
Biji-Bijian Berminyak	1.156,45	1.037,89
Perabot, Penerangan Rumah	1.294,52	479,56
Lak, Getah, dan Damar	767,17	472,46
Kapas Gumpalan, Tali	939,74	384,69
Perekat, Enzim	1.173,73	319,37
Kaca dan Barang dari Kaca	560,74	301,67
Senjata/Amunisi	0,00	199,23
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-Wangian	290,65	160,50
Garam, Belerang, Kapur	158,46	111,87
Gandum-Gandumman	86,67	95,69
Mesin-Mesin/Peswat Mekanik	387,78	88,33
Sabun dan Preparat Pembersih	221,70	60,30
Olahan dari Tepung	0,00	50,77
Bijih, Kerak, dan Abu Logam	54,59	45,35
Kakao/Coklat	309,67	31,24
Bahan-Bahan Nabati	12,63	15,75
Pupuk	22,50	7,89
Barang-Barang Rajutan	0,00	2,14
Kertas/Karton	0,92	0,48
Berbagai Barang Logam Dasar	0,00	0,00
Berbagai Barang Buatan Pabrik	141,45	0,00
Produk Hewani	21,00	0,00
Total	2.890.965,97	4.845.912,18

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Sektor Pariwisata, Provinsi Lampung merupakan daerah dengan banyak sekali wisata. Disadur dari laman resmi Provinsi Lampung tercatat bahwa terdapat 350 objek wisata yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Wisata tersebut diantaranya Kabupaten Tanggamus dengan 77 objek wisata, Kabupaten Way Kanan dengan 59 objek wisata, dan diikuti Lampung Utara dengan 47 objek wisata. Mayoritas wisata alam yang ada di Kabupaten Tanggamus berupa objek wisata bahari dan alam tirta (wisata air), sedangkan wisata yang terdapat pada Kabupaten Way Kanan mayoritas berupa wisata alam, dan Lampung Utara didominasi dengan peninggalan sejarah dan panorama alam.

Selain potensi wisata yang sudah ada, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengembangan pada sektor pariwisata dengan program pengembangan kawasan Wisata Maritim Teluk Lampung, Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rachman (TAHURA

WAR), Teluk Kiluan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dan Teluk Nipah sebagai *Luxurious Resort*. Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan kawasan TNWK “Lampung Safari Way Kambas *Park and Convention Center*”, wisata Pantai Barat Lampung, pembangunan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), dan usulan kawasan ekonomi khusus pariwisata penyelenggaraan Sail Krakatau tahun 2017.

Dengan adanya berbagai macam destinasi wisata yang ada, maka dibutuhkan akomodasi serta penginapan untuk dapat melayani kebutuhan wisatawan. Hal ini menjadi penting agar wisatawan dapat menikmati agenda wisatanya dengan nyaman dan lebih kondusif. Berikut merupakan tabel jumlah restoran dan hotel menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2021.

Tabel 3.30 Jumlah Rumah Makan/Restoran dan Hotel Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Rumah Makan/Restoran (unit)	Hotel Berbintang (unit)	Hotel Non Bintang (unit)
Lampung Barat	50	0	23
Tanggamus	99	0	18
Lampung Selatan	102	2	28
Lampung Timur	87	0	14
Lampung Tengah	262	1	23
Lampung Utara	75	0	10
Way Kanan	39	1	10
Tulang Bawang	40	0	15
Pesawaran	88	0	15
Pringsewu	103	1	15
Mesuji	42	0	7
Tulang Bawang Barat	65	0	10
Pesisir Barat	31	0	55
Bandar Lampung	517	23	104
Metro	169	1	15
Provinsi Lampung	1.769	29	362

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah restoran dan hotel terbanyak baik hotel berbintang maupun non bintang terdapat di Kota Bandar Lampung. Terpusatnya persebaran akomodasi wisata ini di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh peruntukan Bandar Lampung sebagai ibu kota dan banyaknya destinasi wisata di kota tersebut. Bertambahnya restoran dan hotel akan terus sejalan dengan pembangunan daerah dan jumlah

wisatawan yang berwisata pada tiap daerah.

Karena keindahannya, wisata yang ada di Provinsi Lampung tidak hanya menarik wisatawan dari dalam negeri. Adanya sarana penunjang berupa keberadaan bandara kelas internasional yaitu Bandar Udara Radin Inten II membuat para wisatawan asing dapat dengan mudah mengunjungi Lampung. Berikut merupakan tabel rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Provinsi Lampung:

Tabel 3.31 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan (hari) di Provinsi Lampung Tahun 2021

Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
Januari	6,28	1,27
Februari	1,41	1,18
Maret	3,81	1,17
April	5,09	1,24
Mei	2,73	1,19
Juni	4,07	1,25
Juli	3,44	1,22
Agustus	9,00	1,21
September	3,54	1,21
Oktober	2,08	1,21
November	4,46	1,29
Desember	1,73	1,31
Kumulatif Januari-Desember 2019	47,64	14,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata menginap tamu asing paling banyak adalah pada bulan Agustus yaitu 9,00, sedangkan rata-rata menginap paling sedikit adalah pada bulan Februari yaitu 1,41. Untuk wisatawan domestik rata-rata menginap paling besar adalah pada bulan Desember yaitu 1,31, sedangkan rata-rata menginap paling kecil adalah 1,17 pada bulan Maret. Tingginya rata-rata menginap wisatawan domestik dapat disebabkan oleh adanya libur akhir tahun, natal, dan tahun baru.

Destinasi Pariwisata Nasional yang berada di Provinsi Lampung yaitu DPN Krakatau-Ujung Kulon dan Sekitarnya yang meliputi: KKPN Danau Ranau dan sekitarnya, KPPN Way Kambas dan sekitarnya, KPPN Bandar Lampung dan sekitarnya, KPPN Krui-Tanjung Setia dan sekitarnya, KPPN Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya, KPPN Kalianda dan sekitarnya dan KPPN Krakatau-Selat Sunda dan sekitarnya.

Kawasan wisata unggulan di Provinsi Lampung meliputi:

1. Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung;
2. Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Tanjung Setia;
3. Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas;
4. Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan;
5. Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi;
6. Kawasan Wisata Unggulan Bakauheni dan Menara Siger;
7. Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

3.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Perumusan Kawasan Prioritas Pengembangan Lampung disusun berdasarkan metode *multicriteria analysis*. Daftar panjang (*longlist*) kawasan prioritas yang telah disusun pada bab 2 diberikan bobot dengan kriteria yang sesuai untuk mendapatkan kawasan prioritas yang akan ditangani hingga 2029.

Tabel 3.32 Justifikasi Kawasan Prioritas Pertanian

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
Kawasan Pertanian Lampung Tengah	V	V	-	V	V	4	Prioritas	1. Komoditas unggulan padi 2. Luas panen 101.743,09 Ha; produksi 540.115,25 ton 3. Terdapat LP2B sebesar 71.791 hektar 4. Luasan daerah Irigasi: - D.I. Way Pangubuan 4.990 Ha - D.I. Way Sekampung 38.653 Ha
KPPN Mesuji	V	V	V	-	V	4	Prioritas	1. Komoditas unggulan padi 2. Luas panen 57 625,52 Ha; produksi 283 879,49 ton 3. Termuat dalam RPJMN 4. Terdapat LP2B sebesar 27.700 hektar 5. Luasan daerah irigasi: - D.I.R. Rawa Mesuji Atas 16.328 Ha
KPPN Tulang Bawang	V	-	V	-	V	3	Tidak Menjadi Prioritas	1. Komoditas unggulan padi 2. Luas panen 62.835,92 Ha; produksi 280.011,59 ton 3. Termuat dalam RPJMN 4. Terdapat LP2B sebesar 31.800 hektar 5. Luasan daerah irigasi - D.I. Way Rarem 11.851 Ha - D.I.R. Rawa Pitu 10.529 Ha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kriteria:

- 1. Memiliki Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dengan kontribusi tingkat nasional
- 2. Produktivitas yang dominan (Luas panen dan produksi 3 terbesar dalam 5 tahun terakhir)
- 3. Merupakan Kawasan RPJMN
- 4. Kesesuaian Arahana Pengembangan Provinsi (Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3 terbesar di Provinsi Lampung)
- 5. Terdapat daerah irigasi kewenangan pusat

Tabel 3.33 Justifikasi Kawasan Prioritas Perkotaan

Kawasan	1	2	3	4	5	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
PKN Bandar Lampung	V	V	V	V	V	5	Prioritas	1. Merupakan Ibukota Provinsi Lampung 2. Didukung regulasi RTRWN, RPJMN 3. Wilayah Metropolitan Bandar Lampung
PKW Metro	-	-	V	V	V	3	Prioritas	Merupakan Ibukota Kota Metro
PKW Kalianda	-	-	V	-	-	1	Tidak Menjadi Prioritas	Merupakan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan
PKW Liwa	-	-	V	-	V	2	Tidak Menjadi Prioritas	Merupakan Ibukota Kabupaten Lampung Barat
PKW Menggala	-	-	V	-	-	1	Tidak Menjadi Prioritas	Merupakan Ibukota Kabupaten Tulang Bawang
PKW Kotabumi	-	-	V	-	V	2	Tidak Menjadi Prioritas	Merupakan Ibukota Kabupaten Lampung Utara
PKW Kota Agung	-	-	V	-	-	1	Tidak Menjadi Prioritas	Merupakan Ibukota Kabupaten Tanggamus

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kriteria:

- 1. Memiliki Infrastruktur Perhubungan Skala Nasional (Bandara/Pelabuhan)
- 2. Merupakan Kawasan Prioritas RPJMN
- 3. Kesesuaian Arahana Pengembangan Provinsi
- 4. Sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Kab/ Kota merupakan sektor sekunder/tersier
- 5. Merupakan kawasan andalan RTRWN

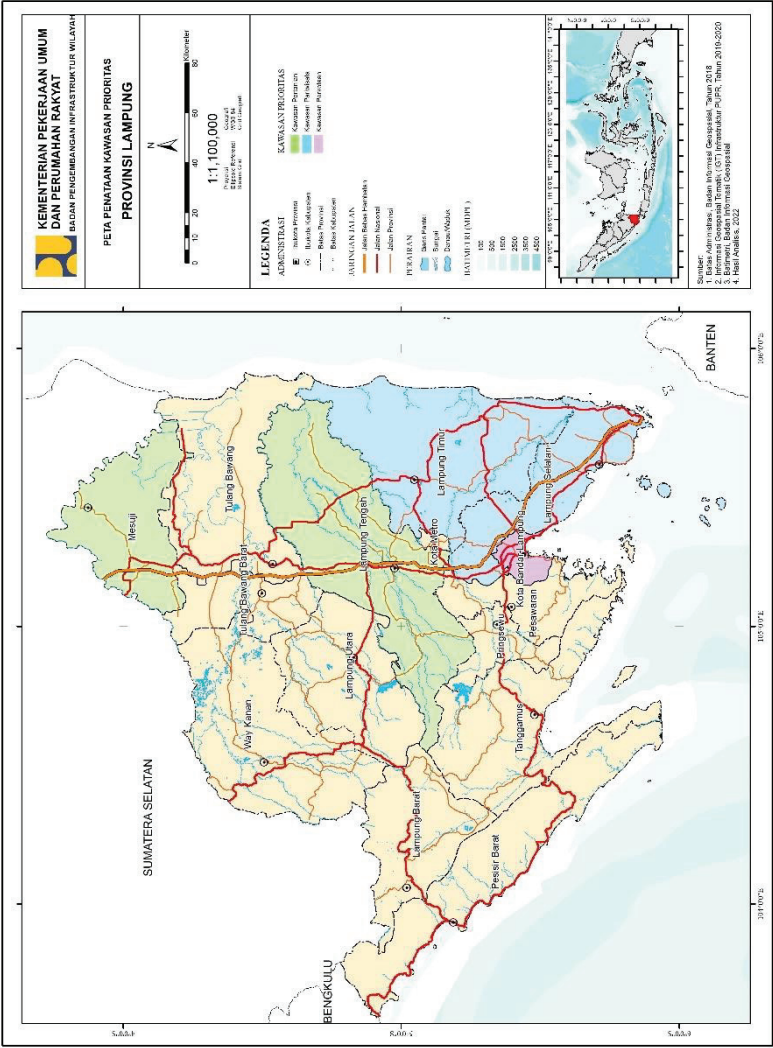
Tabel 3.34 Justifikasi Kawasan Prioritas Pariwisata

Kawasan	1	2	3	4	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
KSPN Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur	V	V	V	V	4	Prioritas	1. Masuk dalam 88 KSPN RIPPARNAS 2. Dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni dapat menempuh jalan nasional lintas timur Sumatera dengan rute Bakauheni-Labuhan Maringgai-Way Jepara-TNWK. Dari Bandar Lampung-Sribawono-Way Jepara-TNWK. Dari Gunung Sugih- Metro-Sukadana-TNWK. Sedangkan dari Manggala (dan Palembang) dapat menempuh rute jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yaitu rute Manggala-Sukadana-TNWK 3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP
KSPN Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat	V	-	V	-	2	Tidak Menjadi Prioritas	1. Masuk dalam 88 KSPN RIPPARNAS 2. Jauh dari simpul transportasi. Melalui Kota Palembang sekitar 8 jam dan Bandar Lampung sekitar 6 jam 3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP 4. Pemanfaatan lebih besar di Sumatera Selatan
KSPN Krakatau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan	V	V	V	V	4	Prioritas	1. Masuk dalam 88 KSPN RIPPARNAS 2. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Desa Canti, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, lalu ke pelabuhan nelayan desa menuju KSPN Krakatau 3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP
Kawasan Pesisir Pantai Barat Lampung	-	V	-	-	1	Tidak Menjadi Prioritas	1. Tidak termuat dalam RIPPARNAS 2. Didukung oleh Jalan W. Trans Sumatera 3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kriteria:

1. Kawasan Prioritas pada RIPPARNAS
2. Aksesibilitas yang memadai: Simpul transportasi, konektivitas dengan jalan nasional
3. Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi
4. Adanya Badan Pengelola



3.3.2. Profil dan Potensi Fokus Pertanian

Provinsi Lampung merupakan salah satu Lumbung Pangan Nasional yang menduduki peringkat ke-6 terbesar nasional dengan produksi padi 2,69 juta ton pada tahun 2022. Kabupaten dengan produksi padi terbesar antara lain Lampung Tengah (540.115,25 ton/tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun), Mesuji (283.879,49 ton/tahun). Akan tetapi, produktivitas tanaman padi masih di bawah rata-rata nasional (52,38 ku/ha) yaitu sebesar 51,87 ku/ha.

Sektor Pertanian di Provinsi Lampung didukung oleh infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan kawasan pertanian dengan sumpul distribusi hingga ke wilayah lain di Pulau Sumatera. Selain itu, sektor pertanian juga didukung dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Sekampung yang berfungsi sebagai sumber air irigasi.

Dilihat dari PDRB Provinsi Lampung, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB provinsi yaitu sebesar 27,90% pada 2022. Sejalan dengan PDRB, SDM pada sektor pertanian juga mendominasi dimana sebanyak 43% (1.843,5 ribu) dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015, terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat antara lain 3 (tiga) Daerah Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 (tiga) Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha. Namun masih banyaknya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan (Nilai Indeks Kinerja Irigasi/IKSI di Provinsi Lampung masih rendah (rata-rata nilai IKSI gabungan 0,5 atau lebih rendah).

3.3.3. Profil dan Potensi Fokus Perkotaan

Provinsi Lampung memiliki 1 Pusat Kegiatan Nasional yaitu PKN Bandar Lampung. PKN Bandar Lampung telah terhubung dengan sistem jaringan transportasi berbasis jalan nasional. PKN Bandar Lampung menjadi pintu gerbang internasional serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional. Selain itu, terdapat 6 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung. Berdasarkan hasil prioritas terdapat dua kawasan perkotaan yang menjadi lokus perencanaan yaitu PKN Bandar Lampung dan PKW Metro. Tersedia infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi perkotaan, berupa Bandar Udara Internasional

Radin Inten II yang melayani pergerakan orang dan barang antarprovinsi maupun internasional, Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan ekspor-impor, dan Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa.

Dilihat dari kondisi standar pelayanan minimum perkotaan dan kebencanaan, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro juga menjadi kota inti bagi *hinterland* di sekitarnya sehingga banyak pergerakan yang dilakukan dari kawasan di sekitar menuju pusat kota. Jumlah Penduduk terpusat di Kota Bandar Lampung dengan jumlah 1,2 juta jiwa dengan kepadatan 6.464 jiwa/km² dan Kota Metro 169.781 jiwa dengan kepadatan 2.321 jiwa/km² (BPS, 2022). Sehingga diperlukan pelayanan dasar permukiman khususnya di kawasan perkotaan.

Terkait infrastuktur dasar, terdapat 16 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. TPA Bakung di Kota Bandar Lampung menjadi TPA dengan jumlah sampah masuk terbanyak di tahun 2021, yaitu 273.750 ton/tahun. PKN Bandar Lampung memiliki akses sanitasi layak sebesar 95,45% dan PKW Metro sebesar 94,64%. Kedua nilai akses sanitasi layak ini berada di atas rata-rata Provinsi Lampung yaitu 83,89%.

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandar Lampung sebanyak 7.177 unit dan Kota Metro sebanyak 254 unit. Total backlog perumahan di Kota Bandar Lampung mencapai 149.218 KK kepenghunian rumah dan 91.515 KK kepemilikan rumah. Total backlog perumahan di Kota Metro mencapai 23.113 KK kepenghunian rumah dan 18.007 KK kepemilikan rumah

Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap kerentanaan seperti banjir, tanah langsor, gempa bumi, dan tsunami. Sebesar 7,58% luas wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana banjir tinggi. Sebesar 9,83% wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana tanah longsor tinggi. Sebesar 28,70% wilayah Provinsi Lampung termasuk dalam klasifikasi bahaya bencana gempa bumi. Dengan demikian, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi perkotaan, dibutuhkan pemenuhan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan berbasis mitigasi bencana

3.3.4. Profil dan Potensi Fokus Pariwisata

Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi Lampung mencapai 2.549.925 orang dengan wisatawan

nusantara sebanyak 2.548.394 dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.531 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya infrastruktur pendukung pariwisata yaitu Tol Trans Sumatera yang memudahkan akses dari dan menuju ke Provinsi Lampung baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera Bagian Selatan.

Sesuai dengan RTRWN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, Provinsi Lampung diarahkan untuk pengembangan kawasan pariwisata alam berskala nasional. Di Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) KSPN yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu KSPN Way Kambas dan sekitarnya KSPN Krakatau dan sekitarnya. Pada KSPN Way Kambas terdapat Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem yaitu ekosistem mangrove, pantai, riparian, hutan rawa air tawar dan hutan dipterokarpa dataran rendah yang menjadikan kawasan TNWK sebagai habitat bagi berbagai macam spesies satwa. Hal tersebut menjadikan TNWK memiliki daya tarik tersendiri. Pada KSPN Krakatau dan Sekitarnya merupakan daerah konservasi alam. Daya tarik dari kawasan pariwisata ini adalah pesisir pantai Lampung selatan dan fenomena vulkanik yang terus berlangsung. Faktor yang mendorong wisatawan untuk berkunjung di Lampung juga dipengaruhi oleh harga tiket wisata yang relatif terjangkau serta terdapat kelompok sadar wisata Desa Braja Harjosari (KSPN Way Kambas dan sekitarnya) dan Komunitas Putera Krakatau (KSPN Krakatau dan sekitarnya).

3.4. Profil Sosial Budaya

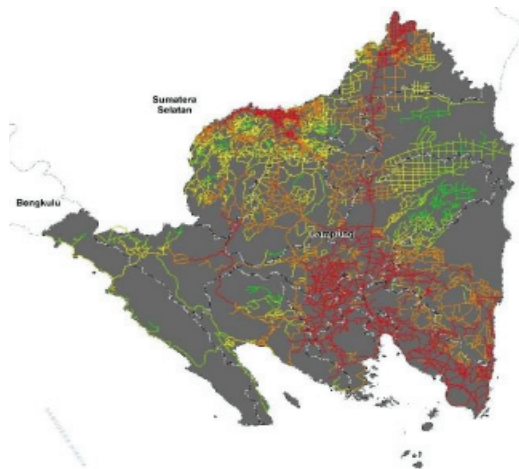
Provinsi Lampung pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda, menaungi berbagai etnis, mulai dari Jawa (60,10%); Lampung (21,9%); Sunda (10,50%); Minangkabau (3,57%); Bali (1,73%); Tionghoa; Melayu; dan lain-lain (2,15%). Semua etnis tersebut hidup rukun di tanah Sang Bumi Ruwai Jurai. Sang Bumi Ruwai Jurai adalah semboyan masyarakat adat Lampung yang bermakna “satu bumi dua aliran adat budaya” atau wadah persatuan yang menampung berbagai macam keanekaragaman.

Masyarakat adat Lampung sangat terbuka dengan kehadiran para pendatang, baik masyarakat asli maupun transmigran hidup, tidak memperlmasalahakan etnis maupun agama. Selain bahasa Lampung sendiri, masyarakat Lampung juga menggunakan Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, dan Bahasa Bali. Berikut tradisi adat di Provinsi Lampung.

1. Upacara Gawi
 - a. Ritual sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah kejadian, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya;
 - b. Upacara merupakan tradisi masyarakat adat Lampung yang bermarga Bunga Mayang Sungkai;
 - c. Upacara dilakukan selama 10 hari.
2. Kukhuk Limau
Tradisi dilakukan oleh masyarakat adat *Pepadun Buay Nuban* di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan.
3. Tayuhan
Sebuah upacara adat yang dilakukan keluarga besar untuk merayakan pernikahan, khitanan, hasil panen yang berlimpah, hingga pembangunan rumah.
4. Belangiran
Tradisi yang dilakukan menjelang bulan suci Ramadan dengan makna penyucian diri.

Selain adat istiadat di Provinsi Lampung, terdapat desa wisata yang masuk kategori desa terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, yaitu Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran. Desa ini memiliki panorama wisata beberapa pantai pasir putih dan pemandangan laut yang indah. Selain memiliki paket wisata, desa ini juga menawarkan penginapan di atas laut. Akses dan lokasi yang dekat dengan Kota Bandar Lampung memudahkan wisatawan untuk berkunjung.

3.5. Profil dan Interaksi Antar Kawasan



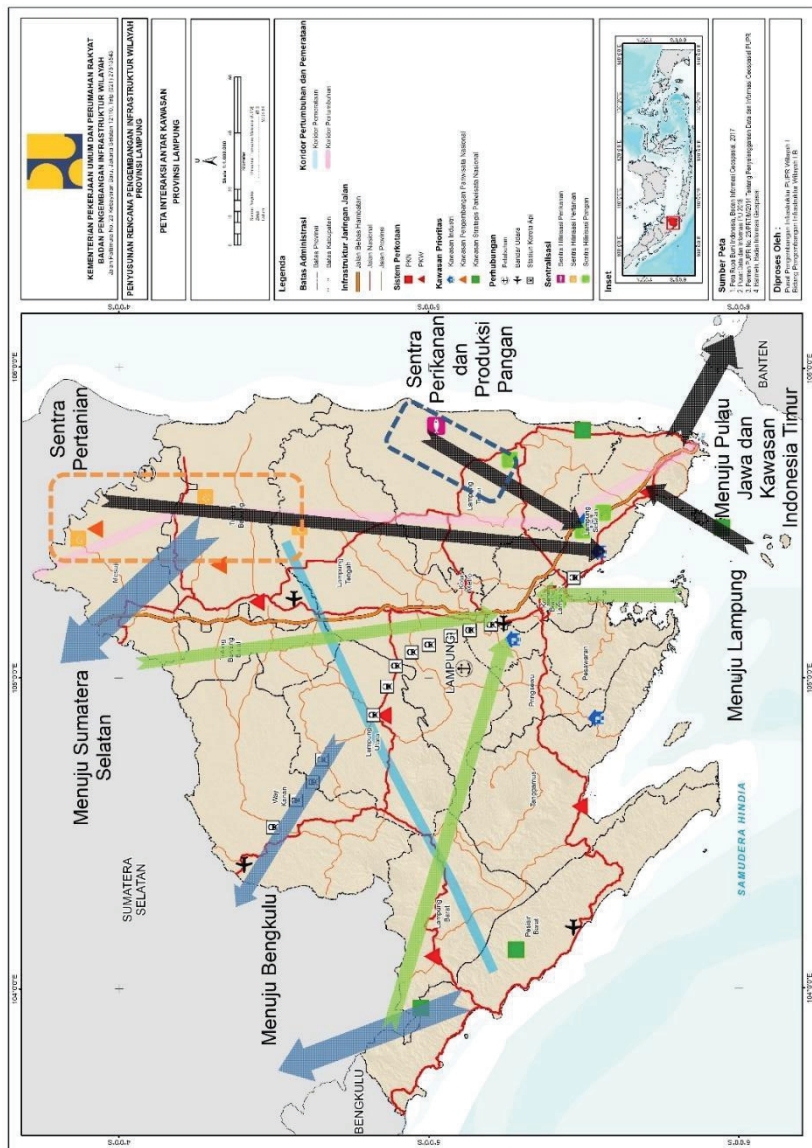
Gambar 3.23 Network Analysis – Gravity di Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada Pola Interaksi Antar Kawasan dapat dilihat bahwa perkembangan Provinsi Lampung tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang ada selama ini. Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilitas penduduk antardaerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau dan terisolir.

Alur distribusi logistik yang masuk maupun keluar dari Provinsi Lampung dapat menggunakan:

- Jalur darat melalui Jalan Nasional menuju ke PKN Bengkulu dan Jalan Tol Trans Sumatera menuju ke PKN Patungraya Agung;
- Jalur darat dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa;
- Jalur udara dari Bandara Sultan Badaruddin II; dan
- Jalur laut dari Pelabuhan Panjang.



Gambar 3.24 Peta Profil Interaksi Antar Kawasan Provinsi Lampung



BAB 4

PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

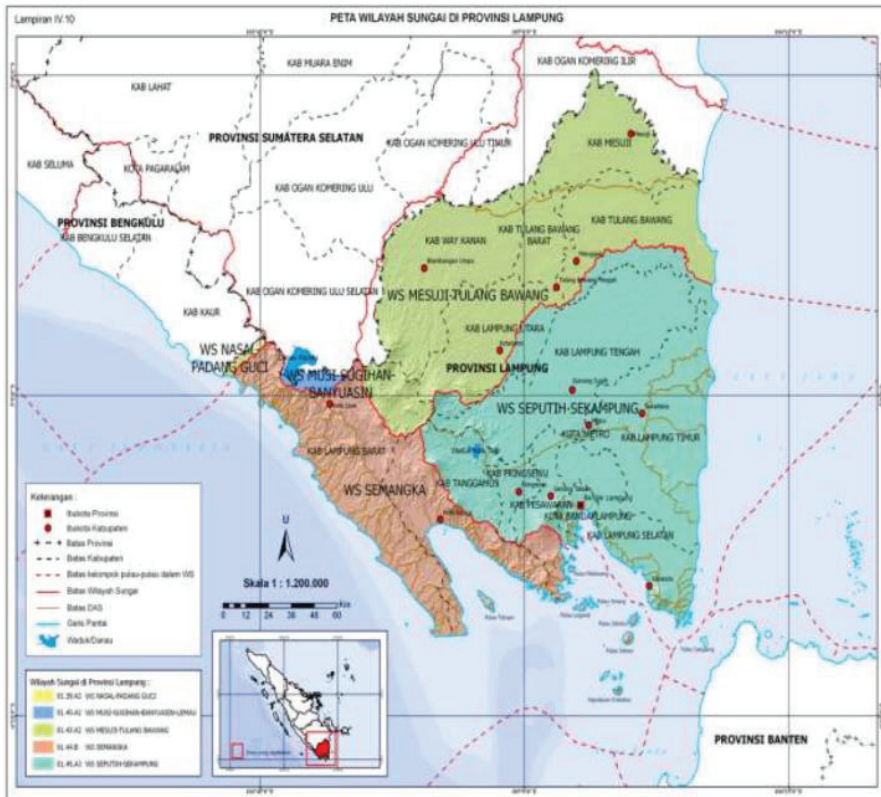


4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Wilayah Provinsi Lampung memiliki beberapa infrastruktur pendukung sumber daya air yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai Provinsi Lampung yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Sungai (WS) utama, yakni:

1. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang
 - a. Wilayah sungai lintas Provinsi (Kewenangan Pemerintah Pusat)
 - b. Terletak di 9 (sembilan) kabupaten melintasi 2 (dua) provinsi yang terdiri dari:
 - 1) 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung: Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat;
 - 2) 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 - c. Memiliki luas Wilayah Sungai sebesar 3 16.625 km².
 - d. Terbagi menjadi 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni:
 - 1) DAS Tulang Bawang seluas 3 9.865 km²;
 - 2) DAS Mesuji seluas 3 6.760 km².
2. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung
 - a. Wilayah Sungai Strategis Nasional (Kewenangan Pemerintah Pusat).
 - b. Terletak di 12 kabupaten dan 2 (dua) kota Provinsi Lampung.
 - c. Memiliki luas Wilayah Sungai 3 1.463.700 Ha.
 - d. Memiliki 42 DAS (Daerah Aliran Sungai) yang terbagi menjadi 2 (dua) DAS dominan, yakni DAS Seputih 3 9719.060 Ha dan DAS Sekampung 3 478.540 Ha serta 37 Sub DAS, yakni:
 - 1) 25 Sub DAS surplus, 2 Sub DAS kritis, dan 10 Sub DAS defisit;
 - 2) 31 Sub DAS sudah dimanfaatkan (utilitas), sisanya 6 Sub DAS belum dimanfaatkan.
 - e. Sisanya (40 DAS) DAS Pesisir.

3. Wilayah Sungai Semangka
 - a. Wilayah Lintas Kabupaten/Kota (Kewenangan Provinsi Lampung).
 - b. Luas Wilayah Sungai sebesar 6.397,55 km².
 - c. Terletak di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesawaran.
 - d. Terdiri dari 116 DAS dengan DAS terluas, yaitu DAS Semangka.



Gambar 4.1 Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Lampung
Sumber: Peraturan Menteri PUPR 04/PRT/M/2015

Kondisi WS Seputih Sekampung berdasarkan klimatologi, suhu udara rerata di WS Seputih Sekampung berkisar antara 26°C-27°C. WS Seputih Sekampung memiliki kelembaban tinggi, sedangkan pada curah hujan dalam 1 tahun terjadi 2 kali pergantian musim yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Curah hujan tahunan untuk beberapa stasiun pencatat hujan selama 15 tahun berkisar antara 1.234 mm-2.565 mm dengan rerata sebesar 1.878 mm.

Pemanfaatan air di WS Seputih Sekampung kondisi saat ini (tahun 2009) untuk memenuhi kebutuhan irigasi sebesar 139.637 m³/det, air baku untuk rumah tangga perkotaan, dan industri 7.467 m³/det, sehingga kebutuhan total mencapai 147.10 m³/det. Kebutuhan air tersebut masih jauh di bawah potensi ketersediaan air mencapai 450.73 m³/det. Namun, ketersediaan secara nyata sangat tergantung kepada kinerja sistem pengelolaan yang ada. Dengan kinerja sistem pengelolaan yang ada saat ini, maka ketersediaan air nyata yang bisa dipenuhi hanya sebesar 81.55 m³/det.

Secara umum, kualitas air yang ada di sungai-sungai di WS Seputih Sekampung mempunyai kualitas di bawah kualitas air sungai sesuai peruntukannya menurut SK Gubernur Nomor G/625/B,VII/HK/1995 (Kelas B; yaitu air yang boleh digunakan sebagai bahan baku air minum setelah pengolahan yang layak),

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pencemaran air di WS Seputih Sekampung sebagian besar berasal dari 3 sumber, yaitu:

1. Pencemaran yang berasal dari buangan limbah dari agro industri, seperti tapioka, karet, sawit, dan tebu/gula. Konsentrasi pencemaran tertinggi dijumpai di Way Sekampung dan Way Pengubuan (anak sungai Way Sekampung), yang mempunyai BOD antara 125 sampai dengan 300 mg/l.
2. Pencemaran yang berasal dari zat kimia yang digunakan pada lahan pertanian (pestisida dan pupuk). Meskipun tidak dijumpai kenampakan yang nyata, namun dapat dipastikan bahwa beban nutrisi, seperti nitrogen, fosfat, dan sedimen, naik dengan meningkatnya sektor pertanian.
3. Limbah rumah tangga dari kawasan pemukiman yang makin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 4.1 Neraca Air WS Seputih Sekampung

No.	Kebutuhan Air	Penggunaan Air		
		Juta m ³ /th	m ³ / dt	%
1.	Irigasi			
	Sub DAS Batanghari	0.00	0.000	0.00
	Sub DAS Way Ilahan	152.78	4.845	3.47
	Sub DAS Way Tebu	233.07	7.391	5.29
	Sub DAS Sekampung Anak	25.94	0.822	0.59
	Sub DAS Way Bulok	559.37	17.738	12.70
	Sub DAS Way Semah	113.25	3.591	2.57
	Sub DAS Way Pisang	114.50	3.631	2.60
	Sub DAS Way Bekarang	0.00	0.000	0.00
	Sub DAS Rawasragi	0.00	0.000	0.00
	Sub DAS Way Ketibung	79.74	2.529	1.81
	Sub DAS Way Sulan	41.60	1.319	0.94
	Sub DAS Way Galih	35.13	1.114	0.80
	Sub DAS Way Kandis Besar	58.70	1.861	1.33

No.	Kebutuhan Air	Penggunaan Air		
		Juta m ³ /th	m ³ /dt	%
	Sub DAS Sekampung Argoguruh	2.35	0.075	0.05
	Sub DAS Way Indomiwon	6.17	0.196	0.14
	Sub DAS Raman	0.00	0.000	0.00
	Sub DAS Batanghari Hulu	99.18	3.145	2.25
	Sub DAS Segala Mider	23.94	0.759	0.54
	Sub DAS Terusan Hulu	5.72	0.181	0.13
	Sub DAS Seputih Surabaya	96.96	3.075	2.20
	Sub DAS Pegadungan	49.95	1.584	1.13
	Sub DAS Sukadana	29.63	0.940	0.67
	Sub DAS Batanghari hilir	13.89	0.441	0.32
	Sub DAS Pengubuan Hilir	11.11	0.352	0.25
	Sub DAS Pengubuan Tengah	44.87	1.423	1.02
	Sub DAS Pengubuan Hulu	20.75	0.658	0.47
	Sub DAS Way Tipo	39.89	1.265	0.91
	Sub DAS Way Waya	103.65	3.287	2.35
	Sub DAS Komering	50.54	1.603	1.15
	Sub DAS Way Tatayan	116.79	3.703	2.65
	Sub DAS Way Pubian	101.73	3.226	2.31
	D.I. Pengubuan	55.42	1.757	1.26
	D.I. Seputih	331.04	10.497	7.52
	D.I. Bekri	150.46	4.771	3.42
	D.I. Sekampung Bunut	127.05	4.029	2.89
	D.I. Raman Utara	105.64	3.350	2.40
	D.I. Sekampung Batanghari	315.83	10.015	7.17
	D.I. Batanghari Utara	147.07	4.664	3.34
	D.I. Punggur Utara	547.42	17.359	12.43
	D.I. Rumbia Barat	169.00	5.359	3.84
	D.I. Waj Jepara	147.14	4.666	3.34
	D.I. Way Curup	76.21 2	.417	1.73
	Sub Total	4403.49	139.637	100.00
2	Kebutuhan Air Baku RKI			
	BLK Pringsewu	1.26	0.040	0.54
	Kota Pringsewu	3.28	0.104	1.39
	Kota Metro	3.63	0.115	1.54
	Kota Natar/Bandara Branti	0.68	0.022	0.29
	Kota Bandarjaya	2.01	0.064	0.86
	Kota Gunung Sugih	1.44	0.046	0.61
	Kota Sukadana	0.62	0.020	0.26
	Kota Bandar Lampung	37.05	1.175	15.73
	Kota Kalianda	2.58	0.082	1.10
	Pengglontoran Sekampung	119.84	3.800	50.89
	Pengglontoran Seputih	63.07	2.000	26.78
	Sub Total	52.57	7.467	100.00
	Total Kebutuhan Air	4456.06	147.10	
	Potensi Ketersediaan Air (Q80%)	14214.22	450.73	
	Potensi Air Permukaan (run-off)	7368.39	233.65	
	Potensi Air tanah (interflow & recharge)	6845.83	217.08	

Sumber: Hasil Analisis Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Seputih Sekampung, 2009

Pada Air Baku, saat ini pemenuhan air untuk rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI) di WS Seputih Sekampung dipasok dari mata air atau sumber-sumber air lain yang dimiliki atau dikelola oleh PDAM dan perseorangan (masing-masing rumah tangga). Tingkat pelayanan PDAM di tiap-tiap kabupaten/kota relatif rendah, tingkat pelayanan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain lama waktu air mengalir, kejernihan air, sistem pelayanan administrasi, dan pertumbuhan saluran rumah.

Pelayanan PDAM ke depan diharapkan dapat terus meningkat seiring adanya potensi air baku baru yang berhasil diidentifikasi di lokasi masing-masing dengan jumlah dan kualitas yang baik. Beberapa lokasi potensi air baku tersebut sebagian dapat didistribusikan secara grafitasi, karena bersumber dari pegunungan yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan daerah layanan, sehingga dapat mengurangi biaya pengelolaan dan distribusi, yang pada akhirnya diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan bila tidak ada sumber air baku yang pengalirannya dapat menggunakan grafitasi, maka terpaksa menggunakan pompa.

Berikut adalah Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air:

1. Menyediakan pasokan air baku untuk meningkatkan pelayanan air minum penduduk yang telah ada hingga 50% sesuai dengan prioritas dan rencana alokasi pada masing-masing kabupaten atau kota.
2. Membangun embung-embung guna memenuhi kebutuhan air baku untuk air bersih RKI.
3. Membangun Waduk Segalamider, Waduk Campangtiga, Waduk Sukarajatiga, Waduk Sidodadi, Waduk Pengubuan, Waduk Wonokerto.
4. Membangun bendung-bendung seperti Bendung Gunung Sugih, Sukoharjo untuk mensuplai air irigasi ke Daerah Irigasi dan PLTA.

Tabel 4.2 Daftar Bendungan dan Kapasitas Air Baku

No	Nama Bendungan	Lokasi	Kapasitas Air Baku (m ³ /det)	Progress Bendungan	Kapasitas Intake Air Baku
1	Bendungan Way Sekampung	Kab. Pringsewu	2.48	Konstruksi mulai tahun 2016 dan direncanakan selesai tahun 2021.	Rencana pembangunan intake sebesar 2.48 m ³ /detik mulai tahun 2021 dan target selesai tahun 2025.
2	Bendungan Marga Tiga	Kab. Lampung Timur	0.83	Konstruksi mulai tahun 2017 dan direncanakan	Rencana pembangunan intake sebesar 0.8 m ³ /detik mulai tahun

No	Nama Bendungan	Lokasi	Kapasitas Air Baku (m ³ /det)	Progress Bendungan	Kapasitas Intake Air Baku
				n selesai tahun 2021.	2022 dan target selesai tahun 2023.

Sumber: National Water and Sanitation Information Services, 2020

Tabel 4.3 Daftar kapasitas Air Baku Provinsi Lampung

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Kapasitas Air Baku (m ³ /det)	Kapasitas yang telah digunakan (m ³ /det)	Kapasitas yang belum dimanfaatkan (m ³ /det)	Tahun Pembangunan
1	Air Baku Way Plembang Kec. Karya Penggawa Kab. Lampung Barat	Kab. Pesisir Barat	0.06	0	0.06	2011
2	Air Baku Kec. Baradatu Kab. Way Kanan	Kab. Way Kanan	0.06	0	0.06	2011
3	Air Baku Way Nangayu Kasui Kec. Banjit Kab. Way Kanan	Kab. Way Kanan	0.06	0	0.06	2012
4	Air Baku Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat	Kab. Pesisir Barat	0.06	0	0.06	2013
5	Air Baku Kab. Pesawaran	Kab. Pesawaran	0.03	0	0.03	2015
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sepagasan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu	Kab. Pringsewu	0.10	0	0.10	2019

Sumber: National Water and Sanitation Information Services, 2020

Kondisi WS Mesuji-Tulang Bawang secara klimatologi, suhu udara rerata di WS Mesuji-Tulang Bawang berkisar antara 23°C-33°C, sedangkan kelembaban rerata yang terjadi berkisar antara 64%-82%. Untuk kecepatan angin rerata, nilainya berkisar antara 1,02 m/dt-2,05 m/dt dan penyinaran matahari rerata bervariasi dari 34,7%-92,6%. WS Mesuji-Tulang Bawang merupakan daerah yang termasuk ke dalam zona iklim tropika berhujan dengan curah hujan tahunan rata-rata yang cukup tinggi yaitu di atas 2.500 mm dan curah hujan maksimum harian mencapai 309 mm, sedangkan curah hujan rata-rata harian sebesar 16 mm. Curah hujan di WS Mesuji-Tulang Bawang mempunyai spesifikasi yang berbeda antara daerah hulu dan daerah hilir. Di daerah hulu seperti Sumber Jaya, Sekincau, Fajar Bulan, Kasui dan sekitarnya, musim hujan relatif lebih panjang dari musim kemarau. Sebaliknya, di daerah hilir, seperti Rawa Jitu dan Rawa Pitu, musim hujan relatif lebih pendek dari musim kemarau.

Terdapat 12 PDA yang dikelola oleh Balai PSDA Mesuji-Tulang Bawang (UPTD Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung). Namun, data yang tersedia secara lengkap hanya 2 (dua) PDA yakni PDA Way Neki dengan debit maksimum sebesar 50,36 m³/det dan debit minimum sebesar 0,46 m³/det serta PDA Way Besai Sukajaya dengan debit maksimum sebesar 99,35 m³/det dan debit minimum sebesar 2,95 m³/det. 10 PDA lainnya dalam kondisi rusak atau hilang.

Kualitas Air di WS Mesuji-Tulang Bawang berdasarkan hasil Uji Laboratorium terhadap pengambilan contoh air pada beberapa titik di WS Mesuji-Tulang Bawang, khususnya yang berkaitan dengan *Biological Oxygen Demands* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terlihat bahwa titik-titik pengambilan contoh air pada musim kemarau mempunyai nilai BOD antara 42 sampai dengan 141,9 ppm, yang masih berada di bawah ambang batas 150 ppm untuk persyaratan air baku. Nilai ppm tertinggi pada lokasi Way Sabuk di sebelah hulu Kotabumi karena permukiman padat di Tanjung Raja.
2. Kualitas air pada musim kemarau mempunyai nilai COD antara 91,5 sampai dengan 274 ppm, yang masih berada di bawah ambang batas 300 ppm untuk persyaratan air baku. Nilai ppm tertinggi pada lokasi Way Tulang Bawang di Menggala karena adanya Pabrik Tapioka, PT. Huma Indah Mekar.

Tabel 4.4 Neraca Air Eksisting WS Mesuji-Tulang Bawang

No.	Kebutuhan Air	Penggunaan Air		
		Juta m ³ /th	m ³ /dt	%
1.	Irigasi			
	WD Up Rarem	15.156	0.481	27.77
	WD Down Rarem	1.923	0.061	3.52
	WD Up Sabuk	7.237	0.229	13.22
	WD Down Sabuk	7.019	0.223	12.88
	WD Sungkai	0.292	0.009	0.52
	WD Besai 1	8.189	0.26	15.01
	WD Besai 4	3.492	0.111	6.41
	WD Campang Selapan	0.524	0.017	0.98
	WD Up Umpu	7.637	0.242	13.97
	WD Pisang	3.162	0.1	5.77
	Sub Total	54.631	1.733	100
	D.I. Way Umpu	132.552	4.203	8.84
	D.I. Tulung mas	60.972	1.933	4.06
	D.I. Bumi Agung	95.163	3.018	6.35
	D.I. Way Rarem	424.846	13.472	28.33
	D.I. Rawa Pitu	184.513	5.851	12.30
	D.I. Rawa Mesuji	284.034	9.007	18.94
	D.I. Rawa Jitu	317.738	10.075	21.18
	Sub Total	1499.811	47.559	100.00
	Kebutuhan Air Baku RKI			

No.	Kebutuhan Air	Penggunaan Air		
		Juta m ³ /th	m ³ /dt	%
	Kebutuhan Air Baku RKI			
	Way Kanan	5.522	0.175	19.91
	Way Bumi	7.605	0.241	27.42
	Limau Kunci	2.335	0.074	8.42
	Way Tuba	10.54	0.334	38.00
	Kayu Agung	1.704	0.054	6.14
	Sub Total	19.912	0.631	100.0
	Tambak Dipasena1	1040.179	32.984	40.08
	Tambak Dipasena2	1266.625	40.164	48.80
	Tambak Dipasena3	288.448	9.146	11.11
	Sub Total	2595.211	82.294	100.00
	Total Kebutuhan Air	4169.565	138.500	
	Potensi Ketersediaan Air (Q80%)	20492.09	649.8	

Sumber: Hasil Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji-Tulang Bawang, Tahun 2012

Pemanfaatan air di WS Mesuji-Tulang Bawang untuk memenuhi kebutuhan irigasi sebesar 49.292 m³/det, untuk rumah tangga perkotaan dan industri dan tambak 82.925 m³/det, dan kebutuhan total mencapai 138.500 m³/det. Kebutuhan air tersebut masih jauh di bawah potensi ketersediaan air mencapai 649.8 m³/det. Dengan tingkat keandalan 80% (Batasan Kriteria Perencanaan Irigasi, Dirjen Pengairan, 1986).

Permasalahan pada aspek pendayagunaan SDA secara umum di WS Mesuji-Tulang Bawang adalah:

1. Berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi;
2. Pengembangan irigasi mikro masih terbatas;
3. Ketersediaan air bersih masih sangat kurang karena sedikitnya sumber air dan topografi yang datar, serta kualitas air yang rendah akibat pencemaran sumber air;
4. Air sungai menjadi keruh saat musim hujan sehingga tidak dapat dimanfaatkan;
5. Banyak jaringan irigasi yang rusak;
6. Infrastruktur Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan desa (JIDES) masih sangat terbatas;
7. Pariwisata air belum dikembangkan secara profesional; dan
8. Belum banyak tersedia tampungan air berupa waduk.

Kondisi Air Baku WS Mesuji-Tulang Bawang antara lain terdapat prasarana Sumber Daya Air yang telah dibangun untuk melayani kebutuhan air minum perkotaan di WS Mesuji-Tulang Bawang, dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber air, (sumber PDAM masing-masing kabupaten di WS Mesuji-Tulang Bawang), yaitu:

1. Sumber Air dari Air Permukaan
 - a. Pompa *Intake* Sungai Way Rarem oleh PDAM unit Kotabumi, kapasitas terpasang 100 lt/dt dengan cakupan layanan wilayah Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Utara dan Kecamatan Kotabumi Selatan.
 - b. Pompa *Intake* Sungai Way Pengubuan oleh PDAM unit Kalibalangan, kapasitas terpasang 10 lt/dt dengan cakupan layanan wilayah Kecamatan Abung Selatan.
 - c. Pompa *Intake* Sungai Way Tulang Bawang oleh PDAM unit Menggala, kapasitas terpasang 20 lt/dt dengan cakupan layanan wilayah Kecamatan Menggala.
 - d. Pompa *Intake* Sungai Way Pidada oleh PDAM unit Rawa Jitu, kapasitas terpasang 20 lt/dt dengan cakupan layanan wilayah Kecamatan Menggala.
2. Sumber Air dari Air Tanah Dalam dari 9 (sembilan) unit sumur bor air tanah dalam di WS Mesuji-Tulang Bawang, ternyata hanya 3 (tiga) unit yang beroperasi, yaitu:
 - a. Sumur bor pada unit PDAM Madukoro sedalam 130 m yang dilengkapi pompa kapasitas 6 lt/dt dengan cakupan layanan Kecamatan Sungkai Selatan.
 - b. Sumur bor pada unit PDAM Madukoro sedalam 130 m yang dilengkapi pompa kapasitas 6 lt/dt dengan cakupan layanan Kecamatan Kotabumi Utara.
 - c. Sumur bor pada unit PDAM Mulya Asri sedalam 130 m yang dilengkapi pompa kapasitas 5 lt/dt dengan cakupan layanan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
3. Sumber Air dari Mata Air
 - a. Mata Air Way Abung-Timah yang dikelola oleh PDAM unit Bukit Kemuning dengan pemanfaatan 30 lt/dt yang melayani wilayah Kecamatan Bukit Kemuning.
 - b. Mata Air Way Sabuk yang dikelola oleh PDAM unit Tanjung Raja dengan pemanfaatan 10,2 lt/dt yang melayani Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Ogan-Lima.
 - c. Mata Air Way Kulur yang dikelola oleh PDAM Unit Subik dengan pemanfaatan 7 l/det melayani Kec. Abung Tengah.

Infrastuktur Sumber Daya Air antara lain Bangunan Tampungan Air meliputi Danau, Bendungan dan bendung, Infrastruktur Daerah Irigasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air. Jenis bangunan tampungan air berupa danau, bendungan, bendung, serta embung. Berikut merupakan tabel jumlah jenis bangunan infrastuktur tampungan air di Provinsi Lampung:

Tabel 4.5 Jumlah Jenis Bangunan Infrastuktur Tampung Air

Jenis	Total
Danau	2
Bendungan	5
Bendung	16
Embung	154

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Adapun berdasarkan tabel di atas, jenis bangunan infrastuktur tampung air di Provinsi Lampung yang memiliki total terbanyak yaitu jenis embung dengan jumlah 154 embung. Selain itu, terdapat jenis tampungan air berupa danau dengan total 2 danau. Dan bendungan dengan total 5 bendungan. Serta bendung dengan total 16 bendung. Berikut tabel nama dan lokasi danau di Provinsi Lampung:

Tabel 4.6 Nama dan Lokasi Danau di Provinsi Lampung

No	Nama	Wilayah Sungai
1	Situ Ham	Seputih-Sekampung
2	Tirtagangga	Seputih-Sekampung

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 2 danau yaitu Danau Situ Ham serta Danau Tirtagangga yang berada pada sekitar wilayah Sungai Seputih hingga Sungai Sekampung.

Berikut ini tabel nama dan lokasi bendungan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.7 Nama dan Lokasi Bendungan di Provinsi Lampung

No	Nama	Wilayah Sungai	Vol Tampungan (m3)
1	Marga Tiga	Seputih-Sekampung	(Proses pembangunan)
2	Way Rarem	Mesuji-Tulang Bawang	72.000.000
3	Way Sekampung	Seputih-Sekampung	68.060.000
4	Batutegi	Seputih-Sekampung	9.620.000
5	Way Jepara	Seputih-Sekampung	32.000.000

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 5 danau yaitu Bendungan Marga Tiga yang masih dalam proses pembangunan. Bendungan Way Rarem, dengan volume tampung 72.000.000 (m³). Bendungan Way Sekampung, dengan volume tampung 68.060.000 (m³). Bendungan Batutegi, dengan volume tampung 9.620.000 (m³) dan Bendungan Way Jepara, dengan volume tampung 32.000.000 (m³). Bendungan - bendungan tersebut berada pada sekitar wilayah Sungai Seputih hingga Sungai Sekampung.

Adapun berikut tabel nama dan lokasi bendung di Provinsi

Lampung:

Tabel 4.8 Nama dan Lokasi Bendung di Provinsi Lampung

No	Nama	Wilayah Sungai
1	Way Tulung Mas	Mesuji-Tulang Bawang
2	Bumi Agung	Mesuji-Tulang Bawang
3	Way Tebu II	Seputih-Sekampung
4	Way Tebu IV	Seputih-Sekampung
5	Curup	Seputih-Sekampung
6	Ajibaru	Seputih-Sekampung
7	Kandis	Seputih-Sekampung
8	Raman	Seputih-Sekampung
9	Pengubuan	Seputih-Sekampung
10	Garongan	Seputih-Sekampung
11	Way Tebu III	Seputih-Sekampung
12	Gerak Jabung	Seputih-Sekampung
13	Way Umpu	Mesuji-Tulang Bawang
14	Argoguruh	Seputih-Sekampung
15	Biha	Semangka
16	Ngambur	Semangka

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 16 bendung yaitu Bendung Way Tulung Mas, Bumi Agung, dan Bendung Way Umpu berada di wilayah Sungai Mesuji hingga Sungai Tulang Bawang. Adapun bendungan Way Tebu II, Way Tebu IV, Curup, Ajibaru, Kandis, Raman, Pengubuan, Garongan, Way Tebu III, Argoguruh, dan Bendung Gerak Jabung berada di wilayah Sungai Seputih hingga Sungai Sekampung. Dan Bendung Biha dan Bendung Ngambur berada di wilayah sungai Semangka.

Daya Tampung Air merupakan kemampuan perairan danau, waduk, sungai, bendungan dalam menampung beban air sehingga dapat memenuhi baku mutu air. Adapun berikut ini daya tampung bendungan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.9 Daya Tampung Bendungan

No	Nama	Wilayah Sungai	Vol Tampung (m ³)
1	Marga Tiga	Seputih-Sekampung	(Proses pembangunan)
2	Way Rarem	Mesuji-Tulang Bawang	72.000.000
3	Way Sekampung	Seputih-Sekampung	68.060.000
4	Batutegi	Seputih-Sekampung	9.620.000
5	Way Jepara	Seputih-Sekampung	32.000.000

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

a. Bendungan Batutegi



Gambar 4.3 Bendungan Batutegi

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022

Bendungan ini dibangun pada Tahun 1995 – 2004, dan memiliki volume tampung $690 \times 10^6 \text{ m}^3$ (M.A.N). dengan luas genangan 21 km^2 (M.A.N). Fungsi dari bendungan ini pada eksistingnya digunakan untuk PLTA $2 \times 14 \text{ MW}$. Dan menjadi suplai bendungan Way Sekampung untuk irigasi. Serta pada eksistingnya menjadi sistem di Sekampung.

b. Bendungan Way Sekampung



Gambar 4.4 Bendungan Way Sekampung

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022

Bendungan ini dibangun pada Tahun 2016 - 2021, dan memiliki volume tampung $68,06 \times 10^6 \text{ m}^3$ (M.A.N). Dengan luas genangan $5,02 \text{ km}^2$ (M.A.N). Fungsi dari bendungan ini pada

eksistingnya digunakan irigasi sistem Sekampung 55.373 Ha (Punggur Utara, Rumbia Barat, Raman Utara, Sekampung Bunut, Bekri, Batanghari Utara, Sekampung Batanghari). Dan pada eksisting bendungan ini digunakan sebagai air baku yang dimanfaatkan PDAM Pringsewu, Metro, dan Bandar Lampung dengan rata - rata ketersediaan air baku 975 lt/dt. Dan Terdapat irigasi rencana di Rumbia Ekstension 17.334 Ha. Serta air baku rencana 2.742 lt/dt di PDAM Pringsewu, Metro, Branti, Bandar Lampung. Dan terdapat rencana PLTA dengan ukuran 2 x 2, 7 MW.

c. Bendungan Margatiga



Gambar 4.5 Bendungan Margatiga

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022

Bendungan ini dibangun pada Tahun 2017 - 2022, dan memiliki volume tampung 29,96 x 106 m³ (M.A.N). Dengan luas genangan 11,17 km² (M.A.N). Fungsi dari bendungan ini pada eksistingnya digunakan untuk irigasi pada daerah Jabung Kiri 5.638 Ha. Serta pada eksistingnya air baku rata - rata ketersediaan air baku 128.33 lt/dt yang digunakan oleh kawasan industri. Serta terdapat rencana irigasi pada daerah Jabung Kanan dengan luas 10. 950 Ha. Dan terdapat air baku rencana dengan rata - rata ketersediaan 800 lt/dt. Adapun fungsi dari bendungan ini adalah Menurunkan Muka Air Banjir pada Pertemuan dengan Sungai Way Kandis, Way Galih dan Way Sulan > 1,6 m.

d. Bendungan Gerak Jabung



Gambar 4.6 Bendungan Gerak Jabung

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022

Berdasarkan data teknis bendungan ini terdapat jumlah pintu banjir 4 buah. Dan pintu jumlah pintu intake 3 buah. Serta Q intake $10,15 \text{ m}^3/\text{dt}$.

e. Bendungan Argoguruh



Gambar 4.7 Bendungan Argoguruh

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022

Berdasarkan data teknis panjang bendungan ini 140 m. Lengan lebar bendung 1 m. Dan tinggi bendung 5,90 m. Selain itu, Q Freeder Canal I 40, 84 m^3/det . Serta Q Freeder Canal II 55, 78 m^3/dt .

Adapun terdapat 16 bangunan bendung di Provinsi Lampung. Bangunan bendung memiliki fungsi yang digunakan untuk menaikan muka air sungai untuk tetap melewati ketinggian bendung itu sendiri. Dan berikut manfaat bendung yang ada di Provinsi Lampung.

a. Bendung Way Tulung Mas



Gambar 4.8 Bendung Way Tulung Mas

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022

Bendung Way Tulung Mas berada di Kabupaten Lampung Utara. Bendung ini berlokasi antara sungai Mesuji – Tulang Bawang. Bendung Way Tulung Mas dimanfaatkan untuk perairan lahan pertanian di daerah sekitar bendungan serta Bendung Way Tulung Mas juga dimanfaatkan sebagai objek wisata bagi masyarakat sekitar dan digunakan untuk memancing ikan.

- b. Bendung Bumi Agung
Bendung Bumi Agung berada di Kabupaten Lampung Utara. Bendung ini berlokasi antara sungai Mesuji – Tulang Bawang. Bendungan ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan lahan pertanian seluas 5.240 hektare.
- c. Bendung Way Tebu II
Bendung Way Tebu II berada di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Daerah Irigasi Way Tebu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1926. Bendung Way Tebu II ini dimanfaatkan untuk daerah irigasi yang mana diharapkan untuk meningkatkan indeks pertanian dan meningkatkan produksi pertanian.
- d. Bendung Way Tebu IV
Bendung Way Tebu IV berada di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Daerah Irigasi Way Tebu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1926. Bendung Way Tebu II ini dimanfaatkan untuk daerah irigasi yang mana diharapkan untuk meningkatkan indeks pertanian dan meningkatkan produksi pertanian. Sistem Daerah Irigasi Way Tebu terbagi menjadi 3 yaitu Irigasi Way Tebu I – II, Irigasi Way Tebu III, dan Irigasi Way Tebu IV. Daya tampung bendung di setiap daerah irigasi mencapai kurang lebih 180 ribu m³. Tiga Daerah Irigasi Way Tebu tersebut berfungsi menyediakan air irigasi dengan potensi 5.298 ha.
- e. Bendung Curup
Bendung ini berada di Desa Kebundamar, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Bendung ini dimanfaatkan sebagai irigasi dan dimanfaatkan untuk budidaya ikan tawar dalam skala besar.
- f. Bendung Kandis
Bendung ini memiliki potensi air permukaan yang mengalir di Sungai Way Kandis yang berasal dari daerah tangkapan hujan di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan masyarakat di sekitarnya.
- g. Bendung Raman
Bendung raman ini berada di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Bendung Raman merupakan sumber irigasi atau pengairan utama untuk ladang dan persawahan di Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.
- h. Bendung Pengubuan
Bendung pengubuan merupakan daerah sungai yang berada di Provinsi Lampung. Sungai ini mengalir lebih dari 15 kilometer, yang berhulu di Kampung Gedung Hartha Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.
- i. Bendung Garongan

Bendungan garongan terletak diantara desa Swadaya dan Desa Bumi Jawa, Kabupaten Lampung Timur. Bendung garongan ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengaliri pertanian dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat sekitar.

j. Bendung Way Tebu III

Bendung Way Tebu III berfungsi untuk menyediakan air irigasi. Bendung ini merupakan bendung tipe tetap dengan konstruksi pasangan batu yang terletak di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Luas area bendung Way Tebu III sekitar 5 Ha. Bendung Way Tebu III terkoneksi dengan bendung Way Tebu IV melalui saluran induk yang disuplesi ke Way Semah (Bendung Way Tebu III membendung sungai Way Semah), Bendung Tebu Way IV yang terkoneksi dengan Bendung Way Tebu I-II melalui saluran induk yang disuplesi melalui sungai Way Napal, sehingga debit air yang ada pada Bendung Way Tebu III terpengaruh dari bukaan pintu pada Bendung Way Tebu IV dan Bendung Way Tebu I – II.

k. Bendung Gerak Jabung

Bendung Gerak Jabung berada di wilayah Kabupaten Lampung. Bendung Gerak Jabung dimanfaatkan untuk area sawah di dua kecamatan ini yang dapat diari dari Bendung Gerak Jabung seluas 6.542 hektar.

l. Bendung Way Umpu

Bendung Way Umpu berada di Way Kanan, Lampung. Bendung ini digunakan untuk mencegah resiko terjadi banjir. Mengingat sungai Way Kanan memiliki debit air yang sangat tinggi, dan sangat rawan banjir ketika musim hujan. Selain itu, bendung ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan menjadi spot untuk memancing ikan bagi masyarakat sekitar.

m. Bendung Argoguruh

Bendung Argoguruh Tegineneng, Kab Pesawaran, dibangun tahun 1935. Pembangunan bendung ini merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan politik etis Belanda di bidang irigasi. Bendung Argoguruh 1935 adalah bangunan berupa bendung (stuwdam) yang membendung sungai Way Sekampung. Fungsinya untuk menaikkan permukaan air sehingga air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah di Kolonisasi Sukadana, Lampung, yang sekarang mengalir ladang dan persawahan untuk Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.

n. Bendung Biha

Bendung Biha berada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Bendung ini dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pertanian dan menjadi objek wisata, seperti spot foto hingga digunakan untuk memancing ikan.

Infrastuktur Daerah Irigasi menurut kewenangan daerah irigasi terdiri dari yaitu:

1. Kewenangan Pusat dengan luasan 233.705 Ha, dengan 18 DI dengan presentase 59.52 %.
2. Kewenangan Provinsi dengan luasan 23. 623 Ha, dengan 29 DI dengan presentase 6, 02 %.
3. Kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan 131.303 Ha, dengan 1.199 DI dengan presentase 33,44 %.

Daerah irigasi di Provinsi Lampung memiliki total luas 392.631 Ha. Dengan daerah irigasi dibagi menjadi 2 yaitu irigasi dan rawa. Adapun daerah irigasi dengan total 336.058 Ha, meliputi irigasi permukaan dengan total 333.201 Ha, irigasi air tanah 2.857 Ha, dan daerah irigasi pompa dengan total – Ha. Sedangkan daerah rawa dengan total 56.573 Ha, meliputi rawa dengan total 52.573 Ha. Dan daerah tambak dengan total 4.000 Ha. Berikut ini tabel luas daerah irigasi menurut kewenangan pusat:

Tabel 4.10 Luas Daerah Irigasi Menurut Kewenangan Pusat

Daerah Irigasi	Luas (Ha)
Way Seputih	20.201
Way Sekampung	76.006
Way Rarem	21.110
Way Pengubuan	5.000
Way Bumi Agung	5.240
Way Tulung Mas	3.200
Way Umpu	7.500
Way Tebu Sistem	4.188
Way Jepara	6.651
Way Curup	4.689
Jabung	7.288
Karya Tani	5.187
Way Kandis II	3.500
Pisang	10.525
Rawa Mesuji Atas	16.238
Tambak Rakyat	4.000
Rawa JITU	17.515
Rawa PITU	10.529

Sumber: BBWS Mesuji – Sekampung, 2022 dan Peraturan Menteri PUPR No. 14, 2015

Kebutuhan Air Irigasi Provinsi Lampung terbagi menjadi dua wilayah yaitu Wilayah Sungai (WS) Tulang Bawang dan Wilayah Sungai (WS) Seputih Sekampung. Berikut ini tabel kebutuhan dari dua wilayah tersebut:

Tabel 4.11 Kebutuhan Air Irigasi WS Mesuji Tulang Bawang

No	Kebutuhan Air	Penggunaan Air		
		Juta m ³ /th	m ³ /dt	%
I	Irigasi			
1	WD_Up Rarem	15,16	0,48	27,77
2	WD_Down Rarem	1,92	0,06	3,52
3	WD_Up Sabuk	7,24	0,23	13,22
4	WD_Down Sabuk	7,02	0,22	12,88
5	WD_Sungkai	0,29	0,01	0,52
6	WD_Besai 1	8,19	0,26	15,01
7	WD_Besai 4	3,49	0,11	6,41
8	WD_Campang Selapan	0,52	0,02	0,98
9	WD_Up Umpu	7,64	0,24	13,97
10	WD_Pisang	3,16	0,10	5,77
	Sub Total	54,63	1,73	100,00
11	D.I. Way Umpu	132,55	4,20	8,84
12	D.I. Tulung Mas	60,97	1,93	4,06
13	D.I. Bumi Agung	95,16	3,02	6,35
14	D.I. Way Rarem	424,85	13,47	28,33
15	D.I. Rawa Pitu	184,51	5,85	12,30
16	D.I. Rawa Mesuji	284,51	9,01	18,94
17	D.I. Rawa Jitu	317,74	10,08	21,18
	Sub Total	1.499,81	47,56	100,00

Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji Tulang Bawang, 2016 dan Pola Pengelolaan

Berdasarkan tabel di atas kebutuhan air irigasi pada daerah WS Mesuji Tulang Bawang yang membutuhkan kebutuhan paling banyak berada pada WD_Up Rarem dengan kebutuhan 15,16 Juta m³/dt, dengan presentase 27,77 %. Serta daerah D.I. Way Rarem dengan kebutuhan 424,85 Juta m³/dt, dengan presentase 28,33 %.

Tabel 4.12 Kebutuhan Air Irigasi WS Seputih Sekampung

No	Kebutuhan Air	Penggunaan Air			
		Juta m ³ /th	m ³ /det	%	Sub Total
I	Irigasi				
1	Sub DAS Batanghari	0	0	0	
2	Sub DAS Way Ilahan	152.78	4.845	3.47	
3	Sub DAS Way Tebu	233.07	7.391	5.29	
4	Sub DAS Sekampung Anak	25.94	0.822	0.59	

No	Kebutuhan Air	Penggunaan Air			
		Juta m ³ /th	m ³ /det	%	Sub Total
5	Sub DAS Way Bulok	559.37	17.738	12.70	
6	Sub DAS Way Semah	113.25	3.591	2.57	
7	Sub DAS Way Pisang	114.5	3.631	2.6	
8	Sub DAS Way Bekarang	0	0	0	
9	Sub DAS Rawasragi	0	0	0	
10	Sub DAS Way Ketibung	79.74	2.529	1.81	
11	Sub DAS Way Sulan	41.6	1.319	0.94	
12	Sub DAS Way Galih	35.13	1.114	0.8	
13	Sub DAS Way Kandis Besar	58.7	1.861	1.33	
14	Sub DAS Sekampung Argoguruh	2.35	0.075	0.05	
15	Sub DAS Way Indomiwon	6.17	0.196	0.14	
16	Sub DAS Raman	0	0	0	
17	Sub DAS Batanghari Hulu	99.18	3.145	2.25	
18	Sub DAS Segala Mider	23.94	0.759	0.54	
19	Sub DAS Terusan Hulu	5.72	0.181	0.13	
20	Sub DAS Seputih Surabaya	96.96	3.075	2.2	
21	Sub DAS Pegadungan	49.95	1.584	1.13	
22	Sub DAS Sukadana	29.63	0.940	0.67	
23	Sub DAS Batanghari Hilir	13.89	0.441	0.32	
24	Sub DAS Pengubuan Hilir	11.11	0.352	0.25	
25	Sub DAS Pengubuan Tengah	44.87	1.423	1.02	
26	Sub DAS Pengubuan Hulu	20.75	0.658	0.47	
27	Sub DAS Way Tipo	39.89	1.265	0.91	
28	Sub DAS Way Waya	103.65	3.287	2.35	
29	Sub DAS Komering	50.54	1.603	1.15	
30	Sub Das Way Tatayan	116.79	3.703	2.65	
31	Sub DAS Way Pubian	101.73	3.226	2.31	
32	D.I. Pengubuan	55.42	1.757	1.26	
33	D.I. Seputih	331.04	10.497	7.52	
34	D.I. Bekri	150.46	4.771	3.42	
35	D.I. Sekampung Bunut	127.05	4.029	2.89	
36	D.I. Raman Utara	105.64	3.35	2.40	
37	D.I. Sekampung Batanghari	315.83	10.015	7.17	
38	D.I. Batanghari Utara	147.07	4.664	3.34	
39	D.I. Punggur Utara	547.42	17.359	12.43	

Sumber: Pengelolaan Sumber Daya Air WS Seputih Sekampung, 2010

Sedangkan pada daerah WS Seputih Sekampung yang membutuhkan kebutuhan paling banyak berada pada Sub DAS Way Bulok dengan kebutuhan 559.37Juta m³/dt, dengan presentase 12,70 %. Serta daerah D.I. Punggur Utara dengan kebutuhan 547.42Juta m³/dt, dengan presentase 12.43 %.

Infrastuktur Pengendalian Daya Rusak Air di Provinsi Lampung merupakan pembangunan pengaman pantai. Pengaman pantai digunakan untuk melindungi pantai dan bangunan sekitarnya

sebagai aset pariwisata. Berikut ini tabel nama dan pembangunan pengaman pantai di Provinsi Lampung:

Tabel 4.13 Nama dan Lokasi Pembangunan Pengalaman Pantai di Provinsi Lampung

No	Nama Bangunan	Panjang (m)	Material
1	Jetty Way Lunik	300	Buis Beton
2	Pembangunan Pengaman Pantai Ketapang	594	Beton
3	Pembangunan Penahan Gelombang Pantai Muara Gading Mas	310	Batu
4	Pembangunan Pengaman Pantai Banding	900	Beton
5	Pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda (Pantai Maja)	1.352	Armor Batu
6	Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Sukaraja)	2.200	Beton Armor Batu Grass Block Paving

Sumber: BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 6 pembangunan pengaman pantai di Provinsi Lampung. Yaitu pembangunan Jetty Way Lunik dengan panjang 300 m, dengan material Buis Beton. Pembangunan Pengaman Pantai Ketapang dengan panjang 594 m, dengan material beton. Pembangunan Penahan Gelombang Pantai Muara Gading Mas dengan panjang 310, dengan material batu. Pembangunan Pengaman Pantai Banding dengan panjang 900 m, dengan material beton. Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Maja) dengan panjang 1.352 m, dengan material armor batu. Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Sukaraja) dengan panjang 2.200 m, dengan material beton, armor batu, grass block paving.

Kebutuhan Air RKI (Rumah Tangga, Kota, Industri) di Provinsi Lampung terdapat di berbagai kota dan kabupaten. Berikut ini tabel kebutuhan RKI Provinsi Lampung:

Tabel 4.14 Kebutuhan RKI Provinsi Lampung

No	Kebutuhan Air	Penggunaan Air	
		Juta m ³ /dt	m ³ /dt
1	BLK Pringsewu	1,26	0,04
2	Kota Pringsewu	3,28	0,104
3	Kota Metro	3,63	0,115
4	Kota Natar/Bandara Branti	0,68	0,022
5	Kota Bandarjaya	2,01	0,064
6	Kota Gunung Sugih	1,44	0,046
7	Kota Sukadana	0,62	0,020
8	Kota Bandar Lampung	37,05	1,175
9	Kota Kalianda	2,58	0,082
10	Pengglontoran Sekampung	119,84	3,800
11	Pengglontoran Seputih	63,07	2,000
12	Way Kanan	5,52	0,18
13	Way Bumi	7,61	0,24
14	Limau Kunci	2,34	0,07
15	Way Tuba	10,54	0,33
16	Kayu Agung	1,7	0,05

Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji Tulang Bawang, 2016

Berdasarkan tabel di atas kebutuhan RKI pada Provinsi Lampung yang membutuhkan kebutuhan paling banyak berada pada daerah Pengglontoran Sekampung. Kebutuhan tersebut dibutuhkan dengan rata – rata penggunaan air 119,84 Juta m³/dt.

Berikut merupakan tabel pemanfaatan air RKI di Provinsi Lampung:

Tabel 4.15 Pemanfaatan Air di Provinsi Lampung

Pemanfaatan	Juta m ³ /tahun	m ³ /dt	Persen
Irigasi	1.063,00	33,69	3,17
RKI	1,01	0,03	0,00
Air Waduk	6,16	0,20	0,02
Tambak	2.700,32	85,62	8,06

Pemanfaatan	Jutam3/tahun	m3/dt	Persen
Terbuang ke Laut	29.714,58	942,24	88,74
Jumlah	33.485,07	1.062	100,00

Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji Tulang Bawang, 2016

Berdasarkan tabel di atas, pemanfaatan air di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah terbanyak yaitu terbuang ke laut dengan jumlah 29.714,58 Juta m3/Tahun. Dengan presentase 88,74 %.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Sumber Daya Air yang terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.16 Monitoring Infrastruktur Sumber Daya Air

No.	Infrastruktur	Volume	Satuan	Lokasi
1	Pengamanan Pantai Kalianda	4.98	Km	Kab. Lampung Selatan
2	Tambak di Provinsi Lampung	20	Kilometer	Provinsi Lampung
3	DI Rawa Mesuji Tulang Bawang Unit II	1	Kilometer	Kab. Mesuji dan Tulangbawang
4	DI Way Sekampung (Sub DI Batanghari Utara)	1	Kilometer	Kab. Lampung Timur
5	Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia (URSIS)	1	Kilometer	Provinsi Lampung
6	Daerah Irigasi Way Rarem	0.0001	Kilometer	Provinsi Lampung
7	Daerah Irigasi Way Umpu Saluran Sekunder	0.0001	Dokumen	Provinsi Lampung
8	Penyediaan Air Baku Pulau Pisang	6	Kilometer	Kab. Pesisir Barat

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023

4.1.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.17 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Kawasan Pertanian

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
Kawasan Pertanian Lampung Tengah			
Wilayah Sungai	Wilayah Sungai Seputih-Sekampung	Luas: 3 1.463.700 Ha	
Daerah Irigasi	D.I. Way Pangubuan	Luas: 4.990 Ha	Rata-rata nilai IKSI Gabungan berada pada range 40-60 (berada dalam kategori kurang) Sumber: epaksi 2019-2022
	D.I. Way Sekampung	Luas: 38.653 Ha	Rata-rata nilai IKSI Gabungan berada pada range 40-60 (berada dalam kategori kurang) Sumber: epaksi 2019-2022
	D.I. Way Seputih	Luas: 20.201 Ha	Rata-rata nilai IKSI Gabungan berada pada range < 40 (dalam kategori kurang) Sumber: epaksi 2019-2022
Kawasan Pertanian Mesuji			
Wilayah Sungai	Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang	Luas: 3 16.625 km ²	
Sistem Jaringan Air Baku (Air Permukaan)	Wiralaga	Lokasi: Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji Tahun Kegiatan: 2000 Debit: 5 l/d Jenis Pengambilan Intake: Free Intake	Aset hilang
Daerah Irigasi	D.I.R. Rawa Jitu	Luas: 9.280 Ha	Rata-rata nilai IKSI Gabungan berada pada range 40- 60 (berada dalam kategori kurang) Sumber: epaksi 2019-2022
	D.I.R. Rawa Mesuji Atas	Luas: 16.328 Ha	Rata-rata nilai IKSI Gabungan berada pada range > 60 (berada dalam kategori sedang) Sumber: epaksi 2019

Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2022

4.1.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.18 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Kawasan Perkotaan

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
Kawasan PKN Bandar Lampung			
Wilayah Sungai	Wilayah Sungai Seputih-Sekampung	Luas: 3 1.463.700 Ha	

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
Kawasan PKN Bandar Lampung			
Sistem Jaringan Air Baku (Air Permukaan)	Way Jernih	- Lokasi: Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat - Tahun Kegiatan: 2008, 2010, 2016 - Debit: 100 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Bendung Tetap	- Rencana: 100 l/d - Realisasi: 100 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: PDAM - Rehab TA.2010, 2016 (beroperasi)
	Way Betung	- Lokasi: Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara - Tahun Kegiatan: 2008, 2010, 2013 - Debit: 150 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Bendung Tetap	- Rencana: 150 l/d - Realisasi: 150 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: PDAM - Rehab TA.2010, 2013 (beroperasi)
	Way Kuripan	- Lokasi: Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat - Tahun Kegiatan: 2008, 2010, 2013	- Rencana: 150 l/d - Realisasi: 150 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: PDAM - Rehab TA.2010, 2013 (beroperasi)
Pengendalian Daya Rusak Air	Pengaman Pantai Jetty Way Lunik	- Lokasi: Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang - Panjang: 300 m - Tahun Pembangunan: 2007 - Material: Buis Beton - Jenis Bangunan: Jetty	Baik/Beroperasi

Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2022

4.1.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Perencanaan Pariwisata

Berikut merupakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung

Tabel 4.19 Profil Infrastruktur Fokus Kawasan Pariwisata

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya			
Wilayah Sungai	Wilayah Sungai Seputih-Sekampung	Luas: 3 1.463.700 Ha	
Sistem Jaringan Air Baku (Air Permukaan)	Way Karya	- Lokasi: Desa Marga Batin, Kecamatan Waway Karya - Tahun Kegiatan: 2008 - Debit: 20 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Free Intake	- Rencana: 20 l/d - Realisasi: - - Idle capacity: 20 l/d - Pengelola: PDAM - Rehab TA.2010, 2016 (beroperasi)
Daerah Irigasi	D.I. Way Sekampung	33.587 Ha	Rata-rata nilai IKSI Gabungan berada pada range 40-60 (berada dalam kategori kurang) Sumber: epaksi 2019-2022
Pengendalian Daya Rusak Air	Pembangunan Pengaman Pantai Muara Gading Mas (Lanjutan) II	Tahun Pembangunan: 2015	N/A
	Pengaman Pa Pembangunan Pengaman Pantai Muara Gading Mas (Lanjutan) II ntai Jetty Way Lunik	Tahun Pembangunan: 2014	N/A
Bendung	Bendung Gerak Jabung	- Lokasi: Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya - Jenis Bendungan: Gerak	- Manfaat: Irigasi 14.138 Ha - Kondisi: Baik/Beroperasi
	Bendung Garongan	Jenis Bendungan: Tetap	- Manfaat: Irigasi 7.726 Ha - Kondisi: Rusak Ringan
	Bendung Curup	- Lokasi: Desa Rajabasa Baru, Kec. Mataram Baru - Jenis Bendungan: Tetap	- Manfaat: Irigasi 4.689 Ha - Kondisi: Rusak Ringan
	Bendung Raman	Lokasi: Desa Wonosari, Kec. Pekalongan	Manfaat: Irigasi 4.689 Ha

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
		Jenis Bendungan: Tetap	Kondisi: Rusak Ringan
Bendungan	Bendungan Way Jepara	- Lokasi: Desa Sumur Bandung, Kec. Way Jepara - Tahun Pembangunan: 1975-1978 - Volume Tampungan: 32.000.000 m³ - Tipe Bendungan: Urugan Tanah	Manfaat: Irigasi 6.641 Ha
	Bendungan Marga Tiga	- Lokasi: Desa Negeri jemanten, Kec. Marga Tiga - Tahun Pembangunan: 2018-2023 (sedang dibangun) - Volume tampungan: 29,96 x 106 m³ (M.A.N) - Luas Genangan 11,17 km² (M.A.N) - Tipe Bendungan: Urugan Batu	Sedang dibangun, belum beroperasi
Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya			
Wilayah Sungai	Wilayah Sungai Seputih-Sekampung	Luas: 3 1.463.700 Ha	
Sistem Jaringan Air Baku (Air Permukaan)	Way Biah	- Lokasi: Desa Canti, Kec. Kalianda - Tahun Kegiatan: 2001 - Debit: 30 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Free Intake	- Rencana: 30 l/d - Realisasi: 30 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: PDAM
	Way Ujau	- Lokasi: Desa Rajabasa, Kec. Kalianda - Tahun Kegiatan: 2002 - Debit: 20 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Bendungan Tetap	- Rencana: 30 l/d - Realisasi: 30 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: PDAM - Tindaklanjut pengelolaan SPAM (tidak beroperasi)
	Rajabasa	- Lokasi: Desa Rajabasa, Kec. Kalianda - Tahun Kegiatan: 2002 - Debit: 3 l/d - Jenis Pengambilan	- Rencana: 3 l/d - Realisasi: 3 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: Desa

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
		Intake: Free Intake	
	Way Andeng	- Lokasi: Desa Toto Harjo, Kec. Kali - Tahun Kegiatan: 2003 - Debit: 40 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Bendungan Tetap	- Rencana: 40 l/d - Realisasi: - - Idle capacity: 40 l/d - Pengelola: PDAM - Tindaklanjut pengelolaan SPAM (tidak beroperasi)
	Gayam	- Lokasi: Desa Gayam, Kec. Panengahan - Tahun Kegiatan: 2007 - Debit: 5 l/d - Jenis Pengambilan Intake: Free Intake	- Rencana: 5 l/d - Realisasi: 5 l/d - Idle capacity: - - Pengelola: Desa - Aset Hilang (Banjir Bandang)
Bendung	Bendung Argoguruh	- Lokasi: Desa Helok, Kec. Natar - Jenis Bendung: Tetap	- Manfaat: Irigasi 66.573 Ha - Kondisi: Baik/Beroperasi
Pengendalian Daya Rusak Air	Pembangunan Pengamanan Pantai Ketapang	- Lokasi: Desa Ketapang, Kec. Ketapang - Tahun Pembangunan: 2014 - Jenis Bangunan: Revetment - Panjang: 594 m - Material: Beton	- Kondisi: Baik/Beroperasi - Manfaat: Perlindungan terhadap fasilitas umum dan permukiman
	Pembangunan Pengamanan Pantai Banding	- Lokasi: Desa Banding, Kec. Rajabasa - Tahun Pembangunan: 2014 - Jenis Bangunan: Revetment - Panjang: 900 m - Material: Beton	- Kondisi: Rusak Ringan - Manfaat: Perlindungan terhadap fasilitas umum dan permukiman
	Pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda (Pantai Maja) Kabupaten Lampung Selatan	- Lokasi: Desa Maja, Kec. Kalianda - Tahun Pembangunan: 2021 - Jenis Bangunan: Revetment - Panjang: 1.352 m - Material: Armor Batu, Timbunan Tanah	- Kondisi: Baik/Beroperasi - Manfaat: Perlindungan terhadap fasilitas umum dan permukiman
	Pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda	Lokasi: Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa	- Kondisi: Baik/Beroperasi - Manfaat: Perlindungan

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
	(Sukaraja) Kabupaten Lampung Selatan	- Tahun Pembangunan: 2021 - Panjang: 2.200 m - Material: Beton, Armor Batu, Timbunan Tanah, Grass Block, Paving	terhadap fasilitas umum dan permukiman

Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2022

4.1.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Tabel 4.20 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas Provinsi Lampung

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
Bendungan	Way Sekampung	- Lokasi: Desa Banjarejo, Kec. Banyumas, Kabupaten Pringsewu - Tahun Pembangunan: 2016 - Tipe: Timbunan batu, zonasi dengan inti tegak - Volume tampungan: 68,06 x 106 m³ (M.A.N)	- Kondisi: Baik/Beroperasi - Manfaat: Mengairi daerah irigasi Sekampung System 55.000 Ha dan penyediaan air baku yang telah memenuhi kebutuhan untuk Kabupaten Pringsewu sehingga penyediaan air baku ini mampu meningkatkan jam operasional PDAM dalam pendistribusian air minum dari semula 14 jam menjadi 24 jam, namun belum terdapat penambahan SR dari semula
Pengendalian Daya Rusak Air	Pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda (Pantai Maja)	- Lokasi: Desa Maja, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan - Tahun Pembangunan: 2021 - Jenis Bangunan: Revetment - Panjang: 1.352 m - Material: Armor Batu, Timbunan Tanah	- Kondisi: Baik/Beroperasi - Manfaat: Mengamankan pantai sepanjang 2,14 km dan 160 Ha pada bagian hulu dari dampak bencana tsunami, serta mencegah pergeseran garis pantai dampak abrasi air laut
	Pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda (Sukaraja)	Lokasi: Desa Sukaraja, Kec. Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan	- Kondisi: Baik/Beroperasi - Manfaat: Mengamankan pantai sepanjang 1,34 km dan 240 Ha pada bagian hulu dari dampak bencana

Infrastruktur			Profil dan Kinerja
		- Tahun Pembangunan: 2021 - Panjang: 2.200 m - Material: Beton, Armor Batu, Timbunan Tanah, Grass Block, Paving	tsunami, serta mencegah pergeseran garis pantai dampak abrasi air laut

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2. Profil dan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur Sistem Jaringan Jalan berupa Jalan Nasional dimana Merujuk pada SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015, jalan nasional di Provinsi Lampung sepanjang 1.292,21 Km. Dari data *Interurban Road Management System* (IRMS), tingkat kemantapan jalan di Provinsi Lampung pada Semester 1 Tahun 2021 sebesar 93,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di Provinsi Lampung memiliki status yang cukup baik. Berikut presentase kemantapan Jalan nasional di Provinsi Lampung dari hasil survei Semester 2 Tahun 2020 dan survei Semester 1 Tahun 2021:

Tabel 4.21 Persentase Kemantapan Jalan

No.	Survei	Mantap	Tidak Mantap
1	Semester 2 Tahun 2020	90,28%	9,72%
2	Semester 1 Tahun 2021	93,21%	6,79%

Sumber: BPJN Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 kemantapan jalan mengalami kenaikan, diharapkan dengan kondisi ini dapat mendorong mobilisasi baik orang maupun barang yang semakin baik di sektor transportasi.

Tabel 4.22 Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung

No	Nama Ruas	VCR	LoS
1	PEMATANG PANGGANG - SP. PEMATANG	0,472	C
2	SP. PEMATANG - SP. BUJUNG TENUK	0,475	C
3	SP. BUJUNG TENUK - BTS. KAB. LAMTENG/KAB. TL. BAWANG	0,328	B
4	BTS. KAB. LAMTENG/KAB.TL.BAWANG - BTS. KAB.LAMTENG/KAB. LAMTIM	0,371	B
5	BTS. KAB. LAMTENG/KAB.LAMTIM - WAY JEPARA	0,462	C

RPIW Provinsi Lampung
Tahun 2025 – 2034

No	Nama Ruas	VCR	LoS
6	WAY JEPARA - WAY SKP. BUNUT (BTS.KAB.LAMSEL/KAB.LAMTIM)	0,417	B
7	WAY SKP. BUNUT (BTS.KAB.LAMSEL/KAB.LAMTIM) - SP. BAKAUHENI	0,278	B
8	BTS. Provinsi SUMSEL - SP. EMPAT	0,312	B
9	SP. EMPAT - BUKIT KEMUNING	0,54	C
10	BUKIT KEMUNING - SIMP. KOTA KOTABUMI (KOTA ALAM)	0,534	C
11	SIMP. KOTA KOTABUMI (KOTA ALAM) - KLP. TUJUH (JLN. SOEKARNO-HATTA - KOTABUMI)	0,786	D
12	SIMP. KOTA KOTABUMI (KLP. TUJUH) - TERBANGGI BESAR	0,621	C
13	TERBANGGI BESAR - GUNUNG SUGIH	1,128	F
14	GUNUNG SUGIH - TEGINENENG	0,766	D
15	TEGINENENG - SP. T.J. KARANG	0,952	E
16	SP. T.J. KARANG - SP. TIGA TELUK AMBON (JLN. SOEKARNO HATTA (BANDAR LAMPUNG)	1,039	F
17	SP. TIGA TELUK AMBON - KM.10 (PANJANG) (BANDAR LAMPUNG)	0,944	E
18	KM.10 (PANJANG) - BTS. KOTA (SUKAMAJU) (BANDAR LAMPUNG)	0,31	B
19	SUKAMAJU - SP. KALIANDA	0,471	C
20	SP. KALIANDA - BAKAUHENI	0,419	B
21	SIMPANG TANJUNGKARANG - TANJUNGKARANG	0,94	E
22	BTS. Provinsi BENGKULU - PUGUNG TAMPAK	0,035	A
23	PUGUNG TAMPAK - SP. GUNUNG KEMALA	0,052	A
24	SP. GUNUNG KEMALA - KRUI	0,59	C
25	KRUI - BIHA	0,097	A
26	BIHA - BENGKUNAT	0,054	A
27	BENGKUNAT - SANGGI	0,031	A
28	SANGGI - WONOSOBO	0,21	B
29	WONOSOBO - KOTA AGUNG	0,14	A
30	BTS. KOTA AGUNG - RANTAU TIJANG	0,18	A
31	RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN	1,227	F
32	KRUI - BIHA	0,097	A
33	BIHA - BENGKUNAT	0,054	A
34	BENGKUNAT - SANGGI	0,031	A
35	SANGGI - WONOSOBO	0,21	A
36	WONOSOBO - KOTA AGUNG	0,14	A
37	JLN. IR. JUANDA (KOTA AGUNG)	0,101	A
38	BTS. KOTA AGUNG - RANTAU TIJANG	0,18	A
39	RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN	1,227	F
40	GEDONGTATAAN - BTS. KOTA BANDAR LAMPUNG	1,518	F
41	JLN. IMAM BONJOL (BANDAR LAMPUNG)	1,358	F
42	JLN. KARTINI (BANDAR LAMPUNG)	1,65	F
43	JLN. MONGINSIDI (BANDAR LAMPUNG)	1,004	F
44	JLN. WARSITO (BANDAR LAMPUNG)	1,004	F

No	Nama Ruas	VCR	LoS
45	JLN. JAKSA AGUNG RI R. SOEPRAPTO (BANDAR LAMPUNG)	1,004	F
46	SP. BUJUNG TENUK - BUJUNG TENUK	0,15	A
47	BUJUNG TENUK - TERBANGGI BESAR	0,481	A
48	BUKIT KEMUNING - PADANG TAMBAK	0,187	A
49	PADANG TAMBAK - BTS. KOTA LIWA	0,068	A
50	JLN. SUDIRMAN (LIWA)	0,24	A
51	KOTA LIWA - SP. GUNUNG KEMALA	0,081	A
52	TEGINENENG - BTS. KOTA METRO	0,717	C
53	JLN. SUDIRMAN (METRO)	0,13	A
54	BTS. KOTA METRO - GEDONG DALAM	0,731	C
55	JLN. A.H. NASUTION (METRO)	0,25	A
56	GEDONG DALAM - BTS. KOTA SUKADANA	0,32	A
57	JLN. SUKARNO-HATTA (SUKADANA)	0,325	A
58	SP. TANJUNG KARANG - KURUNGAN NYAWA (JLN. RADEN GUNAWAN)	0,299	A
59	WAY GALIH - BERGEN	0,995	E
60	JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI (BANDAR LAMPUNG)	0,192	A
61	BERGEN - PUGUNG RAHARJO	0,092	A
62	PUGUNG RAHARJO - SRI BAWONO	0,155	A
63	SRI BAWONO - SP. SRI BAWONO	0,59	A
64	SP. PENAWAR - GEDONG AJI BARU	0,104	A
65	GEDONG AJI BARU - RAWAJITU	0,197	A

Sumber: BPJN Provinsi Lampung, 2021

Tingkat Pelayanan Jalan (LoS):

- A : Arus bebas; volume rendah dan kecepatan tinggi; pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki
- B : Arus stabil; kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas; volume pelayanan yang dipakai untuk disain jalan luar kota
- C : Arus stabil; kecepatan dikontrol oleh lalu lintas; volume pelayanan yang dipakai untuk disain jalan perkotaan
- D : Mendekati arus yang tidak stabil: kecepatan rendah
- E : Arus yang tidak stabil; kecepatan yang rendah dan berbeda-beda: volume mendekati kapasitas
- F : Arus yang terhambat; kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas: banyak berhenti

Tingkat Pelayanan Jalan berdasarkan nilai Level of Service (LOS) 75% ruas jalan nasional Provinsi Lampung berada pada tingkat A-C, yaitu arus bebas dan arus stabil Sedangkan sebagian besar ruas jalan dengan arus yang tidak stabil atau arus terhambat berada pada Kota Bandar Lampung dan ruas yang menghubungkan ke Kota/Kabupaten sekitarnya. Ruas jalan dengan kategori (F) adalah:

1. Terbanggi Besar - Gunung Sugih
2. Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta (Bandar Lampung)
3. Rantau Tijang - Gedongtataan
4. Gedongtataan - Bts. Kota Bandar Lampung
5. Jln. Tengiri (Bandar Lampung)
6. Jln. Imam Bonjol (Bandar Lampung)
7. Jln. Kartini (Bandar Lampung)
8. Jln. Monginsidi (Bandar Lampung)
9. Jln. Warsito (Bandar Lampung)
10. Jln. Jaksa Agung RI R. Soeprpto (Bandar Lampung)

Infrastruktur Jalan Terkoneksi dan Terintegrasi dengan Bandara dan Pelabuhan antara lain Akses Jalan Nasional telah menghubungkan antara PKN Bandar Lampung, Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni. Jalan Nasional yang menghubungkan antar Bandara dan Pelabuhan tersebut berada pada kondisi yang mantap, dan memiliki tingkat VCR yang cukup rendah sehingga arus lalu lintas cenderung stabil. Selain terkoneksi dengan infrastruktur transportasi berskala nasional, jalan nasional juga telah menghubungkan ke beberapa infrastruktur transportasi berskala regional serta terkoneksi dengan jalan tol.



Gambar 4.10 Peta Konektivitas Bandara dengan Pelabuhan

Pada Infrastruktur Jembatan, kondisi kemantapan jembatan mencapai ≥ 6 meter pada semester I TA, 2022 dengan persentase 89,20% pada kondisi mantap dan 10,80% pada kondisi tidak mantap. Berikut merupakan tabel yang menguraikan panjang dari jembatan dengan kondisi mantap dan tidak mantap:

Tabel 4.23 Kemantapan Jembatan

TOTAL		KEMANTAPAN		TIDAK MANTAP	
UNIT	METER	UNIT	METER	UNIT	METER
435	11.724.00	388	9.299.35	47	2.424.65

Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jembatan dengan kondisi mantap terdapat 388 unit dengan panjang 9.299,35 meter. Sedangkan jembatan yang tidak mantap terdapat 47 unit dengan 2.424,65 meter. Sehingga total kemantapan jalan di Provinsi Lampung terdapat 435 unit dengan panjang 11.724,00 meter.

Tabel 4.24 Kondisi Jembatan Berdasarkan Nilai Kerusakan

NK	JUMLAH		PERSENTASE	
	UNIT	METER	UNIT	METER
1	33	997,40	7,59%	8,51%
2	355	8.301,95	81,61%	70,81%
3	41	2.199,75	9,43%	18,76%
4	5	200,90	1,15%	1,71%
5	1	24,00	0,23%	0,20%
TOTAL	435	11.724,00	100,00%	100,00%

Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung

Tabel diatas menjelaskan bahwa jembatan yang memiliki kondisi baik berjumlah 22 unit dengan panjang 997,40 meter dengan persentase 8,51%. Sedangkan jembatan yang memiliki kondisi rusak berat terdapat 6 unit 224,900 meter.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Bina Marga yang terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.25 Monitoring Infrastruktur Bina Marga

No.	Infrastruktur	Volume	Satuan	Lokasi
1	Jembatan Sinar Mulya	60	Meter	Kab. Lampung Utara
2	Jembatan Gantung Sidomulyo	40	Meter	Kab. Lampung Utara
3	Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami	0,8	Kilometer	Kab. Lampung Timur
4	Jembatan Gantung Sungai Cambai	40	Meter	Kab. Tulang Bawang
5	Jembatan Gantung Desa Adiwarno	91	Meter	Kab. Lampung Timur
6	Jembatan Ruas SP. Penawar – Gedong Aji Baru – Rawajitu	130.6	Meter	Kab. Pesawaran
7	Jembatan Way Sekampung	112	Meter	Kab. Pesawaran
8	Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami	0,8	Kilometer	Kab. Lampung Utara

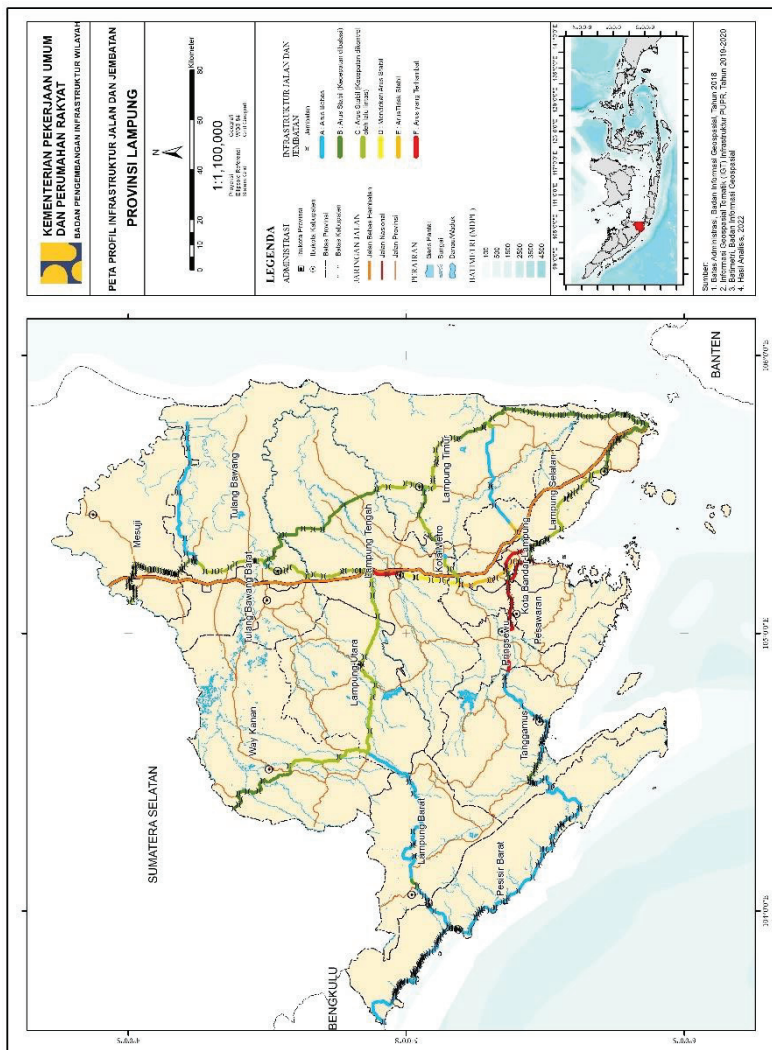
Sumber: E-monitoring PUPR, 2023



Gambar 4.11 Peta Sebaran Kondisi Jembatan Provinsi Lampung



Gambar 4.12 Peta Level of Service Ruas Jalan Provinsi Lampung



Gambar 4.13 Peta Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan Dan Jembatan

4.2.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Bina Marga yang dapat mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.26 Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan Perkotaan

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah			
1.	Jaringan Jalan	Bts. Kab. Lamteng/Kab.Tl.Bawang - Bts. Kab.Lamteng/Kab. Lamtim (45,22 Km)	• LOS A • Kemantapan 92,7%
		Simp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh) - Terbanggi Besar (38,91 Km)	• LOS B • Kemantapan 86,61%
		Terbanggi Besar - Gunung Sugih (11,68 Km)	• LOS F • Kemantapan 94,01%
		Gunung Sugih - Tegineneng (25,27 Km)	• LOS C • Kemantapan 94,32%
		Tegineneng - Bts. Kota Metro (13,62 Km)	• LOS C • Kemantapan 91,92%
Kawasan Pertanian Mesuji			
1.	Jaringan Jalan	Pematang Panggang - Sp. Pematang (20,4 Km)	• LOS A • Kemantapan 96,88%
		Sp. Pematang - Sp. Bujung Tenuk (59,96 Km)	• LOS A • Kemantapan 93,5%

Sumber: BPJN Lampung, 2022

4.2.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Bina Marga yang dapat mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.27 Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan Perkotaan

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung			
1.	Jaringan Jalan	Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta (Bandar Lampung) (18,12 Km) dengan LOS F dan Kemantapan 85,93%	• LOS A • Kemantapan 92,7%
		Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung) (2,31 Km) dengan LOS E dan Kemantapan 88,96%	• LOS B • Kemantapan 86,61%
		Km.10 (Panjang) - Bts. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung) (5,00 Km) dengan LOS A dan Kemantapan 97,32%	• LOS F • Kemantapan 94,01%

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung			
		Simpang Tanjungkarang – Tanjungkarang (7,60 Km) dengan LOS E dan Kemantapan 93,20%	• LOS C • Kemantapan 94,32%
		Jln. Malahayati (Bandar Lampung) (1,34 Km) dengan LOS A dan Kemantapan 100%	• LOS C • Kemantapan 91,92%
		Jln. Tengiri (Bandar Lampung) (0,36 Km)	• LOS F • Kemantapan 86,11%
		Sp. Teluk Betung – Sp. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung) (6,29 Km)	• LOS A • Kemantapan 94,19%
		Sp. Pelabuhan Panjang – Km. 10 (2,30 km)	• LOS A • Kemantapan 100%
		Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung) (0,38 Km)	• LOS A • Kemantapan 94,74%
		Jln. Imam Bonjol (Bandar Lampung) (6,29 Km)	• LOS F • Kemantapan 95,23%
		Jln. Kartini (Bandar Lampung) (1,50 Km)	• LOS F • Kemantapan 96,67%
		Jln. Monginsidi (Bandar Lampung) (2,26 Km)	• LOS F • Kemantapan 100%
		Jln. Warsito (Bandar Lampung) (0,08 Km)	• LOS F • Kemantapan 100%
		Jln. Jaksa Agung Ri R. Soeprpto (Bandar Lampung) (0,91 Km)	• LOS F • Kemantapan 100%
		Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jln. Raden Gunawan) (4,59 Km)	• LOS A • Kemantapan 91,29%
		Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar Lampung) (4,76 Km)	• LOS A • Kemantapan 92,62 %

Sumber: BPJN Lampung, 2022

4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perencanaan Pariwisata

Berikut merupakan Infrastruktur Bina Marga yang dapat mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.28 Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan Pariwisata

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya			
1.	Jaringan Jalan	Bts. Kab. Lamteng/Kab.Lamtim - Way Jepara (51,82 Km)	• LOS A • Kemantapan 94,36%
		Way Jepara - Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/Kab.Lamtim) (38,91 Km)	• LOS A • Kemantapan 96,87%

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya			
		Bts. Kota Metro - Gedong Dalam (11,55 Km)	• LOS C • Kemantapan 93,5%
		Gedong Dalam - Bts. Kota Sukadana (7,96 Km)	• LOS A • Kemantapan 90,57%
		Jln. Sukarno-Hatta (Sukadana) (7,96 Km)	• LOS A • Kemantapan 71,22%
		Pugung Raharjo - Sri Bawono (4,55 Km)	• LOS A • Kemantapan 100%
		Sri Bawono - Sp. Sri Bawono (2,83 Km)	• LOS B • Kemantapan 88,57%
Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya			
1.	Jaringan Jalan	Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/ Kab.Lamtim) - Sp. Bakauheni (32,78 Km)	• LOS A • Kemantapan 96,88%
		Tegineneng - Sp. Tj. Karang (20,76 Km)	• LOS E • Kemantapan 94,13%
		Sukamaju - Sp. Kalianda (41,64 Km)	• LOS A • Kemantapan 89,51%
		Sp. Kalianda – Bakauheni (29,85 Km)	• LOS A • Kemantapan 91,54%
		Way Galih – Bergen (Sukadana) (7,7 Km)	• LOS F • Kemantapan 71,43%
		Bergen - Pugung Raharjo (23,09 Km)	• LOS A • Kemantapan 98,27%

Sumber: BPJN Lampung, 2022

4.3. Profil dan Infrastruktur Permukiman

Sebaran Bangunan Cagar Budaya Nasional dan Desa Adat pada Provinsi Lampung antara lain terdapat satu desa yang memiliki desa adat yang mengunggulkan adat istiadat yang masih mengikuti aturan Marga Punduh. Marga Punduh merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa tersebut ialah Desa Pahawang.

Desa Pahawang merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau ini memiliki luas kurang lebih seluas 1.084 Ha. Desa Pahawang terbagi dalam 6 dusun yang terdiri dari Pahawang, Suakbuah, Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, dan Cukuhnyai.

Desa Pahawang menyimpan berbagai macam potensi. Potensi tersebut meliputi:

1. Pertanian dengan luas 1.084 Ha, yang terbagi menjadi dua yaitu Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil.
2. Perikanan, masyarakat Pulau Pahawang yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dapat

mengembangkan sektor perikanan. Laut di sekitar pulau Pahawang menyimpan banyak kekayaan laut yang dapat dikembangkan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pulau Pahawang.

3. Pariwisata, Desa Pahawang merupakan desa yang berada di pesisir pantai. Hal ini membuat desa ini banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk berlibur. Dan bukan hanya itu suguhan pemandangan pantainya hingga pemandangan bawah lautlah yang membuat desa ini banyak dikunjungi oleh wisatawan.



Gambar 4.14 Peta Sebaran Bangunan Cagar Budaya Nasional dan Desa Adat

Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan berdasarkan SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Provinsi Lampung, umumnya wilayah bagian utara dan selatan provinsi memiliki luasan kawasan permukiman kumuh yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh tersebut yang dapat dilakukan oleh berbagai upaya, diantaranya pemugaran, perbaikan, dan peremajaan sesuai dengan regulasi keruangan.

Tabel 4.29 Profil Kinerja Infrastruktur Kawasan Kumuh Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh (Ha)
1.	Kabupaten Lampung Barat	39,3
2.	Kabupaten Tanggamus	151,95
3.	Kabupaten Lampung Selatan	70,62
4.	Kabupaten Lampung Timur	710,91
5.	Kabupaten Lampung Tengah	49,35
6.	Kabupaten Lampung Utara	47,73
7.	Kabupaten Way Kanan	5,38
8.	Kabupaten Tulang Bawang	139,43
9.	Kabupaten Pesawaran	236,37
10.	Kabupaten Pringsewu	232,97
11.	Kabupaten Mesuji	426,22
12.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	106,74
13.	Kabupaten Pesisir Barat	110,7
14.	Kota Bandar Lampung	304,67
15.	Kota Metro	10,05
Provinsi Lampung		2.489,09

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Menurut data SK masing-masing Kabupaten/Kota, total luas kawasan kumuh yaitu 2.489,09 Ha. Dengan kategori berat yang lebih dari 15 Ha sebanyak 48 kawasan (1.215,96 Ha). Kota Lampung Timur menjadi wilayah dengan luasan kumuh terbesar dibanding wilayah lainnya, yaitu mencapai 710,91 Ha, sedangkan Kabupaten Way Kanan menjadi daerah dengan luasan kawasan kumuh terendah, yaitu 5,28 Ha.

Tabel 4.30 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi (Kelurahan)	Luasan (Ha)
1	Tulang Bawang	Menggala Kota	22,4
2		Dwi Warga Tunggal Jaya	30,55
3		Tunggal Warga	19,17
4		Gedung Karya Jitu	16,12
5		Sungai Nibung	23,94
6	Tulang Bawang Barat	Daya Murni	34,42
7		Mulya Asri	21,05
8		Tiyuh Pulung Kencana	25,7
9	Tanggamus	Purwodadi	17,229
10		Pasar Madang	34,37
11		Talang Padang	35,16
12		Sinar Semendo	19,91
13		Kota Agung Barat	19,35
14		Wonodadi	26,36
15	Pesawaran	Bernung	40,57
16		Bogorejo	31,08
17		Wiyono	27,94
18		Negara Saka	16,76
19		Padang Cermin	26,07
20		Cilimus	16,99
21	Lampung Tengah	Seputih Jaya	15,9
22	Bandar Lampung	Way Dadi Daru	22,922
23		Pidada	15,3
24		Srengsem	19,8
25		Gulak Galik	17,66
26		Kaliawi	18,53
27		Rajabasa Jaya	17,9
28		Rajabasa Raya	20,59
29	Lampung Timur	Tanjung Inten	43,48
30		Banjarejo	22,14
31		Sumbergede	30,26
32		Labuhan Ratu 1	23,72
33		Muara Gading Mas	30
34		Sukorahayu	20
35		Braja Sakti	52,64
36		Mataram Baru	24,6
37		Srimenanti	32,14
38		Sribhawono	16,6
39		Pugung Raharjo	23,5
40		Purwokencono	20
41		Gunung Sugih Besar	20
42		Adirejo	16,38
43		Mekar Jaya	17
44		Pelindung Jaya	40
45		Rejo Mulyo	50
46		Belimbing Sari	20
47	Lampung Selatan	Sido Mekar	35,08
48		Karya Tunggal	24,71

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Jika dilihat dari kelurahan yang ada di Provinsi Lampung, wilayah yang memiliki kawasan kumuh paling luas berada di Kelurahan Braja Sakti yang mencapai 52,64 ha. sedangkan wilayah yang

memiliki kawasan kumuh yang paling rendah berada di Kelurahan Pidada mencapai 15,3 ha.

Sebaran Sistem Penyediaan Air Minum ditinjau berdasarkan pengembangan sistem penyediaan air minum pada beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya. Berdasarkan pada data infrastruktur terbangun pada data tahun 2021, kondisi air minum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.31 Akses Air Minum Layak dan Kinerja SPAM Provinsi Lampung

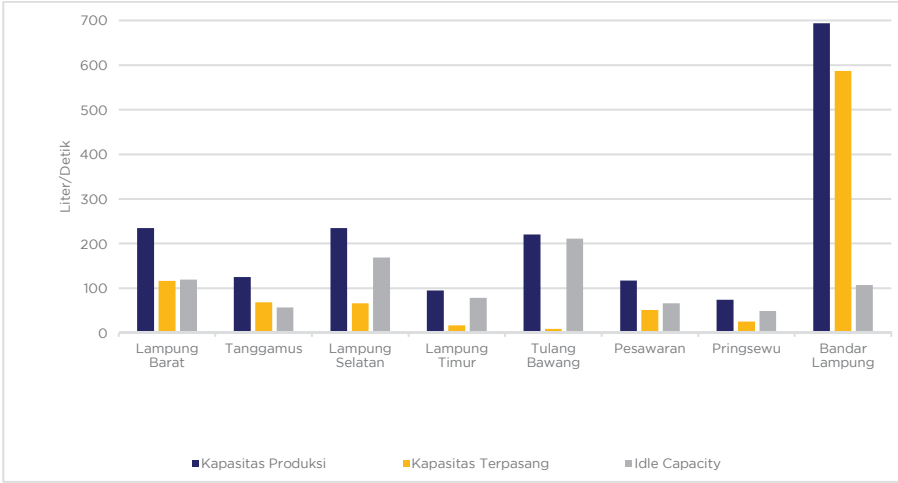
Kabupaten	Nama BUMD	Cakupan Pelayanan %	Effisiensi Produksi %	Tingkat Kehilangan Air %	Kapasitas Terpasang (L/Dt)	Volume Produksi (L/Dt)	Kapasitas Idle (L/Dt)	Jumlah Pelanggan (Unit Sr)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Status PDAM
Lampung Barat	PDAM Limau Kunci	26,19%	49,20%	23,12%	235	116	119	14.542	49.201	Kurang Sehat
Tanggamus	PDAM Way Agung	10,04%	54,28%	52,99%	125	68	57	6.648	26.450	Kurang Sehat
Lampung Selatan	PDAM Tirta Jasa	5,58%	28,28%	29,68%	235	66	169	9.566	30.498	Kurang Sehat
Lampung Timur	PDAM Way Guruh	5,44%	18,33%	23,84%	95	17	78	2.608	11.513	Sakit
Lampung Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lampung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Way Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulang Bawang	PDAM Way Tulang Bawang	1,96%	4,16%	61,28%	220	9	211	1.165	3.620	Sakit
Pesawaran	PDAM Kabupaten Pesawaran	10,51%	43,71%	21,06%	117	51	66	9.462	36.276	Sehat
Pringsewu	PDAM Way Sekampung	15,65%	33,90%	31,17%	74	25	49	5.074	16.097	Kurang Sehat
Mesuji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandar Lampung	PDAM Way Rilau	12,80%	84,57%	46,63%	694	587	107	44.480	130.923	Kurang Sehat
Metro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPPW Provinsi Lampung, 2021

Dari data di atas, Provinsi Lampung memiliki rata-rata akses air minum layak sejumlah 80,20%. Kota Bandar Lampung memiliki nilai akses air minum layak tertinggi dengan persentase pelayanan 98,47% dengan *idle capacity* sebesar 107 l/dt, kemudian terdapat juga kabupaten Pringsewu dengan nilai akses air minum layak dengan persen pelayanan 96,68% *idle capacity* sebesar 49 l/dt.

Adapun menurut profil kinerja infrastuktur cipta karya air minum bahwa Provinsi Lampung memiliki rata – rata akses air minum layak sejumlah 80,20 %. Kota Bandar Lampung memiliki nilai

akses air minum layak tertinggi dengan persentase pelayanan 98,47% dengan *idle capacity* sebesar 107 l/dtk. Sedangkan Kabupaten Pringsewu menjadi PDAM yang memiliki *idle capacity* terendah, yaitu 49 l/dtk. Namun memiliki nilai akses terhadap air minum layak dengan persentase pelayanan 96,68 %. Dan berikut ini gambar diagram kebutuhan air minum di Provinsi Lampung.



Gambar 4.15 Diagram Kebutuhan Air Minum di Provinsi Lampung

Sumber: BPS 2021

Sebaran Sistem Pengolahan Persampahan antara lain terdapat beberapa infrastruktur persampahan yang tersebar di Provinsi Lampung guna menunjang kebutuhan infrastruktur persampahan masyarakat. Terdapat 16 Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. TPA Bakung di Kota Bandar Lampung menjadi TPA dengan jumlah sampah masuk terbanyak di tahun 2021, yaitu 273.750 ton/tahun dan TPA dengan luas terbesar yaitu 8 Ha. Berikut ini secara rinci data teknis dan sebaran dari TPA Provinsi Lampung.

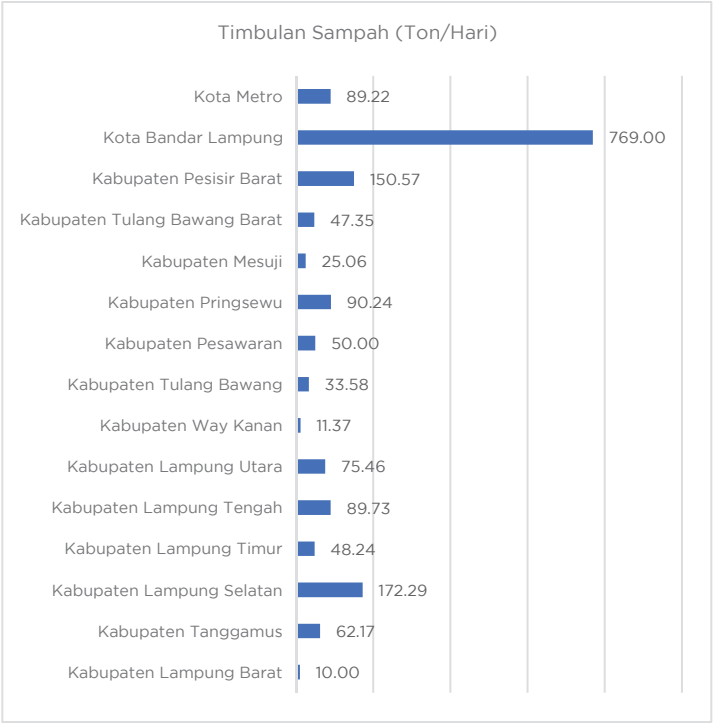
Tabel 4.32 Profil Fasilitas TPA Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah Masuk (ton/tahun)	Luas (Ha)
1	Lampung Barat	TPA Bahway	6.570	0,8
2	Pringsewu	TPA Bumiayu	10.950	0,8
3	Lampung Selatan	TPA Natar	7.665	1,0
4	Lampung Selatan	TPA Kalianda	10.970	1,6
5	Lampung Utara	TPA Alam Kari	10.870	2,0
6	Tanggamus	TPA Kalimiring	10.950	0,9

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Fasilitas	Sampah Masuk (ton/tahun)	Luas (Ha)
7	Lampung Tengah	TPA Bandar Jaya	16.425	1,0
8	Lampung Timur	TPA Sukadana	7.665	0,8
9	Tulangbawang Barat	TPA Penumpangan	5.475	1,2
10	Mesuji	TPA Mesuji	5.360	1,5
11	Way Kanan	TPA Blambangan Umpu	5.245	1,3
12	Pesawaran	TPA Tamansari	7.665	1,2
13	Tulangbawang	TPA Pancakarsa Menggala	8.756	2,0
14	Kota Metro	TPA Kota Metro	10.950	1,9
15	Pesisir Barat	TPA Krui	6.540	1,5
16	Kota Bandar Lampung	TPA Bakung	146.000	8,0

Sumber: BPPW Provinsi Lampung, 2022

Adapun berdasarkan profil infrastuktur persampahan di Provinsi Lampung terdapat timbulan sampah yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Dari kota dan kabupaten di Provinsi Lampung, yang memiliki timbulan sampah terbanyak yaitu sebesar 769.00 ton/hari yaitu berada pada Kota Bandar Lampung. Dan berikut ini gambar diagram timbulan sampah di Provinsi Lampung.



Gambar 4.16 Diagram Timbulan Sampah di Provinsi Lampung

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021; BPPW Lampung, 2022

Sebaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik guna menunjang kebutuhan infrastruktur limbah masyarakat antara lain terdapat beberapa IPLT dan beberapa IPAL yang tersebar di masing-masing kabupaten dan kota. Berikut ini adalah data rinci mengenai kondisi teknis dari masing-masing IPLT di Provinsi Lampung.

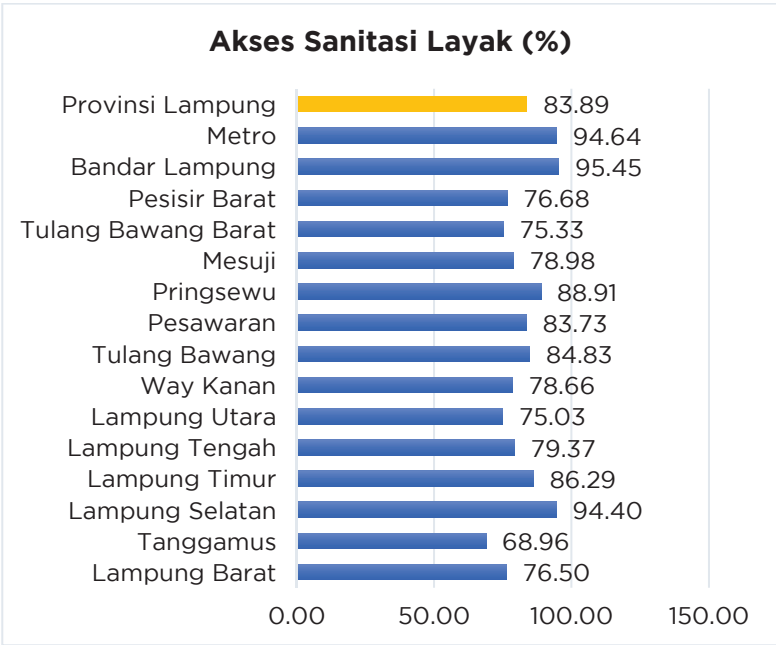
Tabel 4.33 Kondisi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja di Provinsi Lampung

No	Wilayah	Nama IPAL/IPLT	Lokasi	Kapasitas (m ³)	Luas (Ha)	Sistem Pengolahan	Status
1	Lampung Barat	IPLT Bahway	Ds. Bahway Kec. Balik Bukit	3	1	Solid Separation Chamber	Tidak Berfungsi
2	Tanggamus	IPLT Kali Miring	Ds. Kalimiring Kec. Kota Agung Barat	70	0,2	Solid Separation Chamber	Tidak Berfungsi
3	Lampung Selatan	IPLT Lubuk Kamal	Ds. Kalianda	10	1	Solid Separation Chamber	Berfungsi
4	Lampung Tengah	IPLT Bandar Jaya	Ds. Bandar Jaya	2	0,2	Solid Separation Chamber	Tidak Berfungsi
5	Lampung utara	IPLT Alamkari	Ds. Alam Jaya	45	0,5	Solid Separation Chamber	Tidak Berfungsi

No	Wilayah	Nama IPAL/IPLT	Lokasi	Kapasitas (m ³)	Luas (Ha)	Sistem Pengolahan	Status
6	Pringsewu	IPLT Bumi Ayu	Ds. Bumi Ayu	2	0,2	Solid Separation Chamber	Berfungsi
7	Kota Bandar Lampung	IPLT Bakung	Ds. Bakung	40	0,2	Solid Separation Chamber	Berfungsi
8	Kota Metro	IPLT Karang Rejo	Karang Rejo	15	0,2	Solid Separation Chamber	Berfungsi

Sumber: BPPW Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat Terdapat 8 IPLT yang tersebar di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung serta terdapat 1 IPAL komunal di Kawasan Permukiman RSH Beringin Raya Kota Bandar Lampung dengan kapasitas 90 m³/hari. IPLT Bakung di Kota Bandar Lampung merupakan IPLT dengan kapasitas terbesar yaitu 15 m³/hari.



Gambar 4.17 Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan gambar diagram diatas, bahwa Provinsi Lampung memiliki akses sanitasi layak secara rata-rata adalah 83,89%. Kabupaten Tanggamus menjadi wilayah dengan akses sanitasi layak terendah, yaitu sebesar 68,96%. Kab/Kota yang berada di wilayah barat memiliki akses sanitasi yang berada dibawah rata-rata persentase provinsi.

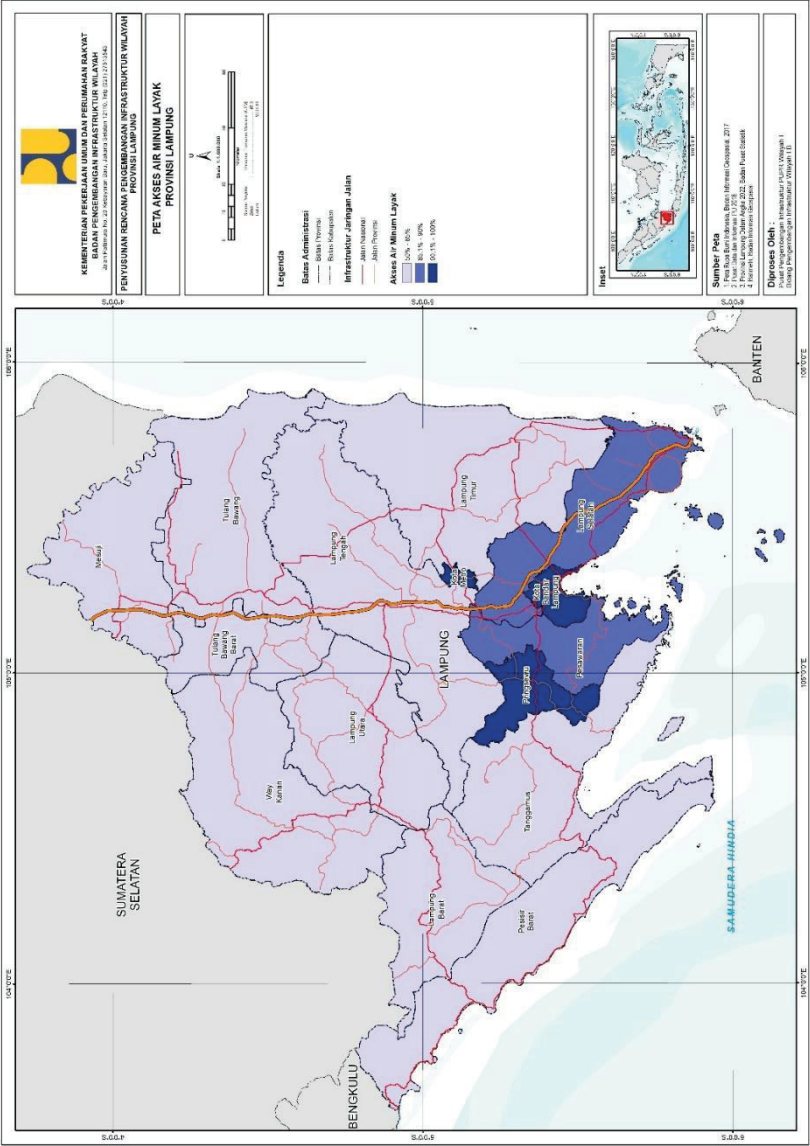
Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Permukiman

yang terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.34 Monitoring Infrastruktur Permukiman

No.	Infrastruktur	Volume	Satuan	Lokasi
1	Gedung Akademik Center Kampus II IAIN Metro	1	Unit	Kota Metro
2	Sekolah Lampung 2	25	Unit	Lampung
3	Madrasah Lampung 1	8	Madrasah	Lampung
4	Madrasah Lampung 2	11	Unit	Lampung
5	SPAM IKK Bumiarum Kabupaten Pringsewu	0,001	Sambungan Rumah	Lampung

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023



Gambar 4.18 Peta Akses Air Minum Layak Provinsi Lampung



Gambar 4.19 Peta Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung



Gambar 4.21 Peta Persebaran Kawasan Kumuh Provinsi Lampung

4.3.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Cipta Karya yang dapat mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.35 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Pertanian

No	Infrastruktur		Kinerja
Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah			
1.	TPA Bandar Jaya	1,0 Ha	Sampah masuk 16.425 ton/tahun
2.	IPLT Bandar Jaya	0,2 Ha	Sudah tidak berfungsi
3.	Permukiman Kumuh	Seputih Jaya	15,9 Ha
Kawasan Pertanian Mesuji			
1.	TPA Mesuji	1,5 Ha	Sampah masuk 5.360 ton/tahun

Sumber: BPPW Lampung, 2021

4.3.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Permukiman yang dapat mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.36 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Perkotaan

No	Infrastruktur		Kinerja
Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung			
1.	PDAM Way Rilau	587 l/dt	Kurang sehat, idle 107 l/d
2.	IPLT Bakung	40 m3	Berfungsi dengan Sistem pengolahan <i>Solid Separation Chamber</i>
3.	TPA Bakung	8 Ha	<i>Overload</i>
4.	Permukiman Kumuh	Way Dadi Daru	22,922 Ha
		Pidada	15,3 Ha
		Srengsem	19,8 Ha
		Gulak Galik	17,66 Ha
		Kaliawi	18,53 Ha
		Rajabasa Jaya	17,9 Ha
		Rajabasa Raya	20,59 Ha

Sumber: BPPW Lampung, 2021

4.3.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perencanaan Pariwisata

Berikut merupakan Infrastruktur Permukiman yang dapat mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.37 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Pariwisata

No	Infrastruktur		Kinerja
Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung			
1.	PDAM Way Rilau	587 l/dt	Kurang sehat, idle 107 l/d
2.	IPLT Bakung	40 m ³	Berfungsi dengan Sistem pengolahan <i>Solid Separation Chamber</i>
3.	TPA Bakung	8 Ha	<i>Overload</i>
4.	Permukiman Kumuh	Way Dadi Daru	22,922 Ha
		Pidada	15,3 Ha
		Srengsem	19,8 Ha
		Gulak Galik	17,66 Ha
		Kaliawi	18,53 Ha
		Rajabasa Jaya	17,9 Ha
		Rajabasa Raya	20,59 Ha

Sumber: BPPW Lampung, 2021

Tabel 4.38 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan Pariwisata

No	Infrastruktur		Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya			
1.	PDAM Way Guruh	17 l/dt	Kapasitas idle 78 liter/detik, status sakit
2.	TPA Sukadana	0,8 Ha	Sampah masuk 7.665 ton/tahun
Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya			
1.	PDAM Tirta Jasa	66 l/dt	Kapasitas idle 169 liter/detik, status kurang sehat
2.	TPA Natar	1 Ha	Sampah masuk 7.665 ton/tahun
3.	TPA Kalianda	1,6 Ha	Sampah masuk 10.970 ton/tahun
4.	IPLT Lubuk Kamal	10 m ³	Kapasitas 10 m ³ masih berfungsi

Sumber: BPPW Lampung, 2023

4.3.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas

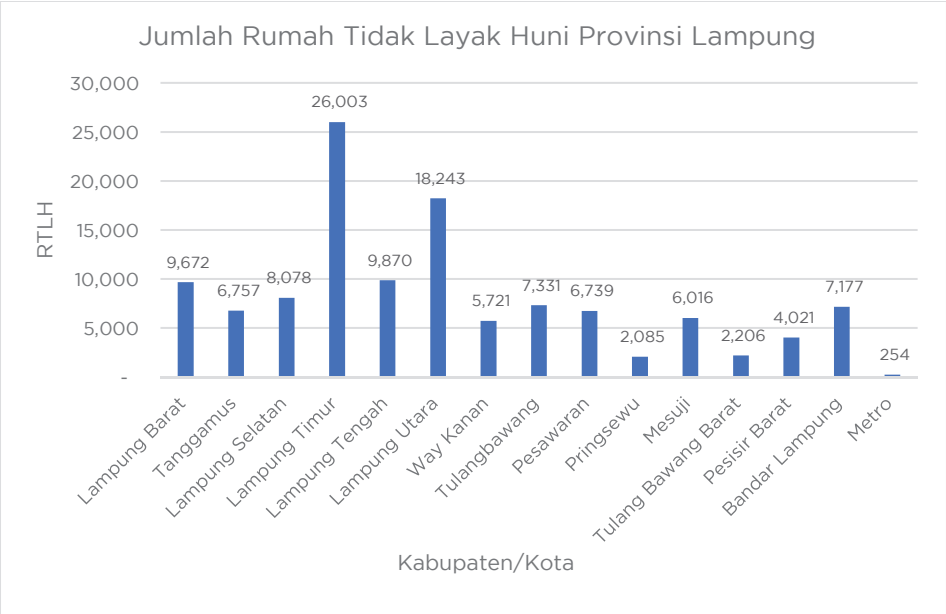
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Sakai Sambayan Kab. Pringsewu dilakukan melalui pembangunan 3 unit gedung TPS3R dan infrastruktur sebagai sarana pendukung TPS3R Pringsewu Utara, Barat, dan Selatan telah berfungsi dan melayani hampir di seluruh RT di wilayah Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu Utara, serta Pringsewu Barat. Masing-masing TPS3R tersebut sudah beroperasi dan berjalan dengan baik.

Program TPS3R yang terdapat di Kawasan Sakai Sambaiyan ini salah satu infrastruktur yang bermanfaat untuk mereduksi/mengurangi sampah di Kabupaten Pringsewu dengan total sampah yang berkurang sebesar 3,93% atau 2.329

Ton/Tahun untuk seluruh Kabupaten Pringsewu. TPS3R di Kawasan Sakai Sambaiyan melayani 827 KK dengan rincian: TPS3R Pringsewu Selatan telah melayani 1292 Jiwa 294 KK, TPS3R Pringsewu Barat telah melayani 753 Jiwa 189 KK, TPS3R Pringsewu Utara telah melayani 543 Jiwa 344 KK.

4.4. Profil dan Infrastruktur Perumahan

Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 120.174 unit. Berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2023, berikut data rumah tidak layak huni berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



Gambar 4.22 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kab/Kota Provinsi Lampung

Sumber: Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Timur 26.003 Unit, Kabupaten Lampung Utara 18.243 Unit, dan Kabupaten Lampung Tengah 9.870 Unit, sedangkan RTLH terendah berada pada Kota Metro 254 Unit, Kabupaten Pringsewu 2.085 Unit, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2.206 Unit



Backlog Perumahan adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. *Backlog* rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Tabel 4.39 Backlog Perumahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Wilayah	Backlog Kepenghunian Rumah (KK)	Backlog Kepemilikan Rumah (KK)
Lampung Barat	49.059	42.990
Tanggamus	43.993	39.822
Lampung Selatan	70.818	63.495
Lampung Timur	94.966	86.609
Lampung Tengah	166.400	150.775
Lampung Utara	49.383	42.055
Way Kanan	40.491	36.669
Tulang Bawang	41.623	37.049
Pesawaran	31.298	27.433
Pringsewu	40.083	35.706
Mesuji	21.999	20.140
Tulang Bawang Barat	27.292	23.351
Pesisir Barat	12.110	11.317
Bandar Lampung	149.218	91.515
Metro	23.113	18.007
Provinsi Lampung	861.846	726.933

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id>, 2022 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat angka *backlog* menandakan masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki rumah. Dilihat dari angka *backlog* yang ada pada tahun 2022, wilayah dengan *backlog* Kepemilikan Rumah tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah 150.775 unit.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Perumahan yang terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.40 Monitoring Infrastruktur Perumahan

No.	Infrastruktur	Volume	Satuan	Lokasi
1	Rumah Susun Institut Teknologi Sumatera	28	Unit	Kab. Lampung Selatan
2	PSU Perumahan bagi MBR	100	Unit	Lampung
3	PSU Perumahan bagi MBR	70	Unit	Kab. Lampung Selatan
4	PSU Perumahan bagi MB	140	Unit	Kab. Lampung Selatan
5	Rumah Swadaya	2250	Unit	Lampung

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023

4.4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Perumahan yang dapat mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.41 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan Pertanian

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Pertanian Lampung Tengah			
1.	Perumahan	Jumlah RTLH 9.870 unit	- Backlog Kepemilikan 150.775 unit - Backlog Kepenghunian 166.400 unit
Kawasan Pertanian Mesuji			
1.	Perumahan	Jumlah RTLH 6.016 unit	- Backlog Kepemilikan 20.140 unit - Backlog Kepenghunian 21.999 unit

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id>, 2022 dan Data P3KE (Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

4.4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Perumahan yang dapat mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.42 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan Perkotaan

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan PKN Bandar Lampung			
1.	Perumahan	Jumlah RTLH 7.177 unit	- Backlog Kepemilikan 91.515 unit - Backlog Kepenghunian 149.218 unit

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id>, 2022 dan Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

4.4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Perumahan yang dapat mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.43 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan Pariwisata

No.	Infrastruktur	Profil Eksisting/ Rencana	Capaian Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya			
1.	Perumahan	Jumlah RTLH 26.003 unit	- Backlog Kepemilikan 86.609 unit - Backlog Kepenghunian 94.966 unit
Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya			
1.	Perumahan	Jumlah RTLH 8.078 unit	- Backlog Kepemilikan 63.495 unit - Backlog Kepenghunian 70.818 unit

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id>, 2022 dan Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

4.5. Profil dan Infrastruktur Non PUPR

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera karena letaknya di ujung Pulau Sumatera dan memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Provinsi Lampung berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Dalam upaya mendukung mengekskalasi pertumbuhan perekonomiannya, Provinsi Lampung didukung oleh berbagai infrastruktur perhubungan yang terus berkembang yang meliputi terminal, pelabuhan dan bandara. adapun infrastruktur non PUPR Perhubungan yang terdapat di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44 Daftar Infrastruktur Perhubungan Provinsi Lampung

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1	Bandara Raden Inten II	Tanjung Karang	Internasional
2	Bandara M. Taufiq Kiemas	Pesisir Barat	Domestik
3	Bandara TNI AD Gatot Subroto	Way Kanan	Domestik
4	Bandara AU Astra Ksetria	Tulang Bawang	Domestik
5	Terminal Rajabasa	Tanjung Karang	Terminal Tipe A
6	Terminal Panjang	Kota Bandar Lampung	Terminal Tipe B
7	Terminal Kota Agung	Kota Agung	Terminal Tipe B

No	Nama	Lokasi	Keterangan
8	Terminal Mulyojati	Kota Metro	Terminal Tipe B
9	Terminal Kota Bumi	Kota Bumi	Terminal Tipe B
10	Terminal Bukit Kemuning	Lampung Utara	Terminal Tipe B
11	Terminal Manggala	Manggala	Terminal Tipe B
12	Terminal Bakauheni	Lampung Selatan	Terminal Tipe B
13	Terminal Liwa	Lampung Barat	Terminal Tipe B
14	Terminal Way Ratu Krui	Lampung Barat	Terminal Tipe B
15	Terminal Kemiling	Kota Bandar Lampung	Terminal Tipe B
16	Pelabuhan Panjang	Bandar Lampung	Pelabuhan Utama
17	Pelabuhan Teluk Betung	Bandar Lampung	Pelabuhan Pengumpan Regional
18	Pelabuhan Sebalang	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Regional
19	Pelabuhan Lagundi	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
20	Pelabuhan Kalianda	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
21	Pelabuhan P. Sebesi	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
22	Pelabuhan Mesuji	Mesuji	Pelabuhan Pengumpan Lokal
23	Pelabuhan Batu Balai	Tanggamus	Pelabuhan Pengumpan Lokal
24	Pelabuhan Ketapang	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
25	Pelabuhan Kuala Penet	Lampung Timur	Pelabuhan Pengumpan Lokal
26	Pelabuhan Maringgai	Lampung Timur	Pelabuhan Pengumpan Lokal
27	Pelabuhan Way Sekampung	Pringsewu	Pelabuhan Pengumpan Lokal
28	Pelabuhan Tabuan	Tanggamus	Pelabuhan Pengumpan Lokal
29	Pelabuhan Teladas	Tulang Bawang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
30	Pelabuhan Menggala	Menggala	Pelabuhan Pengumpan Lokal
31	Pelabuhan Bengkuntat	Lampung Barat	Pelabuhan Pengumpan Lokal
32	Pelabuhan Krui	Lampung Barat	Pelabuhan Pengumpan Lokal
33	Pelabuhan Way Seputih	Lampung Tengah	Pelabuhan Pengumpan Lokal
34	Pelabuhan Sungai Burung	Tulang Bawang	Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sumber: RTRW Provinsi Lampung

Di samping, Infrastruktur perhubungan terdapat juga

Infrastruktur Kelistrikan dimana Provinsi Lampung umumnya sudah menggunakan PLN sebagai sumber penerangan, yaitu sebesar 98,22%. Kota Metro menggunakan listrik PLN sebagai sumber satu-satunya penerangannya, yaitu sebesar 100%. Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten dengan tingkat penggunaan sumber penerangan bukan dari listrik yang terbesar, yaitu 15,44%. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, karena listrik menjadi hal yang penting selain sebagai sumber penerangan, listrik juga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas rumah tangga.

Tabel 4.45 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Lampung Barat	84,23	15,44	0,33
Tanggamus	99,19	0,55	0,26
Lampung Selatan	99,04	0,63	0,32
Lampung Timur	98,70	1,22	0,08
Lampung Tengah	98,74	0,92	0,34
Lampung Utara	98,62	0,31	1,07
Way Kanan	97,99	1,53	0,49
Tulang Bawang	99,43	0,57	0,00
Pesawaran	97,50	2,50	0,00
Pringsewu	99,18	0,70	0,12
Mesuji	96,37	2,68	0,95
Tulang Bawang Barat	99,74	0,16	0,10
Pesisir Barat	90,10	5,75	4,14
Bandar Lampung	99,81	0,00	0,19
Metro	100,00	0,00	0,00
Lampung	98,22	1,43	0,35

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

4.5.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Non PUPR yang dapat mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.46 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Pertanian

No	Nama	Lokasi	Keterangan
Kawasan Pertanian Lampung Tengah			
1	Pelabuhan Way Seputih	Lampung Tengah	Pelabuhan Pengumpan Lokal
Kawasan Pertanian Mesuji			
1	Pelabuhan Mesuji	Mesuji	Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sumber: RTRW Provinsi Lampung

4.5.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Non PUPR yang dapat mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.47 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Perkotaan

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1	Terminal Rajabasa	Tanjung Karang	Terminal Tipe A
2	Terminal Panjang	Kota Bandar Lampung	Terminal Tipe B
3	Terminal Kemiling	Kota Bandar Lampung	Terminal Tipe B
4	Pelabuhan Panjang	Bandar Lampung	Pelabuhan Utama
5	Pelabuhan Teluk Betung	Bandar Lampung	Pelabuhan Pengumpan Regional

Sumber: RTRW Provinsi Lampung

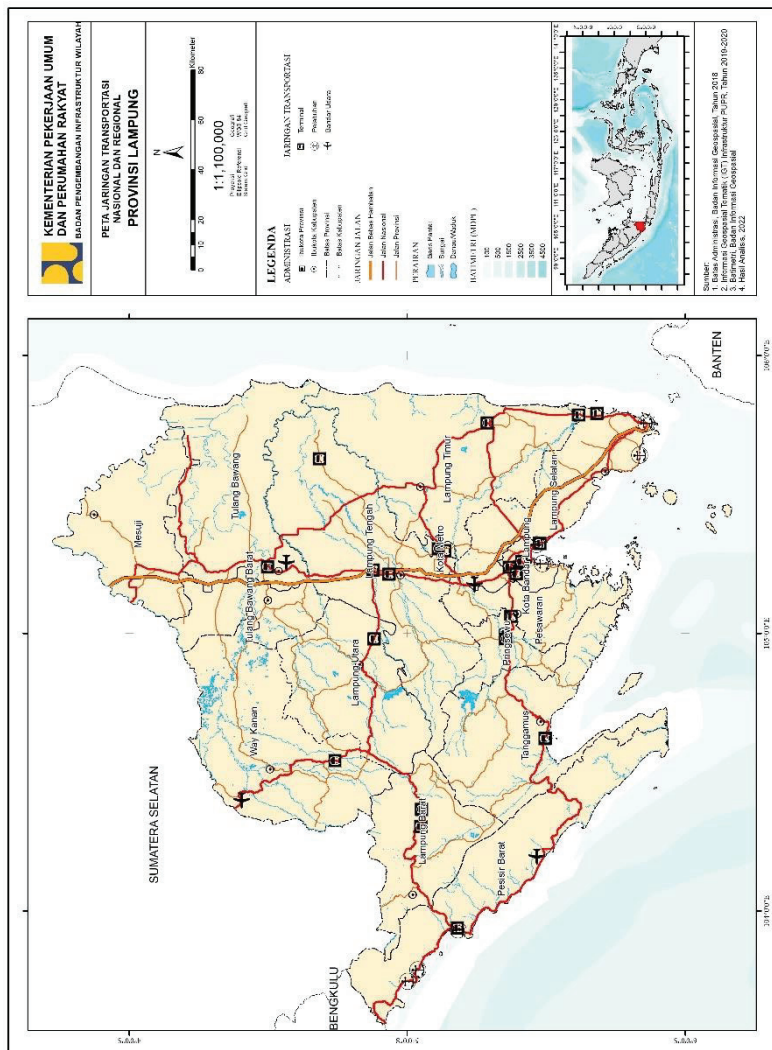
4.5.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Perencanaan Pariwisata

Berikut merupakan Infrastruktur Non PUPR yang dapat mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.48 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Pariwisata

No	Nama	Lokasi	Keterangan
KSPN Way Kambas dan sekitarnya			
1	Pelabuhan Kuala Penet	Lampung Timur	Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	Pelabuhan Maringgai	Lampung Timur	Pelabuhan Pengumpan Lokal
KSPN Krakatau dan sekitarnya			
1	Bandara Raden Inten II	Tanjung Karang	Internasional
2	Terminal Bakauheni	Lampung Selatan	Terminal Tipe B
3	Pelabuhan Sebalang	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Regional
4	Pelabuhan Lagundi	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
5	Pelabuhan Kalianda	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
6	Pelabuhan Sebesi P.	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
7	Pelabuhan Ketapang	Lampung Selatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sumber: RTRW Provinsi Lampung



Gambar 4.24 Peta Persebaran Infrastruktur Perhubungan Provinsi Lampung



BAB 5

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Bab ini menjelaskan tentang potensi dan tantangan pengembangan wilayah Provinsi Lampung yang dirumuskan menjadi isu strategis berdasarkan konteks perencanaan makro (tinjauan nasional), meso (tinjauan regional wilayah Jawa-Sumatera), dan mikro (tinjauan wilayah Provinsi Lampung). Penetapan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan fokus kebijakan sebagai baseline, tren pengembangan di masa yang akan datang dan masalah utama yang dihadapi untuk mencapai kondisi tersebut. Permasalahan dan isu strategis menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

5.1. Isu Strategis Provinsi

Permasalahan dan Isu Strategis di Provinsi Lampung adalah:

A. Kendala Kewilayahan:

1. Sebagian wilayah di sisi Barat Provinsi Lampung memiliki tingkat kelerengan yang cukup curam serta terdapat beberapa ancaman bencana alam.
2. Sebanyak 367 desa di Provinsi Lampung termasuk dalam desa yang terklasifikasi tingkat kekeringan tinggi.
3. Sebesar 9,83% wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana tanah longsor tinggi berada pada Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Barat.
4. 7,58% luas wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana banjir tinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji.
5. 28,70% wilayah Provinsi Lampung termasuk dalam klasifikasi bahaya bencana gempa bumi.
6. Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam.
7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif sebesar 69,90, meskipun nilai IPM tersebut meningkat setiap tahunnya.
8. Kawasan Industri yang diamanatkan dalam RPJMN masih dalam proses perencanaan.

B. Kendala Infrastruktur:

1. Kurangnya konektivitas antarkawasan strategis dan antarkawasan di Provinsi Lampung untuk mendukung hilirisasi industri serta pergerakan barang dan orang.
2. Beberapa wilayah di bagian utara, barat, serta

kepulauan masih belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai.

3. Sebagian jalan yang berada pada wilayah utara berada pada kondisi tidak mantap (10,80%).
4. 6 dari 65 ruas jalan nasional memiliki nilai VCR > 0,9, yaitu (1) Tegineneng - Sp. Tj. Karang; (2) Gedongtataan - Bts. Kota Bandar Lampung; (3) Jalan Imam Bonjol (Bandar Lampung); (4) Jalan Monginsidi (Bandar Lampung); (5) Jalan Jaksa Agung RI R. Soeprapto (Bandar Lampung); dan (6) Way Galih - Bergen.
5. Cakupan pelayanan air minum layak terendah sebesar 1,96% berada di Kabupaten Tulang Bawang.
6. Akses sanitasi layak terendah sebesar 68,96% dimiliki Kabupaten Tanggamus.
7. Sebagian besar fasilitas IPLT sebesar 50% tidak berfungsi karena buruknya faktor operasional rutin yang tidak dilaksanakan secara berkala.
8. Total luas kawasan kumuh Provinsi Lampung seluas 2.489,09 Ha dan kategori kawasan kumuh berat (> 15 Ha) sebanyak 48 kawasan dengan luas 1.215,96 Ha.
9. Masih terdapat 120.173 Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar di Provinsi Lampung.
10. Backlog tahun 2022 Provinsi Lampung untuk kepenghunian 861.846 KK dan kepemilikan 726.933 KK.

C. Isu Strategis:

1. Potensi pengembangan produksi dan hilirisasi pada sektor pertanian dan perkebunan.
2. Potensi pengembangan pariwisata alam, buatan, dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan simpul transportasi dan pintu gerbang Pulau Sumatera.
4. Sebagian besar wilayah provinsi berpotensi untuk dikembangkan.
5. Ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota (ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur).
6. Sebagian besar wilayah provinsi berpotensi untuk dikembangkan, seperti pengembangan pariwisata alam, buatan, dan ekonomi kreatif.
7. Terjadinya risiko bencana alam di beberapa wilayah.
8. Tersebar nya kawasan kumuh dan kurangnya penyediaan infrastruktur dasar penunjang perkotaan.

5.2. Isu Strategis Fokus Perencanaan

5.2.1. Isu Strategis Fokus Pertanian

Provinsi Lampung merupakan salah satu Lumbung Pangan Nasional yang menduduki peringkat ke-6 terbesar nasional dengan produksi padi 2,69 juta ton pada tahun 2022. Kabupaten dengan produksi padi terbesar antara lain Lampung Tengah (540.115,25 ton/tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun), Mesuji (283.879,49 ton/tahun). Akan tetapi, produktivitas tanaman padi masih di bawah rata-rata nasional (52,38 ku/ha) yaitu sebesar 51,87 ku/ha.

Sektor Pertanian di Provinsi Lampung didukung oleh infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan kawasan pertanian dengan simpul distribusi hingga ke wilayah lain di Pulau Sumatera. Selain itu, sektor pertanian juga didukung dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Sekampung yang berfungsi sebagai sumber air irigasi.

Dilihat dari PDRB Provinsi Lampung, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB provinsi yaitu sebesar 27,90% pada 2022. Sejalan dengan PDRB, SDM pada sektor pertanian juga mendominasi dimana sebanyak 43% (1.843,5 ribu) dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015, terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat antara lain 3 (tiga) Daerah Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 (tiga) Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha. Namun di sisi lain, terdapat beberapa tantangan seperti nncaman bencana banjir tinggi di lokasi produksi pertanian, dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum optimal, keterbatasan anggaran dari pemerintah maupun badan usaha (BUJT) untuk membangun jalan tol, pengembangan jaringan irigasi baru memerlukan anggaran yang besar, belum adanya sektor industri yang menampung hilirisasi produk pertanian, dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum optimal, masih banyaknya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan (Nilai Indeks Kinerja Irigasi/IKSI di Provinsi Lampung masih rendah (rata-rata nilai IKSI gabungan 0,5 atau lebih rendah) atau belum adanya jaringan irigasi tersier yang tersambung sampai persawahan dan penurunan luas lahan baku sawah akibat alih fungsi guna lahan sawit sebesar 9%.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sektor pertanian di Provinsi Lampung, diperlukan strategi dan kebijakan yang mendukung sektor pertanian yaitu dengan optimalisasi infrastruktur pendukung pertanian untuk meningkatkan daya saing produksi pertanian dan dapat menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Pulau Sumatera. Hal ini dapat didukung dengan beberapa opsi pengembangan di masa seperti pengembangan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera yang terkoneksi sampai dengan seluruh wilayah Pulau Sumatera sehingga meningkatkan distribusi hasil pertanian ke provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, optimalisasi Bendungan Way Sekampung sebagai sumber suplai irigasi, meningkatkan nilai tambah komoditas hasil pertanian melalui hilirisasi agroindustri, meningkatnya kualitas SDM terdidik dan terampil pada sektor pertanian melalui penyediaan pendidikan pertanian, meningkatnya nilai IKSI menjadi kategori baik (di atas 0,7) dan mempertahankan luasan LP2B serta menetapkan LSD sesuai dengan kebijakan pertanian nasional.

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Pertanian

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertanian	Makro (Lampung - Nasional)	Produktivitas pertanian terhadap nasional	Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi padi 2,69 juta ton (2022) dengan kontributor terbesar Lampung Tengah (540.115,25 ton/tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun), Mesuji (283 879,49 ton/tahun)	Kebijakan pertanian di Lampung sesuai dengan kebijakan penataan ruang (RTRWN dan RTR Pulau Sumatera)	1. Kawasan Pertanian Lampung Tengah 2. KPPN Mesuji	Menjadi Provinsi dengan produksi padi terbesar di Pulau Sumatera	Ancaman bencana banjir tinggi di lokasi produksi pertanian	Optimalisasi infrastruktur pendukung pertanian untuk meningkatkan daya saing produksi pertanian
			Produktivitas tanaman padi Lampung di bawah rata-rata nasional (data tahun 2022 sebesar 51,87 ku/ha).				Dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum optimal	
	Meso (Sumbagsel)	infrastruktur pendukung pertanian	Tersedianya jalan nasional dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan kawasan pertanian dengan simpul distribusi hingga ke wilayah lain di Pulau Sumatera	RTR Pulau Sumatera, Renstra PUPR dan Rencana Umum Jaringan Nasional		Terkoneksinya jaringan Jalan Tol Trans Sumatera sampai dengan seluruh wilayah Pulau Sumatera, sehingga meningkatkan distribusi hasil pertanian ke provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera	Keterbatasan anggaran dari pemerintah maupun badan usaha (BUJT)	
			Tersedianya Bendungan Way Sekampung sebagai	Pembangunan Bendungan Way Sekampung		Optimalisasi Bendungan Way Sekampung	Pengembangan jaringan irigasi baru	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS (6)	SKENARIO		ISU STRATEGIS (9)
FOKUS (1)	LOKUS (2)	UNSUR/ PERTIMBANGAN (3)	KONDISI EKSTING (4)	FOKUS KEBIJAKAN (5)		OPSI MASA DEPAN (7)	MASALAH UTAMA (8)	
			sumber air baku untuk irigasi pertanian	sebagai PSN yang tercantum dalam Perpres109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional		sebagai sumber suplai irigasi	memerlukan anggaran yang besar	
			PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Lampung merupakan sektor yang berkontribusi paling besar (27,90% pada 2022) terhadap PDRB provinsi	Kebijakan Pertanian di Lampung sesuai dengan kebijakan penataan ruang dan pembangunan daerah (RTRW Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung)		Meningkatkan nilai tambah komoditas hasil pertanian melalui hilirisasi agroindustri	Belum adanya sektor industri yang menampung hilirisasi produk pertanian	
	Mikro (Lampung)	Karakteristik wilayah dan komoditas potensial pertanian	Sebanyak 43% (1,84 juta) dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian			Meningkatnya kualitas SDM terdidik dan terampil pada sektor pertanian melalui penyediaan pendidikan pertanian	Dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum optimal	
			Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat sebanyak 3 Daerah Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha (Permen 14/2015). Nilai Indeks Kinerja Irigasi (IKSI) di Provinsi Lampung masih rendah (rata-rata nilai IKSI gabungan 0,5 atau lebih rendah)	Kebijakan Daerah Irigasi sesuai dengan Permen PUPR 14/2016		Meningkatnya nilai IKSI menjadi kategori baik (di atas 0,7)	Masih banyaknya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau belum adanya jaringan irigasi tersier yang tersambung sampai persawahan	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS (6)	SKENARIO		ISU STRATEGIS (9)
FOKUS (1)	LOKUS (2)	UNSUR/ PERTIMBANGAN (3)	KONDISI EKSISTING (4)	FOKUS KEBIJAKAN (5)		OPSI MASA DEPAN (7)	MASALAH UTAMA (8)	
			Terdapat LP2B pada kawasan prioritas pertanian, yaitu Lampung Tengah sebesar 71.791 hektar; KPPN Mesuji sebesar 27.700 hektar; dan Tulang Bawang sebesar 31.800 hektar	Keberadaan LP2B sesuai dengan Kebijakan Pertanian di Lampung (Perda no. 17 tahun 2013)		Mempertahankan luasan LP2B serta menetapkan LSD sesuai dengan kebijakan pertanian nasional	Penurunan luas lahan baku sawah akibat alih fungsi guna lahan sawit sebesar 9%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.2.2. Isu Strategis Fokus Perkotaan

Terdapat 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Lampung yaitu PKN Bandar Lampung, serta 6 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung. Tersedia infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi perkotaan, berupa Bandar Udara Internasional Radin Inten II yang melayani pergerakan orang dan barang antarprovinsi maupun internasional. Selain itu, terdapat Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni sebagai dukungan simpul transportasi. Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan internasional yang dikunjungi 447 kapal pelayaran luar negeri dan 1.049 kapal pelayaran dalam negeri setiap tahunnya. Komoditas lemak dan minyak hewan/nabati; komoditas batubara; dan komoditas kopi, teh dan rempah-rempah merupakan beberapa komoditas unggulan yang telah diekspor ke berbagai negara. Sedangkan Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa.

Saat ini telah terbangun Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni sampai dengan batas Sumatera Selatan. Jalan Nasional yang menghubungkan simpul-simpul transportasi berada pada kondisi yang mantap, dan memiliki tingkat VCR yang cukup rendah sehingga arus lalu lintas cenderung stabil. Sedangkan kinerja jalan daerah (provinsi dan kabupaten) tergolong masih rendah.

Terkait infrastuktur dasar, terdapat 16 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. TPA Bakung di Kota Bandar Lampung menjadi TPA dengan jumlah sampah masuk terbanyak di tahun 2021, yaitu 273.750 ton/tahun. Sebagian besar sistem pengolahan persampahan belum menggunakan sistem *Sanitary Landfill*, hal ini mengakibatkan pengolahan sampah yang belum memenuhi standart kesehatan lingkungan. TPA eksisting yang ada di Provinsi Lampung kapasitasnya sudah mencapai maksimal dan perencanaan TPA Regional belum diputuskan. PKN Bandar Lampung memiliki akses sanitasi layak sebesar 95,45% dan PKW Metro sebesar 94,64%. Kedua nilai akses sanitasi layak ini berada di atas rata-rata Provinsi Lampung yaitu 83,89%.

Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 120.173 unit. Total backlog perumahan di Provinsi Lampung mencapai 861.846 KK kepenghunian rumah dan 726.933 KK kepemilikan rumah. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan tingkat backlog perumahan yang tinggi di kawasan perkotaan menyebabkan banyak masyarakat di perkotaan belum memiliki rumah yang kebencanaan.

Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap kerentanaan seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Sebesar 7,58% luas wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana banjir tinggi. Sebesar 9,83% wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana tanah longsor tinggi. Sebesar 28,70% wilayah Provinsi Lampung termasuk dalam klasifikasi bahaya bencana gempa bumi. Dengan demikian, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi perkotaan, dibutuhkan pemenuhan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan berbasis mitigasi bencana.

Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan	Makro Hubungan Provinsi Lampung Terhadap Wilayah Pulau Sumatera- Nasional- Internasional	Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung sebagai hub kegiatan nasional dan internasional di Provinsi Lampung	Tersedianya infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi perkotaan, berupa Bandar Udara Internasional Radin Inten II yang melayani pergerakan orang dan barang antar provinsi maupun internasional	RTRWN, Rencana Induk Kebandar Udaraan Nasional	1. PKN Bandar Lampung 2. PKW Metro	Berkembangnya PKN Bandar Lampung sebagai Wilayah Metropolitan baru didukung dengan kawasan perkotaan disekitarnya	Perlu peningkatan kapasitas bandara untuk melayani penerbangan internasional	Pemenuhan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan berbasis mitigasi bencana
			Tersedianya Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Bakauheni yang melayani pergerakan orang dan barang antar Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya di Indonesia	RTRWN, Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional		Belum optimalnya pengelolaan Pelabuhan Panjang sebagai salah satu pelabuhan utama di Pulau Sumatera		
	Meso Hubungan Provinsi Lampung Terhadap Provinsi Lain di Sumatera Bagian Selatan	Aksesibilitas	Pada saat ini telah terbangun Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni sampai dengan batas Sumatera Selatan	RTR Pulau Sumatera, Renstra PUPR dan Rencana Umum Jaringan Nasional		Berkembangnya ekonomi wilayah di sekitar koridor jalan tol sebagai pusat pertumbuhan baru	Masih terkonsentrasinya perekonomian Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
			TPA eksisting sudah over capacity dan perencanaan TPA Regional belum diputuskan, total backlog mencapai 861.846 kepenghunian dan 726.933 kepemilikan					
			PKN Bandar Lampung memiliki akses sanitasi layak 95,45% dan PKW Metro sebesar 94,64% berada di atas rata-rata Provinsi Lampung (83,89%)	Renstra PUPR mengarahkan untuk pemenuhan prasarana dasar mendukung kegiatan perkotaan		Pemenuhan layanan dasar seperti air minum perpipaan, TPA, hingga kebutuhan air baku dalam mendukung kawasan-kawasan strategis, rumah huni layak terutama di PKN Bandar Lampung	Layanan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, pengolahan sampah, dan sanitasi terutama di kawasan perkotaan masih perlu peningkatan untuk dapat mengimbangi peningkatan aktivitas ekonomi	
	Mikro Provinsi Lampung	Standar Pelayanan Minimum Perkotaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Tingkat Backlog Perumahan yang tinggi di kawasan perkotaan, sehingga banyak masyarakat diperkotaan belum memiliki rumah yang layak					
			Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap kebencanaan	Sejalan dengan Renstra PUPR yang mengarahkan untuk		Berkembangnya kawasan perkotaan Lampung menjadi kota	Belum tersedianya infrastruktur yang memadai	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
			seperti banjir, tanah langsor, gempa bumi, dan tsunami	mendukung penanganan pengendalian banjir		inklusif dan berketahanan terhadap bencana	untuk mitigasi bencana	
			Kinerja jalan daerah (provinsi dan kabupaten masih rendah)	Sejalan dengan Renstra PUPR yang mengarahkan untuk meningkatkan konektivitas simpul transportasi Lampung		Pemeliharaan kualitas jaringan jalan untuk mendukung konektivitas wilayah	Terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk infrastruktur jalan	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.2.3. Isu Strategis Fokus Pariwisata

Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi Lampung mencapai 2.549.925 orang dengan wisatawan nusantara sebanyak 2.548.394 dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.531 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya infrastruktur pendukung pariwisata yaitu Tol Trans Sumatera yang memudahkan akses dari dan menuju ke Provinsi Lampung baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera Bagian Selatan.

Sesuai dengan RTRWN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, Provinsi Lampung diarahkan untuk pengembangan kawasan pariwisata alam berskala nasional. Di Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) KSPN yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu KSPN Way Kambas dan sekitarnya KSPN Krakatau dan sekitarnya. Pada KSPN Way Kambas terdapat Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem yaitu ekosistem mangrove, pantai, riparian, hutan rawa air tawar dan hutan dipterokarpa dataran rendah yang menjadikan kawasan TNWK sebagai habitat bagi berbagai macam spesies satwa. Hal tersebut menjadikan TNWK memiliki daya tarik tersendiri. Pada KSPN Krakatau dan Sekitarnya merupakan daerah konservasi alam. Daya tarik dari kawasan pariwisata ini adalah pesisir pantai Lampung selatan dan fenomena vulkanik yang terus berlangsung. Faktor yang mendorong wisatawan untuk berkunjung di Lampung juga dipengaruhi oleh harga tiket wisata yang relatif terjangkau serta Terdapat kelompok sadar wisata Desa Braja Harjosari (KSPN Way Kambas dan sekitarnya) dan Komunitas Putera Krakatau (KSPN Krakatau dan sekitarnya).

Namun pada sektor pariwisata ini masih terdapat permasalahan diantaranya sarana prasarana pariwisata yang perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana pariwisata lokal daerah yang masih terbatas sehingga daya tarik wisata kurang optimal, penebangan dan perburuan liar yang mengancam terhadap ekosistem TNWK, minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata, khususnya terkait dengan evakuasi bencana, masih terbatasnya kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan pilihan sarana transportasi yang terbatas menuju kawasan pariwisata. Beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan pengembangan akses dan infrastruktur pendukung pariwisata, menjadikan KSPN Way Kambas pusat kegiatan pariwisata alam Provinsi Lampung yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mewujudkan KSPN Krakatau sebagai pariwisata alam terintegrasi dengan BHC

(Bakauheni *Harbour City*), meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola dan mempromosikan pariwisata Lampung serta pembentukan paket pariwisata yang terintegrasi.

Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Pariwisata

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pariwisata	Makro (Lampung - Nasional)	Destinasi Pariwisata Skala Nasional	Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi Lampung mencapai 2.549.925 orang, wisnus sebanyak 2.548.394 dan wisman 1.531 orang	Sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025	1. KSPN Way Kambas dan sekitarnya 2. KSPN Krakatau dan sekitarnya	Optimalisasi infrastruktur strategis terbangun seperti bandara, jalan nasional dan jalan tol untuk mendukung kawasan pariwisata	Sarana Prasarana Pariwisata yang perlu ditingkatkan	Optimalisasi Infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas dalam mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung
	Meso (Sumbagsel)	Infrastruktur Pendukung Pariwisata	Adanya pembangunan Tol Trans Sumatera yang memudahkan akses dari dan menuju ke Provinsi Lampung baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera Bagian Selatan	RTR Pulau Sumatera, Renstra PUPR dan Rencana Umum Jaringan Nasional		Pengembangan akses dan infrastruktur pendukung pariwisata	Sarana dan prasarana pariwisata lokal daerah yang masih terbatas sehingga daya tarik wisata kurang optimal	
	Mikro (Lampung)	Potensi Pariwisata Lokal	Terdapat lima tipe ekosistem utama penyusun kawasan TNWK, yaitu ekosistem mangrove, pantai, riparian, hutan rawa air tawar dan hutan dipterokarpa	Sesuai dengan dokumen RTRWN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, diarahkan untuk pengembangan		Menjadikan KSPN Way Kambas pusat kegiatan pariwisata alam Provinsi Lampung yang berwawasan lingkungan	Penebangan dan perburuan liar yang mengancam terhadap ekosistem TNWK	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
			dataran rendah, yang menjadikan kawasan TNWK sebagai habitat bagi berbagai macam spesies satwa	kawasan pariwisata alam berskala nasional		dan berkelanjutan		
			KSPN Krakatau merupakan daerah konservasi alam. Daya tarik dari kawasan pariwisata ini adalah pesisir pantai Lampung Selatan dan fenomena vulkanik yang terus berlangsung			Mewujudkan KSPN Krakatau sebagai pariwisata alam terintegrasi dengan BHC (<i>Bakauheni Harbour City</i>)	Minimnya sarana dan prasarana dengan evakuasi bencana	
			Terdapat kelompok sadar wisata Desa Braja Harjosari. (KSPN TNWK); dan Komunitas Putera Krakatau (KSPN Krakatau)			Meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola dan mempromosikan pariwisata Lampung	Masih terbatasnya kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor pariwisata	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
			Harga tiket pariwisata yang relatif terjangkau			Pembentukan paket pariwisata yang terintegrasi	Pilihan sarana transportasi yang terbatas menuju kawasan pariwisata	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 6

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH



6.1. Proyeksi Pertumbuhan

Proyeksi Penduduk merupakan metode hitung prediksi jumlah penduduk di masa depan berdasarkan kondisi saat ini dengan kondisi sebelumnya. Perhitungan proyeksi penduduk dapat menjadi acuan oleh pemerintah agar dapat membuat rancangan dan strategi pembangunan sesuai dengan prediksi kondisi yang sekiranya akan terjadi di masa depan. Berikut adalah proyeksi penduduk di Provinsi Lampung:

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2022-2029

Kabupaten/ Kota		Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun ke -N (Pn)				
Nama	Laju Pertumbuhan 2020-2021	0	1	2	3	4
		2021 (Po)	2022	2023	2024	2025
Lampung Barat	0,27	302.749	304.894	307.054	309.229	311.420
Tanggamus	1,15	645.807	655.757	665.86	676.119	686.536
Lampung Selatan	0,93	1.071.727	1.085.973	1.100.408	1.115.035	1.129.857
Lampung Timur	0,93	1.118.115	1.133.061	1.148.207	1.163.556	1.179.109
Lampung Tengah	1,59	1.477.395	1.506.797	1.536.785	1.567.370	1.598.563
Lampung Utara	0,21	634.117	638.316	642.542	646.797	651.079
Way Kanan	0,93	476.871	483.191	489.595	496.084	502.659
Tulang Bawang	0,19	430.63	433.411	436.21	439.027	441.863
Pesawaran	1,19	481.708	489.281	496.973	504.786	512.722
Pringsewu	0,45	406.823	410.369	413.946	417.554	421.193
Mesuji	1,32	229.772	233.78	237.857	242.006	246.227
Tulang Bawang Barat	0,72	287.707	290.969	294.267	297.603	300.977
Pesisir Barat	0,77	163.641	165.576	167.534	169.515	171.52
Kota Bandar Lampung	2,16	1.184.949	1.214.453	1.244.691	1.275.683	1.307.446
Kota Metro	0,87	169.781	171.933	174.113	176.32	178.555
TOTAL		9.081.792	9.217.761	9.356.043	9.496.683	9.639.725

Kabupaten/ Kota		Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun ke -N (Pn)			
Nama		6	7	8	10
		2026	2027	2028	2034
Lampung Barat	313.627	315.849	318.086	320.340	331.850
Tanggamus	697.113	707.854	718.759	729.833	787.815
Lampung Selatan	1.144.876	1.160.094	1.175.514	1.191.140	1.272.439
Lampung Timur	1.194.871	1.210.843	1.227.029	1.243.431	1.328.790
Lampung Tengah	1.630.376	1.662.824	1.695.916	1.729.668	1.908.772
Lampung Utara	655.39	659.73	664.098	668.495	690.922
Way Kanan	509.321	516.071	522.91	529.841	565.895
Tulang Bawang	444.716	447.589	450.479	453.389	468.220
Pesawaran	520.783	528.97	537.286	545.733	590.001
Pringsewu	424.864	428.568	432.303	436.071	455.409

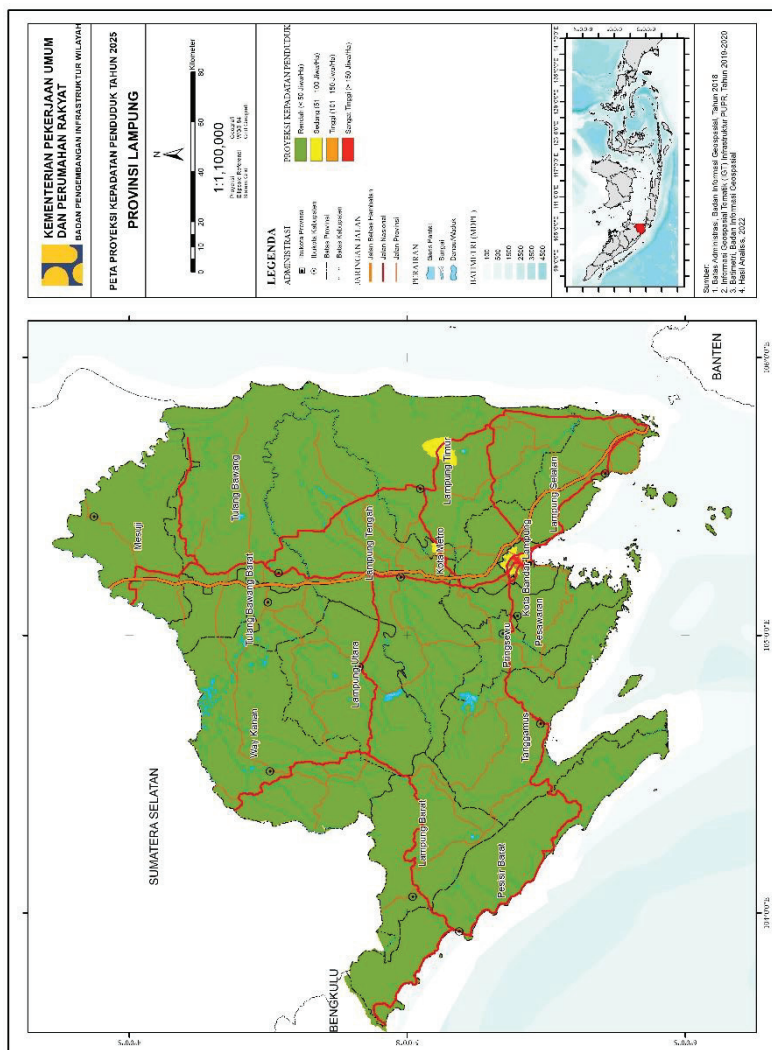
Kabupaten/ Kota Nama	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun ke -N (Pn)				
	6 2026	7 2027	8 2028	9 2029	10 2034
Mesuji	250.522	254.891	259.337	263.860	287.688
Tulang Bawang Barat	304.389	307.839	311.329	314.859	333.115
Pesisir Barat	173.548	175.6	177.677	179.778	190.661
Kota Bandar Lampung	1.340.000	1.373.364	1.407.559	1.442.606	1.631.371
Kota Metro	180.818	183.11	185.431	187.782	199.989
TOTAL	9.785.213	9.933.194	10.083.715	10.236.824	11.042.935

Sumber: BPS, 2021

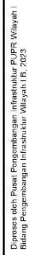
Berdasarkan proyeksi penduduk Provinsi Lampung per kabupaten/kota berdasarkan Proyeksi *Least Square* di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2034 mendatang, diproyeksikan jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 11.042.935 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak di tahun 2034 berada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah proyeksi penduduk 1.908.772 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2034 dengan jumlah terkecil berada di Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah penduduk 190.661 jiwa.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto, dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi di tahun 2025 termasuk kedalam kepadatan rendah, kecuali untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Untuk kecamatan dengan klasifikasi kepadatan tinggi berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, dan Kedaton. Sedangkan kecamatan dengan klasifikasi kepadatan penduduk sangat tinggi berada di Kecamatan Bumi Waras, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, dan Way Halim.

Berdasarkan gambar peta proyeksi kepadatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2029 termasuk kedalam kepadatan rendah, kecuali Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Kecamatan dengan klasifikasi kepadatan tinggi berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Kedaton, dan Enggal. Sedangkan Kecamatan dengan klasifikasi kepadatan penduduk sangat tinggi berada di Kecamatan Bumi Waras, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, dan Way Halim.



Gambar 6.1 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025 Provinsi Lampung



Gambar 6.2 Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2029 Provinsi Lampung

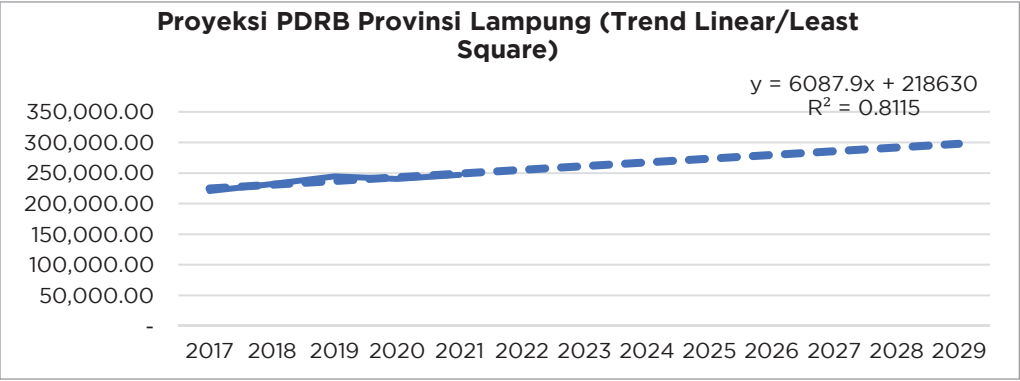
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Sektor Unggulan dilakukan melalui proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023-2029 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2023-2029

Tahun	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Way Kanan	Tulang Bawang
2021	5.053,32	10.924,78	30.541,21	29.000,40	48.710,04	16.727,89	9.736,50	16.062,92
2022	5.224,90	11.275,20	31.535,12	32.743,40	50.425,80	17.298,32	10.072,08	16.624,72
2023	5.352,40	11.521,15	32.266,64	33.794,80	51.740,60	17.727,04	10.333,46	17.048,84
2024	5.479,90	11.767,10	32.998,16	34.846,20	53.055,40	18.155,76	10.594,84	17.472,96
2025	5.607,40	12.013,05	33.729,68	35.897,60	54.370,20	18.584,48	10.856,22	17.897,08
2026	5.734,90	12.259,00	34.461,20	36.949,00	55.685,00	19.013,20	11.117,60	18.321,20
2027	5.862,40	12.504,95	35.192,72	38.000,40	56.999,80	19.441,92	11.378,98	18.745,32
2028	5.989,90	12.750,90	35.924,24	39.051,80	58.314,60	19.870,64	11.640,36	19.169,44
2029	6.117,40	12.996,85	36.655,76	40.103,20	59.629,40	20.299,36	11.901,74	19.593,56
	Linear	Linear	Linear	Linear	Linear	Linear	Linear	Linear

Tahun	Tulang Bawang	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Kota Bandar Lampung	Kota Metro
2021	16.062,92	11.492,49	7.870,16	7.107,31	7.970,78	3.133,19	39.818,10	4.358,39
2022	16.624,72	11.883,08	8.123,76	7.348,74	8.244,12	3.249,72	41.527,14	4.512,26
2023	17.048,84	12.154,26	8.321,77	7.531,63	8.452,29	3.329,64	42.804,66	4.625,97
2024	17.472,96	12.425,44	8.519,78	7.714,52	8.660,46	3.409,56	44.121,50	4.739,68
2025	17.897,08	12.696,62	8.717,79	7.897,41	8.868,63	3.489,48	45.478,84	4.853,39
2026	18.321,20	12.967,80	8.915,80	8.080,30	9.076,80	3.569,40	46.877,93	4.967,10
2027	18.745,32	13.238,98	9.113,81	8.263,19	9.284,97	3.649,32	48.320,07	5.080,81
2028	19.169,44	13.510,16	9.311,82	8.446,08	9.493,14	3.729,24	49.806,58	5.194,52
2029	19.593,56	13.781,34	9.509,83	8.628,97	9.701,31	3.809,16	51.338,81	5.308,23
	Linear	Linear	Linear	Linear	Linear	Linear	Exponential	Linear

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 6.3 Grafik Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 2022-2029

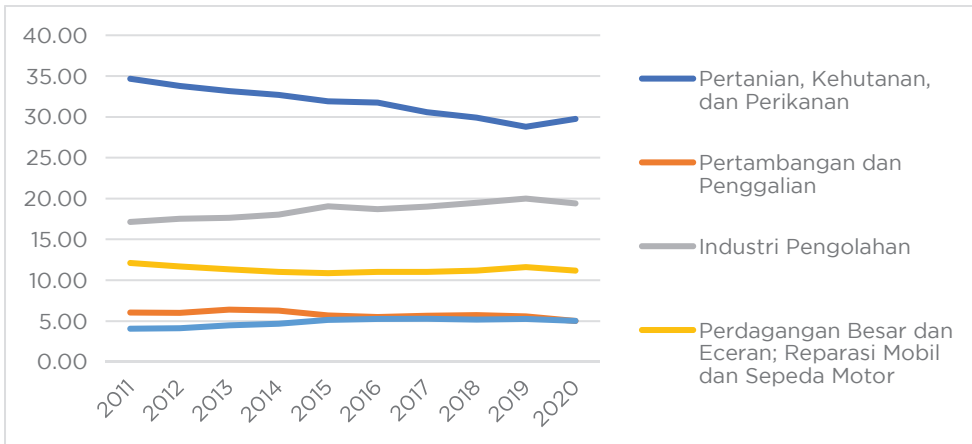
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Metode yang memenuhi syarat untuk proyeksi PDRB Provinsi Lampung adalah metode Trend Linear (Least Square) dengan nilai R-Square 0,81, proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Lampung pada tahun 2029 mencapai 297.772,70 miliar rupiah. Kecenderungan Pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung pada 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung pada Tahun 2011-2020

Sektor Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,67	33,81	33,16	32,69	31,92	31,76	30,57	29,90	28,79	29,78
Pertambangan dan Penggalan	6,03	6,02	6,39	6,29	5,68	5,49	5,65	5,74	5,55	5,01
Industri Pengolahan	17,14	17,51	17,65	18,03	19,05	18,70	19,02	19,50	20,00	19,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,11	11,70	11,33	11,02	10,86	11,02	11,04	11,16	11,59	11,18
Transportasi dan Pergudangan	4,06	4,13	4,49	4,65	5,15	5,25	5,28	5,18	5,24	5,03

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 6.4 Grafik Perkembangan Kecenderungan Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2020

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2011-2020 dapat dilihat bahwa:

1. Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Industri Pengolahan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.
2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami nilai yang fluktuatif.
3. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan terus menerus disetiap tahunnya dan meningkat pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19.

Keberlanjutan Lingkungan dilakukan dengan analisis Daya Dukung Lahan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Metode *Multi Criteria Analysis* (MCA)

Kriteria	Luas (Ha)	%
MCA 1 Lahan Sesuai (Zona Prioritas Pengembangan Perkotaan)	1.425.524	43,51
MCA 2 Lahan Cukup (Zona Pengembangan Perkotaan Bersyarat)	1.247.355	38,07
MCA 3 Lahan Cukup (Zona Pengembangan Perkotaan Bersyarat)	384.940	11,75
MCA 4 Lahan Tidak Sesuai (Zona Lindung dan Penyangga Perkotaan)	218.831	6,68

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan gambar peta dan tabel kriteria di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 kriteria daya dukung lahan, yaitu MCA 1 Lahan sesuai atau Zona Prioritas Pengembangan Perkotaan

dengan luas 1.425.524 Ha atau 43,51% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Kemudian MCA 2 Lahan Cukup atau Zona Pengembangan Perkotaan Bersyarat dengan luas sebesar 1.247.355 Ha atau 38,07% dari luas total Provinsi Lampung. MCA 3 Lahan Cukup atau Zona Pengembangan Perkotaan Bersyarat memiliki luas sebesar 384.940 Ha atau 11,75% dari luas total Provinsi Lampung. Dan MCA 4 Lahan Tidak Sesuai atau Zona Lindung dan Penyangga Perkotaan dengan luas 218.831 Ha atau 6,68% dari luas total Provinsi Lampung.

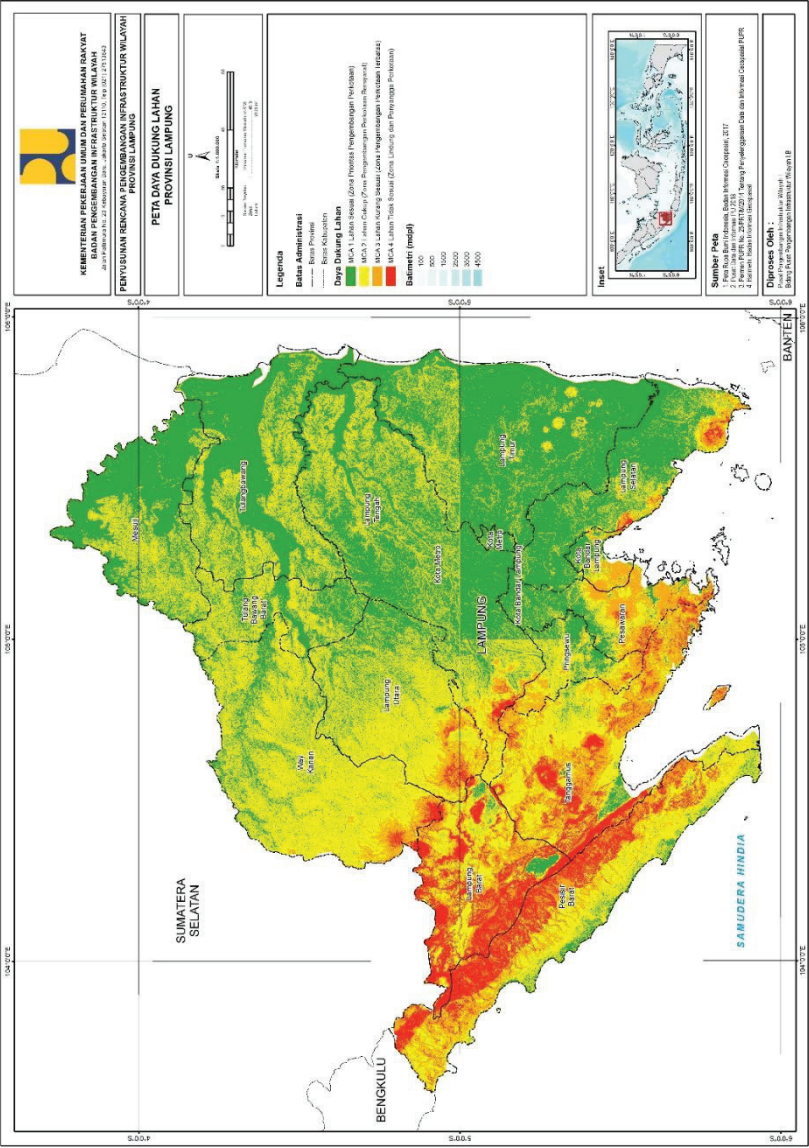
Tabel 6.5 Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung berdasarkan MCA

Daya Dukung Lahan	Luas (Ha)	%
Potensial (MCA 1 & MCA 2)	2.672.880	82
Kendala (MCA 3)	384.940	12
Limitasi (MCA 4)	218.831	7

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel di atas, daya dukung lahan potensial di Provinsi Lampung berasal MCA 1 dan MCA 2 dengan luas gabungan sebesar 2.672.880 Ha atau 82% dari luas total Provinsi Lampung. Kemudian daya dukung lahan kendala (MCA 3) memiliki luas sebesar 384.940 Ha atau 12% dari luas total Provinsi Lampung. Dan daya dukung lahan limitasi (MCA 4) seluas 218.831 Ha atau 7% dari luas total Provinsi Lampung. Daya dukung dengan kategori limitasi tidak boleh dilakukan pengembangan dan sebagian besar terdapat di Barat Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan kondisi fisik kelerengan yang cukup tinggi serta beberapa ancaman bencana. Sedangkan pada bagian tengah dan timur Provinsi Lampung, sebagian besar wilayah yang dapat dikembangkan karena termasuk ke dalam kategori daya dukung lahan potensial.

Hasil Daya Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLb) Provinsi Lampung sebesar 11,39% yang masuk ke dalam daya Dukung Lahan Terbangun Sedang. Mayoritas wilayah Lampung berada pada Daya Dukung Lahan Terbangun Baik, sehingga pengembangan wilayah lebih baik diarahkan ke bagian utara dan timur. Daya Dukung Lahan Terbangun Terlampaui atau Buruk berada di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, sehingga diarahkan untuk revitalisasi atau peremajaan kota/wilayah.



Gambar 6.5 Peta Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung



6.2. Visi dan Strategi

Berdasarkan karakter wilayah dan analisis yang telah dilakukan, Provinsi Lampung memiliki karakter wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, namun potensi belum terkelola secara maksimal dan wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi namun terdapat keterbatasan fisik dan ketimpangan antarwilayah. Dari potensi ekonomi di Provinsi Lampung yang cukup tinggi tersebut, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi PDRB Provinsi Lampung. Salah satu komoditas pertanian unggulan di Provinsi Lampung adalah padi dan untuk bidang pariwisata terdapat beberapa objek wisata unggulan di Provinsi Lampung, yaitu KSPN Way Kambas dan KSPN Krakatau dan sekitarnya.

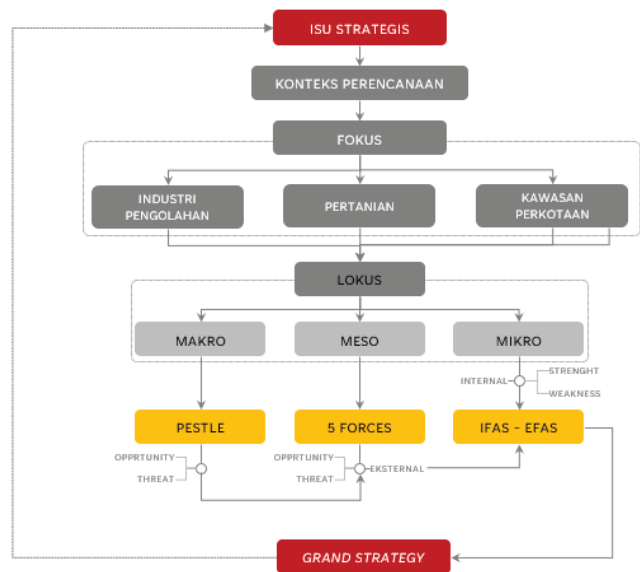
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rumusan visi pengembangan wilayah di Provinsi Lampung adalah Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Lampung sebagai Hub Sumatera Bagian Selatan melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Perkotaan dan Pariwisata.

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yang akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Lampung yaitu:

1. Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian;
2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana;
3. Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas dalam Mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung.

6.3. Skenario Pengembangan

Sub bab ini menjelaskan terkait dengan strategi pengembangan wilayah berdasarkan pada tujuan dan sasaran, isu strategis, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di Provinsi Lampung pada masing-masing fokus perencanaan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Langkah strategis disusun mengikuti alur pada gambar berikut:



Gambar 6.7 Langkah Penyusunan *Grand Strategy*

Penentuan strategi pengembangan dilakukan dengan analisis Pestle, 5 Forces dan IFAS-EFAS.

Analisis *Pestle*

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Lampung, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Lampung, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Analisis Penyusunan Strategi dilakukan untuk menghasilkan strategi yang lebih detail melalui metode SWOT terhadap masing-masing grand strategy. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) pada setiap

fokus.pengembangan di Provinsi Lampung.

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pertanian berada pada kuadran agresif, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).

6.3.1. Skenario Pengembangan Wilayah Fokus Pertanian
Analisis *PESTLE* (Makro)

Tabel 6.6 Isu Strategis Fokus Pertanian

Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Sektor pertanian didukung kebijakan penataan ruang sebagai pengembangan sektor pertanian skala nasional	Program dan kebijakan yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efektif, dan efisien	2	9%
ECONOMIC	Provinsi Lampung merupakan 6 besar provinsi penghasil padi di Indonesia	Kebergantungan pada komoditas padi disertai dengan fluktuasi harga yang tidak stabil	5	23%
SOCIOLOGICAL	Adanya kolaborasi antara masyarakat dan stakeholder pada lingkup nasional untuk meningkatkan indeks tanam dengan cara percepatan pengolahan tanah serta mengoptimalkan sumber daya alam yang ada	Perlunya dorongan agar ada peningkatan SDM pertanian atau petani <i>milenial</i> yang saat ini mengalami penurunan baik di Lampung dan secara nasional	4	18%
TECHNOLOGICAL	Pembangunan bendungan-bendungan dan potensi perluasan jaringan irigasi yang besar untuk mendukung produksi sektor pertanian	Ketidamerataan akses teknologi pertanian diikuti kinerja irigasi yang belum optimal	4	18%

Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
LEGAL	Penetapan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dalam RPJMN	Belum adanya penetapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sebagai salah satu kebijakan nasional di sektor pertanian	3	14%
ENVIRONMEN	Banyaknya lahan baku sawah di Provinsi Lampung yaitu seluas 361.699 Ha	Penurunan luas panen dan produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 9%	4	18%
			22	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.7 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian

Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	3	25%	Penetapan LP2B di Provinsi Lampung dalam rangka menjaga produktivitas pangan	Resiko alih fungsi lahan pada lahan pertanian yang mempengaruhi kontribusi produksi padi Provinsi Lampung
Kualitas Yang Diinginkan	5	42%	Menjadi Provinsi dengan produksi padi terbesar di Pulau Sumatera	Ketidameratan akses teknologi pertanian diikuti irigasi yang belum optimal
Inovasi	4	33%	Peningkatan <i>added value</i> produk pertanian melalui industrialisasi yang terintegrasi	Masih kurangnya pengembangan industri pengolahan sebagai bahan upaya peningkatan <i>added value</i> produk
SUB TOTAL	12	100%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	4	33%	Hasil produksi pertanian (hortikultura, perkebunan,	Akses infrastruktur distribusi hasil

Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
			pangan, dan kehutanan) diekspor ke negara Asia dan Eropa	pertanian yang belum optimal
Trend Eksisting	5	42%	Produksi padi 2.688.160 ton (BPS, 2022) menjadikan Lampung menjadi provinsi ke-6 produksi padi tertinggi di Indonesia di bawah Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel dan Sumatera Selatan atau tertinggi ke-2 di Pulau Sumatera	Penurunan luas panen dan produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 9%
Penciptaan Nilai	3	25%	Kenaikan pertumbuhan regional melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian	Harga pangan yang tidak stabil berdampak terhadap produksi pangan dan keberlanjutan usaha tani
SUB TOTAL	12	100%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				
Ketergantungan Saat ini	3	30%	Gerakan masyarakat untuk tata kelola pertanian berkelanjutan yang inklusif dengan melibatkan kelompok tani, penggiat dan stakeholder lain yang lebih luas	Kurang terintegrasinya kelompok tani, penggiat dan stakeholder lain yang terlibat dalam mendukung sektor pertanian
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	5	50%	Peningkatan kualitas SDM terdidik dan terampil pada sektor pertanian melalui penyediaan pendidikan pertanian	Keterbatasan SDM maupun kelembagaan menyebabkan kerentanan pada sektor pertanian
Daya Dukung Eksisting	2	20%	Dari 95,31% penduduk yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak	Perkembangan minat dan kompetensi sektor pertanian relatif stagnan

Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
			1.843,5 ribu orang (43,03%).	
SUB TOTAL	10	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				
Tantangan Yang Dihadapi	4	33%	Aksesibilitas dan waktu tempuh yang cepat untuk distribusi hasil pertanian	Keterbatasan fiskal dalam penyelesaian jalan tol
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	5	42%	Didukung jalur logistik Trans Sumatera untuk mendistribusikan komoditas pertanian ke Pulau Sumatera dan Jawa	Keterbatasan anggaran dari pemerintah maupun badan usaha (BUJT)
Ancaman Terhadap Legacy	3	25%	Dukungan Renstra PUPR dalam peningkatan konektivitas antar wilayah di ruas Jalan Nasional	Belum optimalnya kemandirian jalan yang menghambat distribusi hasil pertanian dan waktu tempuh
SUB TOTAL	12	100%		
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	4	36%	Provinsi Lampung merupakan 6 besar provinsi penghasil padi di Indonesia dan terbesar ke-2 di Pulau Sumatera	Produktivitas tanaman padi Lampung tahun 2022 masih di bawah rata-rata nasional
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	5	45%	Terdapat PSN Bendungan Way Sekampung dan potensi perluasan DI Rumbia Extension dari Bendungan Way Sekampung untuk mengairi daerah pertanian di Provinsi Lampung	Pengembangan jaringan irigasi baru memerlukan anggaran yang besar
Peralihan Cost	2	18%	Teknologi dapat mengurangi kebutuhan tenaga di wilayah sekitar dan meningkatkan produktivitas	Teknologi memerlukan modal yang besar sehingga akan menyulitkan umkm untuk shifting dari pertanian tradisional

Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
SUB TOTAL	11	100%		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis SWOT untuk fokus pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.8 Analisis SWOT Fokus Pertanian

PERTANIAN			
S (STRENGTH) - KEKUATAN		W (WEAKNESS) - KELEMAHAN	
1	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Lampung merupakan sektor yang berkontribusi paling besar (27,90% pada 2022) terhadap PDRB provinsi	1	Ancaman bencana banjir tinggi di lokasi produksi pertanian
2	Sebanyak 43% (1,84 juta) dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian	2	Nilai Indeks Kinerja Irigasi (IKSI) di Provinsi Lampung masih rendah (rata-rata nilai IKSI gabungan 0,5 atau lebih rendah)
3	Tiga kabupaten dengan produksi padi terbesar pada tahun 2022 Lampung Tengah (540.115,25 ton/ tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun), Mesuji (283 879,49 ton/tahun)	3	Belum adanya sektor industri yang menampung hilirisasi produk pertanian
4	Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat sebanyak 3 Daerah Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha (Permen 14/2015).	4	Masih banyaknya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau belum adanya jaringan irigasi tersier yang tersambung sampai persawahan
5	Memiliki kawasan lahan pangan berkelanjutan yang berpotensi sebagai lumbung pangan nasional	5	Penurunan luas lahan baku sawah akibat alih fungsi guna lahan sawit sebesar 9%
O (OPPORTUNITY) - PELUANG		T (THREAT) - ANCAMAN	
1	Menjadi Provinsi dengan produksi padi terbesar di Pulau Sumatera	1	Pengembangan jaringan irigasi baru memerlukan anggaran yang besar
2	Produksi padi 2.688.160 ton (BPS, 2022) menjadikan Lampung menjadi provinsi ke-6 produksi padi tertinggi di Indonesia di bawah Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel dan Sumatera Selatan atau tertinggi ke-2 di Pulau Sumatera	2	Keterbatasan anggaran dari pemerintah maupun badan usaha (BUJT)
3	Meningkatnya kualitas SDM terdidik dan terampil pada sektor pertanian melalui penyediaan pendidikan pertanian	3	Dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum optimal

PERTANIAN			
S (STRENGTH) – KEKUATAN		W (WEAKNESS) – KELEMAHAN	
4	Terkoneksinya jaringan Jalan Tol Trans Sumatera sampai dengan seluruh wilayah Pulau Sumatera, sehingga meningkatkan distribusi hasil pertanian ke provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera	4	Belum adanya penetapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sebagai salah satu kebijakan nasional di sektor pertanian
5	Tersedianya Bendungan Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk irigasi pertanian	5	Ketidamerataan akses teknologi pertanian diikuti kinerja irigasi yang belum optimal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.9 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Pertanian

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
STRENGTH	1	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Lampung merupakan sektor yang berkontribusi paling besar (27,90% pada 2022) terhadap PDRB provinsi	4	23,53%	3	0,71
	2	Sebanyak 43% (1,84 juta) dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian	3	17,65%	2	0,35
	3	Tiga kabupaten dengan produksi padi terbesar pada tahun 2022 Lampung Tengah (540.115,25 ton/ tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun), Mesuji (283 879,49 ton/tahun)	4	23,53%	3	0,71
	4	Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat sebanyak 3 Daerah Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha (Permen 14/2015).	3	17,65%	3	0,53
	5	Memiliki kawasan lahan pangan berkelanjutan yang berpotensi sebagai lumbung pangan nasional	3	17,65%	2	0,35
	SUB TOTAL		17	100,00%		2,65
	Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating
WEAKNESS	1	Ancaman bencana banjir tinggi di lokasi produksi pertanian	2	15,38%	-2	-0,31

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
	2	Nilai Indeks Kinerja Irigasi (IKSI) di Provinsi Lampung masih rendah (rata-rata nilai IKSI gabungan 0,5 atau lebih rendah)	3	23,08%	-1	-0,23
	3	Belum adanya sektor industri yang menampung hilirisasi produk pertanian	2	15,38%	-2	-0,31
	4	Masih banyaknya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau belum adanya jaringan irigasi tersier yang tersambung sampai persawahan	3	23,08%	-3	-0,69
	5	Penurunan luas lahan baku sawah akibat alih fungsi guna lahan sawit sebesar 9%	3	23,08%	-3	-0,69
SUB TOTAL			13	100,00%		-2,23
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL						0,42

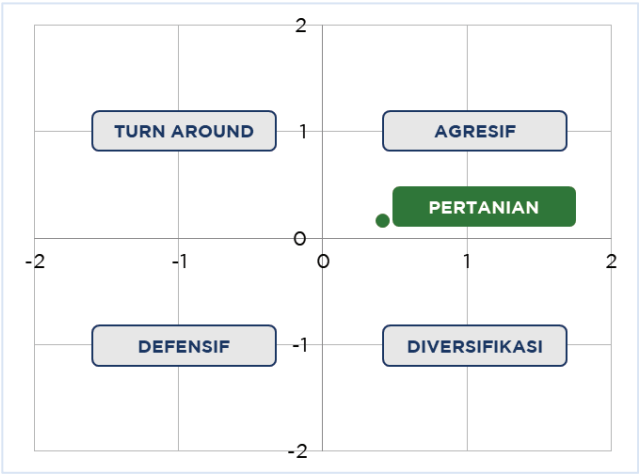
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.10 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Pertanian

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
OPPORTUNITY	1	Menjadi Provinsi dengan produksi padi terbesar di Pulau Sumatera	4	25,00%	3	0,75
	2	Produksi padi 2.688.160 ton (BPS, 2022) menjadikan Lampung menjadi provinsi ke-6 produksi padi tertinggi di Indonesia di bawah Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel dan Sumatera Selatan atau tertinggi ke-2 di Pulau Sumatera	3	18,75%	3	0,56
	3	Meningkatnya kualitas SDM terdidik dan terampil pada sektor pertanian melalui penyediaan pendidikan pertanian	3	18,75%	3	0,56
	4	Terkoneksinya jaringan Jalan Tol Trans Sumatera sampai dengan seluruh wilayah Pulau Sumatera, sehingga meningkatkan distribusi hasil pertanian ke provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera	3	18,75%	3	0,56
	5	Tersedianya Bendungan Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk irigasi pertanian	3	18,75%	1	0,19
	SUB TOTAL		16	100,00%		2,63
Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
THREAT	1	Pengembangan jaringan irigasi baru memerlukan anggaran yang besar	3	23,08%	-3	-0,69
	2	Keterbatasan anggaran dari pemerintah maupun badan usaha (BUJT)	3	23,08%	-2	-0,46
	3	Dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum optimal	3	23,08%	-3	-0,69
	4	Belum adanya penetapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sebagai salah satu kebijakan nasional di sektor pertanian	2	15,38%	-2	-0,31
	5	Ketidamerataan akses teknologi pertanian diikuti kinerja irigasi yang belum optimal	2	15,38%	-2	-0,31
SUB TOTAL			13	100,00%		-2,46
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL						0,16

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 6.8 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung dikembangkan dengan strategi agresif, yaitu:

1. Optimalisasi infrastruktur pertanian untuk mendukung produktivitas tanaman pangan (S4-O4-O5);
2. Perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan sebagai lumbung pangan nasional (S1-S3-S5-O1-O2);
3. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan untuk

mendukung sektor pertanian (S2-O3).

6.3.2. Skenario Pengembangan Wilayah Fokus Perkotaan

Tabel 6.11 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Posisi PKN Bandar Lampung yang sangat strategis diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I)	Kebergantungan Provinsi Lampung terhadap kebijakan anggaran pusat untuk pemenuhan infrastruktur perkotaan	3	17%
ECONOMIC	Pelabuhan Panjang menjadi simpul transportasi laut nasional dengan komoditas ekspor hasil pertanian, pertambangan dan perkebunan serta Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa (penyebrangan nasional)	Pelabuhan panjang sebagai simpul ekspor belum berfungsi optimal	5	28%
SOCIOLOGICAL	Perubahan perilaku masyarakat yang modern sebagai dampak investasi pembangunan pusat perkotaan	Rendahnya kualitas SDM Provinsi Lampung kurang mendukung perkembangan simpul ekspor	4	22%
TECHNOLOGICAL	Adanya Proyek-proyek strategis nasional infrastruktur dasar perkotaan yang meningkatkan daya saing perkotaan secara nasional	Sosialisasi teknologi yang tidak terdistribusi secara menyeluruh akan menyebabkan ketertinggalan pada sebagian masyarakat	2	11%
LEGAL	PKN Bandar Lampung ditetapkan sebagai sistem perkotaan nasional dalam RTRWN	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung masih belum ditetapkan sebagai kawasan strategis metropolitan skala nasional	1	6%
ENVIRONMENT	Perkembangan perkotaan di sepanjang pesisir	Tingginya ancaman bencana skala nasional	3	17%

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
	pantai memberikan lanskap perkotaan yang indah dan berbasis lingkungan	berupa gempa bumi dan tsunami (lokasi yang di sekitar <i>ring of fire</i>), ancaman banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat intensitas industri di perkotaan		
			18	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.12 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	4	36%	Provinsi Lampung didukung oleh Jalan Tol Trans Sumatera dan Pelabuhan Internasional yang mampu mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang antara Pulau Jawa dan Sumatera	Potensi kerusakan infrastruktur transportasi dan pelabuhan akibat beban jalan yang berat
Kualitas Yang Diinginkan	2	18%	Peningkatan kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional serta terwujudnya pemerataan kontribusi PDRB masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung	Aksesibilitas kawasan yang belum optimal sehingga menghambat distribusi logistik.
Inovasi	5	45%	PKN Bandar Lampung dan PKW Metro diarahkan menjadi kawasan metropolitan sebagai simpul utama kegiatan jasa dan pintu gerbang antara	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung masih belum ditetapkan sebagai kawasan strategis metropolitan skala nasional

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
			Pulau Jawa dan Pulau Sumatera	
SUB TOTAL	11	100%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	4	31%	PKN Bandar Lampung berperan sebagai simpul transportasi lintas provinsi antara Lampung-Sumatera Selatan serta lintas pulau Jawa-Sumatera	Kecenderungan semakin banyaknya kawasan perdesaan yang berkembang menjadi perkotaan dan potensi adanya <i>urban sprawl</i>
Trend Eksisting	4	31%	Kemantapan jalan Nasional Provinsi Lampung di atas 90% yang mendukung dalam akses mobilitas antar wilayah sebagai simpul transportasi lintas provinsi	Kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan batu bara berlebih
Penciptaan Nilai	5	38%	Kota di sekitar PKN Bandar Lampung menjadi kawasan penyangga bagi kawasan perkotaan dengan mendorong integrasi aktivitas antara perdesaan dan perkotaan	Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai
SUB TOTAL	13	100%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				
Ketergantungan Saat ini	5	45%	Posisi PKN Bandar Lampung yang sangat strategis diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I)	Ketergantungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap anggaran pengembangan infrastruktur Lampung
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	3	27%	Kualitas jaringan transportasi dan infrastruktur dasar yang mendukung kawasan Pelabuhan Panjang	Perlunya jalan bebas hambatan untuk mempercepat distribusi logistik menuju Pelabuhan Panjang

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Daya Dukung Eksisting	3	27%	Infrastruktur pendukung perkotaan yang handal untuk menunjang simpul transportasi dibanding wilayah sekitarnya	Biaya pemeliharaan untuk dukungan perkotaan yang terbatas dibanding wilayah sekitarnya
SUB TOTAL	11	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				
Tantangan Yang Dihadapi	4	31%	Perubahan perilaku masyarakat yang <i>modern</i> sebagai dampak investasi pembangunan pusat perkotaan	Tergerusnya budaya lokal Lampung akibat proses <i>modernisasi</i> perkotaan
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	5	38%	Pengembangan perkotaan dengan konsep <i>harbour city</i> memberikan peluang terhadap pengembangan infrastruktur kawasan pesisir	Tingginya ancaman bencana berupa gempa bumi dan tsunami (lokasi yang di sekitar <i>ring of fire</i>), ancaman banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat intensitas industri di perkotaan
Ancaman Terhadap Legacy	4	31%	Renstra PUPR dalam mendukung pengembangan kawasan strategis dengan meningkatkan konektivitas wilayah Pulau Sumatera	Kemacetan yang ada di Jalan Lintas Timur Sumatera
SUB TOTAL	13	100%		
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	5	45%	Pelabuhan Panjang menjadi simpul transportasi laut nasional dengan komoditas ekspor hasil pertanian, pertambangan dan perkebunan serta Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang pulau	Pelabuhan panjang sebagai simpul ekspor belum berfungsi optimal

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
			Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa (penyebrangan nasional)	
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	4	36%	PKN Bandar Lampung sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional di Provinsi Lampung sesuai dengan RTRWN	Kurangnya konektivitas antarkawasan strategis dan antarwilayah di Provinsi Lampung untuk mendukung hilirisasi industri serta pergerakan barang dan orang.
Peralihan Cost	2	18%	Anggaran Pembangunan Perkotaan dapat dibantu dari investasi yang masuk dari wilayah sekitar dan luar pulau (Jawa)	Anggaran Pembangunan Infrastruktur dan investasi infrastruktur dalam mendukung perkembangan perkotaan yang terbatas sehingga dapat menghambat
SUB TOTAL	11	100%		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis SWOT untuk fokus kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.13 Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan

PERKOTAAN			
S (STRENGTH) - KEKUATAN		W (WEAKNESS) - KELEMAHAN	
1	Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandar Lampung dengan sektor unggulan perdagangan, jasa dan industri	1	Layanan infrastruktur dasar pengolahan sampah dan perumahan di kawasan perkotaan yang belum memenuhi SPM
2	Tersedianya simpul transportasi pendukung aktivitas ekonomi perkotaan, berupa Bandar Udara Internasional Radin Inten II, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Bakauheni yang melayani pergerakan orang dan barang dan menopang ekonomi wilayah Provinsi Lampung.	2	Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap kebencanaan seperti banjir, tanah langsor, gempa bumi, dan tsunami
3	PKN Bandar Lampung berfungsi sebagai simpul ekspor barang dan jasa di Provinsi Lampung	3	Jumlah rumah tidak layak huni dan tingkat backlog perumahan yang tinggi di kawasan perkotaan

PERKOTAAN					
4	Akses Jalan Nasional telah menghubungkan antara PKN Bandar Lampung dan infrastruktur pendukung memiliki kemantapan jalan yang baik	4	Kinerja jalan daerah (provinsi dan kabupaten masih rendah)		
5	PKN Bandar Lampung memiliki akses sanitasi layak 95,45% dan PKW Metro sebesar 94,64% berada di atas rata-rata Provinsi Lampung (83,89%)	5	Terbatasnya pendanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar kawasan perkotaan		
O (OPPORTUNITY) – PELUANG			T (THREAT) – ANCAMAN		
1	PKN Bandar Lampung dan PKW Metro diarahkan menjadi kawasan metropolitan sebagai simpul utama kegiatan jasa dan pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera	1	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung masih belum ditetapkan sebagai kawasan strategis metropolitan skala nasional		
2	Kota di sekitar PKN Bandar Lampung termasuk PKW Metro menjadi kawasan penyangga bagi kawasan perkotaan dengan mendorong integrasi aktivitas antara perdesaan dan perkotaan	2	Tingginya ancaman bencana berupa gempa bumi dan tsunami (lokasi yang di sekitar ring of fire), ancaman banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat intensitas industri di perkotaan		
3	Pelabuhan Panjang menjadi simpul transportasi laut nasional dengan komoditas ekspor hasil pertanian, pertambangan dan perkebunan serta Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa (penyebrangan nasional)	3	Pelabuhan panjang sebagai simpul ekspor belum berfungsi optimal		
4	Pengembangan perkotaan dengan konsep harbour city memberikan peluang terhadap pengembangan infrastruktur kawasan pesisir	4	Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai		
5	Posisi PKN Bandar Lampung yang sangat strategis diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I)	5	Ketergantungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap anggaran pengembangan infrastruktur Lampung		

Sumber: Hasil Analisis 2023

Tabel 6.14 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Kawasan Perkotaan

Variabel/ Faktor		Tingkat	Bobot	Rating	Skor
STRENGTH	1	4	30,77%	3	0,92
Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandar Lampung dengan sektor unggulan perdagangan, jasa dan industri					

Variabel/ Faktor		Tingkat	Bobot	Rating	Skor	
	2	Tersedianya simpul transportasi pendukung aktivitas ekonomi perkotaan, berupa Bandar Udara Internasional Radin Inten II, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Bakauheni yang melayani pergerakan orang dan barang dan menopang ekonomi wilayah Provinsi Lampung.	2	15,38%	2	0,31
	3	PKN Bandar Lampung berfungsi sebagai simpul ekspor barang dan jasa di Provinsi Lampung	3	23,08%	2	0,46
	4	Akses Jalan Nasional telah menghubungkan antara PKN Bandar Lampung dan infrastruktur pendukung memiliki kemantapan jalan yang baik	2	15,38%	2	0,31
	5	PKN Bandar Lampung memiliki akses sanitasi layak 95,45% dan PKW Metro sebesar 94,64% berada di atas rata-rata Provinsi Lampung (83,89%)	2	15,38%	1	0,15
	SUB TOTAL		13	100,00%		2,15
Variabel/ Faktor		Tingkat	Bobot	Rating	Skor	
WEAKNESS	1	Layanan infrastruktur dasar pengolahan sampah dan perumahan di kawasan perkotaan yang belum memenuhi SPM	4	25,00%	-3	-0,75
	2	Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap kebencanaan seperti banjir, tanah langsor, gempa bumi, dan tsunami	4	25,00%	-3	-0,75
	3	Jumlah rumah tidak layak huni dan tingkat <i>backlog</i> perumahan yang tinggi di kawasan perkotaan	3	18,75%	-3	-0,56
	4	Kinerja jalan daerah (provinsi dan kabupaten masih rendah)	3	18,75%	-1	-0,19
	5	Terbatasnya pendanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar kawasan perkotaan	2	12,50%	-1	-0,13
	SUB TOTAL		16	100,00%		-2,38
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL					-0,22	

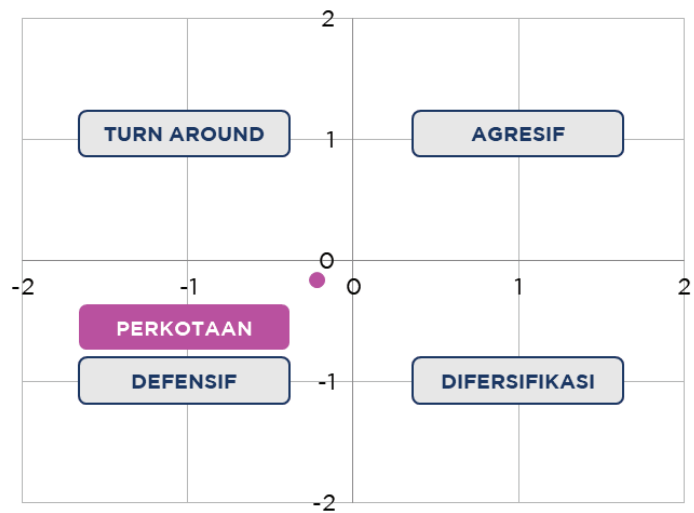
Sumber: Hasil Analisis 2023

Tabel 6.15 *Skoring Opportunities* dan *Threats* Fokus Kawasan Perkotaan

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
OPPORTUNITY	1	PKN Bandar Lampung dan PKW Metro diarahkan menjadi kawasan metropolitan sebagai simpul utama kegiatan jasa dan pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera	4	30,77%	3	0,92
	2	Kota di sekitar PKN Bandar Lampung termasuk PKW Metro menjadi kawasan penyangga bagi kawasan perkotaan dengan mendorong integrasi aktivitas antara perdesaan dan perkotaan	2	15,38%	2	0,31
	3	Pelabuhan Panjang menjadi simpul transportasi laut nasional dengan komoditas ekspor hasil pertanian, pertambangan dan perkebunan serta Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau Jawa (penyebrangan nasional)	2	15,38%	1	0,15
	4	Pengembangan perkotaan dengan konsep <i>harbour city</i> memberikan peluang terhadap pengembangan infrastruktur kawasan pesisir	2	15,38%	2	0,31
	5	Posisi PKN Bandar Lampung yang sangat strategis diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I)	3	23,08%	2	0,46
	SUB TOTAL		13	100,00%		2,15
	Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating
	1	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung masih belum ditetapkan sebagai kawasan strategis metropolitan skala nasional	3	18,75%	-2	-0,38
	2	Tingginya ancaman bencana berupa gempa bumi dan tsunami (lokasi yang di sekitar <i>ring of fire</i>), ancaman banjir, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat intensitas industri di perkotaan	4	25,00%	-3	-0,75
	3	Pelabuhan panjang sebagai simpul ekspor belum berfungsi optimal	2	12,50%	-2	-0,25

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
	4	Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai	4	25,00%	-3	-0,75
	5	Ketergantungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap anggaran pengembangan infrastruktur Lampung	3	18,75%	-1	-0,19
	SUB TOTAL		16	100,00%		-2,31
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL						-0,16

Sumber: Hasil Analisis 2023



Gambar 6.9 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, focus kawasan pertanian di Provinsi Lampung dikembangkan dengan strategi defensif, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perkotaan dasar sesuai standar pelayanan minimum (W1-W3-W5-T1-T4-T5);
2. Peningkatan jalur distribusi orang dan barang untuk meningkatkan ekonomi perkotaan (W4-T3);
3. Pengembangan perkotaan yang tahan bencana (W2-T2).

6.3.3. Skenario Pengembangan Wilayah Fokus Pariwisata

Tabel 6.16 Isu Strategis Fokus Pariwisata

Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung				
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Kebijakan RIPPARNAS dapat mengundang investor untuk menanamkan modal	Masih belum optimalnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap pariwisata daerah	2	11%
ECONOMIC	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2020 - 2022	Kurangnya daya saing dengan KSPN sejenis di Indonesia	5	28%
SOCIOLOGICAL	Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku wisata	Belum terbentuknya <i>brand image</i> di kawasan wisata Lampung	4	22%
TECHNOLOGICAL	Perkembangan teknologi yang semakin maju dalam mempromosikan wisata Provinsi Lampung	Keterbatasan SDM dalam mengaplikasikan teknologi promosi pemasaran wisata Lampung	3	17%
LEGAL	Terdapat tiga KSPN yang termuat dalam dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025	Belum adanya kebijakan yang mengatur integrasi pariwisata di KSPN Provinsi Lampung	1	6%
ENVIRONMENT	Pariwisata alam Lampung yang mengintegrasikan aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan	Ancaman kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kelestarian alam	3	17%
			18	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.17 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata

Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	5	45%	Daya tarik dan daya saing pariwisata Lampung berupa pariwisata cagar alam	Perburuan liar terhadap fauna dan flora yang dilindungi di

Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
				kawasan pariwisata
Kualitas Yang Diinginkan	2	18%		
Inovasi	5	45%		
SUB TOTAL	12	109%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	5	38%	Pariwisata Provinsi Lampung menjadi daya tarik wisata nasional utamanya dari wilayah sekitarnya yaitu dari Sumatera Selatan dan Pulau Jawa dengan aksesibilitas utama menggunakan moda darat dan laut	Kesiapan Lampung dalam menampung wisatawan pada saat-saat puncak liburan utamanya dari wilayah sekitar
Trend Eksisting	4	31%		
Penciptaan Nilai	5	38%		
SUB TOTAL	14	108%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				
Ketergantungan Saat ini	5	45%		
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	3	27%	Wisata ekonomi kreatif berpotensi untuk dikembangkan sebagai atraksi disamping wisata alam yang sudah berkembang seperti di wilayah sekitarnya	Wisata alam dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan seperti sampah yang merusak obyek wisata sehingga menurunkan wisatawan dari wilayah sekitarnya
Daya Dukung Eksisting	3	27%	Lokasi KSPN Lampung yang mudah dicapai dari segala arah (akses dari Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung, dan Palembang)	Kurangnya daya saing dengan KSPN sejenis di Indonesia
SUB TOTAL	11	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				
Tantangan Yang Dihadapi	4	31%		

Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung				
PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	5	38%	Adanya pengembangan PSN Bakauheni yang berpotensi menarik wisatawan	Berkembangnya pariwisata yang tidak diikuti oleh akses infrastruktur transportasi yang belum optimal
Ancaman Terhadap Legacy	4	31%		
SUB TOTAL	13	100%		
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	5	45%	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2020 – 2022	Kurangnya daya saing dengan KSPN sejenis di Indonesia
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	4	36%	Lonjakan pengunjung ke Provinsi Lampung dari wilayah sekitar akibat adanya <i>revenge tourism</i>	Potensi peningkatan kasus Covid-19 akibat peningkatan jumlah wisatawan
Peralihan Cost	2	18%	Biaya Pengembangan SDM dapat beralih dengan berkembangnya teknologi, sehingga tidak bergantung pada wilayah sekitar untuk pengembangan dan pelatihan	Keterbatasan anggaran pengembangan teknologi IT yang cukup besar dibanding menggunakan dari wilayah sekitarnya
SUB TOTAL	11	100%		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis SWOT untuk fokus kawasan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.18 Analisis SWOT Fokus Kawasan Pariwisata

PARIWISATA			
S (STRENGTH) - KEKUATAN		W (WEAKNESS) - KELEMAHAN	
1	Kawasan KSPN sebagai habitat bagi berbagai macam spesies satwa	1	Penebangan dan perburuan liar yang mengancam terhadap ekosistem KSPN
2	Daya tarik dari kawasan pariwisata Krakatau berupa pesisir pantai	2	Minimnya sarana dan prasarana evakuasi bencana

PARIWISATA			
	Lampung Selatan dan fenomena vulkanik yang terus berlangsung		
3	Kawasan pariwisata yang memiliki amenitas sesuai arahan KSPN RIPPARNAS	3	Pilihan sarana transportasi yang terbatas menuju kawasan pariwisata
4	Sudah adanya kelompok masyarakat pengelola atraksi wisata dan badan pengelola di kawasan pariwisata di Provinsi Lampung	4	Masih terbatasnya kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor pariwisata
5	Kawasan pariwisata di Provinsi Lampung sudah didukung aksesibilitas jalan yang baik	5	Fasilitas dan sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas di Provinsi Lampung
O (OPPORTUNITY) – PELUANG		T (THREAT) – ANCAMAN	
1	Daya tarik dan daya saing pariwisata Lampung berupa pariwisata cagar alam	1	Perburuan liar terhadap fauna dan flora yang dilindungi di kawasan pariwisata
2	Pariwisata Provinsi Lampung menjadi daya tarik wisata nasional utamanya dari wilayah sekitarnya yaitu dari Sumatera Selatan dan Pulau Jawa dengan aksesibilitas utama menggunakan moda darat dan laut	2	Kesiapan Lampung dalam menampung wisatawan pada saat-saat puncak liburan utamanya dari wilayah sekitar
3	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2020 – 2022	3	PSN Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang memiliki berbagai fungsi, diantaranya perumahan, hotel, dan komersial untuk mendukung simpul utama kegiatan jasa dan pintu gerbang Jawa-Sumatera belum sepenuhnya terbangun
4	Adanya pengembangan PSN Bakauheni yang berpotensi menarik wisatawan	4	Berkembangnya pariwisata yang tidak diikuti oleh akses infrastruktur transportasi yang belum optimal
5	Lokasi KSPN Lampung yang mudah dicapai dari segala arah (akses dari Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung, dan Palembang)	5	Kurangnya daya saing dengan KSPN sejenis di Indonesia

Sumber: Hasil Analisis 2023

Tabel 6.19 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Kawasan Pariwisata

Variabel/ Faktor		Tingkat	Bobot	Rating	Skor
STRENGTH	1 Kawasan KSPN sebagai habitat bagi berbagai macam spesies satwa	4	25,00%	3	0,75
	2 Daya tarik dari kawasan pariwisata krakatau berupa pesisir pantai Lampung Selatan dan fenomena vulkanik yang terus berlangsung	4	25,00%	2	0,50
	3 Kawasan pariwisata yang memiliki amenitas sesuai arahan KSPN RIPPARNAS	3	18,75%	2	0,38

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
	4	Sudah adanya kelompok masyarakat pengelola atraksi wisata dan badan pengelola di kawasan pariwisata di Provinsi Lampung	3	18,75%	3	0,56
	5	Kawasan pariwisata di Provinsi Lampung sudah didukung aksesibilitas jalan yang baik	2	12,50%	1	0,13
	SUB TOTAL		16	100,00%		2,31
Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
WEAKNESS	1	Penebangan dan perburuan liar yang mengancam terhadap ekosistem KSPN	4	25,00%	-3	-0,75
	2	Minimnya sarana dan prasarana evakuasi bencana	3	18,75%	-2	-0,38
	3	Pilihan sarana transportasi yang terbatas menuju kawasan pariwisata	3	18,75%	-3	-0,56
	4	Masih terbatasnya kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor pariwisata	3	18,75%	-2	-0,38
	5	Fasilitas dan sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas di Provinsi Lampung	3	18,75%	-1	-0,19
	SUB TOTAL		16	100,00%		-2,25
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL						0,06

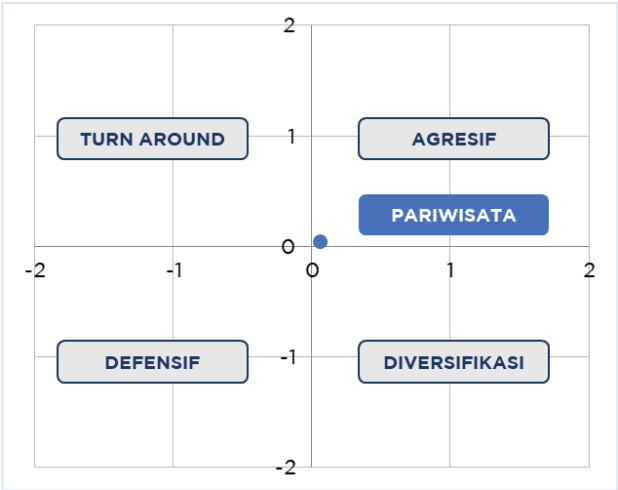
Sumber: Hasil Analisis 2023

Tabel 6.20 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Kawasan Pariwisata

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
OPPORTUNITY	1	Daya tarik dan daya saing pariwisata Lampung berupa pariwisata cagar alam	4	22,22%	3	0,67
	2	Pariwisata Provinsi Lampung menjadi daya tarik wisata nasional utamanya dari wilayah sekitarnya yaitu dari Sumatera Selatan dan Pulau Jawa dengan aksesibilitas utama menggunakan moda darat dan laut	4	22,22%	3	0,67
	3	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2020 - 2022	3	16,67%	2	0,33
	4	Adanya pengembangan PSN Bakauheni yang berpotensi menarik wisatawan	4	22,22%	3	0,67

Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
	5	Lokasi KSPN Lampung yang mudah dicapai dari segala arah (akses dari Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung, dan Palembang)	3	16,67%	1	0,17
	SUB TOTAL		18	100,00%		2,50
Variabel/ Faktor			Tingkat	Bobot	Rating	Skor
THREAT	1	Perburuan liar terhadap fauna dan flora yang dilindungi di kawasan pariwisata	3	23,08%	-3	-0,69
	2	Kesiapan Lampung dalam menampung wisatawan pada saat-saat puncak liburan utamanya dari wilayah sekitar	3	23,08%	-3	-0,69
	3	PSN Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang memiliki berbagai fungsi, diantaranya perumahan, hotel, dan komersial untuk mendukung simpul utama kegiatan jasa dan pintu gerbang Jawa-Sumatera belum sepenuhnya terbangun	2	15,38%	-2	-0,31
	4	Berkembangnya pariwisata yang tidak diikuti oleh akses infrastruktur transportasi yang belum optimal	2	15,38%	-2	-0,31
	5	Kurangnya daya saing dengan KSPN sejenis di Indonesia	3	23,08%	-2	-0,46
	SUB TOTAL		13	100,00%		-2,46
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL						0,04

Sumber: Hasil Analisis 2023



Gambar 6.10 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, focus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung dikembangkan dengan strategi agresif, yaitu:

1. Peningkatan aksesibilitas kawasan pariwisata (S5-O4);
2. Peningkatan amenitas kawasan pariwisata (S3-O5);
3. Pengembangan atraksi baru sebagai daya tarik pariwisata (S1-S2-O1);
4. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata (S4-O2-O3).



BAB 7

ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR



Bab 7 Analisis Kebutuhan Infrastruktur memuat analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur di kawasan prioritas. Analisis kebutuhan infrastruktur menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi pembangunan infrastruktur.

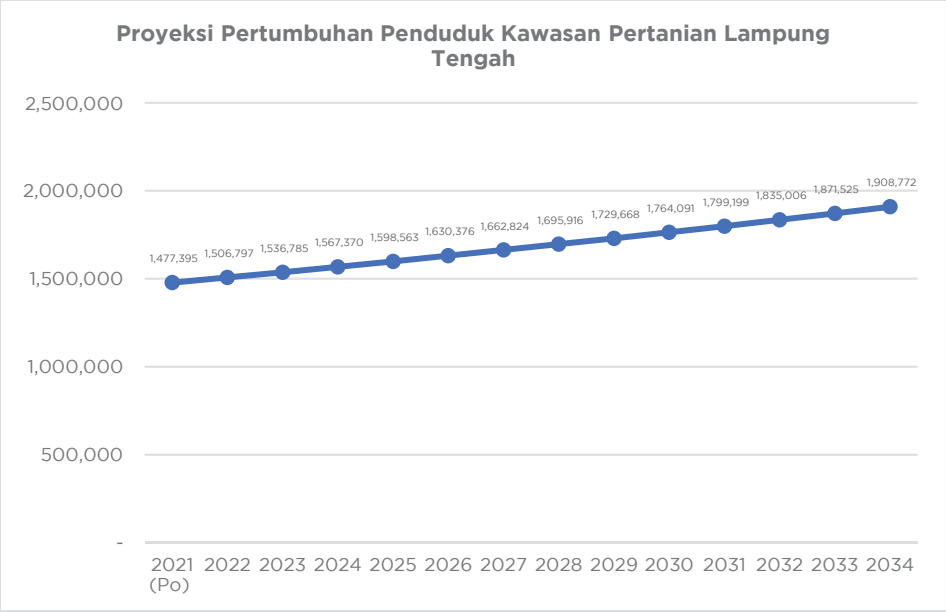
7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

7.1.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah pada Fokus Pertanian

Analisis kesenjangan dilakukan baik di tingkat provinsi maupun pada masing-masing kawasan meliputi air baku, daerah irigasi, pengendalian daya rusak air, jalan, air minum, air limbah domestik, persampahan, kawasan kumuh, dan perumahan.

A. Kawasan Prioritas Kawasan Pertanian Lampung Tengah

Kawasan Prioritas Kawasan Pertanian Lampung Tengah merupakan kawasan yang terdiri dari satu kabupaten, meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan 18 kecamatan, meliputi Kecamatan Seputih Mataram, Seputih Banyak, Seputih Raman, Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Seputih Agung, Punggur, Kota Gajah, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Bekri, Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Padang Ratu, Pubian, Bangunrejo, Sendang Agung, dan Kalirejo. Proyeksi Penduduk Kawasan Pertanian Lampung Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7.1 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan Pertanian Lampung Tengah
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk di Kawasan Pertanian Lampung Tengah mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2034. Pada tahun 2034, proyeksi penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.908.772. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Terbagi Besar, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Anak Ratu Aji.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air Kawasan Pertanian Lampung Tengah antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Proyeksi **Kebutuhan Air Baku** Kawasan Pertanian Lampung Tengah:

Tabel 7.1 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian Lampung Tengah

No.	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Air Baku	2,575	2,601	2,739	2,780	2,821	2,862	2,902	2,943	3,148
2.	Penyediaan Air Baku	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076
Gap		-0,525	-0,525	-0,663	-0,704	-0,745	-0,786	-0,826	-0,867	-1,072

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di Kawasan Pertanian Lampung Tengah terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku sebesar 2,076 m³/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 3,148 m³/dt, sehingga terjadi *gap* sebesar (-1,072) m³/dt. Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di Kabupaten Lampung Tengah.

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Lampung Tengah

No.	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m ³ /dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Irigasi	77.890	78.693	82.843	84.082	85.320	86.559	87.797	89.036	95.231
2.	Penyediaan Irigasi	247.845	247.845	247.845	247.845	247.845	247.845	247.845	247.845	247.845
Gap		169.955	169.152	165.002	163.763	162.525	161.286	160.048	158.809	152.614

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.3 Nilai IKS Kawasan Pertanian Lampung Tengah

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKS / TAHUN			
				2020			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
1	80001	D.I. Way Pangubuan	5	67,4	56,1	65,1	Sedang
2	80003	D.I. Way Sekampung Bekri	6.655	55,5	75	59,4	Kurang
3	80005	D.I. Way Seputih	20.201	0	1,5	0,3	Kurang
4	80103	D.I. Way Sekampung Rumbia Barat 1	3.47	55,9	75,6	59,9	Kurang
5	80113	D.I. Way Sekampung Rumbia Barat 2	1.909	53,5	74,9	57,8	Kurang
6	80123	D.I. Way Sekampung (Raman Utara)	4.877	67,8	63,3	66,9	Sedang
7	8013	D.I. Way Sekampung PC1	5.671	71,6	74,6	72,2	Sedang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2020			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
8	80133	D.I. Way Sekampung PC13	4.666	66,2	69,9	66,9	Sedang
9	8023	D.I. Way Sekampung PC2	3.262	52,9	73,1	56,9	Kurang
10	8033	D.I. Way Sekampung PC3	2.512	53,3	73,9	57,4	Kurang
11	8043	D.I. Way Sekampung Argoguruh 1	2.729	52,2	74,8	56,7	Kurang
12	8053	D.I. Way Sekampung Argoguruh 2	3.918	54,8	68,7	57,6	Kurang
13	8063	D.I. Way Sekampung Punggur Utara	4.127	55,2	73,4	58,8	Kurang
14	8073	D.I. Way Sekampung PC7	4.452	58,8	70,1	61	Sedang
15	8083	D.I. Way Sekampung PC8	4,56	59,1	70,1	61,3	Sedang
16	8093	D.I. Way Sekampung PC9	5.023	60,2	74,6	63,1	Sedang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2021			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
1	80001	D.I. Way Pangubuan	5	0	2,3	0,5	Kurang
2	80003	D.I. Way Sekampung Bekri	6.655	63,1	73,5	65,2	Sedang
3	80005	D.I. Way Seputih	20.201	0	1,5	0,3	Kurang
4	80103	D.I. Way Sekampung Rumbia Barat 1	3.47	60,6	75,5	63,6	Sedang
5	80113	D.I. Way Sekampung Rumbia Barat 2	1.909	56,7	73,1	59,9	Kurang
6	80123	D.I. Way Sekampung (Raman Utara)	4.877	72,7	68,8	71,9	Sedang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2021			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
7	8013	D.I. Way Sekampung PC1	5.671	75,7	75	75,6	Sedang
8	80133	D.I. Way Sekampung PC13	4.666	67,8	75,1	69,3	Sedang
9	8023	D.I. Way Sekampung PC2	3.262	57,6	74,6	61	Sedang
10	8033	D.I. Way Sekampung PC3	2.512	57,7	75,8	61,3	Sedang
11	8043	D.I. Way Sekampung Argoguruh 1	2.729	60,6	74,3	63,3	Sedang
12	8053	D.I. Way Sekampung Argoguruh 2	3.918	62,9	65,9	63,5	Sedang
13	8063	D.I. Way Sekampung Punggur Utara	4.127	60,5	72,4	62,9	Sedang
14	8073	D.I. Way Sekampung PC7	4.452	62,4	72,5	64,4	Sedang
15	8083	D.I. Way Sekampung PC8	4.56	65,7	77,6	68,1	Sedang
16	8093	D.I. Way Sekampung PC9	5.023	64,3	78,5	67,2	Sedang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2022			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
1	80001	D.I. Way Pangubuan	5	26,7	16,4	24,6	Kurang
2	80003	D.I. Way Sekampung Bekri	6.655	16,5	3,9	14	Kurang
3	80005	D.I. Way Seputih	20.201	33	14,8	29,4	Kurang
4	80103	D.I. Way Sekampung Rumbia Barat 1	3.47	15,3	14,6	15,1	Kurang
5	80113	D.I. Way Sekampung Rumbia Barat 2	1.909				
6	80123	D.I. Way Sekampung	4.877	0,3	1,3	0,5	Kurang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	2022			
				Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
		(Raman Utara)					
7	8013	D.I. Way Sekampung PC1	5.671				
8	80133	D.I. Way Sekampung PC13	4.666	0	2,3	0,5	Kurang
9	8023	D.I. Way Sekampung PC2	3.262				
10	8033	D.I. Way Sekampung PC3	2.512				
11	8043	D.I. Way Sekampung Argoguruh 1	2.729	16,3	3,9	13,8	Kurang
12	8053	D.I. Way Sekampung Argoguruh 2	3.918	18,3	16,1	17,8	Kurang
13	8063	D.I. Way Sekampung Punggur Utara	4.127	12,8	14,1	13,1	Kurang
14	8073	D.I. Way Sekampung PC7	4.452	13,3	11,2	12,9	Kurang
15	8083	D.I. Way Sekampung PC8	4.56				
16	8093	D.I. Way Sekampung PC9	5.023				

Sumber: E-paksi, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air irigasi di Kawasan Pertanian Lampung Tengah terdapat kebutuhan irigasi dan penyediaan irigasi. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air irigasi sebesar 247.845 m³/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air irigasi mencapai 95.231 m³/dt, sehingga terjadi Gap sebesar 152.614 m³/dt. Jadi, kebutuhan air irigasi di kawasan ini sudah terpenuhi.

Pengendalian Daya Rusak (Banjir) dilakukan melalui perhitungan proyeksi luasan daerah banjir di Kawasan Pertanian Lampung Tengah dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7.4 Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian
Lampung Tengah**

No.	Wilayah Banjir	Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	132.119,89	132.217,03	132.314,17	132.411,31	132.508,46	132.605,60	132.702,74	132.799,89	133.285,64

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 133.285,64 Ha, sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir di Kawasan Pertanian Lampung Tengah.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Bina Marga dianalisis melalui perhitungan Proyeksi LoS pada Jalan Nasional di Kawasan Pertanian Lampung Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.5 Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Kawasan Pertanian Lampung Tengah

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (km)	RATA-RATA LEBAR JALAN (M)	KEMANTAPAN	2022		2025		2029		2034	
						VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23
1	004	BTS. KAB. LAMTENG/KAB.T L.BAWANG - BTS. KAB.LAMTENG/K AB. LAMTIM	45,22	7,41	92,70	0,38	A	0,42	A	0,47	A	0,53	A
2	011	SIMP. KOTA KOTABUMI (KLP. TUJUH) - TERBANGGI BESAR	38,91	7,29	86,61	0,64	B	0,70	C	0,78	C	0,88	D
3	013	TERBANGGI BESAR - GUNUNG SUGIH	11,68	6,46	94,01	1,17	F	1,28	F	1,42	F	1,60	F
4	014	GUNUNG SUGIH - TEGINENENG	25,27	6,84	94,32	0,79	C	0,87	D	0,97	E	1,09	F
5	040	TEGINENENG - BTS. KOTA METRO	13,62	6,05	91,92	0,74	C	0,81	D	0,90	E	1,02	F

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui LoS tingkat pelayanan pada Kawasan Pertanian Lampung Tengah. Adapun LoS pada tingkat pelayanan A merupakan arus jalan di wilayah tersebut bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa tundaan. Tingkat pelayanan B merupakan arus jalan stabil, kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Tingkat pelayanan C merupakan arus jalan yang stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

Tingkat pelayanan D merupakan arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan oleh kondisi arus lalu lintas. Tingkat pelayanan E merupakan volume lalu lintas mendekati kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti. Dan tingkat pelayanan F merupakan arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean panjang, dan hambatan atau tundaan besar. Terdapat LoS pada tingkat pelayanan F pada Jalan Terbanggi Besar – Gunung Sugih. Akan tetapi ruas jalan tersebut sejajar dengan Jalan Tol sehingga tidak diperlukan peningkatan jalan.



Gambar 7.2 Peta Level of Service (LoS) Kawasan Pertanian Lampung Tengah

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan Perumahan Kawasan Pertanian Lampung Tengah dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, lumpur tinja, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini perhitungan **proyeksi dan kebutuhan air minum**:

**Tabel 7.6 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum
Kawasan Pertanian Lampung Tengah Kebutuhan Air Minum
Kawasan Pertanian Lampung Tengah**

NO	Kawasan Prioritas	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)					
			2021 (Po)		2022		2025	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	-	1806	-1806	1906	-1906	2233	-2233

NO	Kawasan Prioritas	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)			
			2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	-	2736	-2736	3492	-3376

Sumber: Hasil Analisis, 2022

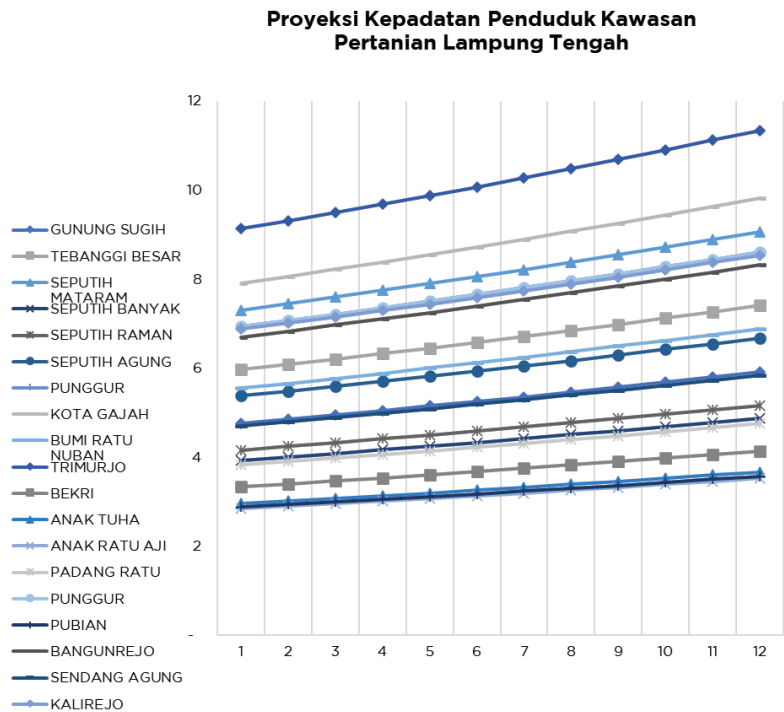
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum hingga tahun 2029, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan Pertanian Lampung Tengah mengalami kekurangan suplai air minum di setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2022 mengalami kekurangan suplai air minum dari PDAM sebesar -1.906 l/dt dan pada tahun 2029 Kota Bandar Lampung mengalami kekurangan air sebesar -2.736 l/dt. Maka, diperlukannya penambahan kapasitas pada unit IPA Pertanian Lampung Tengah pada tahun 2023 minimum 750 l/dt agar dapat memenuhi kebutuhan total air minum hingga tahun 2029.

Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kawasan Pertanian Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.7 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan Pertanian Lampung Tengah

NO	KAWASAN PRIORITAS	PROYEKSI JUMLAH AIR LIMBAH TOTAL (Liter/dt)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	1.525	1.608	1.696	1.786	1.881	1.980	2.082	2.189	2.793

Sumber: Hasil Analisis, 2022



**Gambar 7.3 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan
Pertanian Lampung Tengah**
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbunan air limbah mencapai 2.793 l/dt. Terkait dengan proyeksi kepadatan penduduk di Kawasan Pertanian Lampung Tengah yang belum mencapai 150 jiwa/Ha, maka belum ada kebutuhan penanganan air limbah terpusat. Namun, berkaitan dengan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal perlu tetap dioperasikan dan ditingkatkan pengoperasiannya guna melayani pengolahan air limbah masyarakat.

Proyeksi Timbunan Lumpur Tinja di Kawasan Pertanian Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.8 Proyeksi Timbunan Lumpur Tinja Kawasan Pertanian
Lampung Tengah**

Kawasan Pertanian Lampung Tengah	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Timbunan Lumpur Tinja (l/dt)	753	768	784	799	815	831	848	865	954

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 7.9 Gap Supply-Demand Lumpur Tinja Kawasan
Pertanian Lampung Tengah**

Kawasan Pertanian Lampung Tengah	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Total (liter/detik)	- 751	- 766	- 782	- 797	- 813	- 829	- 846	- 863	-952

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 7.10 Kapasitas Eksisting Lumpur Tinja Kawasan Pertanian
Lampung Tengah**

Kawasan Prioritas	Kabupaten/Kota	Unit IPLT	Kapasitas IPLT (m3/hari)	Kapasitas Riil (m3/hari)
Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Lampung Tengah	IPLT	2	2

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Gap *supply-demand* lumpur tinja, hingga pada tahun 2029, maka dapat disimpulkan Kawasan Pertanian Lampung Tengah dimulai dari tahun 2022 mengalami kekurangan IPLT, maka diperlukan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) agar tetap dioperasikan dan ditingkatkan pengoperasiannya guna melayani pengolahan lumpur tinja masyarakat.

Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan Pertanian Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.11 Proyeksi Timbulan Persampahan dan *Gap Supply-Demand* Pengelolaan Sampah Kawasan Pertanian Lampung Tengah

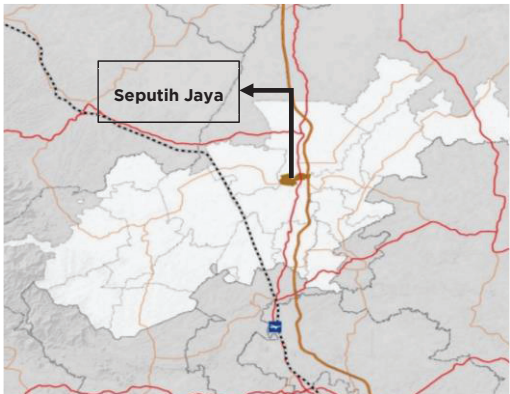
NO	KAWASAN PRIORITAS	KAPASITAS (m ³ /hari)	PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M ³ /HARI)							
			2022		2025		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Kawasan Pertanian Lampung Tengah (<i>Overload</i>)	105.000	1.899	-1.899	2.014	-2.014	2.179	-2.179	2.358	-2.358

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari analisis dan perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kawasan Pertanian Lampung Tengah tahun 2034 memerlukan persiapan perencanaan penambahan kapasitas TPA. Adapun luas TPA di Kawasan Pertanian Lampung Tengah seluas 4 Ha. Untuk volume kapasitas 105.000 m³ dan *sudah overload*.

Di Kawasan Pertanian Lampung Tengah terdapat TPA Bandar Jaya yang berada di lokasi Jalan Kampung Peninggiran Bandar Jaya Timur dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah; luas lahan 4 Ha; kapasitas tampungan 105.000 m³ menggunakan sistem pengolahan *Open Dumping*. Di kawasan ini juga terdapat IPLT, namun kurangnya fasilitas penunjang seperti alat berat dan juga jembatan timbang. Adapun Total Timbulan Sampah Kawasan Pertanian Lampung Tengah pada tahun 2034 sebesar 2.358 m³/hari. Dan jumlah timbulan sampah didominasi oleh sampah domestik yang berasal dari rumah tangga berupa sampah sisa dapur.

Perumahan dan Kawasan Kumuh dilihat berdasarkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Luasan Kawasan Kumuh di Kawasan Pertanian Lampung Tengah. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 9.870 unit. Hal tersebut perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut perihal unit-unit yang berada di Kawasan Pertanian Lampung Tengah. Terdapat *Backlog* Kepenghunian Rumah sejumlah 166.400 KK dan *Backlog* Kepemilikan Rumah sebanyak 150.775 di Kabupaten Lampung Tengah. Adapun Kawasan Kumuh di Kawasan Pertanian Lampung Tengah yang merupakan kewenangan pusat (luas 244ndustr kumuh > 15 Ha), yaitu seluas 15,9 Ha di Kelurahan Seputih Jaya.

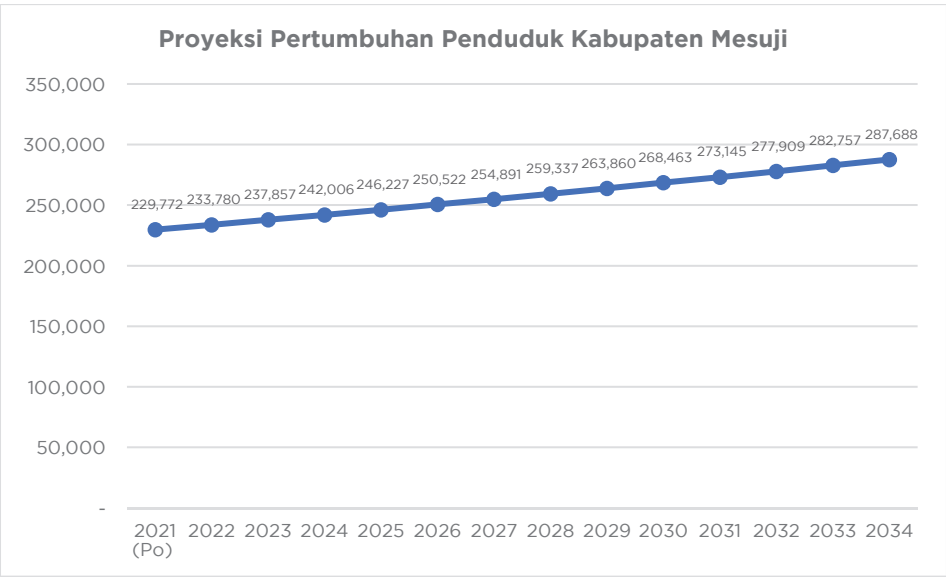


Gambar 7.4 Foto *Mapping* Sebaran Kawasan Kumuh Kawasan Pertanian Lampung Tengah

Sumber: SK Kumuh Kabupaten Lampung Tengah

B. Kawasan Prioritas Pertanian Mesuji

Kawasan Prioritas Pertanian Mesuji merupakan kawasan yang terdiri dari 1 (satu) Kabupaten. Proyeksi Penduduk Kawasan Pertanian Mesuji dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7.5 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan Pertanian Mesuji

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas menunjukkan proyeksi penduduk Kawasan Pertanian Mesuji mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2034. Pada tahun 2034 diproyeksikan bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Mesuji mencapai 287.688 jiwa.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air Kawasan Pertanian Mesuji antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Hasil Proyeksi **Kebutuhan Air Baku** Kawasan Pertanian Mesuji:

Tabel 7.12 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian Mesuji

No.	Kawasan Pertanian Mesuji	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Air Baku	0,329	0,333	0,347	0,351	0,355	0,360	0,364	0,368	0,388
2.	Penyediaan Air Baku	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Gap		-0,324	-0,328	-0,342	-0,346	-0,350	-0,355	-0,359	-0,363	-0,383

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di Kawasan Pertanian Mesuji terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku 0,005 m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 0,388 m3/dt, sehingga terjadi Gap sebesar (-0,383) m3/dt. Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di Kabupaten Mesuji. Adapun berikut ini gambar grafik proyeksi neraca air Kawasan Pertanian Mesuji.

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Mesuji adalah sebagai berikut:

Tabel 7.13 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Mesuji

No.	Kawasan Pertanian Mesuji	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Irigasi	23,793	24,038	25,050	25,364	25,678	25,992	26,306	26,620	28,190
2.	Penyediaan Irigasi	120,283	120,283	120,283	120,283	120,283	120,283	120,283	120,283	120,283
Gap		96,489	96,245	95,233	94,919	94,605	94,291	93,977	93,663	92,093

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.14 Kondisi Jaringan Irigasi

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2020			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
1	80019	DIR. Rawa Jitu	17.515	53	60,7	54,5	Kurang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2021			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
1	80019	DIR. Rawa Jitu	17.515	52,5	63,2	54,6	Kurang

No.	Daerah Irigasi			NILAI IKSI / TAHUN			
				2022			
	Kode	Nama	Luas (Ha)	Utama	Tersier	Gabungan	Kondisi
1	80019	DIR. Rawa Jitu	17.515	-	-	-	-

Sumber: E-paksi, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air irigasi di Kawasan Pertanian Mesuji terdapat kebutuhan irigasi dan penyediaan irigasi. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air irigasi sebesar 120,283 m³/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air irigasi mencapai 28,190 m³/dt, sehingga terjadi Gap sebesar 92,093 m³/dt. Jadi, kebutuhan air irigasi di kawasan ini sudah terpenuhi. Berikut ini gambar grafik proyeksi neraca air Kawasan Pertanian Mesuji.

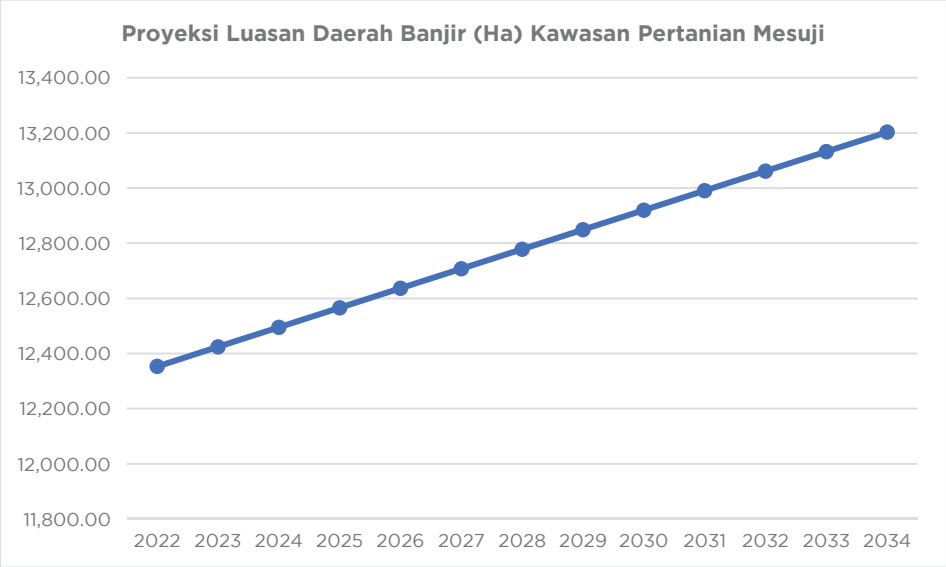
Pengendalian Daya Rusak (Banjir) dihitung melalui proyeksi luasan daerah banjir di Kawasan Pertanian Mesuji dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.15 Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian Mesuji

No.	Wilayah Banjir	Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kawasan Pertanian Mesuji	12.352,90	12.423,71	12.494,51	12.565,31	12.636,11	12.706,92	12.777,72	12.848,52	13.202,52

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2029 proyeksi Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 13.202,52 Ha, sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir di Kawasan Pertanian Mesuji.



Gambar 7.6 Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian Mesuji

Sumber: Hasil Analisis, 2022

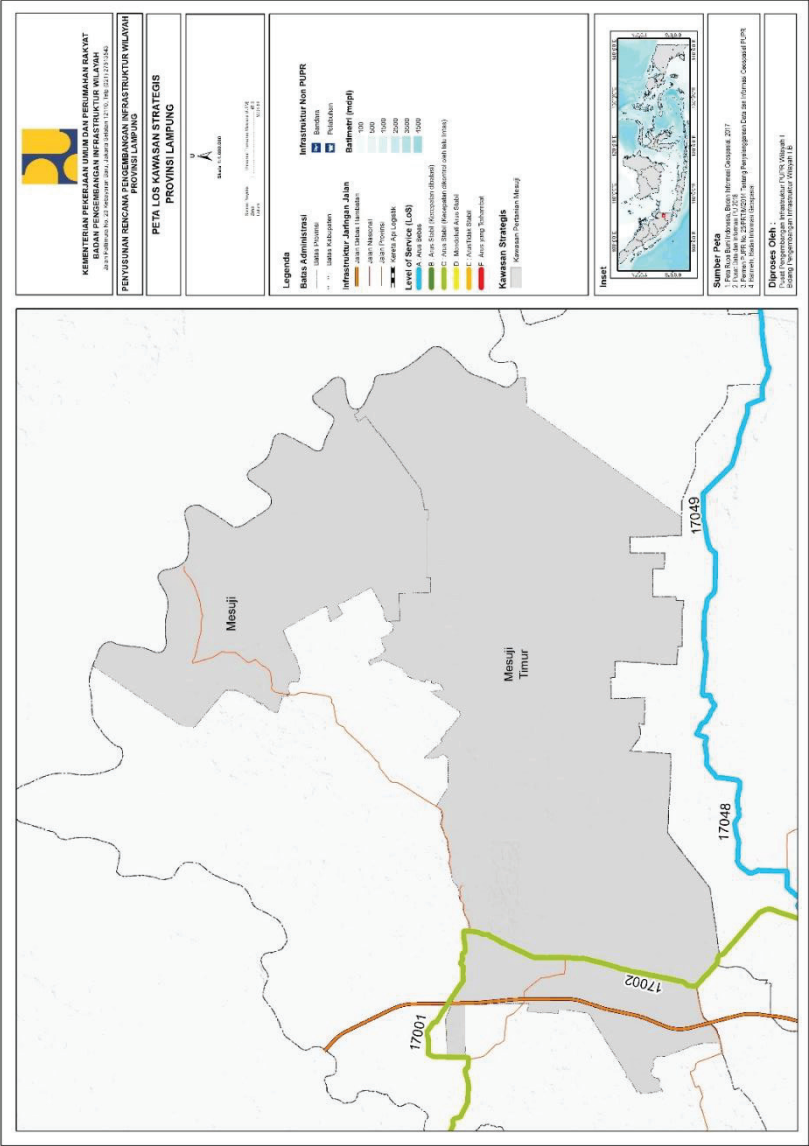
Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Bina Marga dianalisis melalui perhitungan Proyeksi LoS pada Jalan Nasional di Kawasan Pertanian Mesuji dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.16 Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Kawasan Pertanian Mesuji

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (km)	RATA-RATA LEBAR JALAN (M)	KEMANTAPAN	2022		2025		2029		2034	
						VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
		2	4	5	6	7	8	9	15	22	23	22	23
1	001	PEMATANG PANGGANG - SP. PEMATANG	20,40	7,18	96,88	0,49	A	0,54	A	0,60	A	0,67	B
2	002	SP. PEMATANG - SP. BUJUNG TENUK	59,96	6,82	93,50	0,49	A	0,54	A	0,60	A	0,68	B

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui LoS tingkat pelayanan pada Kawasan Pertanian Mesuji hanya ada pada tingkat B saja. Hal tersebut berarti tidak memerlukan adanya pelebaran menambah jalur jalan pada kawasan ini.



Gambar 7.7 Peta Level of Service (LoS) Kawasan Pertanian Mesuji

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan Perumahan Kawasan Pertanian Mesuji dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, lumpur tinja, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini perhitungan proyeksi kebutuhan **air minum**:

Tabel 7.17 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Kebutuhan Air Minum Kawasan Pertanian Mesuji

NO	Kawasan Prioritas	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)									
			2021 (Po)		2022		2025		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Kawasan Pertanian Mesuji	-	281	-281	296	-296	344	-344	417	-417	526	-410

Sumber: Hasil Analisis, 2022

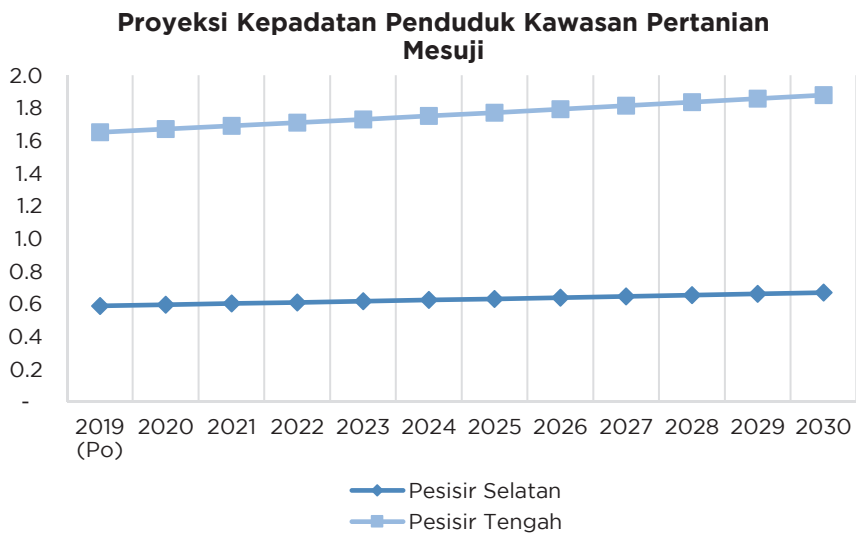
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum hingga tahun 2029, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan Pertanian Mesuji mengalami kekurangan suplai air minum di setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2022 mengalami kekurangan suplai air minum dari PDAM sebesar (-116 l/dt) dan pada tahun 2029 Kawasan Pertanian Mesuji mengalami kekurangan air sebesar (-157 l/dt). Maka, diperlukannya penambahan kapasitas pada unit IPA Pertanian Mesuji pada tahun 2023 minimum 160 l/dt agar dapat memenuhi kebutuhan total air minum hingga tahun 2029.

Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kawasan Pertanian Mesuji adalah sebagai berikut:

Tabel 7.18 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan Pertanian Mesuji

Kawasan Pertanian Mesuji	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Timbulan Air Limbah (l/dt)	237	249	262	275	289	303	318	334	421

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 7.8 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan Pertanian Mesuji

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbunan air limbah mencapai 421 l/dt. Terkait dengan proyeksi kepadatan penduduk di Kawasan Pertanian Mesuji yang belum mencapai 150 jiwa/Ha. Maka, belum ada kebutuhan penanganan air limbah terpusat. Namun, berkaitan dengan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal agar tetap dioperasikan dan ditingkatkan pengoperasiannya guna melayani pengolahan air limbah masyarakat.

Proyeksi Timbunan Persampahan di Kawasan Pertanian Mesuji adalah sebagai berikut:

Tabel 7.19 Proyeksi Timbunan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah Kawasan Pertanian Mesuji

KAWASAN PRIORITAS	KAPASITAS (m3/hari)	PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)							
		2022		2025		2029		2034	
		Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
Mesuji	60.000	295	29.705	310	29.690	332	29.668	356	29.644

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Di Kawasan Pertanian Mesuji terdapat 1 TPA yaitu TPA Margo Rahayu yang berada di lokasi Jalan Simpang Pematang dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Mesuji; luas lahan 3 Ha; kapasitas tampungan sebesar 60.000 m³ dengan menggunakan sistem pengolahan *Control Landfill*. Di kawasan ini juga terdapat IPLT namun kurangnya fasilitas penunjang seperti

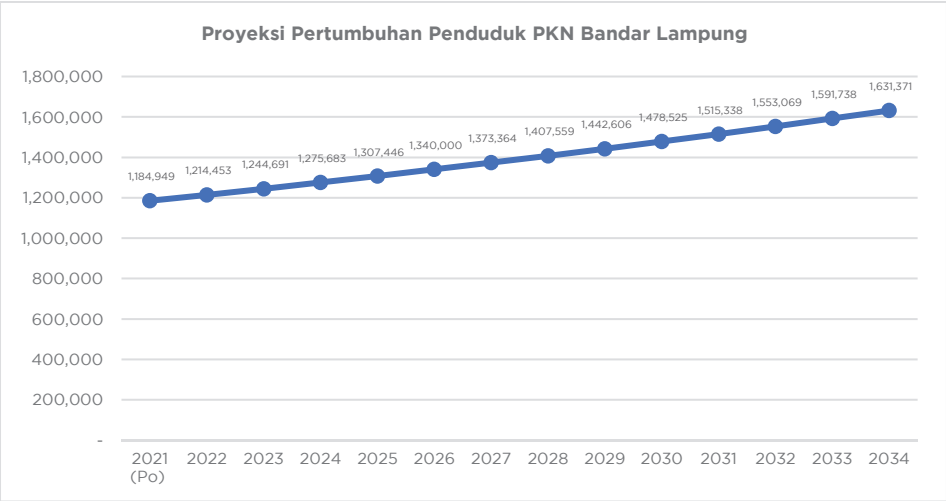
alat berat dan juga jembatan timbang. Adapun Total Timbunan Sampah Kawasan Pertanian Mesuji pada tahun 2034 sebesar 356 m³/hari. Dan jumlah timbunan sampah didominasi oleh sampah domestik yang berasal dari rumah tangga berupa sampah sisa dapur.

Perumahan dan Kawasan Kumuh dilihat berdasarkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Luasan Kawasan Kumuh di Kawasan Pertanian Mesuji. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kabupaten Mesuji berjumlah 6.016 unit. Hal tersebut perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut perihal unit-unit yang berada di Kabupaten Mesuji. Terdapat Backlog Kepenghunian Rumah sebanyak 21.999 KK dan Backlog Kepemilikan Rumah yang berjumlah 20.140 di Kabupaten Mesuji. Adapun Kawasan Pertanian Mesuji tidak memiliki 253ndustr kumuh yang merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha). Kawasan kumuh yang berada di Kawasan Pertanian Mesuji seluruhnya berada pada kewenangan Kabupaten Mesuji karena luasan 253ndustr kumuh < 10 Ha yang berada di Kecamatan Mesuji dan Mesuji Timur.

7.1.2. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Perkotaan

A. Kawasan Prioritas PKN Bandar Lampung

PKN Bandar Lampung merupakan kawasan (satu) kota, yang terdiri dari 20 kecamatan, meliputi Kecamatan Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Raja Basa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Senang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, dan Way Halim. Proyeksi Penduduk PKN Bandar Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7.9 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk PKN Bandar Lampung

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk di PKN Bandar Lampung mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2034. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Way Halim, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Sukabumi.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air PKN Bandar Lampung antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Proyeksi **Kebutuhan Air Baku** PKN Bandar Lampung:

Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Baku PKN Bandar Lampung

No.	PKN Bandar Lampung	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m ³ /dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Kebutuhan Air Baku	2,07	2,09	2,25	2,29	2,34	2,38	2,42	2,47	2,72
2	Penyediaan Air Baku	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Gap		-0,99	-1,01	-1,17	-1,21	-1,26	-1,30	-1,34	-1,39	-1,64

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di PKN Bandar Lampung terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku sebesar 1,08 m³/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 2,72 m³/dt, sehingga terjadi Gap sebesar -1,64 m³/dt. Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di PKN Bandar Lampung.

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan PKN Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.21 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan PKN Bandar Lampung

No.	Kawasan PKN Bandar Lampung	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m ³ /dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Irigasi	0,2	0,20	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,29
2.	Penyediaan Irigasi	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10
Gap		9,8	9,8	9,8	9,78	9,78	9,78	9,77	9,77	9,76

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.22 Proyeksi Luasan Daerah Banjir PKN Bandar Lampung

No.	Wilayah Banjir	Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	PKN Bandar Lampung	2.171,33	2.179,81	2.188,29	2.196,78	2.205,26	2.213,75	2.222,23	2.230,72	2.273,17

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 2.273,17 Ha, sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir di PKN Bandar Lampung.

PKN Bandar Lampung dilayani oleh 16 Ruas Jalan Nasional. Jika melihat dari hasil proyeksi LOS di PKN Bandar Lampung hingga tahun 2034, terdapat beberapa ruas jalan dengan kategori F sehingga diperlukan penanganan yaitu:

1. SP. TJ. KARANG — SP. TIGA TELUK AMBON (JLN. SOEKARNO HATTA (BANDAR LAMPUNG)
2. SP. TIGA TELUK AMBON — KM.10 (PANJANG) (BANDAR LAMPUNG)
3. SIMPANG TANJUNGKARANG - TANJUNGKARANG
4. JLN. TENGIRI (BANDAR LAMPUNG)
5. JLN. IMAM BONJOL (BANDAR LAMPUNG)
6. JLN. KARTINI (BANDAR LAMPUNG)
7. JLN. MONGINSIDI (BANDAR LAMPUNG)
8. JLN. WARSITO (BANDAR LAMPUNG)
9. JLN. JAKSA AGUNG RI R. SOEPRAPTO (BANDAR LAMPUNG).

Tabel 7.23 Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Kawasan PKN Bandar Lampung

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (km)	RATA-RATA LEBAR JALAN (M)	KEMANTAPAN	2022			2025			2029			2034	
						VCR	LOS	VCR	VCR	LOS	VCR	VCR	LOS	VCR	LOS	LOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	016	SP. TJ. KARANG - SP. TIGA TELUK AMBON (JLN. SOEKARNO HATTA (BANDAR LAMPUNG)	18,12	13,63	85,93	1,08	F	1,18	F	1,31	F	1,48	F			
2	017	SP. TIGA TELUK AMBON - KM.10 (PANJANG) (BANDAR LAMPUNG)	2,31	7,15	88,96	0,98	E	1,07	F	1,19	F	1,34	F			
3	018	KM.10 (PANJANG) - BTS. (SUKAMAJU) (BANDAR LAMPUNG)	5,00	7,92	97,32	0,32	A	0,35	A	0,39	A	0,44	A			
4	021	SIMPANG TANJUNGGARANG - TANJUNGGARANG	7,60	17,15	93,20	0,97	E	1,07	F	1,19	F	1,34	F			
5	022	11 K JLN. MALAHAYATI (BANDAR LAMPUNG)	1,34	10,40	100,00	0,44	A	0,48	A	0,53	A	0,60	A			
6	022	12 K JLN. TENGIRI (BANDAR LAMPUNG)	0,36	6,24	86,11	1,29	F	1,41	F	1,56	F	1,76	F			
7	023	11 K SP. TELUK BETUNG - SP. PELABUHAN PANJANG (BANDAR LAMPUNG)	6,02	12,60	94,19	0,43	A	0,46	A	0,52	A	0,58	A			
8	023	12 K SP. PELABUHAN PANJANG - KM.10	2,30	6,86	100,00	0,39	A	0,43	A	0,48	A	0,54	A			
9	023	13 K JLN. TELUK AMBON (BANDAR LAMPUNG)	0,38	12,56	94,74	0,41	A	0,45	A	0,50	A	0,57	A			
10	034	11 K JLN. IMAM BONJOL (BANDAR LAMPUNG)	6,29	7,63	95,23	1,41	F	1,54	F	1,71	F	1,93	F			

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG JALAN (km)	RATA-RATA LEBAR JALAN (M)	KEMANTAPAN	2022			2025			2029			2034		
							VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
11	034	12	K	JLN. KARTINI (BANDAR LAMPUNG)	13,26	96,67	1,71	F	1,87	F	2,08	F	2,35	F				
12	034	13	K	JLN. MONGINSIDI (BANDAR LAMPUNG)	9,20	100,00	1,04	F	1,14	F	1,27	F	1,43	F				
13	034	14	K	JLN. WARSITO (BANDAR LAMPUNG)	9,20	100,00	1,04	F	1,14	F	1,27	F	1,43	F				
14	034	15	K	JLN. JAKSA AGUNG RI R. SOEPRAPTO (BANDAR LAMPUNG)	9,20	100,00	1,04	F	1,14	F	1,27	F	1,43	F				
15	043	11	K	SP. TANJUNG KARANG - KURUNGAN NYAWA (JLN. RADEN GUNAWAN)	6,41	91,29	0,31	A	0,34	A	0,38	A	0,43	A				
16	044	11	K	JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI (BANDAR LAMPUNG)	6,22	92,65	0,20	A	0,22	A	0,24	A	0,27	A				

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan Perumahan Kawasan PKN Bandar Lampung dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini 258ndus perhitungan **proyeksi kebutuhan air minum**:

Tabel 7.24 Proyeksi Gap Supply-Demand Air Minum Kawasan PKN Bandar Lampung

NO	Kawasan Prioritas	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)									
			2021 (Po)		2022		2025		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	PKN Bandar Lampung	587	1449	-862	1536	-949	1826	-1239	2282	-1695	2984	-2868

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum hingga tahun 2034, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan PKN Bandar Lampung mengalami kekurangan suplai air minum di setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2021 mengalami kekurangan suplai air minum dari PDAM sebesar 862 l/dt dan pada tahun 2034 Kota Bandar Lampung mengalami kekurangan air sebesar - 2.868 l/dt). Maka, diperlukan penambahan kapasitas pada unit IPA pada tahun 2023 minimum 750 l/dt agar dapat memenuhi kebutuhan total air minum hingga tahun 2029.

Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kawasan PKN Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.25 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan PKN Bandar Lampung

PKN Bandar Lampung	Proyeksi Jumlah Air Limbah (Liter/Detik)									
	2021 (Po)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
TOTAL Air Limbah	1.277	1.340	1.405	1.473	1.543	1.616	1.692	1.771	1.853	2.387

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi timbulan air limbah mencapai 1.853 l/dt. Proyeksi kedatangan penduduk di Kawasan PKN Bandar Lampung belum mencapai 150 jiwa/Ha. Namun seiring dengan perkembangan perkotaan dan urbanisasi, diperlukan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat melayani pengolahan air limbah masyarakat.

Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan PKN Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.26 Proyeksi Timbunan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah Kawasan PKN Bandar Lampung

KAWASAN PRIORITAS	KAPASITAS (m ³ /hari)	PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M ³ /HARI)							
		2022		2025		2029		2034	
		Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
Kota Bandar Lampung (Overload)	840.000	1.530	-1.530	1.647	-1.647	1.818	-1.818	2.006	-2.006

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari analisis dan perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kawasan PKN Bandar Lampung Tahun 2034 memerlukan persiapan perencanaan penambahan kapasitas TPA. Adapun luas TPA di Kawasan PKN Bandar Lampung seluas 14 Ha yaitu TPA Bakung dengan volume kapasitas 840.000 m³. Namun saat ini TPA Bakung sudah *over capacity*. Di kawasan ini juga terdapat 1 TPST Universitas Lampung yang berada di lokasi Rajabasa dengan sistem pengolahan Open Window. Adapun Total Timbunan Sampah PKN Bandar Lampung pada tahun 2034 sebesar 2.006 m³/hari. Dan jumlah timbunan sampah didominasi oleh sampah domestik yang berasal dari rumah tangga berupa sampah sisa dapur.

Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman di PKN Bandar Lampung dilihat dari RTLH, Backlog serta Kawasan Kumuh. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kota Bandar Lampung berjumlah 7.177 unit. Selain itu terdapat Backlog Kepenghunian Rumah sebanyak 149.218 KK dan Backlog Kepemilikan Rumah yang berjumlah 91.515 KK di. Adapun PKN Bandar Lampung memiliki 259 industri kumuh yang merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha) yaitu pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 7.27 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha di PKN Bandar Lampung

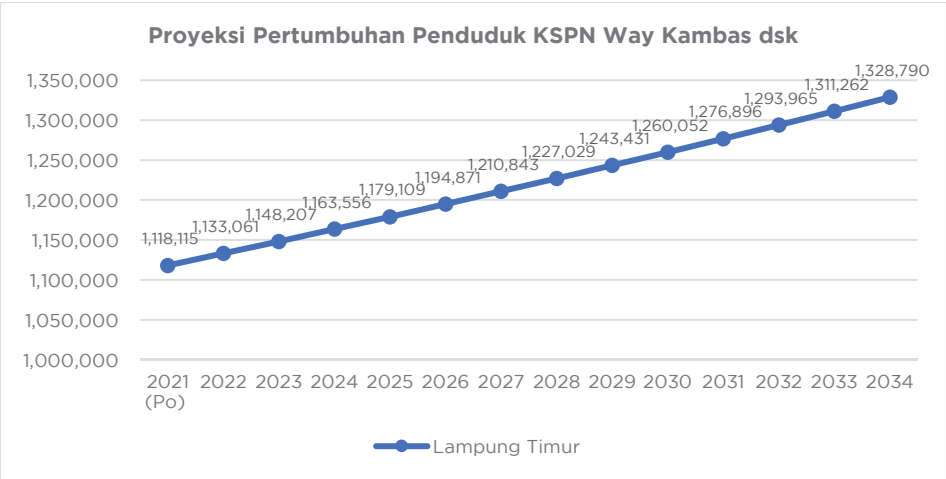
No.	Kabupaten/Kota	Lokasi (Kelurahan)	Luasan (Ha)
1	Bandar Lampung	Way Dadi Daru	22,922
2		Pidada	15,3
3		Srengsem	19,8
4		Gulak Galik	17,66
5		Kaliawi	18,53
6		Rajabasa Jaya	17,9
7		Rajabasa Raya	20,59

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

7.1.3. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Pariwisata

A. Kawasan Prioritas KSPN Way Kambas dan sekitarnya

KSPN Way Kambas dan sekitarnya terdiri dari 24 kecamatan, meliputi Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Margatiga, Sekampung Udik, Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Melinting, Gunung Pelindung, Way Jepara, Braja Slebah, Labuhan Ratu, Sukadana, Bumi Agung, Batanghari Nuban, Pekalongan, Raman Utara, Purbolingo, dan Way Bungur. Proyeksi Penduduk KSPN Way Kambas dan sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7.10 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN Way Kambas dsk

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk di KSPN Way Kambas dan sekitarnya mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi jumlah penduduk mencapai 1.328.790 jiwa. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Batanghari Nuban, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Sekampung Udik.

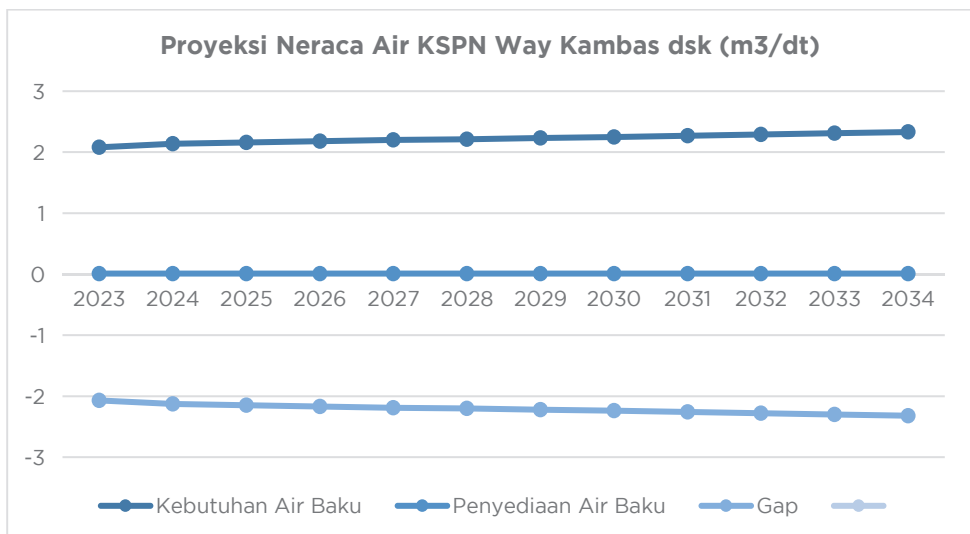
Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air KSPN Way Kambas dan sekitarnya antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Proyeksi **Kebutuhan Air Baku** KSPN Way Kambas dan sekitarnya:

Tabel 7.28 Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Way Kambas dan sekitarnya

No.	KSPN Way Kambas dsk	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m ³ /dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Kebutuhan Air Baku	2,06	2,08	2,14	2,16	2,18	2,20	2,21	2,23	2,33
2	Penyediaan Air Baku	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gap		-2,05	-2,07	-2,13	-2,15	-2,17	-2,19	-2,20	-2,22	-2,32

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di KSPN Way Kambas dan sekitarnya terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku sebesar 0,01 m³/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 2,23 m³/dt, sehingga terjadi Gap sebesar -2,32 m³/dt. Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di KSPN Way Kambas dan sekitarnya. Adapun berikut ini gambar grafik proyeksi neraca air KSPN Way Kambas dan sekitarnya.



Gambar 7.11 Grafik Proyeksi Neraca Air KSPN Way Kambas dan sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Way Kambas dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.29 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Way Kambas dan sekitarnya

No.	KSPN Way Kambas dsk	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m ³ /dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Irigasi	58,35	58,94	60,52	61,06	61,6	62,15	62,69	63,23	65,93
2.	Penyediaan Irigasi	210,79	210,79	210,79	210,79	210,79	210,79	210,79	210,79	210,79
Gap		152,44	151,85	150,27	149,73	149,19	148,64	148,1	147,56	144,86

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.30 Proyeksi Luasan Daerah Banjir KSPN Way Kambas dan sekitarnya

No.	Wilayah Banjir	Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	KSPN Way Kambas dsk	113.809,92	113.814,75	113.819,59	113.824,42	113.829,26	113.834,09	113.838,93	113.843,77	113.867,97

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 113.867,97 Ha, sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir di KSPN Way Kambas dsk.

KSPN Way Kambas dan sekitarnya dilayani oleh 7 Ruas Jalan Nasional. Jika melihat dari hasil proyeksi LoS hingga tahun 2029, pada tahun 2029 belum terdapat ruas jalan dengan kategori F. Proyeksi LoS pada ruas Bts. Kab. Lamteng/Kab.Lamtim – Way Jepara adalah ruas yang mendukung langsung KSPN Way Kambas berada pada level A sehingga belum memerlukan penanganan.

Tabel 7.31 Proyeksi Kinerja Jalan Nasional KSPN Way Kambas

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (km)	RATA-RATA LEBAR JALAN (M)	KEMANTAPAN	2022			2025			2029			2034	
						VCR	LOS	VCR	VCR	LOS	VCR	VCR	LOS	VCR	LOS	LOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	005	BTS. KAB. LAMTENG/KAB.LAMTIM - WAY JEPARA	51,82	7,48	94,37	0,48	A	0,52	A	0,58	A	0,66	B			
2	006	WAY JEPARA - WAY SKP. BUNUT (BTS.KAB.LAMSEL/KAB.LAMTIM)	56,06	7,11	96,88	0,43	A	0,47	A	0,53	A	0,59	A			
3	041	BTS. KOTA METRO - GEDONG DALAM	11,55	6,30	93,51	0,76	C	0,83	D	0,92	E	1,04	F			
4	042	GEDONG DALAM - BTS. KOTA SUKADANA	7,96	5,73	90,58	0,33	A	0,36	A	0,40	A	0,46	A			
5	046	PUGUNG RAHARJO - SRI BAWONO	22,24	5,89	71,22	0,16	A	0,18	A	0,20	A	0,22	A			
6	047	SRI BAWONO - SP. SRI BAWONO	2,83	6,34	100,00	0,61	B	0,67	B	0,74	C	0,84	D			
7	042	JLN. SUKARNO-HATTA (SUKADANA)	4,55	9,51	88,57	0,34	A	0,37	A	0,41	A	0,46	A			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan Perumahan dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, lumpur tinja, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini perhitungan **proyeksi dan kebutuhan air minum**:

Tabel 7.32 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum di Kabupaten Lampung Timur

Kawasan Prioritas	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)									
		2021 (Po)		2022		2025		2029		2034	
		Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
KSPN Way Kambas dsk Kab. Lampung Timur	17	1367	-1350	1433	-1416	1647	-1630	1967	-1950	2431	-2315

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.33 Proyeksi Timbunan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Timur

KAWASAN PRIORITAS	KAPASITAS (m3/hari)	PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)							
		2022		2025		2029		2034	
		Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
KSPN Way Kambas dsk Kab. Lampung Timur	87.151	1.428	42.148	1.486	42.090	1.567	42.009	1.652	41.923

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.34 Proyeksi Timbunan Air Limbah Kawasan di Kabupaten Lampung Timur

Kawasan Prioritas	Proyeksi Jumlah Air Limbah (Liter/Detik)									
	2021 (Po)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
KSPN Way Kambas dsk Kab. Lampung Timur	1.094	1.147	1.202	1.259	1.318	1.378	1.441	1.507	1.574	1.994

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbunan air limbah mencapai 1.994 l/dt. Proyeksi kepadatan penduduk di Kawasan PKN Bandar Lampung belum mencapai 150 jiwa/Ha. Namun seiring dengan perkembangan perkotaan dan urbanisasi, diperlukan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat melayani pengolahan air limbah masyarakat.

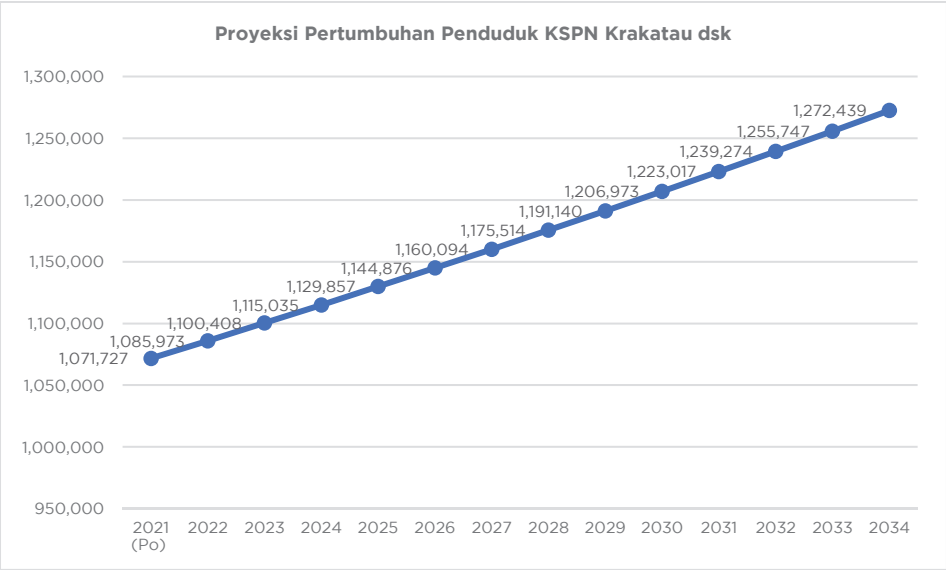
Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman di KSPN Way Kambas dan Sekitarnya dilihat dari RTLH, Backlog serta Kawasan Kumuh yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 26.003 unit. Selain itu terdapat Backlog Kepenghunian Rumah sebanyak 94.966 KK dan Backlog Kepemilikan Rumah yang berjumlah 86.609 KK di. Adapun Kabupaten Lampung Timur memiliki kawasan kumuh yang merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha) yaitu pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 7.35 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha di Kabupaten Lampung Timur

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi (Kelurahan)	Luasan (Ha)
1	Lampung Timur	Tanjung Inten	43,48
2		Banjarejo	22,14
3		Sumbergede	30,26
4		Labuhan Ratu 1	23,72
5		Muara Gading Mas	30
6		Sukorahayu	20
7		Braja Sakti	52,64
8		Mataram Baru	24,6
9		Srimenanti	32,14
10		Sribhawono	16,6
11		Pugung Raharjo	23,5
12		Purwokencono	20
13		Gunung Sugih Besar	20
14		Adirejo	16,38
15		Mekar Jaya	17
16		Pelindung Jaya	40
17		Rejo Mulyo	50
18		Belimbing Sari	20

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

KSPN Krakatau dan sekitarnya terdiri dari 28 kecamatan, meliputi Kecamatan Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Kalirejo, Sendang Agung, Bangun Rejo, Gunung Sugih, Bekri, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman, Terbanggi Besar, Seputih Agung, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Bumi Nabung, Putra Rumbia, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya. Proyeksi Penduduk KSPN Krakatau dan sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7.12 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN Krakatau dan sekitarnya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi penduduk di KSPN Krakatau dan sekitarnya dimulai pada tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi penduduk mencapai 1.272.439. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Terbanggi Besar dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Anak Ratu Aji.

B. Kawasan Prioritas KSPN Krakatau dan sekitarnya

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air KSPN Krakatau dan sekitarnya antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Krakatau dan sekitarnya:

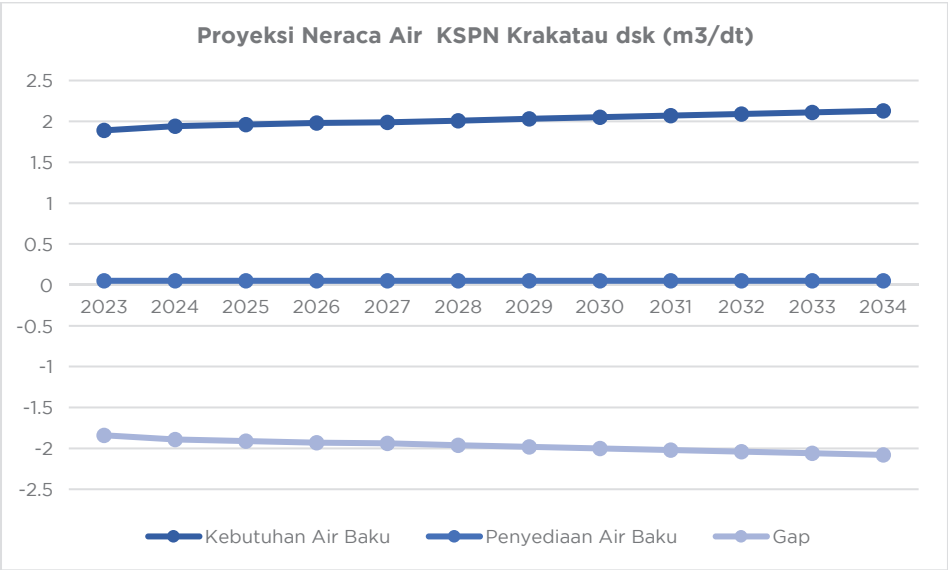
Tabel 7.36 Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Krakatau dan sekitarnya

No.	KSPN Krakatau dsk	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1	Kebutuhan Air Baku	1,87	1,89	1,94	1,96	1,98	1,99	2,01	2,03	2,13
2	Penyediaan Air Baku	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gap		-1,82	-1,84	-1,89	-1,91	-1,93	-1,94	-1,96	-1,98	-2,08

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di PKW Metro

terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku sebesar 0,05 m³/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 2,08 m³/dt, sehingga terjadi Gap sebesar -2,08 m³/dt. Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di KSPN Krakatau dan sekitarnya. Adapun berikut ini gambar grafik proyeksi neraca air KSPN Krakatau dan sekitarnya.



Gambar 7.13 Grafik Proyeksi Neraca Air KSPN Krakatau dsk
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Krakatau dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.37 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Krakatau dan sekitarnya

No.	KSPN Krakatau dsk	Eksisting	Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m ³ /dt)							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	Kebutuhan Irigasi	29,51	29,81	30,6	30,88	31,15	31,43	31,7	31,98	33,38
2.	Penyediaan Irigasi	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06
Gap		91,55	91,25	90,46	90,18	89,91	89,63	89,36	89,08	87,68

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.38 Proyeksi Luasan Daerah Banjir KSPN Krakatau dan sekitarnya

No.	Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)
-----	------------------------------------

RPIW Provinsi Lampung
Tahun 2025 – 2034

	Wilayah Banjir	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
1.	KSPN Krakatau dsk	45.164,29	45.240,05	45.315,80	45.391,55	45.467,30	45.543,05	45.618,81	45.694,56	46.073,31

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 46.073,31 Ha, sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/banjir.

KSPN Krakatau dan sekitarnya dilayani oleh 6 Ruas Jalan Nasional. Jika melihat dari hasil proyeksi LoS hingga tahun 2034, terdapat beberapa ruas jalan dengan kategori F sehingga diperlukan penanganan yaitu:

1. TEGINENENG – SP. TJ. KARANG
2. WAY GALIH – BERGEN

Tabel 7.39 Proyeksi Kinerja Jalan Nasional KSPN Krakatau dan Sekitarnya

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (km)	RATA-RATA LEBAR JALAN (M)	KEMANTAPAN	2022			2025			2029			2034		
						VCR	LOS		VCR	LOS		VCR	LOS		VCR	LOS	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14	
1	007	WAY SKP. BUNUT (BTS.KAB.LAMSEL/ KAB.LAMTIM) - SP. BAKAUHENI	32,78	7,30	96,88	0,29	A		0,32	A		0,35	A		0,40	A	
2	015	TEGINENENG - SP. TJ. KARANG	20,76	12,81	94,13	0,99	E		1,08	F		1,20	F		1,35	F	
3	019	SUKAMAJU - SP. KALIANDA	41,64	7,79	89,51	0,49	A		0,53	A		0,59	A		0,67	B	
4	020	SP. KALIANDA - BAKAUHENI	29,85	7,65	91,54	0,43	A		0,47	A		0,53	A		0,60	A	
5	044	WAY GALIH - BERGEN	7,70	6,26	71,43	1,03	F		1,13	F		1,26	F		1,42	F	
6	045	BERGEN - PUGUNG RAHARJO	23,09	5,96	98,27	0,10	A		0,10	A		0,12	A		0,13	A	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan Perumahan dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini perhitungan **proyeksi dan kebutuhan air minum**:

Tabel 7.40 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum di Kabupaten Lampung Selatan

Kawasan Prioritas	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)									
		2021 (Po)		2022		2025		2029		2034	
		Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
KSPN Kratau dsk Kab. Lampung Selatan	66	1310	-1244	1374	-1308	1578	-1512	1884	-1818	2328	-2212

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.41 Proyeksi Timbunan Air Limbah Kawasan di Kabupaten Lampung Selatan

Kawasan Prioritas	Proyeksi Jumlah Air Limbah (Liter/Detik)									
	2021 (Po)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
KSPN Krakatau dsk. Kab. Lampung Selatan	1.048	1.099	1.152	1.206	1.263	1.321	1.381	1.443	1.508	1.862

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbunan air limbah mencapai 1.862 l/dt. Proyeksi kepadatan penduduk di Kawasan PKN Bandar Lampung belum mencapai 150 jiwa/Ha. Namun seiring dengan perkembangan perkotaan dan urbanisasi, diperlukan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat melayani pengolahan air limbah masyarakat.

Tabel 7.42 Proyeksi Timbunan Persampahan dan Gap Supply-Demand Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan

KAWASAN PRIORITAS	KAPASITAS (m3/hari)	PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)							
		2022		2025		2029		2034	
		Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
Lampung Selatan	50	1.368	-1.343	1.424	-1.399	1.501	-1.476	1.582	-1.557

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman di KSPN Krakatau dan Sekitarnya dilihat dari RTLH, Backlog serta **Kawasan Kumuh yang berada di Kabupaten Lampung Selatan**. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Lampung Selatan berjumlah 5.673 unit. Selain itu terdapat Backlog

Kepenghunian Rumah sebanyak 70.818 KK dan Backlog Kepemilikan Rumah yang berjumlah 63.495 KK di. Adapun Kabupaten Lampung Selatan memiliki 271 industri kumuh yang merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha) yaitu pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 7.43 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi (Kelurahan)	Luasan (Ha)
1	Lampung Selatan	Sido Mekar	35,08
2		Karya Tunggal	24,71

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

7.1.4. Analisis Kesenjangan Infrastruktur untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

A. Infrastruktur Sumber Daya Air

Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Lampung antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Proyeksi Kebutuhan Air Baku Provinsi Lampung:

Tabel 7.44 Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI Provinsi Lampung Tahun 2023-2029

		Debit Tersedia (m3/dt)	Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI (m3/dt)															
No	Kabupaten		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Kab. Lampung Barat	0.01	0.434	-0.429	0.435	-0.430	0.436	-0.431	0.437	-0.432	0.439	-0.434	0.440	-0.435	0.441	-0.436	0.446	-0.436
2	Kab. Tanggamus	0.07	0.911	-0.359	0.943	-0.868	0.953	-0.878	0.964	-0.889	0.974	-0.899	0.984	-0.909	0.995	-0.920	1,05	-0.98
3	Kab. Lampung Utara	0.57	0.900	0.136	0.898	-0.328	0.900	-0.330	0.902	-0.332	0.904	-0.334	0.906	-0.336	0.908	-0.338	0.918	-0.348
4	Kab. Way Kanan	0.01	0.679	-0.421	0.697	-0.684	0.704	-0.690	0.710	-0.697	0.716	-0.703	0.722	-0.709	0.729	-0.715	0.764	-0.754
5	Kab. Tulang Bawang	0.23	0.614	-0.204	0.613	-0.383	0.614	-0.384	0.615	-0.385	0.616	-0.386	0.617	-0.387	0.618	-0.388	0.623	-0.393
6	Kab. Pesawaran	0.06	0.686	-0.370	0.711	-0.647	0.719	-0.655	0.728	-0.664	0.736	-0.672	0.744	-0.680	0.752	-0.688	0.792	-0.732
7	Kab. Pringsewu	0.20	0.581	-0.234	0.585	-0.385	0.588	-0.388	0.591	-0.391	0.593	-0.393	0.596	-0.396	0.598	-0.398	0.608	-0.408
8	Kab. Tulang Bawang Barat	0.36	0.414	-0.074	0.421	-0.061	0.424	-0.064	0.427	-0.067	0.430	-0.070	0.433	-0.073	0.436	-0.076	0.451	-0.091

		Proyeksi Kebutuhan Air Baku RKI (m3/dt)																
No	Kabupaten	Debit Tersedia (m3/dt)	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
9	Kab. Pesisir Barat	0.05	0.240	-0.385	0.245	-0.196	0.246	-0.197	0.248	-0.199	0.250	-0.201	0.252	-0.203	0.254	-0.205	0.264	-0.214
10	Kota Metro	0.05	0.248	-0.384	0.254	-0.204	0.256	-0.206	0.259	-0.209	0.261	-0.211	0.263	-0.213	0.265	-0.215	0.275	-0.225

Sumber: Hasil Analisis BPiW, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di Provinsi Lampung terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2029 gap terbesar yaitu Kabupaten Tanggamus (-0,920 m3/dt) dan gap terkecil yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat (-0,076 m3/dt). Jadi, kebutuhan air baku di Provinsi Lampung masih belum terpenuhi, sehingga perlu adanya 273ndustry273t273 prasarana air baku di semua kabupaten/kota.

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.45 Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

		Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt)																
No	Kabupaten	Debit Tersedia (m3/dt)	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Kab. Lampung Barat	115,56	11,79	103,78	11,82	103,75	11,85	103,71	11,88	103,68	11,91	103,65	11,94	103,62	11,98	103,59	12,18	103,38
2	Kab. Tanggamus	158,19	31,16	127,03	32,27	125,92	32,62	125,57	32,98	125,21	33,33	124,86	33,69	124,5	34,04	124,15	35,79	122,4
3	Kab. Lampung Utara	137,97	27,58	110,39	27,53	110,43	27,59	110,38	27,65	110,32	27,71	110,26	27,76	110,21	27,82	110,15	28,12	109,85

No	Kabupaten	Debit Tersedia (m3/dt)	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt)											
			2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
4	Kab. Way Kanan	199,49	13,89	185,6	14,26	185,23	14,39	185,1	14,52	184,97	14,65	184,84	14,78	184,72
5	Kab. Tulang Bawang	168,6	28,12	140,48	28,05	140,54	28,11	140,49	28,16	140,44	28,21	140,39	28,26	140,33
6	Kab. Pesawaran	69,72	18,68	51,04	19,37	50,35	19,59	50,13	19,81	49,91	20,03	49,69	20,25	49,47
7	Kab. Pringsewu	33,52	10,61	22,91	10,69	22,83	10,74	22,78	10,78	22,73	10,83	22,69	10,88	22,64
8	Kab. Tulang Bawang Barat	70,13	0,35	69,78	0,35	69,77	0,36	69,77	0,36	69,77	0,36	69,77	0,36	69,76
9	Kab. Pesisir Barat	162,98	4,8	158,17	4,9	158,08	4,94	158,04	4,98	158	5,01	157,97	5,05	157,93
10	Kota Metro	3,99	3,35	0,64	3,43	0,56	3,46	0,53	3,49	0,5	3,52	0,47	3,54	0,45

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, pemenuhan kebutuhan air irigasi di Provinsi Lampung surplus, yang berarti kebutuhan air irigasi di Provinsi ini telah terpenuhi.

Pengendalian Daya Rusak (Banjir) dilakukan melalui perhitungan proyeksi luasan daerah banjir. Proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.46 Tabel Proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Wilayah Banjir	Luas Banjir (Ha)	Debit Puncak Banjir (Peningkatan, %)	Proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir (Ha)					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kab. Lampung Barat	7.655	0,00123	7.664	7.674	7.683	7.692	7.702	7.711

2029

2030

2031

2032

2033

2034

No	Wilayah Banjir	Luas Banjir (Ha)	Debit Puncak Banjir (Peningkatan, %)	Proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir (Ha)							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
2	Kab. Tanggamus	11.151	0,00390	11.194	11.238	11.281	11.325	11.368	11.412	11.455	11.681
3	Kab. Lampung Utara	45.411	0,00169	45.487	45.564	45.640	45.717	45.794	45.870	45.947	46.336
4	Kab. Way Kanan	48.958	0,00182	4.904	49.136	49.225	49.314	49.403	49.492	49.581	50.034
5	Kab. Tulang Bawang	146.758	0,00108	146.917	147.076	147.235	147.394	147.553	147.711	147.870	148.671
6	Kab. Pesawaran	12.669	0,00204	12.695	12.721	12.747	12.773	12.799	12.825	12.850	12.982
7	Kab. Pringsewu	10.109	0,00163	10.126	10.142	10.159	10.175	10.192	10.208	10.225	10.308
8	Kab. Tulang Bawang Barat	40.065	0,00128	40.117	40.168	40.219	40.271	40.322	40.373	40.425	40.684
9	Kab. Pesisir Barat	12.353	0,00573	12.424	12.495	12.565	12.636	12.707	12.778	12.849	13.221
10	Kota Metro	3.018	0,00021	3.018	3.019	3.020	3.020	3.021	3.022	3.022	3.025

Sumber: Hasil Analisis BPW, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi luasan banjir di Provinsi Lampung pada tahun 2029 akan bertambah pada setiap kabupaten/kota, bila tidak dilakukan program pengendalian banjir. Dengan demikian, maka perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/banjir, antara lain dengan: bangunan *revetment*, parapet, embung atau bendungan.

B. Infrastruktur Bina Marga

Berikut merupakan hasil proyeksi LoS dan VCR di Kabupaten/Kota untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM):

Tabel 7.47 Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Rata-Rata Lebar Jalan (M)	Kemantapan	2022		2025		2029		2034	
							VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
Kabupaten/ Kota Lampung Barat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	037		BUKIT KEMUNING - PADANG TAMBAK	5,60	92,52	0,19	A	0,21	A	0,24	A	0,27	A
	2	038		PADANG TAMBAK - BTS. KOTA LIWA	5,51	96,22	0,07	A	0,08	A	0,09	A	0,10	A
	3	038	11	K JLN. SUDIRMAN (LIWA)	9,33	97,64	0,25	A	0,27	A	0,30	A	0,34	A
	1	030		SANGGI - WONOSOBO	5,56	92,30	0,22	A	0,24	A	0,27	A	0,30	A
Tanggamus	2	031		WONOSOBO - KOTA AGUNG	6,16	96,36	0,15	A	0,16	A	0,18	A	0,20	A
	3	032		BTS. KOTA AGUNG - RANTAU TIJANG	6,02	96,47	0,19	A	0,20	A	0,23	A	0,26	A
	4	031	11	K JLN. IR. JUANDA (KOTA AGUNG)	7,05	90,20	0,10	A	0,11	A	0,13	A	0,14	A
	1	010		BUKIT KEMUNING - SIMP. KOTA KOTABUMI (KOTA ALAM)	6,70	97,02	0,55	A	0,61	B	0,67	B	0,76	C
Lampung Utara	2	010	11	K SMP. KOTA KOTABUMI (KOTA ALAM) - KLP. TUJUH (JLN. SOEKARNO-HATTA -KOTABUMI)	3,99	81,20	0,82	D	0,89	D	0,99	E	1,12	F
	3	010	11	K JLN. RADEN INTAN (KOTABUMI)	2,92	92,40	0,35	A	0,39	A	0,43	A	0,48	A
	4	012	11	K JLN. SUDIRMAN (KOTABUMI)	2,50	95,00	0,29	A	0,32	A	0,35	A	0,40	A
	1	008		BTS. PROV. SUMSEL - SP. EMPAT	38,96	89,19	0,32	A	0,35	A	0,39	A	0,44	A
Way Kanan	2	009		SP. EMPAT - BUKIT KEMUNING	41,68	96,16	0,56	A	0,61	B	0,68	B	0,77	C
	1	003		SP. BUJUNG TENUK - BTS. KAB. LAMTENG/KAB. TL. BAWANG	18,94	87,21	0,34	A	0,37	A	0,41	A	0,47	A
Tulang Bawang	2	035		SP. BUJUNG TENUK - BUJUNG TENUK	1,62	100,00	0,16	A	0,17	A	0,19	A	0,21	A

Kabupaten/ Kota	No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Rata-Rata Lebar Jalan (M)	Kemantapan	2022		2025		2029		2034	
							VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS	VCR	LOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	036	BUJUNG TERBANGGI BESAR - TENUK	48,31	6,93	96,48	0,50	A	0,55	A	0,61	B	0,68	B
	4	048	SP. PENAWAR - GEDONG AJI BARU	20,02	4,53	85,51	0,11	A	0,12	A	0,13	A	0,15	A
	5	049	GEDONG AJI BARU - RAWAJITU	45,76	5,36	62,44	0,20	A	0,22	A	0,25	A	0,28	A
	1	034	GEDONGTATAAN - BTS. KOTA BANDAR LAMPUNG	14,87	6,97	93,53	1,57	F	1,72	F	1,92	F	2,16	F
Pringsewu	1	033	RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN	30,08	6,63	95,68	1,27	F	1,39	F	1,55	F	1,75	F
	1	024	BTS. PROV. BENGKULU - PUGUNG TAMPAK	40,60	5,72	83,74	0,04	A	0,04	A	0,04	A	0,05	A
Pesisir Barat	2	025	PUGUNG TAMPAK - SP. GUNUNG KEMALA	34,40	5,88	95,20	0,05	A	0,06	A	0,07	A	0,07	A
	3	026	SP. GUNUNG KEMALA - KRUI	2,29	5,88	100,00	0,61	B	0,67	B	0,74	C	0,84	D
	4	027	KRUI - BIHA	25,00	6,47	99,40	0,10	A	0,11	A	0,12	A	0,14	A
	5	028	BIHA - BENGKUNAT	39,05	5,62	98,53	0,06	A	0,06	A	0,07	A	0,08	A
	6	029	BENGKUNAT - SANGGI	64,11	5,48	90,72	0,03	A	0,04	A	0,04	A	0,04	A
Kota Metro	7	039	KOTA LIWA - SP. GUNUNG KEMALA	28,50	5,05	90,53	0,08	A	0,09	A	0,10	A	0,12	A
	1	040	JLN. SUDIRMAN (METRO)	5,57	12,79	96,41	0,13	A	0,15	A	0,16	A	0,18	A
	2	041	JLN. A.H. NASUTION (METRO)	4,45	7,09	90,53	0,26	A	0,28	A	0,32	A	0,36	A

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel proyeksi VCR dan LOS untuk Kabupaten/Kota Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diketahui bahwa ruas jalan yang membutuhkan penanganan pada tahun 2029 adalah:

- Kabupaten Lampung Utara
 - SIMP. KOTA KOTABUMI (KOTA ALAM) — KLP. TUJUH (JLN. SOEKARNO-HATTA — KOTABUMI) dengan proyeksi VCR 0,99 LOS F
- Kabupaten Pesawaran
 - GEDONGTATAAN — BTS. KOTA BANDAR LAMPUNG dengan proyeksi VCR 1,92 LOS F
- Kabupaten Pringsewu
 - RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN dengan proyeksi VCR 1,55 LOS F.

C. **Infrastruktur Cipta Karya**

Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Infrastruktur Cipta Karya Provinsi Lampung dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, persampahan, dan 278ndustr kumuh. Berikut merupakan Proyeksi Kebutuhan Air Minum Provinsi Lampung:

Tabel 7.48 Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

NO	KOTA/ KABUPATEN	Kapasitas Produksi (Liter/dt)	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)									
			2021 (Po)		2022		2025		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Lampung Barat	116	370	-254	386	-270	435	-319	507	-391	607	-491
2	Tanggamus	68	790	-722	830	-762	959	-891	1155	-1087	1441	-1325
3	Lampung Utara	-	583	-583	808	-808	909	-909	1058	-1058	1264	-1148
4	Way Kanan	-	583	-583	611	-611	702	-702	838	-838	1035	-919
5	Tulang Bawang	-	526	-517	609	-600	686	-677	797	-788	952	-836
6	Pesawaran	-	589	-538	619	-568	716	-665	863	-812	1079	-963
7	Pringsewu	-	497	-472	519	-519	588	-588	690	-690	833	-717
8	Tulang Bawang Barat	-	352	-352	368	-368	420	-420	498	-498	609	-493
9	Pesisir Barat	-	200	-200	209	-209	240	-240	284	-284	349	-233
10	Kota Metro	-	208	-208	218	-218	249	-249	297	-297	366	-250

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum hingga tahun 2034, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung mengalami kekurangan suplai air minum di setiap tahunnya. Maka

diperluarkannya penambahan kapasitas pada unit IPA agar dapat memenuhi kebutuhan total air minum hingga tahun 2034.

Proyeksi Jumlah Air Limbah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.49 Tabel Proyeksi Jumlah Air Limbah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

NO	KOTA/ KABUPATEN	PROYEKSI JUMLAH AIR LIMBAH TOTAL (Liter/dt)																	
		2021 (Po)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
1	Lampung Barat	296	309	321	335	348	362	376	391	405	421	436	452	469	486				
2	Tanggamus	632	664	697	731	767	804	843	882	924	966	1.011	1.056	1.104	1.153				
3	Lampung Utara	466	646	673	700	728	756	785	815	846	878	910	943	977	1.011				
4	Way Kanan	466	489	512	537	562	588	614	642	671	700	731	762	795	828				
5	Tulang Bawang	421	487	507	528	549	570	592	615	638	661	685	710	735	761				
6	Pesawaran	471	495	520	546	573	601	630	660	691	723	756	791	826	863				
7	Pringsewu	398	415	433	452	471	490	510	531	552	574	596	619	642	666				
8	Tulang Bawang Barat	281	294	308	322	336	351	366	382	399	415	433	450	469	487				
9	Pesisir Barat	160	168	175	183	192	200	209	218	228	237	247	257	268	279				
10	Kota Metro	166	174	182	191	200	209	218	228	238	248	259	270	281	293				

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbulan air limbah tertinggi yaitu Kabupaten Tanggamus mencapai 1.153 l/dt. Terkait dengan proyeksi kepadatan penduduk di Provinsi Lampung yang belum mencapai 150 jiwa/Ha, maka belum ada kebutuhan penanganan air limbah terpusat. Namun, berkaitan dengan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal perlu tetap dioperasikan dan ditingkatkan pengoperasiannya guna melayani pengolahan air limbah masyarakat.

Proyeksi Timbulan Sampah Masuk TPA Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.50 Tabel Proyeksi Timbulan Sampah Masuk TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

NO	KOTA/ KABUPATEN	KAPASITAS (m ³ /hari)	PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M ³ /HARI)							
			2022		2025		2029		2034	
			Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap	Proyeksi	Gap
1	Lampung Barat (Overload)	74.853	384	-384	392	-392	404	-404	415	-415
2	Tanggamus	10.220	826	-826	865	-865	920	-920	978	-978
3	Lampung Utara	210.000	804	104.196	820	104.180	842	104.158	865	104.135
4	Way Kanan	138.600	609	68.691	633	68.667	668	68.632	704	68.596
5	Tulang Bawang	125	546	-484	557	-494	571	-509	586	-524
6	Pesawaran	128.100	616	63.434	646	63.404	688	63.362	732	63.318
7	Pringsewu	280	517	-377	531	-391	549	-409	569	-429
8	Tulang Bawang Barat	-	367	- 367	379	-379	397	-397	415	-415
9	Pesisir Barat	4.000	209	1.791	216	1.784	227	1.773	237	1.763
10	Kota Metro (Overload)	199.500	217	-217	225	-225	237	-237	249	-249

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari analisis dan perhitungan di atas, didapatkan bahwa di Provinsi Lampung pada tahun 2034 memerlukan persiapan perencanaan penambahan kapasitas TPA pada Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Tulang Bawang, Pringsewu, Tulang Bawang Barat san Kota Metro. Adapun jumlah timbulan sampah masuk TPA terbesar pada tahun 2034 yaitu Kabupaten Tanggamus (978 m³/hari). Dan jumlah timbulan sampah didominasi oleh sampah domestik yang berasal dari rumah tangga berupa sampah sisa dapur.

Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan berdasarkan SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Provinsi Lampung, umumnya wilayah bagian utara memiliki luasan permukiman kumuh yang lebih tinggi dari wilayah lainnya. Perlu adanya peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh tersebut yang dapat dilakukan oleh berbagai upaya, diantaranya pemugaran, perbaikan, dan peremajaan sesuai dengan regulasi keruangan.

Tabel 7.51 Luas Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh (Ha)
1.	Kabupaten Lampung Barat	39,3
2.	Kabupaten Tanggamus	151,95
3.	Kabupaten Lampung Utara	47,73
4.	Kabupaten Way Kanan	5,38
5.	Kabupaten Tulang Bawang	139,43
6.	Kabupaten Pesawaran	236,37
7.	Kabupaten Pringsewu	232,97
8.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	106,74
9.	Kabupaten Pesisir Barat	110,7
10.	Kota Metro	10,05

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Menurut data SK masing-masing Kabupaten/Kota, yang termasuk dalam kategori berat (luas lebih dari 15 Ha) sebanyak 48 kawasan (1.215,96 Ha). Kabupaten Pesawaran menjadi wilayah dengan luasan kumuh terbesar dibanding wilayah lainnya, yaitu mencapai 236,37 Ha, sedangkan Kabupaten Way Kanan menjadi daerah dengan luasan kawasan kumuh terendah, yaitu 5,28 Ha. Adapun kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat (>15 Ha) terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Tanggamus dan Pesawaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.52 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi (Kelurahan)	Luasan (Ha)
1	Tulang Bawang	Menggala Kota	22,4
2		Dwi Warga Tunggal Jaya	30,55
3		Tunggal Warga	19,17
4		Gedung Karya Jitu	16,12
5		Sungai Nibung	23,94
6	Tulang Bawang Barat	Daya Murni	34,42
7		Mulya Asri	21,05
8		Tiyuh Pulung Kencana	25,7
9	Tanggamus	Purwodadi	17,229
10		Pasar Madang	34,37

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi (Kelurahan)	Luasan (Ha)
11	Pesawaran	Talang Padang	35,16
12		Sinar Semendo	19,91
13		Kota Agung Barat	19,35
14		Wonodadi	26,36
15		Bernung	40,57
16		Bogorejo	31,08
17		Wiyono	27,94
18		Negara Saka	16,76
19		Padang Cermin	26,07
20		Cilimus	16,99

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

D. Infrastruktur Perumahan

Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Infrastruktur Perumahan Provinsi Lampung dilakukan melalui analisis *backlog* dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Tabel 7.53 Backlog Perumahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Backlog Kepenghunian Rumah (KK)	Backlog Kepemilikan Rumah (KK)	RTLH (Unit)
1.	Kabupaten Lampung Barat	49.059	42.990	9.672
2.	Kabupaten Tanggamus	43.993	39.822	6.757
3.	Kabupaten Lampung Utara	49.383	42.055	18.243
4.	Kabupaten Way Kanan	40.491	36.669	5.721
5.	Kabupaten Tulang Bawang	41.623	37.049	7.331
6.	Kabupaten Pesawaran	31.298	27.433	6.739
7.	Kabupaten Pringsewu	40.083	35.706	2.085
8.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	27.292	23.351	2.206
9.	Kabupaten Pesisir Barat	12.110	11.317	4.021
10.	Kota Metro	23.113	18.007	254

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id>, 2022 dan Data P3KE (Pencapaian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

Berdasarkan data di atas, masih terdapat angka *backlog* menandakan masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki rumah. Dilihat dari angka *backlog* yang ada pada tahun 2022,

wilayah dengan *backlog* Kepenghunian Rumah tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Utara sejumlah 49.383 KK dan *backlog* Kepemilikan Rumah tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Barat sejumlah 42.990 KK. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara 18.243 unit, sedangkan RTLH terendah yaitu Kota Metro 254 unit. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dapat diintegrasikan dengan penataan permukiman kumuh. Sehingga diarahkan penanganan berupa rumah swadaya untuk penanganan RTLH, PSU pada backlog kepemilikan, dan rumah susun MBR pada *backlog* hunian.

7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Tabel 7.54 Matriks Keterpaduan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur

Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Fungsi	Infrastruktur PUPR					Keterpaduan Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Infrastruktur PUPR	
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Perumahan	Waktu
Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Pertanian		Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Pangabuan	2026 - 2029			Peningkatan SPAM Kabupaten/Optimalisasi SPAM Kalijero	2026 - 2026	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah	2025 - 2029
			Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan Di Rumbia Extension	2027 - 2029			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Optimalisasi Sel TPA Bandar Jaya	2026 - 2026	Pembangunan Rumah Susun MBR Kabupaten Lampung Tengah	2027 - 2027
			Bendungan yang dibangun/Pembangunan Bendungan Sumber Bandung	2028 - 2029					Pembangunan Rumah Susun ASN Kabupaten Lampung Tengah	2028 - 2028
			Bendungan yang dibangun/Pembangunan Bendungan Segala Mider	2028 - 2029						
			Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Intake Air Baku Kalirejo	2027 - 2027						
			Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Intake Air Baku Rumbia	2027 - 2027						
			Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sundal Way Seputih	2027 - 2029						
			Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Seputih Surabaya	2025 - 2029						
			Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan Daerah Irigasi Permuakan Di Pangabuan	2028 - 2029						

Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Fungsi	Infrastruktur PUPR					Keterpaduan Infrastruktur PUPR		Keterpaduan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan	
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu
			Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang ditingkatkan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	2026 - 2026						
			Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/Pembangunan dan Pengeboran Jaringan Irigasi Air Tanah	2026 - 2026						
			Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Rawajitu	2026 - 2026				Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Mesuji	2025 - 2029	
			Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi tasi DIR, Mesuji Atas	2026 - 2026				Pembangunan Rumah Susun ASN Kabupaten Mesuji	2025 - 2029	
Kawasan Pertanian Mesuji	Pertanian		Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Sungai Buaya	2027 - 2027						
		Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Buaya	2027 - 2029							
PKN Bandar Lampung	Perkotaan		Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Kota Bandar Lampung	2028 - 2029	Pembangunan Jalan bebas Hambatan/Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Ruas Pelabuhan Panjang-Lematang	2026 - 2029	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Pembangunan TPA Regional	2029 - 2029	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Bandar Lampung	2025 - 2029
		Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kawasan Pelabuhan Panjang	2028 - 2028			Peremajaan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung (Kek. Kaliawi, Keli. Rajabasa)	2026 - 2026	Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kota Bandar Lampung	2025 - 2025	
		Saluran Drainase utama perkotaan yang dibangun/Pembangunan Drainase Utama perkotaan Kota Bandar Lampung	2028 - 2028			Perluasan SPAM KPBU Kota Bandar Lampung	2025 - 2029	Pembangunan Rumah Susun ASN BP-SDM	2025 - 2025	
KSPN Way Kambas disk	Pariwisata		Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan	2027 - 2027			Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangunan SPAM IKK Labuhan Maringgai	2026 - 2026	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	2025 - 2029

Kawasa n Priorita s	Tematik Pengenbang an Kawasan	Fung si	Infrastruktur PUPR						Keterpadu an Infrastrukt ur Non PUPR	
			Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpadu an Infrastrukt ur PUPR	Keterpadu an Infrastrukt ur Non PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
			an Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Batanghari				Kabupaten Lampung Timur			
			Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangu nan Bangunan Pengendalian Banjir Sukadana	2028 - 2028		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Optimalisasi TPA Sukadana		2026 - 2026		
			Daerah Irigasi yang dibangun/Pembangu nan DI Jabung Kanan	2029 - 2029		Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur (kec. Way Jepara, kec. Pekalongan)		2027 - 2028		
KSPN Krakata u disk	Parwisata		Prasarana air baku yang dibangun/Pembangu nan Prasarana Air Baku Kabupaten Lampung Selatan	2027 - 2027		Peningkatan SPAM Kabupaten/Pembangu nan Jaringan Distribusi Utama PDAM Tirtajasa	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Selatan	2025 - 2029		
			Bangunan Pengamanan Pantai yang dibangun/Pembangu nan Pantai Pengamanan Pantai Kalianda (lanjutan)	2027 - 2028		Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Tengah) Kel. Sido Mekar, Kel. Karya Tunggal)		2028 - 2028		
			Bangunan Pengendalian banjir yang ditingkatkan/Rehabili tasi Tanggul Banjir Way Katibung Sulan	2028 - 2028						

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.58 Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas Provinsi Lampung

No.	Infrastruktur Prioritas	Informasi Umum dan Teknis Program/ Kegiatan Prioritas	Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Rencana	Jenis Penanganan	Waktu Rencana	Jenis Penanganan	Waktu Rencana	Jenis Penanganan	Waktu Rencana			
1	Bendungan Way Sekampung	Bendungan Way Sekampung 1. Waktu pelaksanaan program/kegiatan: 2016-2021 2. Volume tampungan waduk: 68,06 x 10 ⁶ m ³											
		Manfaat untuk irigasi: - Penyediaan air irigasi untuk intensifikasi dan perluasan lahan dengan luasan 156.375 Ha, dengan peningkatan intensitas Tanam 27,0 % (Pola tanam Padi-Padi-Palawia). - Penyediaan air irigasi untuk pengembangan D.I Rumbia Extension dengan potensi luas 17.334 Ha.	Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan DI Rumbia Extension Output: 14.000 Ha	2025-2029								Keterpaduan antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana irigasi, serta pembinaan pengelolaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	
		Manfaat untuk air baku: - Potensi penyediaan air baku (Kota Bandar Lampung, Bratu dan kota Metro) sebesar 2.737 liter/detik.											
		Manfaat untuk listrik: - Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTM) dengan daya sebesar 5,4 MW.											
		Manfaat untuk pengendalian banjir: - Reduksi Banjir dengan Total Debit Reduksi 3,546 m ³ /det											
2	Bendungan Margatiga	Bendungan Margatiga 1. Waktu pelaksanaan program/kegiatan: 2017-2024											

No.	Infrastruktur Prioritas	Informasi Umum dan Teknis Program/ Kegiatan Prioritas	Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Rencana	Jenis Penanganan	Waktu Rencana	Jenis Penanganan	Waktu Rencana	Jenis Penanganan	Waktu Rencana			
		2. Volume tampungan waduk: 41,31 juta m ³											
		Manfaat untuk irigasi: 1. Jabung (16.586 Ha); 2. Jabung Kanan (10.950 Ha); 3. Jabung Kiri (5.628 Ha); 4. Jabung Tengah (5.628 Ha); 5. Total: 44.112 Ha (Pola tanam Padi-Padi)	Daerah Irigasi yang dibangun/ Pembangunan Padi-Padi Output: 8.585 Ha	2025-2029								Keterpaduan antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan irigasi serta pembinaan petani dalam pengelolaan Perikumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	
		Manfaat untuk air baku: - Potensi air baku 0,8 m ³ /det											
		Manfaat untuk pengendalian banjir: - Reduksi Banjir 83,10 m ³ /det											
		Manfaat untuk konservasi air											
		Manfaat untuk pariwisata											
3	SPAM KPBU Kota Bandar Lampung	1. Waktu pelaksanaan: 2020-2022; 2. Kapasitas: IPA: 750 L/det 3. Jumlah sambungan rumah yang direncanakan: 60.000 SR 4. Jumlah sambungan rumah yang sudah dibangun: 7.484 SR 5. Sisa sambungan rumah yang belum dibangun: 52.516 SR											
		Manfaat untuk air minum			Perluasan SPAM KPBU Kota Bandar Lampung Output: 52.516 SR							Keterpaduan antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah dan PDAM	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 8

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Bab Rencana aksi kebutuhan infrastruktur memuat daftar program yang diperlukan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Lampung. Daftar program dilengkapi dengan justifikasi kegiatan dan tujuan program yang bersumber dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Rencana aksi memuat sumber pendanaan serta rencana implementasi program.

Subbab ini menjelaskan rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan Non-PUPR yang berkaitan dengan empat sektor unggulan di Provinsi Lampung yaitu sektor pertanian, pariwisata, dan 291Industr perkotaan.

Berdasarkan data produktivitas komoditas pertanian khususnya padi, Provinsi Lampung menjadi provinsi ke-6 dengan produksi padi tertinggi di Indonesia dan tertinggi ke-2 di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, rencana aksi keterpaduan program melibatkan beberapa unit teknis pelaksana, salah satunya yaitu Kementerian Pertanian sebagai *leading sector*-nya. Adapun K/L lain seperti Kementerian PUPR merupakan supporting agency dalam 291Indus mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Keunggulan lainnya di Provinsi Lampung yaitu sektor pariwisata dengan potensi kekayaan alam dan budaya, menjadi salah satu sektor prioritas untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Sehingga, penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata harus memenuhi syarat 6A (*Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities, dan Available Package*) yang dapat dipenuhi melalui kolaborasi lintas K/L hingga pemerintah daerah.

Infrastruktur dasar 291Industr perkotaan menjadi salah satu kriteria dalam percepatan pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan 2 sektor di atas. Berikut ini dijelaskan rencana aksi yang menerangkan informasi kebutuhan, pelaksana, dan tahun pelaksanaan program.

8.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur pada Fokus Perencanaan

8.1.1. Program dan Rencana Aksi PUPR dan Non PUPR Fokus Pertanian

Tabel 8.1 Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian

GRAND STRATEGY	PROGRA M	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN							
				VOLUME	SATUAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Optimalisasi infrastruktur pertanian untuk mendukung produktivitas tanaman pangan (S4-O4-O5)	Peningkatan Kinerja Saluran Irigasi	Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Pangubuhan	Kab. Lampung Tengah	20	Km	88.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR			X	X	X	X	X	
		Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan Di Rumbia Extension	Kab. Lampung Tengah	14	Ha	1.411.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR				X	X	X	X	
		Bendungan yang dibangun/Pembangunan Bendungan Sumber Bandung	Kab. Lampung Tengah	1	Unit	350.000.000	KPBU	PUPR	SUMBER DAYA AIR							X	
		Bendungan yang dibangun/Pembangunan Bendungan Segala Mider	Kab. Lampung Tengah	1	Unit	1.000.000.000	KPBU	PUPR	SUMBER DAYA AIR							X	
		Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Seputih Surabaya	Kab. Lampung Tengah	1	Unit	437.238.306	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR		X	X	X	X	X	X	
		Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan Daerah Irigasi Permukaan Di Pangubuhan	Kab. Lampung Tengah	10	Km	44.400.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X	X	
		Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang ditingkatkan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Kab. Lampung Tengah	10	Km	44.400.000	APBN/APBD/CSR	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X	X	
		Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/Pembangunan dan pengeboran Jaringan Irigasi Air Tanah	Kab. Lampung Tengah	5	Paket	17.500.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR				X				
		Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Rawalitu	Kab. Mesuji	10	Km	44.400.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR		X	X	X	X	X	X	
		Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi DIR, Mesuji Atas	Kab. Mesuji	10	Km	44.400.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR				X				
	Pembangunan Prasarana Air Baku	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Intake Air Baku Kalirejo	Kab. Lampung Tengah	20-Jan	Unit/lt/detik	10.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR			X					

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN							
				VOLUME	SATUAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Intake Air Baku Rumbia	Kab. Lampung Tengah	20-Jan	Unit/lt/detik	6.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X			
		Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Sungai Buaya	Kab. Mesuji	1	Unit	10.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR								X
		Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Way Seputih	Kab. Lampung Tengah	24	Km	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X		X
	Pengendalian Bencana	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Buaya	Kab. Mesuji	10	Km	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR							X	X
		Peningkatan SPAM Kabupaten/Optimalisasi SPAM Kalihero	Kab. Lampung Tengah	20	Lt/detik	15.000.000	APBN/APBD	PUPR	CIPTA KARYA				X				
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Optimalisasi Sel TPA Bandar Jaya	Kab. Lampung Tengah	3	Ha	20.000.000	APBN/APBD	PUPR	CIPTA KARYA				X				
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	9.87	Unit	197.400.000	APBN/APBD/CSR	PUPR	PERUMAHAN				X	X	X	X	X
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Mesuji	Kab. Mesuji	6.016	Unit	120.320.000	APBN/APBD/CSR	PUPR	PERUMAHAN				X	X	X	X	X
		Pembangunan Rumah Susun MBR Kabupaten Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	44	Unit	7.500.000	APBN/APBD/CSR	PUPR	PERUMAHAN						X		
		Pembangunan Rumah Susun ASN Kabupaten Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	44	Unit	7.500.000	APBN/APBD/CSR	PUPR	PERUMAHAN							X	
		Pembangunan Rumah Susun ASN Kabupaten Mesuji	Kab. Mesuji	44	Unit	7.500.000	APBN/APBD/CSR	PUPR	PERUMAHAN				X				
		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan/Preservasi Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	APBN	PUPR	BINA MARGA				X	X	X	X	X
	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar	Efisiensi Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kemenuh, Pelindo	TBD				X	X	X	X	X
		Pembangunan Jembatan Timbang	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kemenuh	TBD				X	X	X	X	X
		Peningkatan Kemantapan Jalan Daerah	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Pemda	TBD				X	X	X	X	X
	Pengembangan Simpul Logistik	Pengembangan Kawasan Bongkar Muat di Pelabuhan	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kemenuh, Pelindo	TBD				X	X	X	X	X
Pengembangan dan Pemeliharaan Pelabuhan Logistik		Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kemenuh, Pelindo	TBD				X	X	X	X	X	
Penetapan Peraturan Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Lampung		Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kemenuh, Pelindo	TBD				X	X	X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRA M	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN							
				VO LUME	SATUAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Perlindungan lahan pertanian berkala sebagai lumbung pangan nasional (S3-S5—OT-02)	Pengukuhan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	PUPR, Kementan	TBD			X	X	X	X	X	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Irigasi bagi Petani	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD			X	X	X	X	X	
		Pembentukan Unit Pengelola Daerah Irigasi	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD			X	X	X	X	X	
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya P3TGAI	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD			X	X	X	X	X	
3	Peningkatan SDM pertanian	Pengembangan teknologi informasi pertanian	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD			X	X	X	X	X	
		Kajian mengenai iklim dan Cuaca di Kawasan Pertanian	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	BMKG	TBD		X	X					
		Pengembangan Teknologi Informasi Klimatologi dan Curah Hujan yang Terintegrasi dan Mudah Diakses	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	BMKG	TBD		X						
		Pemetaan Kondisi Hidrogeologi	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	PUPR	TBD		X	X					
		Sosialisasi tentang Diversifikasi Tanaman Pangan	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD		X	X					
		Pembagian Bibit	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD			X					
		Penelitian dan Pengembangan Bibit Tanaman yang sesuai dengan Kondisi Topografi dan Klimatologi	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD				X	X	X	X	
		Pembangunan Pusat Studi Pertanian	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD				X				
		Penyuluhan tentang Budidaya Tanaman Pangan	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD			X	X				
		Penyuluhan tentang Potensi dan Nilai Ekonomi Hasil Pertanian	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan, Kemendag	TBD				X				
	Penanaman Budaya Keleakaragaman Pangan dan Hasil Pertanian	Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD		X	X						

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.1.2. Program dan Rencana Aksi PUPR dan Non PUPR Fokus Pertanian Perkotaan

Tabel 8.2 Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN						
				VOLUME	SATUAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Peneruhan kepatuhan infrastruktur perkotaan sesuai standar pelayanan minimum (W1-W3-W5-11-14-15)	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	1	Unit	10.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR						X	X
		Pembangunan SPAM KPB Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	52.516	SR	750.000.000	APBD	PUPR	CIPTA KARYA			X	X		X	X
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Pembangunan TPA Regional	Kota Bandar Lampung	15	Ha	80.000.000	APBN/APBD	PUPR	CIPTA KARYA							X
		Peremajaan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung (Kel. Kaliawi, Kel. Rajabasa)	Kota Bandar Lampung	31.71	Ha	47.565.000	APBN/APBD	PUPR	CIPTA KARYA				X			
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	7.177	Unit	143.540.000	APBN/APBD /CSR	PUPR	PERUMAHAN			X	X	X	X	X
		Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	44	Unit	7.500.000	APBN	PUPR	PERUMAHAN			X				
		Pembangunan Rumah Susun ASN BP5DM	Kota Bandar Lampung	44	Unit	7.500.000	APBN	PUPR	PERUMAHAN				X			
		Pembangunan Jalan bebas Hambatan/Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Ruas Pelabuhan Panjang-Lenatang Provinsi	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Pemda	TBD				X	X	X	X
		Preservasi Jalan Kota/kabupaten	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Pemda	TBD				X	X	X	X
		Peningkatan pelayanan angkutan bus	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD				X	X	X	X
2	Peningkatan jalur distribusi barang untuk meningkatkan ekonomi perkotaan (W4-T3)	Pengembangan Simpul dan Moda Transportasi	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD				X	X	X	X
		Pengembangan Simpul dan Moda Transportasi	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD				X	X	X	X
		Pengembangan Simpul dan Moda Transportasi	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD				X	X	X	X
		Pengembangan Simpul dan Moda Transportasi	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD				X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN					
				VOLUME	SATUAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pengembangan perkotaan yang tahan bencana (W2-12)	Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Bangunan Pengendalian banjir yang aman dengan Pengendalian Banjir Kawasan Pelabuhan Panjang	Kota Bandar Lampung	1	Paket	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	
		Saluran Drainase utama perkotaan yang dibangun/Pembangunan Drainase Utama Perkotaan Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	1	Paket	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	
		Penyediaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB), Rencana Kontijensi, Rencana Kedaruratan, dan Rencana Rehabilitasi	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	BNPB/BPBD	TBD		X		X		X
		Pembentukan desa/kelurahan sadar bencana	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	BNPB/BPBD	TBD		X		X		X
		Peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	BNPB/BPBD	TBD		X		X		X
	Pembangunan Perkotaan yang Inovatif, Berkualitas, dan Cerdas	Penguatan kelimbagaan bencana daerah	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	BNPB/BPBD	TBD		X		X		X
		Mendorong penerapan Transit Oriented Development	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD		X		X		X
		Mendorong penerapan mixed building	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD		X		X		X
		Perencanaan pembangunan dan koefisien lantai bangunan	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD		X		X		X
		Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD		X		X		X
		Peningkatan kualitas transportasi yang terintegrasi bagi industri/urban (alih moda ramah lingkungan).	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD		X		X		X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN						
				VOLU ME	SATU AN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		penerapan ICT pada lalu lintas														
		Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi di perkotaan	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD			X	X	X	X	X
		Penerapan waste management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD			X	X	X	X	X
		Memberikan fasilitas berupa industri tentang mengembangkan kurikulum melek digital, serta membangun fasilitas ramah difabel	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD			X	X	X	X	X
		Edukasi industri sebagai end-user yang hidup di perkotaan	Kota Bandar Lampung	TBD	TBD	TBD	TBD	Penkot	TBD			X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.1.3. Program dan Rencana Aksi PUPR dan Non PUPR Fokus Pariwisata

Tabel 8.3 Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

GRAND STRATEGY	PROGRA M	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN						
				VOLU ME	SATU AN					2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	Peningkat an aksesibilit as industr as pariwisata (SS-02-Q4)	Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dermaga	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X	X			
		Pembangunan industri transportasi penyeberangan wisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	K/L	UNOR	TAHUN							
				VOLUME	SATUAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Perluasan terminal bandara dan perancangan perpanjangan runway	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD						X		
		Penyediaan dan peningkatan terminal	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD					X	X	X	
		Penyediaan halte bus	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X					
		Penyediaan moda transportasi angkutan laut perintis	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X	X			X	
		Penyediaan kapal/perahu wisata antar pulau	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X	X				
		Penyediaan moda bus pariwisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD					X			
		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Jembatan/Preservasi Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X	X				
		Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Bersih Kabupaten Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan	1	unit	10.000.000	APBN	PUPR	BINA MARGA					X	X	X	
		Daerah Irigasi yang dibangun/Pembangunan Di Jabung Kanan	Kab. Lampung Timur	8.585	Ha	865.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR							X	
		2	Peningkatan amenities infrastruktur pariwisata (S3-O5)	Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Pengendalian banjir Sungai Batanghari	Kab. Lampung Timur	1	Paket	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR				X		
Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan	Kab. Lampung Timur			1	Paket	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR						X		

GRAND STRATEGY	PROGRA M	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGA RAN	SUMBER PENDAN AAN	K/L	UNOR	TAHUN							
				VOLU ME	SATU AN					20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	
		Pengendalian Banjir Sukadana															
		Pengamanan Pengendalian banjir yang ditingkatkan/Rehabilitasi Tanggul Banjir Way Katibung Sulan	Kab. Lampung Selatan	1	Paket	55.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR						X		
		Bangunan Pengamanan Pantai yang dibangun/Pembangunan Pengamanan Pantai Kallanda (lanjutan)	Kab. Lampung Selatan	1,5	Km	15.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X		
		Pemeliharaan Infrastruktur Pengamanan Pantai Kallanda (Pantai Sukaraja)	Kab. Lampung Selatan	2,14	Km	15.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR			X					
		Pemeliharaan Infrastruktur Pengamanan Pantai Kallanda (Pantai Majal)	Kab. Lampung Selatan	1,34	Km	15.000.000	APBN	PUPR	SUMBER DAYA AIR			X					
		Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangunan SPAM IKK Labuhan Meringgail	Kab. Lampung Timur	20	Lt/de tik	15.000.000	APBN	PUPR	CIPTA KARYA			X					
		Peningkatan SPAM Kabupaten/Pembangunan Jaringan Distribusi Utama PDAM Tirtilasa	Kab. Lampung Selatan	10	Km	35.000.000	APBN/A PBD	PUPR	CIPTA KARYA					X	X		
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Optimalisasi TPA Sukadana	Kab. Lampung Timur	1	Unit	20.000.000	APBN/A PBD	PUPR	CIPTA KARYA			X					
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Timur	Kab. Lampung Timur	26.003	Unit	520.060.000	APBN/A PBD	PUPR	PERUMAHAN			X	X	X	X	X	X
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan	8.078	Unit	161.560.000	APBN/A PBD	PUPR	PERUMAHAN			X	X	X	X	X	X
		Perumahan Permukiman Kumuh	Kab. Lampung Timur	113.33	Ha	169.995.000	APBN	PUPR	CIPTA KARYA					X	X	X	

[illegible]

GRAND STRATEGY	PROGRA M	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGA RAN	SUMBER PENDAN AAN	K/L	UNOR	TAHUN							
				VOLU ME	SATU AN					20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	
Peningkat an kapasitas SDM kelenbag pariwisata (S4-O2- O3)	Peningkat an kapasitas SDM kelenbag pariwisata (S4-O2- O3)	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Lingkungan	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD			X	X	X			
		Pelatihan Pemandu Wisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD			X	X	X			
		Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi pelaku wisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD				X	X	X	X	
		Pelatihan Keterampilan Pemasaran dan Pelayanan	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD				X	X	X		
		Pelatihan pengelolaan pariwisata (akomodasi, transportasi, keuangan bisnis)	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD				X	X	X		
		Peningkatan kualitas dan kuantitas industr pariwisata yang terakreditasi	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD					X	X		
		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan industriyt kepariwisataan	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD					X	X		
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata di lingkungan pemerintahan	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD					X	X		
		Peningkatan kapasitas Pengetahuan tentang konservasi, serta perlindungan dan pelestarian alam	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD					X	X		
		Peningkatan partisipasi masyarakat adat/ndus sebagai pelaku pariwisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD					X	X		
		Pelatihan pengembangan pusat pemberdayaan industriyt dan	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENDARE KRAF	TBD					X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRA M	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	INDIKASI KEBUTUHAN		BIAYA ANGGA RAN	SUMBER PENDAN AAN	K/L	UNOR	TAHUN						
				VOLU ME	SATU AN					20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29
		peningkatan kemampuan pengembangan wisata														
		Pemberlakuan segmentasi harga berdasarkan destinasi	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPARE KRAF	TBD		X	X	X	X	X	
		Diversifikasi produk dan paket wisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPARE KRAF	TBD			X	X	X	X	
		Peningkatan promosi produk wisata minat khusus dan wisata budaya	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPARE KRAF	TBD			X	X	X	X	
	Peningkat an pemasaran wisata dan optimalisa si kelenbag aan	Pengembangan inovasi pemasaran berdasarkan segmen wisatawan berbasis website, aplikasi, dan media sosial	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPARE KRAF, KOMINFO	TBD			X	X	X	X	
		Pengembangan kegiatan pelatihan organisasi bidang pariwisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPARE KRAF	TBD		X	X	X	X		
		Pengembangan dan penguatan organisasi bidang industri pariwisata	Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPARE KRAF	TBD		X	X	X	X		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2. Program dan Rencana Aksi PUPR

8.2.1. Program dan Rencana Aksi Sektor Sumber Daya Air

Tabel 8.4 Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	SDA	Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Pangubuan	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	1. Kebutuhan air irigasi mencapai 89.04 m ³ /dt, 2. Indeks Kondisi Irigasi pada tahun 2022 Di Pangubuan sebesar 24,6 (termasuk pada kategori kurang sehingga diperlukan pembangunan daerah irigasi daerah irigasi).	Agar disiapkan RC berupa DED, Doking dan lainnya	20	km	88.000.000	APBN	2028	2029
2	SDA	Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan Di Rumbia Extension	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Kebutuhan air irigasi mencapai 89.04 m ³ /dt sehingga diperlukan pembangunan daerah irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lampung dalam rangka mendukung Provinsi Lampung sebagai Lumbung Pangan.	Agar disiapkan RC berupa DED, Doking dan lainnya	14.000	Ha	1.411.000.000	APBN	2028	2029
3	SDA	Bendungan yang dibangun/Infrastruktur penyediaan air untuk irigasi kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Potensi penambahan air irigasi melalui pembangunan bendungan dalam rangka mencukupi kebutuhan air irigasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 89.04 m ³ /dt di tahun 2029.	Agar disiapkan RC berupa DED (2025), FS, Larap, Doking dan lainnya (2026-2027) dan pembangunan kurang lebih selama 5 tahun (2028-2032)	1	Unit	350.000.000	KPBU	2029	2029
4	SDA	Bendungan yang dibangun/Infrastruktur penyediaan air untuk irigasi kawasan pertanian Lampung Tengah	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Potensi penambahan air irigasi melalui pembangunan bendungan dalam rangka mencukupi kebutuhan air irigasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar	Agar disiapkan RC berupa DED (2025), FS, Larap, Doking dan lainnya (2026-2027) dan	1	Unit	1.000.000.000	KPBU	2029	2029

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					89,04 m3/dt di tahun 2029.	pembangunan kurang lebih selama 5 tahun (2028-2032)						
					Pada proyeksi kebutuhan air baku di kawasan pertanian Lampung Tengah terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan hingga tahun 2029 yaitu sebesar -0,867 m3/dt, sehingga dibutuhkan pembangunan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Lampung Tengah.	Sudah disusun SID 2021 sehingga terdapat Rencana DED (2025) dan lahan (2026) oleh Pemerintah Daerah		Unit/lt/detik	10.000.000	APBN	2027	2027
5	SDA	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Intake Air Baku Kalirejo	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 132.799,89 ha. Banjir melalui Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi di Sungai Way Sekampung sampai ke hilir daerah Rumbia. Genangan di Daerah Hilir bisa mencapai 1 minggu dengan tinggi 2,5 m. Di daerah persawahan (DIF Seputh Surabaya) banjir bisa mencapai tahunan. Pada daerah hulu juga terjadi degradasi sungai.	Agar disiapkan RC berupa DED, Doking dan lainnya	20	Km	125.000.000	APBN	2027	2029
					Indeks Kondisi Jaringan irigasi pada tahun 2022 < 60% (kategori kurang)	Agar disiapkan RC berupa DED, Doking dan lainnya	64	km	437.238.306	APBN	2025	2029
7	SDA	Daerah irigasi yang ditingkatkan/ Rehabilitasi Di Kecamatan Di Seputh Surabaya	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Kebutuhan air irigasi mencapai 89,04 m3/dt sehingga diperlukan pemeliharaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mendukung Provinsi Lampung sebagai pendukung Lumbung Pangan.	Agar disiapkan RC berupa DED, Doking dan lainnya	10	km	44.400.000	APBN	2028	2029
8	SDA	Daerah irigasi yang dibangun/Pembangunan Permukaan Di Pangabuan	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah								

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	SDA	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/direhabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Kebutuhan air irigasi mencapai 89,04 m3/dt sehingga diperlukan rehabilitasi/peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Lampung dalam rangka mendukung Provinsi Lampung sebagai Lumbung Pangan.		64	km	23.300.000	APBN/ APBD/CSR	2025	2028
10	SDA	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/Pembangunan dan Pengeboran Jaringan Irigasi Air Tanah	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Kebutuhan air irigasi mencapai 89,04 m3/dt sehingga diperlukan pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lampung dalam rangka mendukung Provinsi Lampung sebagai Lumbung Pangan.	Diperlukan review SID Geolistrik dan Eksplorasi untuk menentukan kecukupan debit (2025)	10	km	54.650.000	APBN	2025	2029
11	SDA	Daerah Irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Rawajitu	Kawasan Pertanian Mesuji	Kab. Mesuji	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi pada tahun 2022 rendah pada kategori kurang sehingga (15,1) sehingga diperlukan pembangunan jaringan irigasi untuk mengoptimalkan proyeksi kebutuhan air irigasi sebesar 26,62 m3/dt pada tahun 2029.	Agar disiapkan RC berupa DED, loket dan lainnya	74	km	239.907.000	APBN	2025	2029
12	SDA	Daerah Irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi DIR. Mesuji Atas	Kawasan Pertanian Mesuji	Kab. Mesuji	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi pada tahun 2022 rendah pada kategori kurang sehingga (15,1) sehingga diperlukan pembangunan jaringan irigasi untuk mengoptimalkan proyeksi kebutuhan air irigasi sebesar 26,62 m3/dt pada tahun 2029.	Diperlukan review DED (2025)	21	km	75.710.000	APBN	2025	2029
13	SDA	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Sungai Buaya	Kawasan Pertanian Mesuji	Kab. Mesuji	Pada proyeksi kebutuhan air baku di Kawasan Pertanian Mesuji terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan hingga tahun 2029 yaitu sebesar -0,363 m3/dt, dengan ketersediaan air baku	Dibutuhkan review SID (2026)	1	km	10.000.000	APBN	2027	2027

No	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					mencapai 0,005 m3/dt dan kebutuhan air baku mencapai 0,368 m3/dt, sehingga dibutuhkan pembangunan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Mesuji.							
14	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Buaya	Kawasan Pertanian Mesuji	Kab. Mesuji	Pada tahun 2029, luasan daerah rawan banjir mencapai 116,291.42 Ha. Banjir terjadi di Sungai Buaya		10	km	165.000.000	APBN	2028	2028
15	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kawasan Pelabuhan Panjang	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir di PKN Bandar Lampung mencapai 2.230,72 ha sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali banjir. Urgensi penanganan pada Drainase Utama dan Kawasan Pelabuhan Panjang	Agar disiapkan RC berupa DED (2026), Larap (2007) dan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Daerah (2027)	2	km	25.000.000	APBN	2028	2028
16	SDA	Saluran Drainase utama perkotaan yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kota Bandar Lampung	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi Luas Daerah Rawan Banjir di PKN Bandar Lampung mencapai 2.230,72 ha sehingga perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali banjir. Urgensi penanganan pada Drainase Utama dan Kawasan Pelabuhan Panjang	Agar disiapkan RC berupa DED (2026), Larap (2007) dan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Daerah (2027)	1	km	25.000.000	APBN	2025	2025
17	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Batanghari	KSPN Way Kambas disk	Kab. Lampung Timur	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 113.843,77 Ha.	Agar disiapkan RC berupa Masterplan Penanganan Banjir Lampung Timur (2025), Doking, Larap dan talinya (2026).	51	km	781.000.000	APBN	2028	2029
18	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan	KSPN Way Kambas disk	Kab. Lampung Timur	1. Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir	Agar disiapkan RC berupa	1	paket	55.000.000	APBN	2028	2028

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bangunan Pengendalian Banjir Sukadana			mencapai 113.843,77 Ha, 2. Tinggi genangan mencapai 50 cm selama kurang lebih 3 hari.	Masterplan Penanganan Banjir Lampung Timur (2025), Dokling, Amalal Larap dan lainnya (2026-2027).						
19	SDA	Daerah Irigasi yang dibangun/Pembangunan Di Jabung Kanan	KSPN Way Kambas dsk	Kab. Lampung Timur	1. Pada tahun 2029 memiliki proyekti luas daerah rawan banjir mencapai 113.843,77 Ha, 2. Tinggi genangan mencapai 50 cm selama kurang lebih 3 hari.	Agar disiapkan RC berupa Masterplan Penanganan Banjir Lampung Timur (2025), Dokling, Amalal Larap dan lainnya (2026-2027).	7.565	Ha	756.500.000	APBN	2029	2029
20	SDA	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Lampung Selatan	KSPN Krakatau dan sekitarnya	Kab. Lampung Selatan	1. Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Selatan memiliki kebutuhan air baku sedangkan penyediaan air baku sebesar 0,05 m ³ /dt, maka perlu demicikan terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan yaitu sebesar -1,979 m ³ /dt, sehingga dibutuhkan pembangunan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Pembangunan prasarana air baku menggunakan Estuary Dam untuk mendukung Bakauheni Harbour City	Agar disiapkan RC berupa Dokling (2025), Larap (2026) dan lainnya	4	unit	1.414.000.000	APBN	2025	2028
21	SDA	Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Kallanda (lanjutan)	KSPN Krakatau dan sekitarnya	Kab. Lampung Selatan	1. Sebagai upaya untuk perlindungan terhadap garis pantai dalam resiko kerusakan pada permukiman dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. 2. Jika dilihat pada lokasi spesifik, Kabupaten Lampung Selatan memiliki panjang wilayah rawan abrasi sebesar 165,51 km. Dengan proyeksi panjang rawan abrasi	Agar disiapkan RC berupa DED (2025), Dokling (2026) dan lain sebagainya	3	km	30.000.000	APBN	2025	2025

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					mencapai 170,09 km. 3.							
22	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang ditingkatkan/Rehabilitasi Tanggul Banjir Way Kalbung Sulan	KSPN Krakatau dan sekitarnya	Kab. Lampung Selatan	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 45,694.56 Ha.	Diperlukan Review Design	1	paket	55.000.000	APBN	2026	2026
23	SDA	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Bandar Negeri Suoh	Non Kawasan	Kab. Lampung Barat	Terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan dari tahun 2023 dan pada tahun 2029 mencapai - 0,436 m3/dt.	Dibutuhkan peningkatan kapasitas air baku (2025). Dokling (2026) serta kelemakan RC lainnya	1	Unit	10.000.000	APBN	2027	2027
24	SDA	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Tanggamus	Non Kawasan	Kab. Tanggamus	Terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan dari tahun 2023 dan pada tahun 2029 mencapai - 0,920 m3/dt.	Agar disiapkan RC berupa DED, Dokling dan lainnya	1	unit	5.000.000	APBN	2029	2029
25	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Way Jelai Kel. Baros	Non Kawasan	Kab. Tanggamus	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 11,455 Ha.	Pengangan banjir tergantung dari hasil SID Drainase Utana (2025)	1	paket	55.000.000	APBN	2027	2027
26	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Pengendalian Banjir Way Sesah-Way Rarem	Non Kawasan	Kab. Lampung Utara	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 45,947 Ha.	Agar disiapkan RC berupa SID, engendalian Banjir Way Sesah-Way Rarem (2025), Dokling (2026) dan RC lainnya	1	paket	55.000.000	APBN	2027	2027
27	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Way Kanan	Non Kawasan	Kab. Way Kanan	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 49,581 Ha.	Agar disiapkan RC berupa DED, Dokling dan lainnya	1	paket	55.000.000	APBN	2027	2027
28	SDA	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Tulang Bawang	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 147,870 Ha. Terdapat sedimentasi di Muara Sungai Tulang Bawang	Agar disiapkan RC berupa SID, engendalian Banjir Rawa Banir Rawa Pidada Tulang Bawang dan lainnya sebelum tahun 2028	10	km	35.000.000	APBN	2026	2029
29	SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Ratal	Non Kawasan	Kab. Pesawaran	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir	Agar disiapkan RC berupa DED,	7	km	252.000.000	APBN	2026	2027

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAPUAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					mencapai 12.850 Ha. Prioritas berada di pesisir pantai Teluk Ratai Karena banjir rob dan abrasi	Dokling (2026) dan lainnya sampai dengan tahun 2027						
30	SDA	Pembangunan Bakau/Pengendalian Banjir Way Mincang, Way Bulok dan Way Semah	Non Kawasan	Kab. Pringsewu	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 10.225 Ha.	Agar diperoleh RC berupa DED, Dokling dan lainnya	1	paket	55.000.000	APBN	2027	2028
31	SDA	Prasarana air baku yang dibangun/Pembangunan Prasarana Air Baku Kabupaten Tulang Bawang Barat	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang Barat	Terdapat gap ketersediaan air baku daerah rawan banjir dari tahun 2023 dan pada tahun 2029 mencapai - 0,076 m3/dt.	Agar diperoleh RC berupa SID, Dokling dan lainnya sampai dengan 2026	1	unit	6.000.000	APBN	2029	2029
32	SDA	Bangunan Pengendalian pantai yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kab. Tulang Bawang Barat	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang Barat	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 40.425 Ha.	Agar diperoleh RC berupa SID, Dokling dan lainnya sampai dengan 2026	5	km	14.900.000	APBN	2027	2029
33	SDA	Bangunan Pengamanan pantai yang dibangun/Pembangunan Pengamanan Pantai Mandiri	Non Kawasan	Kab. Pesisir Barat	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 12.649 Ha. Rawan abrasi pantai	Agar diperoleh RC berupa SID, Dokling dan lainnya sampai dengan 2027	19	km	190.500.000	APBN	2028	2029
34	SDA	Bangunan Pengamanan Pantai yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kota Metro	Non Kawasan	Kota Metro	Pada tahun 2029 memiliki proyeksi luas daerah rawan banjir mencapai 3.022 Ha.	Agar diperoleh RC berupa SID, Dokling, Larap dan lainnya sampai dengan tahun 2027	1	Km	55.000.000	APBN	2027	2027
35	SDA	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Provinsi Lampung	Provinsi Lampung		Tidak perlu	1	Provinsi	2.198.377.610	APBN	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.2. Program dan Rencana Aksi Sektor Bina Marga

Tabel 8.5 Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Bina Marga

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	BM	Pembangunan Jalan bebas n Jalan Bebas Hambatan Ruas Pelabuhan Panjang- Lematang	PKN Bandar Lampung	Menuju Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung (Gedung Pelabuhan Panjang- Lematang)	1. Exit Tol Terdekat dengan Pelabuhan Panjang adalah Exit Tol Lematang. 2. Jalan non tol yang menghubungkan GT Lematang dengan Pelabuhan Panjang adalah: - Ruas Jalan Nasional Ir. Sutami dengan kondisi VCR 0,192 atau LoS level A dan pada tahun 2029 direvisi berdasarkan hasil perhitungan analisis memiliki VCR 0,24 atau LoS level A. - Ruas Jalan Nasional Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung) dengan kondisi VCR 0,944 atau LoS level E dan pada tahun 2029, berdasarkan hasil perhitungan analisis memiliki VCR 1,19 atau LoS level F. Kondisi ini dideskripsikan dengan arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan perjalanan volume mendekati kapasitas. 3. Pada ruas jalan nasional yang menghubungkan antara Exit Tol Lematang dan Pelabuhan Panjang merupakan ruas yang rawan kecelakaan terlebin terdapat ruas jalan dengan topografi mendaki. Dengan demikian diperlukan pembangunan jalan baru yang berupa Jalan Tol yang menghubungkan langsung dengan simpul transportasi Pelabuhan Panjang sehingga dapat	Agar disiapkan RC berupa FS, DED, Dokling dan lainnya	11	km	520.638.446	KPB	2026	2029

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
					mempercepat distribusi logistik serta komoditas Provinsi Lampung dari dan ke Pulau Sumatera.							
2	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Simp. Kota Kotabumi (Kota Alam) - Klp. Tujuh (Jln. Soekarna-Hatta - Kotabumi)	SPM	Kab. Lampung Utara Simp. Kota Kotabumi (Kota Alam) - KLP. Tujuh (Jln. Soekarna-Hatta - Kotabumi)	Proyeksi VCR 0.99 LOS E		4	km	35.183.090	APBN	2028	2028
3	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Gedongtataan - Bts. Kota Bandar Lampung	SPM	Kab. Pesawaran GEDONGTATAAN - BTS. KOTA BANDAR LAMPUNG	Proyeksi VCR 1.92 LOS F	Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan lahan	15	km	131.120.939	APBN	2029	2029
4	BM	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Rantau Tjiang - Gedongtataan	SPM	Kab. Pringsewu RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN	Proyeksi VCR 1.55 LOS F.		30	km	265.239.935	APBN	2028	2028
5	BM	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Preservasi Jembatan/Preservasi Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	Provinsi Lampung		Tidak perlu	1	Provinsi	1.716.380.380	APBN/KSP/kP BU	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.3. Program dan Rencana Aksi Sektor Cipta Karya

Tabel 8.6 Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten/Optimalisasi SPAM Kalijero	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	1. Pada tahun 2029 diprediksi dibutuhkan perambahan kapasitas IPA minimum 2700 l/dt. Namun dalam rangka menyelaraskan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan sambungan rumah untuk air minum maka diusulkan Pembangunan SPAM kapasitas minimum 40 l/dt untuk daerah memenuhi secara bertahap kebutuhan total air minum hingga tahun 2029. 2. IPA dan jaringan ekisting dalam kondisi rusak	RC telah tersedia CDED dan RAB). Diperlukan RC berupa surat usulan dari Pemerintah Daerah	20	lt/detik	15.000.000	APBN/APBD	2028	2028
2	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Peningkatan Sel TPST Bandar Jaya	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Terdapat gap sebesar 146,908 m3 pada tahun 2029 dengan kondisi ekisting TPA yang sudah overload	Diperlukan pemenuhan kebutuhan RC oleh pemerintah daerah	3	Ha	20.000.000	APBN/APBD	2026	2026
3	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Pembangunan TPST Regional	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	TPA Bakung (Ekisting) overload sehingga tidak bisa menampung Timbulan Sampah Kota Bandar Lampung hingga tahun 2029 sehingga dalam rangka menyelaraskan dengan kemampuan pemda dalam menyediakan lahan dan menyiapkan kelembagaan kerjasama regional, maka diusulkan pembangunan TPA Regional pada tahun 2029.	Diperlukan pemenuhan RC oleh Pemerintah Daerah RC terutama MoU/ PKS Kabupaten dan kota terkait. Penyiapan RC oleh Pemerintah Kota dan Provinsi sampai dengan tahun 2028	15	Ha	80.000.000	APBN/APBD	2029	2029
4	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung (Kel. Kaliawi, Kel. Rajabasa)	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Terdapat sisa permukiman kumuh kewenangan pusat di Kota Bandar Lampung (> 15 Ha) di Kelurahan Kaliawi (15,60 Ha) dan Kelurahan Rajabasa Jaya (16,11 Ha).	Diperlukan RC berupa Dokumen SK2KPKPK, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah	32	Ha	47.565.000	APBN/APBD	2026	2026

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (Rp RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	CK	Perluasan SPAM KPBU Kota Bandar Lampung	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Target SR sebesar 60.000 SR dan baru terealisasi 7.484, sehingga terdapat sisa 52.516 SR	Agar disiapkan RC	52.516	SR	750.000.000	APBD	2025	2029
6	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangun an SPAM IKK Labuhan Maringgai	KSPN Way Kambas dsk	Kab. Lampung Timur	Terdapat gap ketersediaan air minum dengan kebutuhan dari tahun 2023 dan pada tahun 2029	RC telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan kelenyangan PDAM sakit sehingga diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan kelenyangan hingga status PDAM menjadi minimal "kurang sehat"	20	lt/detik	15.000.000	APBN/APBD	2027	2027
7	CK	Sistem Pengelolaan Sampah Berskala Kota/Optimalisasi TPST Sukadana	KSPN Way Kambas dsk	Kab. Lampung Timur	Kondisi eksisting TPA sudah overload	Agar disiapkan RC oleh Pemerintah Daerah	1	unit	20.000.000	APBN/APBD	2025	2025
8	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Timur (Kec. Way Jepara, Kec. Pekalongan)	KSPN Way Kambas dsk	Kab. Lampung Timur	Terdapat sisa permukiman kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) dengan prioritas penanganan di Kecamatan Way Jepara (Desa Labuhan Ratu 1 20.84 Ha, Desa Braja Sakti 27.68 Ha dan Desa Sumber Rejo 22.74 Ha) dan Kecamatan Pekalongan (Desa Adirejo 15.57 Ha dan Desa Sidodadi 26.5 Ha).	Diperlukan penyiapan penempatan Dokumen RP2KPKPK, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah	113	Ha	169.995.000	APBN	2027	2027
9	CK	Perinkatan SPAM Kabupaten/Pembangun an Jaringan Distribusi Utama PDAM Tirtajasa	KSPN Krakatau dan sekitarnya	Kab. Lampung Selatan	Untuk dapat memenuhi kebutuhan proveksi air minum hingga tahun 2029 yaitu 59 lt/dt, diusulkan penambahan kapasitas IPA minimum 60 l/dt.	Diperlukan pemenuhan RC berupa surat usulan oleh Pemerintah Daerah	10	km	35.000.000	APBN/APBD	2027	2028
10	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Tengah) Kel. Sido Mekar, Kel. Karya Tunggai)	KSPN Krakatau dan sekitarnya	Kab. Lampung Selatan	Terdapat sisa permukiman kumuh kewenangan pusat di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 54,71 Ha (Kel. Sido Mekar 35,08 Ha) dan Karya Tunggai (24,71 Ha). Prioritas	Diperlukan penyiapan penempatan RC berupa Dokumen RP2KPKPK, SK kumuh, Pembahasan Lahan (2025-2026), DED (2027), surat	35	Ha	52.620.000	APBN/APBD	2028	2028

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAJARAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (Rp RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					penanganan di Desa Sido Mekar.	minat dan terima hibah oleh Pemerintah Daerah						
11	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Pembangunan Sel TPS1 Batu Ketulis	Non Kawasan	Kab. Lampung Barat	TPA Eksisting Over load dengan proyeksi tambahan sampah yang masuk ke TPA pada tahun 2029 sebesar 32.468 m3.	Sudah ada SKK, Kasreplan, Surat Minat dan Terima Aset, Lahan, DED dan lainnya (RC lengkap)	5	Ha	15.000.000	APBN/APBD	2027	2027
12	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Lampung Barat (Desa Pajar Bulan, Desa Pasar Luga)	Non Kawasan	Kab. Lampung Barat	Terdapat permukiman kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) di Falar Bulan 28,71 Ha dan Pasar Luga 25,140	Agar disiapkan RC	54	Ha	61.778.000	APBN/APBD	2028	2028
13	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangun an SPAM IKK Sikincan	Non Kawasan	Kab. Lampung Barat	Untuk memenuhi kebutuhan proyeksi air minum hingga tahun 2029	Agar disiapkan RC berupa DED, Dokling, Surat Usulan dan lainnya	20	lt/detik	15.000.000	APBN	2027	2027
14	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangun an SPAM Bandar Negeri Suoh	Non Kawasan	Kab. Lampung Barat	Untuk memenuhi kebutuhan proyeksi air minum hingga tahun 2029	RC dan surat usulan telah tersedia. Pembanguna dilaksanakan selelah Pembanguna n Prasarana Air Baku Bandar Negeri Suoh selesai	20	lt/detik	15.000.000	APBN	2028	2028
15	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanggamus (Kel. Pasar Madang, Kel. Talang Padang, Kel. Sinar Banten)	Non Kawasan	Kab. Tanggamus	Terdapat sisa permukiman kumuh kewenangan pusat (> 15 Ha) di Desa Pasar Madang 22,36 Ha, Desa Talang Padang 32,44 Ha, Desa Sinar Banten 23,68 Ha	Diperlukan penyajian berupa DED, Dokling, RP2KPKPK, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah	79	Ha	90.264.000	APBN/APBD	2025	2025
16	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten/Optimalisasi SPAM IKK Pakuan Ratu	Non Kawasan	Kab. Way Kanan	Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Way Kanan	Kelengkapan berupa UPTD sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui BLUD. Diperlukan pemenuhan RC berupa surat usulan	20	lt/detik	15.000.000	APBN	2027	2027

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAJARAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangun an SPAM IKK Menggala	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang	Terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan dari tahun 2023 dan pada tahun 2029 mencapai - 0.388 m3/dt	Agar diapkan RC serta perbaikan. Kondisi eksisting perumahan sakit, kebocoran tinggi sehingga perlu perbaikan kelembagaan terlebih dahulu	20	lt/detik	15.000.000	APBN	2029	2029
18	CK	Peremajaan Perumahan Kumuh Kabupaten/Tulang Bawang (Kel. Meda Sari, Kel. Karya Jitu)	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang	Terdapat sisa perumahan kumuh di Kabupaten Ha). Prioritas Penanganan di Kecamatan Rawajitu Selatan (Desa Meda Sari dan Karya Jitu) dengan total luas 25.79 Ha	Diperlukan penyediaan perumahan DokumPK, RP2KPKPK, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah	26	Ha	38.685.000	APBN/APBD	2026	2026
19	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangun an SPAM IKK Way Klau	Non Kawasan	Kab. Pesawaran	Terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan dari tahun 2023 dan pada tahun 2029 mencapai - 0.688 m3/dt.	Kelembagaan kurang sehat sehingga diperlukan perbaikan kelembagaan dengan status minimal kurang sehat. RC dan surat usulan telah tersedia.	20	lt/detik	15.000.000	APBN	2027	2027
20	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pembangun an SPAM IKK Kedondong	Non Kawasan	Kab. Pesawaran	Terdapat gap ketersediaan air baku dengan kebutuhan dari tahun 2023 dan pada tahun 2029 mencapai - 0.688 m3/dt.	Kelembagaan kurang sehat sehingga diperlukan perbaikan kelembagaan dengan status minimal kurang sehat. RC telah tersedia	20	lt/detik	15.000.000	APBN	2028	2028
21	CK	Peremajaan Perumahan Kumuh Kabupaten Pesawaran (Kec. Cilimus)	Non Kawasan	Kab. Pesawaran	Terdapat sisa perumahan kumuh kewenangan pusat di Kabupaten Pesawaran (> 15 Ha). Prioritas di Kecamatan Cilimus (16.99 Ha)	Diperlukan perbaikan RC berupa Dokumen RP2KPKPK, SK kumuh, DED, surat minat dan terima hibah	17	Ha	15.000.000	APBN/APBD	2028	2028

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESAJARAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (Rp Ribu)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten/Pengemban gan Jaringan Distribusi Utama SPAM IKK Way Seputih	Non Kawasan	Kab. Pringsewu	Untuk memenuhi kebutuhan air minum	RC dan surat usulan telah tersedia	1	paket	10.000.000	APBN	2025	2026
23	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Optimalisasi sel baru TPST Bumi Ayu	Non Kawasan	Kab. Pringsewu	TPA sudah overload	RC Slap. Diperlukan pembinaan lahan oleh Pemda 5 Ha	1	unit	15.000.000	APBN	2025	2025
24	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kab. Pringsewu (Pekon Wonodadi)	Non Kawasan	Kab. Pringsewu	Terdapat kawasan kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) di Pekon Wonodadi 26,36	Agar diapakan RC berupa DED	26	Ha	39.540.000	APBN	2027	2027
25	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten/Optimalisasi SPAM IKK Panegaran	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang Barat	Pada tahun 2021 akses terhadap air minum layak paling rendah di Provinsi Lampung yaitu 42,81% dengan proyeksi gap di tahun 2029 sebesar - 498 l/d	Kelembagaan berupa UPTD sehingga perlu peningkatan status kelembagaan menjadi BLUD. Perlu pemenuhan RC dan surat usulan.	20	lt/detik	15.000.000	APBN/APBD	2028	2028
26	CK	Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten/Pengemb angan Jaringan Distribusi Utama SPAM IKK Mulya Asri, Tiuh Pulung Kencana)	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang Barat	Terdapat sisa permukiman kumuh kewenangan pusat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (> 15 Ha)	Diperlukan penyapan RC berupa pembinaan lahan oleh Pemda 8 Ha berupa DED, surat minat dan terima hibah	81	Ha	93.120.000	APBN/APBD	2025	2027
27	CK	Pembangunan SPAM Kabupaten/Pengangun an SPAM IKK Krd	Non Kawasan	Kab. Pesir Barat	Untuk memenuhi kebutuhan air minum	Kelembagaan berupa UPTD, perlu peningkatan status kelembagaan menjadi BLUD RC dan surat usulan telah tersedia	100	lt/detik	75.000.000	APBN	2028	2028
28	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Optimalisasi TPST Karangrejo	Non Kawasan	Kota Metro	TPA Existing Over load dengan proyeksi timbun sampah yang masuk ke TPA pada tahun 2029 sebesar 16.458 ms/tari	Agar diapakan RC berupa DED, Dokling dan lainnya	1	unit	25.000.000	APBN/APBD	2025	2025
29	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten/Optimalisasi SPAM Rejomulyo	Non Kawasan	Kota Metro	Untuk memenuhi kebutuhan air minum	Kelembagaan berupa UPTD, perlu peningkatan status kelembagaan menjadi BLUD. RC	100	lt/detik	7.500.000	APBN	2027	2027

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						telah tersedia namun pemenuhan RC berupa surat usulan						
30	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota/Peringkatan PLT Karangrejo	Non Kawasan	Kota Metro	Untuk memenuhi kebutuhan sanitasi layak	Agar disiapakan RC	1	unit	5.000.000	APBN	2026	2026

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.4. Program dan Rencana Aksi Sektor Perumahan

Tabel 8.7 Matriks Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Tengah	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan Tersebutnya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat sisa RTLH update surat permohonan sejumlah 9.134 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Dirjen Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
2	PR	Pembangunan Rumah Susun MBR Kabupaten Lampung Tengah	Kawasan Pertanian Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan untuk mengurangi backlog. 1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan SK Penetapan Dirjen Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Dirjen Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	44	unit	7.500.000	APBN/APBD/C SR	2027	2027
3	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mesuji	Kawasan Pertanian Mesuji	Kab. Mesuji	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan untuk mengurangi backlog. 2. Terdapat sisa RTLH update surat permohonan sejumlah 3.050 unit sehingga sisa	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Dirjen Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2029	2029

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandar Lampung	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersesarnya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH sejumlah 3126 unit. Penanganan sampai dengan tahun 2025 berjumlah 1045 unit. Sisa penanganan berjumlah 2.081.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Perumahan. Diperlukan Surat Kesediaan Menyediakan Dana Pendamping.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
5	PR	Pembangunan Rumah Susun MBR Kota Bandar Lampung	PKN Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan untuk mengurangi backlog.	RC siap.	44	unit	7.500.000	APBN	2025	2025
6	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Timur	KSPN Way Kambas dsk	Kab. Lampung Timur	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersesarnya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH sejumlah 17.195 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
7	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Selatan	KSPN Krakatau dan sekitarnya	Kab. Lampung Selatan	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersesarnya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat sisa RTLH sejumlah 5.673 unit. Penanganan sampai dengan 2023 berjumlah 2.472 unit. Sisa penanganan 3.201 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
8	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Barat	Non Kawasan	Kab. Lampung Barat	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersesarnya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH sejumlah 6.607 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
9	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanggamus	Non Kawasan	Kab. Tanggamus	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersesarnya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH sejumlah 12.278 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Perumahan. Diperlukan	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penanganan s.d 2023: 1.515 unit. Sisa Penanganan: 10.763 unit.	update surat permohonan.						
10	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Utara	Non Kawasan	Kab. Lampung Utara	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH berjumlah 6.281 unit. Penanganan s.d 2023: 6.033 unit. Sisa: 2.248 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK. Penetapan Dirjen. Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
11	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Way Kanan	Non Kawasan	Kab. Way Kanan	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH 7.150 unit. Penanganan s.d 2023: 4.595 unit. Sisa: 2.555 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK. Penetapan Dirjen. Perumahan. Diperlukan update surat permohonan s.d Bupati/Walikota	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
12	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tulang Bawang	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH berjumlah 11.379 unit. Penanganan s.d 2023: 10.000 unit. Sisa 10.379 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK. Penetapan Dirjen. Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
13	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesawaran	Non Kawasan	Kab. Pesawaran	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH 8.846 unit. Penanganan s.d 2023 2.239 unit. Sisa penanganan 6.607 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK. Penetapan Dirjen. Perumahan. Diperlukan penyelesaian masalah RC sesuai ketentuan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
14	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pringsewu	Non Kawasan	Kab. Pringsewu	1. Sesuai dengan isu terkait Kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Kumuh. 2. Terdapat RTLH berjumlah 5.982 unit. Penanganan s.d 2023: 5.982. Sisa 3.639 unit.	Diperlukan Data RTLH dan SK. Penetapan Dirjen. Perumahan. Diperlukan update surat permohonan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029

NO	UNOR	PROGRAM/KEGIATAN	CAKUPAN KERJA		JUSTIFIKASI/TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	KESIAPAN READINESS CRITERIA	INDIKASI KEBUTUHAN		PERKIRAAN BIAYA (RP RIBU)	SUMBER PENDANAAN	TAHUN RENCANA IMPLEMENTASI	
			KAWASAN PRIORITAS	LOKASI SPESIFIK			VOLUME	SATUAN			MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tulang Bawang Barat	Non Kawasan	Kab. Tulang Bawang Barat	1. Sesuai dengan isu terkait kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Permukiman. 2. Terdapat RTLH sejumlah 3.680 unit. Penanganan s.d 2023 berjumlah 1632. Sisa Penanganan 2.048	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Dirjen. Diperlukan penyesuaian format RC sesuai ketentuan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
16	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat	Non Kawasan	Kab. Pesisir Barat	1. Sesuai dengan isu terkait kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Permukiman. 2. Terdapat RTLH sejumlah 7.020 unit. Penanganan s.d 2023/1.448. Sisa: 5.572	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Dirjen. Diperlukan penyesuaian format RC sesuai ketentuan.	2.000	unit	40.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2029
17	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Metro	Non Kawasan	Kota Metro	1. Sesuai dengan isu terkait kurangnya Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Tersedianya Kawasan Permukiman. 2. Terdapat RTLH sejumlah 264 unit. Penanganan s.d 2023: 256. Sisa 23.	Diperlukan Data RTLH dan SK Penetapan Dirjen. Diperlukan penyesuaian format/usu lan.	200	unit	4.000.000	APBN/APBD/C SR	2025	2025

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW



9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (living document).

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan output (infrastruktur terbangun),

outcome (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), benefit (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), impact (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - a. Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun.
 - b. Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - a. Evaluasi Tahunan (*output* dan *outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
 - b. Evaluasi Lima (5) Tahunan (*benefit*, *impact*, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.



www.pu.go.id